



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA



Peraturan Bupati Purwakarta
Nomor 66 Tahun 2023
tentang

RPD

(Rencana Pembangunan Daerah)

Kabupaten Purwakarta

Tahun

2024-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, TAHUN 2022



bappelitbangda.purwakartakab.go.id/



bappedakabpurwakarta@gmail.com



(0264) 8307463



Jl. Gandanegara No. 25, Kab. Purwakarta



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 66 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana

Pembangunan Daerah (RPD), yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

36. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 – 2026;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
24. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RPD ini untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan

kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD;

(2) Tujuan disusunnya RPD ini untuk :

- a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- b. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Purwakarta;
- d. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta;
- e. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah;
- f. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
- g. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
- h. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RPD meliputi :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.

- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah / Penjabat (Pj.) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Purwakarta;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan RPD;
 - b. Pelaksanaan RPD;
 - c. Hasil RPD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;

- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Maret 2023



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 66

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 66

Tanggal : 30 Maret 2023

Tentang : Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	I-9
1.3.2 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat	I-9
1.3.3 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	I-10
1.3.4 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan RTRW Kabupaten Purwakarta	I-10
1.3.5 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta	I-12
1.4 Maksud dan Tujuan	I-14
1.5 Sistematika Penulisan	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah	II-1
2.1.2 Topografi	II-5
2.1.3 Klimatologi	II-6
2.1.4 Geologi	II-6
2.1.5 Hidrologi	II-7
2.1.6 Penggunaan Lahan	II-8

2.1.7	Demografi	II-9
2.1.8	Potensi Pengembangan Wilayah	II-10
2.1.9	Wilayah Rawan Bencana	II-58
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-66
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-66
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-87
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-90
2.2.4	Fokus Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.....	II-91
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-93
2.3.1	Fokus Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-93
2.3.2	Fokus Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar....	II-121
2.3.3	Fokus Urusan Pilihan.....	II-169
2.3.4	Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung	II-194
2.3.5	Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	II-201
2.3.6	Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan	II-216
2.3.7	Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan	II-219
2.3.8	Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pemerintahan Umum	II-238
2.3.9	Pencapaian Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ..	II-242
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-246
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..	II-248
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-249
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-250
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-250
2.5	Capaian Kinerja RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018 - 2023	II-252
2.6	Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	II-257
2.7	Analisis Daya Tampung dan Daya Dukung KLHS.....	II-260
2.7.1	Daya Dukung Lingkungan	II-261
2.7.2	Daya Tampung Lingkungan	II-262

2.7.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-263
2.8	Kerjasama Daerah	II-272
2.9	Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	II-278
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.1.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-2
3.1.1.2	Pengelolaan Belanja Daerah.	III-7
3.1.1.3	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-13
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-19
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ...	III-28
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-33
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah	III-34
3.3	Kerangka Pendanaan	III-37
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-38
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan ...	III-43
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DAERAH	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-1
4.1.2	Aspek Pelayanan Umum.....	IV-6
4.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	IV-22
4.2	Isu Strategis	IV-24
4.2.1	Isu Strategis Internasional.....	IV-24
4.2.2	Isu Strategis Nasional.....	IV-28
4.2.3	Isu Strategis Regional.....	IV-33
4.2.4	Isu Strategis Lokal.....	IV-50
4.2.5	Penetapan Isu Strategis.....	IV-83
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025	V-1
5.2	Tujuan dan Sasaran	V-2
5.3	Keselarasan RPD dengan Dokumen Perencanaan	V-10

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
	6.1 Strategi	VI-1
	6.2 Arah Kebijakan	VI-12
	6.3 Prioritas Pembangunan	VI-25
	6.4 Program Pembangunan	VI-38
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
	9.1 Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1
	9.2 Pedoman Transisi.....	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta ...	II-4
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	II-10
Tabel 2.3	Daftar Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasarkan Jenisnya Di Kabupaten Purwakarta	II-47
Tabel 2.4	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Purwakarta	II-59
Tabel 2.5	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Purwakarta.....	II-61
Tabel 2.6	Antara Kawasan Rawan Bencana Gempa dengan Peruntukkan Permukiman Perkotaan ...	II-62
Tabel 2.7	Kriteria Dan Lokasi Kawasan Bencana	II-62
Tabel 2.8	Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Bencana	II-64
Tabel 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-67
Tabel 2.10	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022	II-67
Tabel 2.11	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2022	II-71
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Tahun 2019-2022	II-71
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2022 ..	II-72
Tabel 2.14	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2022	II-72
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022	II-73
Tabel 2.16	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022	II-74

Tabel 2.17	Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-75
Tabel 2.18	Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022.....	II-76
Tabel 2.19	Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-77
Tabel 2.20	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022	II-78
Tabel 2.21	Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2022	II-79
Tabel 2.22	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-80
Tabel 2.23	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022	II-81
Tabel 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-83
Tabel 2.25	Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022	II-84
Tabel 2.26	Capaian Indek Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023	II-85
Tabel 2.27	Persandingan Indek Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022	II-85
Tabel 2.28	Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-86
Tabel 2.29	Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-88
Tabel 2.30	Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dalam Rangka Mengembangkan Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-90
Tabel 2.31	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-93

Tabel 2.32	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-96
Tabel 2.33	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-101
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-110
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-112
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-119
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-121
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-123
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-125
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pertanahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-126
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-127
Tabel 2.42	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-131
Tabel 2.43	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-134
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-137
Tabel 2.45	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-142
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-144

Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-147
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-151
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-155
Tabel 2.50	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Statistik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-158
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-159
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-161
Tabel 2.53	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perpustakaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-163
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kearsipan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-165
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-169
Tabel 2.56	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pariwisata di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-174
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-175
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perdagangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-184
Tabel 2.59	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perindustrian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-188
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Transmigrasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-192
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-194
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022	II-199

Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perencanaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	II-202
Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keuangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	II-205
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kepegawaian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	II-210
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	II-214
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	II-215
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pengelolaan Perbatasan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	II-216
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pengawasan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	II-217
Tabel 2.70	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	II-220
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	II-239
Tabel 2.72	Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.....	II-243
Tabel 2.73	Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.....	II-243
Tabel 2.74	Hasil Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.....	II-244
Tabel 2.75	Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.....	II-245
Tabel 2.76	Hasil Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.....	II-245
Tabel 2.77	Hasil Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.....	II-246
Tabel 2.78	Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023.....	II-250

Tabel 2.79	Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-250
Tabel 2.80	Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Iklim Berinvestasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-251
Tabel 2.81	Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-251
Tabel 2.82	Capaian dan Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023	II-254
Tabel 2.83	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Purwakarta	II-263
Tabel 2.84	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	II-263
Tabel 2.85	Kualitas Udara Ambien Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-265
Tabel 2.86	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-271
Tabel 2.87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-272
Tabel 2.88	Laporan Kegiatan Kerjasama Daerah Kabupaten Purwakarta	II-273
Tabel 2.89	Kinerja BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021	II-280
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	III-5
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	III-10
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	III-13
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021	III-16
Tabel 3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021.....	III-22
Tabel 3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021	III-33
Tabel 3.7	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021	III-35
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021.....	III-35

Tabel 3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021.....	III-36
Tabel 3.10	Proyeksi APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026	III-40
Tabel 3.11	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026	III-44
Tabel 3.12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta	III-44
Tabel 3.13	Belanja Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta	III-45
Tabel 3.14	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.....	III-48
Tabel 4.1	Telaahan RPJMD/RPD Daerah Lain	IV-45
Tabel 4.2	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Sosial	IV-60
Tabel 4.3	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Ekonomi	IV-64
Tabel 4.4	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Lingkungan.....	IV-67
Tabel 4.5	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Kelembagaan	IV-74
Tabel 4.6	Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta	IV-79
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026	V-3
Tabel 5.2	Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026	V-8
Tabel 5.3	Keselarasn Indikator Makro RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026	V-11
Tabel 5.4	Keselarasn Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.....	V-12
Tabel 5.5	Keselarasn Sasaran RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024.....	V-14
Tabel 5.6	Keselarasn Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dengan dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.....	V-17

Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Purwakarta	VI-3
Tabel 6.2	Tema Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026	VI-12
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026	VI-19
Tabel 6.4	Keselarasan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026	VI-25
Tabel 6.5	Keterkaitan / Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026	VI-35
Tabel 6.6	Keterkaitan / Keselarasan Prioritas Pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026.....	VI-36
Tabel 6.7	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026	VI-38
Tabel 6.8	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, Program dan Pagu Indikatif Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026	VI-104
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 Kabupaten Purwakarta.....	VII-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta	VII-5
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026	VIII-4
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Makro Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026	VIII-6
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026	VIII-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-13
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta.....	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta ..	II-2
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	II-65
Gambar 4.1	Visi, Misi, Arahana Presiden dan 7 Agenda Pembangunan.....	IV-30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Luas Wilayah Kab. Purwakarta menurut Kecamatan	II-5
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi	II-67
Grafik 2.3	Persandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten wilayah perbatasan.....	II-68
Grafik 2.4	Inflasi Kabupaten Purwakarta	II-76
Grafik 2.5	Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.....	II-77
Grafik 2.6	Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta....	II-78
Grafik 2.7	Jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan kabupaten purwakarta	II-78
Grafik 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta	II-82
Grafik 2.9	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten wilayah perbatasan	II-82
Grafik 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta	II-83
Grafik 2.11	Indeks Gini Kabupaten Purwakarta	II-85
Grafik 2.12	Persandingan Indeks Gini Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten wilayah perbatasan	II-86
Grafik 2.13	Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta	II-87
Grafik 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	III-5
Grafik 3.2	Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	III-6

Grafik 3.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	III-11
Grafik 3.4	Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	III-12
Grafik 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	III-14
Grafik 3.6	Komposisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhannya terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 ..	III-15
Grafik 3.7	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021	III-34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024, sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Purwakarta akan ada masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta berakhir pada tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Purwakarta tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut

akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; (4) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; (5) Isu-isu strategis yang berkembang termasuk penerapan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 didasarkan dengan mempedomani pada visi misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 Tahap Keempat.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan

daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun melalui proses tahapan, analisis, konsultasi publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah, RPD memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis dan politis sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan rencana pembangunan daerah kepada seluruh masyarakat.
2. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2029 selesai disusun.
3. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
4. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah.
5. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi.
6. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian dan evaluasi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 36. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJMN 2020-2024, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

1.3.2 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

1.3.3 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPD.

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berpedoman pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Tahap Keempat RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purwakarta. Penjabaran Renstra PD termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

Selanjutnya, dokumen RPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD setiap tahun.

1.3.4 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan RTRW Kabupaten Purwakarta

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031.

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta mempedomani RTRW Kabupaten Purwakarta melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPD yang disusun diharapkan selaras dan

mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Dalam hal ini, penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 harus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031. Dasar pemikirannya adalah RPJMD/RPD menjadi bagian dari penyelenggaraan RTRW agar kesesuaian pola dan struktur ruang di setiap wilayah dapat diwujudkan melalui penyesuaian antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, dan program-program pembangunan daerah, pada periode berkenaan untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) baik secara vertikal maupun horizontal. SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW, dengan menyelaraskan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dalam kaitannya dengan penyesuaian Dokumen RPD dan RTRW, dokumen SPPR ini menjadi instrumen yang dapat dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi antara program dalam dokumen RPD agar selaras dengan program pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW. Dengan demikian, program-program pembangunan yang bersifat spasial dapat memiliki lokus yang jelas dan berbasis ruang.

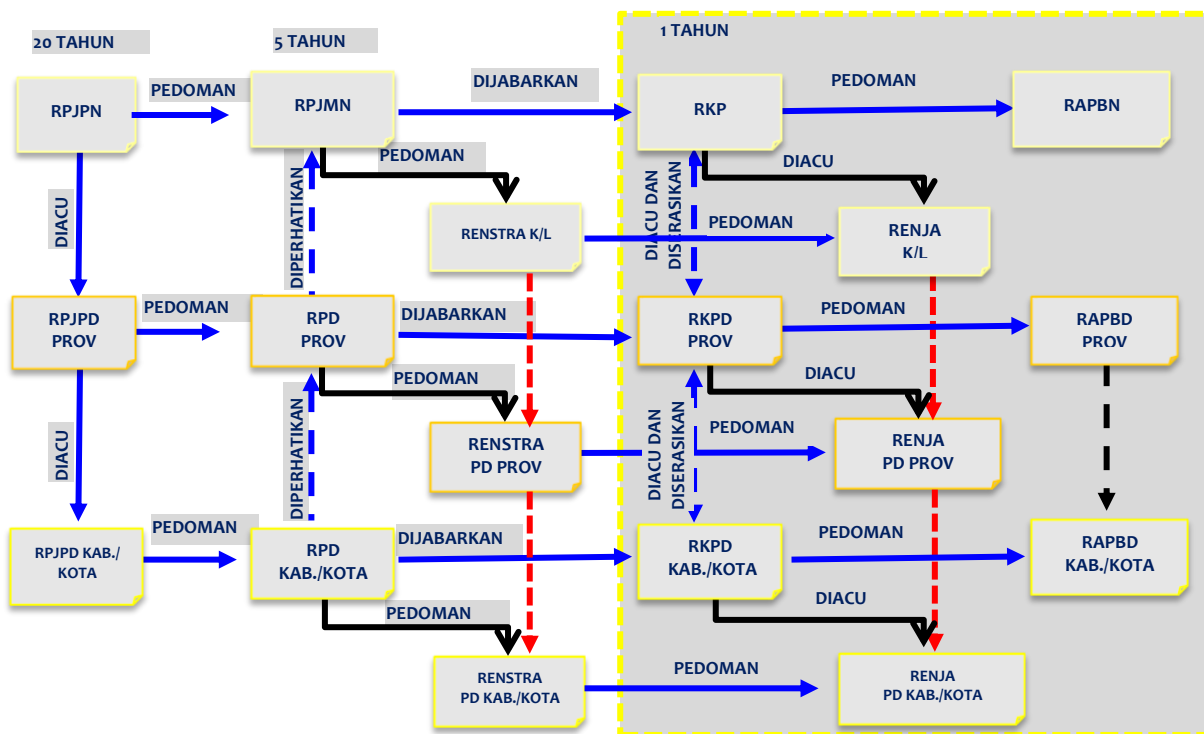
1.3.5 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam Penyusunan RPD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Untuk itu agar terjadi keterkaitan dan keselarasan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, maka perlu dilakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Keselarasan tersebut meliputi visi, misi, tujuan, isu strategis, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pemangku pembangunan yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain keterkaitan dan keselarasan tersebut, RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 juga harus menjadi pedoman dan selaras dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan rencana tahunan RKPD.

Adapun hubungan RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah Lainnya



Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2023

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan rancangan arah pembangunan daerah 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah, dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
2. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Purwakarta;
4. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta;
5. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah;
6. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
7. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
8. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Dokumen RPD.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, Bab ini memuat hasil RPJMD periode lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's).

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan dengan menyelaraskan pada Visi dan Misi RPJPD.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang. Selanjutnya ditetapkan Program Pembangunan Daerah yang akan menunjang

pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahunnya.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPD dan pedoman transisi pada saat RPD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

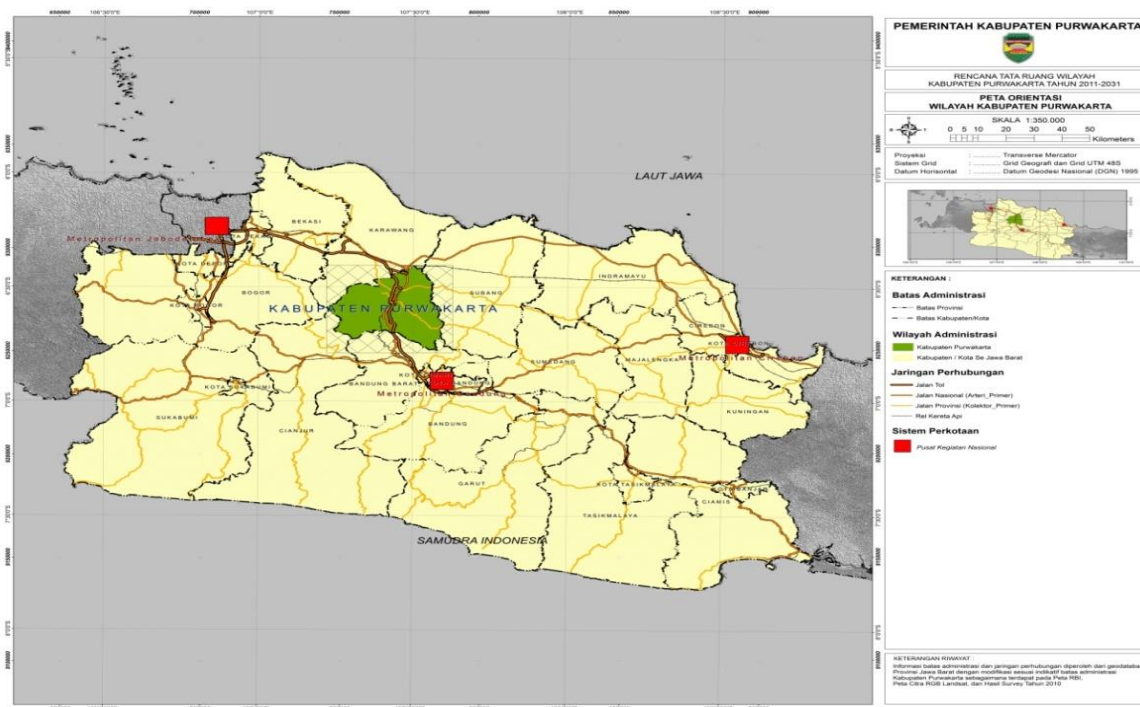
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Purwakarta terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107°30' - 107°40' Bujur Timur dan 6°25' - 6°45' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Purwakarta terletak di persimpangan jalan nasional yang menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dan yang menghubungkan Jakarta dengan Cirebon. Peta orientasi Kabupaten Purwakarta disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappelitbangda Kab. Purwakarta

Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan 5 (lima) kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

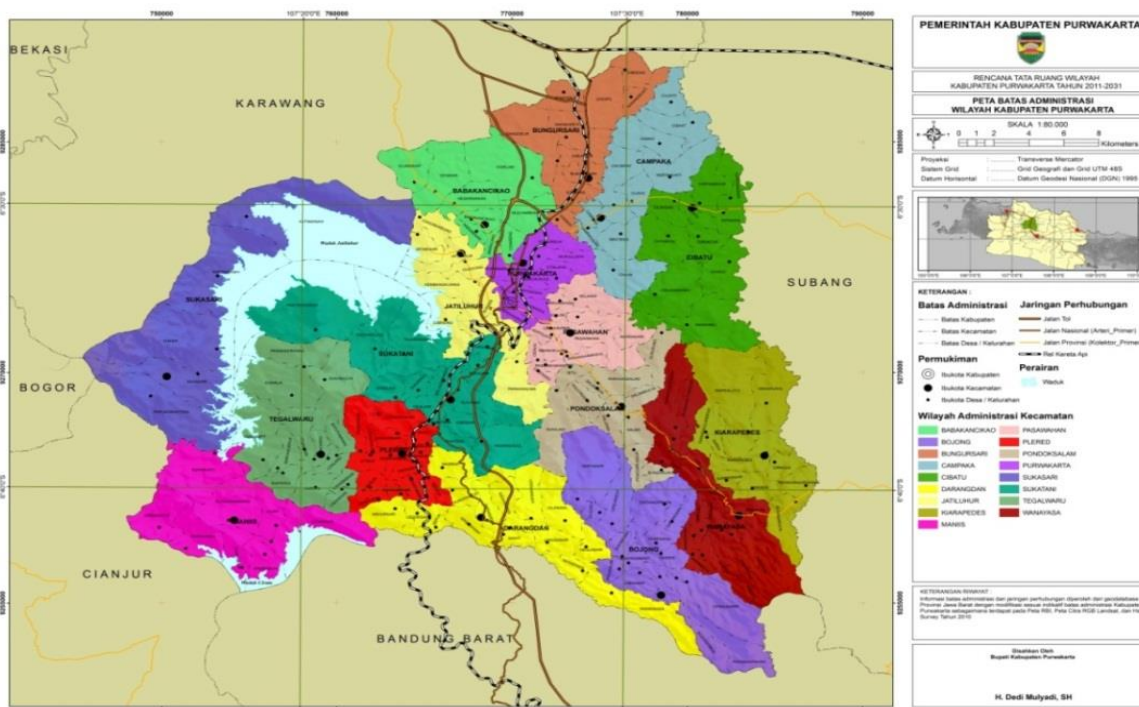
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor;

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta 97.172 hektar (971,72 km²) atau 2,81 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 508 dusun, 1.155 Rukun Warga (RW), dan 3.622 Rukun Tetangga (RT).

Secara Administrasi, luas dan batas wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2

Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappelitbangda Kab. Purwakarta

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Bagian Barat, Bagian

Selatan dan Bagian Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah Bagian Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari dimana sebagian wilayahnya merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda yang mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Wilayah bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 mdpl.

Kabupaten Purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional (Jakarta, Bandung dan Cirebon). Masih banyak wisata lain yang belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Di masa yang akan datang potensi pariwisata di Kabupaten Purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya.

Kabupaten Purwakarta juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang juga sebagai pemasok barang kebutuhan utama di Pasar Induk Bandung dan Jakarta. Kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah dapat ditanami banyak jenis pohon. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat masyarakat pada hamparan wilayah tertentu, misalnya persawahan, perkebunan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan skala ekonomi.

Kedekatan dengan pusat-pusat permintaan (*demand*) seperti Jakarta dan Bandung adalah keunggulan geografis Purwakarta. Sektor finansial yang berkembang pesat di Purwakarta dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas ekonomi, namun masalah penjaminan bagi usaha kecil juga penting menjadi perhatian.

Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. Zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. Momentum potensi investasi ini harus lebih dimanfaatkan

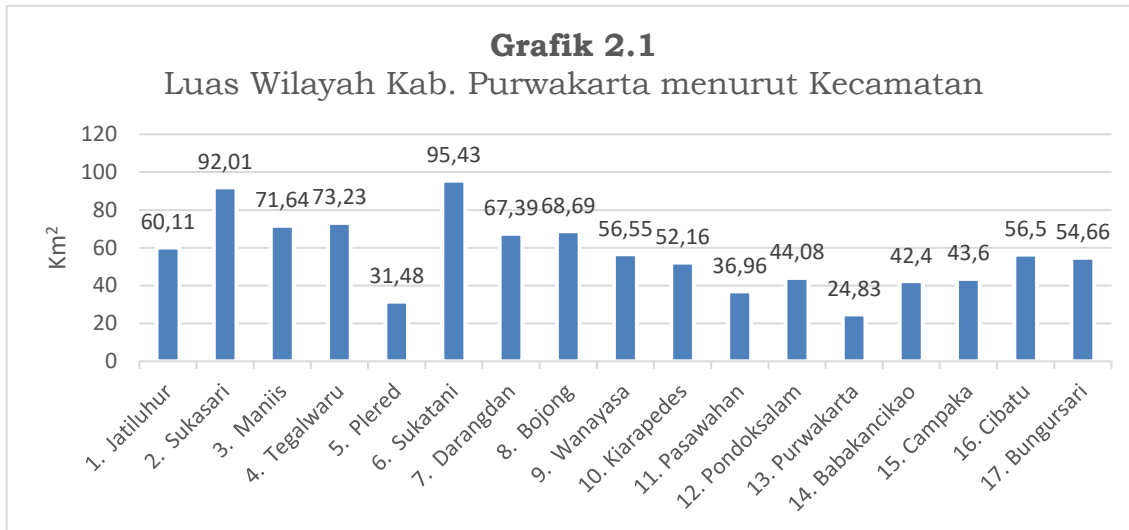
secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi antar sektor pembangunan daerah lainnya. Luas Wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.1

Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA/ KELURAHAN
	Km ²	%	
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatuh	56,50	5,81	10
17. Bungursari	54,66	5,63	10
JUMLAH	971,72	100,00	192

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Sukatani merupakan wilayah terluas dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta yaitu seluas 95,43 km² atau 9,82%, sedangkan Kecamatan Purwakarta merupakan luas wilayah terkecil yaitu seluas 24,83 km² atau 2,56%. Untuk jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Plered sebanyak 16 desa, sedangkan Kecamatan Sukasari merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu 5 desa.

2.1.2 Topografi

Dilihat dari Aspek Topografi, Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) wilayah, berdasarkan relief buminya yaitu:

1. Wilayah Pegunungan. Wilayah ini terletak di tenggara dengan ketinggian 1.100 sd 2.036 m dpl, meliputi 29,73% dari total luas wilayah.
2. Wilayah Perbukitan dan Danau. Wilayah ini terletak di barat laut dengan ketinggian 500 sd 1.000 m dpl, meliputi 33,8% dari total luas wilayah.
3. Wilayah Daratan. Wilayah ini terletak di utara dengan ketinggian 35 sd 499 m dpl, meliputi 36,47% dari total luas wilayah.

Kabupaten Purwakarta yang memiliki struktur wilayah yang unik, wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan disebelah selatan, tenggara dan barat, mendatar/daratan di tengah dan utara. Di Purwakarta

juga terdapat Danau Jatiluhur sebagai salah satu tenaga pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik untuk daerah Jawa Bali.

2.1.3 Klimatologi

Purwakarta beriklim panas yang terbagi atas zona panas dan zona sedang, berkisar antara 22°-32° C pada siang hari 17°-26° C pada malam hari. Secara agroklimat, Purwakarta berada di daerah lembab permanen (1-4 bulan basah/tahun dengan curah hujan 100 mm/bulan). jumlah bulan kering rata-rata 1-3 bulan/tahun. Curah hujan antara 1.413 mm - 4.501 mm/tahun, dengan curah hujan rata-rata 3.039 mm/tahun. curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret dan Desember. Kondisi ini biasa terjadi di Kecamatan Wanayasa (4.501 mm). Hari hujan paling banyak adalah 148 hari. Mengenai resevoir atau resapan air, Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa sumber mata air yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan air. Diantaranya terdapat di Gunung Sanggabuana, Gunung Parang, serta Pasir Katungandak di wilayah Kecamatan Wanayasa dan Pasir Madang di Kecamatan Campaka. Selain itu, zona air tanah dari ukuran sedang sampai dangkal terdapat di wilayah Sungai Cikao di Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Plered dan Kecamatan Campaka. Untuk zona air tanah ukuran dalam, terdapat di wilayah Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Wanayasa. Untuk air genangan antara lain adalah Bendungan Ir. H. Djuanda dan sebagian area Bendungan Cirata.

2.1.4 Geologi

Kondisi geologi daerah Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klastik, berupa batu gamping (kapur), batu lempung, batu pasir dan batuan vulkanik seperti tuf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglomerat dan napal. Untuk jenis batuan beku terobosan meliputi andesit, diorite, vetrofir, basal dan gabro. Batuan ini umumnya bertebaran di bagian barat daya wilayah Kabupaten Purwakarta. Jenis Batuan napal atau batu pasir kuarsam merupakan batuan yang tertua di wilayah Kabupaten Purwakarta yang sebarannya terdapat di tepi Bendungan Jatiluhur (Bendungan Ir. H Djuanda).

Sedangkan batu lempung yang usianya lebih muda (miosen) tersebar di sekitar wilayah barat laut dan bagian timur Kabupaten Purwakarta

berikut endapan bekas gunung api tua yang berasal dari gunung Burangrang dan Gunung Sunda, yaitu berupa tuf, lava andesit basaltitis, breksi vulkanik dan lahar. Pada bagian permukaan batuan itu terdapat endapan hasil erupsi gunung api muda yang meliputi batu pasir, lahar, lapili, breksi lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, lapili dan laca scoria.

Berdasarkan kondisi dan jenis batuan di atas, maka di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat kandungan geologi berupa batu kali batu andesit, batu gamping (kapur), tanah lempung, pasir, pasir kuarsa, pasir batu (sirtu), tras, fosfat, barit dan batu gips. Sebagian besar jenis tanah adalah tanah latosol dan sebagian kecil adalah tanah aluvial, andosol, grumosol, litosol, podsolik dan regosol. Berdasarkan potensi yang dipaparkan di atas telah mendorong munculnya kegiatan pertambangan di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta berada pada cekungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dengan kemiringan 0-40% dan DAS Cilamaya. Hal itu sangat berpengaruh pada hidrologi dan sistem drainase daerah Purwakarta. Pada cekungan itu dibangun Bendungan Ir. H. Djuanda di Jatiluhur (7.757 ha.) dan Cirata (1.182 ha.), yang berfungsi sebagai "flow control", irigasi, pembangkit tenaga listrik, juga sebagai sumber air minum DKI Jakarta. Luas kedua bendungan tersebut setara dengan 9,19% luas wilayah Kabupaten Purwakarta. Pembangunan bendungan tersebut dimungkinkan oleh keberadaan sejumlah sungai.

2.1.5 Hidrologi

Berdasarkan Basis Data Lingkungan Hidup, sungai-sungai di Kabupaten Purwakarta adalah (1) Sungai Cilamaya yang merupakan Induk Sungai (orde 1 di DAS) dengan panjang 62 Km, lebar rata-rata 30 m, dan debit air 366 m³/detik. Sungai Cilamaya ini mempunyai orde 2 di DAS yaitu antara lain: Sungai Ciracas, Sungai Cijambe, Sungai Cisaat, Sungai Cibongas, Sungai Cilandak, dll. (2) Sungai Cikao, yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang sungai 45 km, lebar 40 m. Sungai Cikao terdiri dari beberapa sungai orde 2 DAS, yaitu antara lain: Sungai Cigintung, Sungai Cigadung, Sungai Cikembang, Sungai Cicadas, Sungai Cigajah, Sungai Cisitu, Sungai Cibingbin, Sungai Cigorogoy, Sungai Ciledug, Sungai Citajur, Sungai Cigalugur, Sungai Cinangka, dll. (3) Sungai Cilangkap, yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang 16

km, lebar 4 m. Sungai ini mempunyai orde 2 di DAS yaitu Sungai Cioray dan Sungai Cijalu. (4) Sungai Ciampel yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang 14 km dan lebar sungai 4 m. Sungai Ciampel ini mempunyai orde 2 di DAS, yaitu Sungai Cikapuk, Sungai Sumurbeunying, Sungai Cilabuh, Sungai Ciwaru dan Sungai Cikantong.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Secara umum intensitas pemanfaatan lahan Kabupaten Purwakarta didominasi oleh permukiman dan perumahan, hal ini menunjukkan sebagian besar wilayah ini telah bersifat urban. Penggunaan lahan untuk kegiatan perumahan dan permukiman termasuk penggunaan yang paling dominan dalam pemanfaatan lahan terbangun kegiatannya dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

- Perumahan/permukiman yang tumbuh dan berkembang tidak tertata dalam skala ruang yang relatif kecil atau yang lazim disebut perkampungan. Perumahan penduduk secara individual ini tersebar, dari bentuk, ukuran kavling, sempadan bangunan maupun lokasinya. Penempatan perumahan individual relatif kurang ada kesamaan. sehingga terkesan tidak teratur.
- Perumahan yang tumbuh dan berkembang dibangun secara masal oleh perusahaan atau lembaga pengembang dalam skala ruang yang relatif besar dengan berbagai kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas yang umumnya disebut kompleks perumahan.

Masing-masing kegiatan perumahan mempunyai pola sebaran berbeda. Untuk perkampungan yang berada di sekitar pusat kota pada umumnya menunjukkan pola sebaran menerus rapat, Orientasi akses perumahan penduduk umumnya memanfaatkan jaringan jalan utama kota. Perumahan di kawasan pusat kota relatif banyak terkelompok pada kawasan 'dalam' dengan jaringan jalan penghubung atau jalan lingkungan yang relatif sempit dan berupa gang, serta kepadatannya sudah relatif tinggi.

Kondisi orientasi akses yang tetap memanfaatkan jalan utama kota sebagai akses pergerakan lokal memudahkan timbulnya kemacetan lalu lintas di jalan utama. Sedangkan kompleks perumahan pada umumnya

pola pengembangannya tidak menerus dan menyesuaikan terhadap luas dan bentuk lahan yang berhasil dibebaskan.

Sebaran perumahan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, sebagian besar berada di Kecamatan Purwakarta dan penyebarannya cukup besar seperti di Kelurahan Nagrikaler, Kelurahan Munjuljaya, Kelurahan Ciseureuh, Kelurahan Tegalmunjul dan Desa Citalang. Pembangunan dan pengembangan perumahan di Kecamatan Purwakarta masih terus berlangsung sampai saat ini, baik yang di kerjakan oleh pengembang besar maupun yang berskala kecil.

2.1.7 Demografi

Gambaran Umum Demografis Wilayah Kabupaten Purwakarta tercermin dari jumlah Penduduk Purwakarta. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai sebanyak 852.521 jiwa. Sedangkan Hasil Sensus Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2020 mencapai sebanyak 997.869 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Purwakarta tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,69 persen.

Data jumlah penduduk yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada perbedaan, hal ini dikarenakan tidak samanya indikator yang digunakan, misalnya BPS tidak menghitung penduduk yang tidak berada di Kabupaten Purwakarta minimal selama 6 bulan, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menghitung penduduk tersebut selama masih mempunyai KTP dan terdaftar di Kartu Keluarga. Dalam Dokumen RPD ini kami menggunakan data dari BPS, dengan pertimbangan bahwa jumlah penduduk dari BPS menjadi dasar perhitungan untuk menentukan berbagai indikator makro pembangunan baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional/pusat.

Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			
		2019	2020	2021	2022	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1	Jatiluhur	69,94	73,95	75,1	76,51	2,22	1,73	1,16	1,87
2	Sukasari	15,9	17,26	17,53	17,85	1,35	1,73	2,07	1,87
3	Maniis	33,09	36,05	36,49	37,06	1,31	1,41	1,63	1,55
4	Tegalwaru	50,37	53,18	54,05	55,11	1,4	1,82	2,18	1,96
5	Plered	79,35	83,43	84,57	86,01	2,57	1,56	1,84	1,7
6	Sukatani	72,71	76,91	78,18	79,73	2,3	1,84	2,21	1,98
7	Darangdan	68,39	70,89	71,95	73,26	1,33	1,68	1,99	1,82
8	Bojong	49,25	53	53,78	54,74	1,04	1,65	1,96	1,79
9	Wanayasa	41,65	43,3	43,67	44,19	0,77	1,04	1,14	1,18
10	Kiarapedes	27,6	28,39	28,85	29,41	0,21	1,81	2,17	1,95
11	Pasawahan	47,66	49,46	50,33	51,38	1,07	1,95	2,36	2,09
12	Pondoksalam	30	30,73	31,14	31,66	0,64	1,51	1,77	1,65
13	Purwakarta	174,74	179,23	180,3	181,96	1,33	0,78	0,8	0,92
14	Babakancikao	55,98	59,91	61,16	62,64	1,84	3,76	2,8	2,42
15	Campaka	45,91	50,34	51,27	52,39	1,74	0,57	2,47	2,17
16	Cibatu	31,2	31,27	31,66	32,16	0,63	1,43	1,67	1,58
17	Bungursari	56,36	60,57	61,44	62,52	1,12	1,62	1,92	1,76
JUMLAH		950,1	997,87	1.011,47	1.028,57	1,35	1,54	1,82	1,69

Sumber : BPS, Purwakarta Dalam Angka 2023

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 memuat kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut:

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- (1) Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) dengan strategi meliputi:
 - a. menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);

- b. mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
 - c. mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan industri; dan
 - d. merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.
- (2) Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten dengan strategi meliputi:
- a. menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - b. meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - c. mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten;
 - e. mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran, dan perangkutan produk pertanian.
- (3) Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
 - c. mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten;
 - d. mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan
 - f. membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- (4) Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan PKW, PKL, PKLp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
 - b. mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
- (5) Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global dengan strategi meliputi:
- a. memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
 - b. meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - d. meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan ketertiban penataan penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ; dan
 - f. merehabilitasi kawasan bekas pertambangan.
- (6) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;

- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas :

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah.

Sistem pusat kegiatan terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

(1) Sistem perkotaan terdiri atas:

- a. penetapan sistem pusat kegiatan, terdiri atas :
 - 1. PKW berada di Cikopo-Cikampek Kecamatan Bungursari .
 - 2. PKL meliputi:
 - a. Kecamatan Purwakarta;
 - b. Kecamatan Plered; dan
 - c. Kecamatan Wanayasa.
 - 3. PKLp meliputi:
 - a. Kecamatan Cibatu; dan
 - b. Sawit berada di Kecamatan Darangdan.
 - 4. PPK meliputi:
 - a. Kecamatan Babakancikao;

- b. Kecamatan Campaka;
- c. Kecamatan Jatiluhur;
- d. Kecamatan Sukatani;
- e. Kecamatan Tegalwaru;
- f. Kecamatan Maniis;
- g. Kecamatan Sukasari;
- h. Kecamatan Pasawahan;
- i. Kecamatan Pondoksalam
- j. Kecamatan Bojong;
- k. Kecamatan Kiarapedes; dan
- l. Kecamatan Bungursari.

b. fungsi pelayanan pusat kegiatan.

1. PKW Cikampek-Cikopo dengan fungsi pelayanan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland);
2. PKL Purwakarta, Plered, dan Wanayasa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industri kecil, dan pariwisata;
3. PKLp Cibatu dan Sawit-Darangdan dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan industri perdagangan dan jasa; dan
4. PPK dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

(2) Sistem perdesaan berupa PPL dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala antar desa meliputi:

- a. Desa Cijunti berada di Kecamatan Campaka;
- b. Desa Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
- c. Desa Depok berada di Kecamatan Darangdan;
- d. Desa Cianting dan Tajursindang berada di Kecamatan Sukatani;
- e. Desa Cisarua dan Sukahaji berada di Kecamatan Tegalwaru;
- f. Desa Taringgul Tonggoh berada di Kecamatan Wanayasa;
- g. Desa Pasawahan Anyar berada di Kecamatan Pasawahan;
- h. Desa Margaluyu berada di Kecamatan Kiarapedes; dan
- i. Desa Cikeris berada di Kecamatan Bojong.

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Sistem Prasarana Utama berupa sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - (1) Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terdiri atas :
 1. jaringan jalan terdiri atas:
 - a. jaringan jalan bebas hambatan berupa pemantapan jalan bebas hambatan Cikampek-Padalarang;
 - b. jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer meliputi:
 1. ruas batas Kab. Karawang/Purwakarta-Sadang (Cikampek-Sadang);
 2. ruas Sadang-batas Kota Purwakarta;
 3. ruas Jalan Veteran;
 4. ruas Jalan Jend. Sudirman;
 5. ruas Jalan R.E. Martadinata;
 6. ruas Jalan Basuki Rachmat;
 7. ruas batas Kota Purwakarta-Cisomang (batas Bandung Barat);
 8. ruas Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga;
 9. ruas Jalan Ibrahim;
 10. ruas Jalan Jend. A. Yani; dan
 11. ruas Jalan raya Ciganea.
 - c. jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer 2 (KP-2) meliputi:
 1. ruas Jalan Sadang-Batas Purwakarta/Subang;
 2. ruas Jalan Simpang Purwakarta-Jatiluhur;
 3. ruas Jalan Basuki Rachmat;
 4. ruas Jalan Kapten Halim;
 5. ruas Jalan Purwakarta-Wanayasa;
 6. ruas Jalan Wanayasa;
 7. ruas Jalan Wanayasa-Batas Purwakarta/Subang;

8. ruas Jalan Batas Purwakarta /Karawang (Curug)-Purwakarta; dan
 9. ruas Jalan Pahlawan.
- d. jaringan jalan kabupaten terdiri atas :
1. jalan kolektor sekunder meliputi:
 - a. ruas Jalan Cikopo-Cilandak;
 - b. ruas Jalan Cibatu-Cibukamanah;
 - c. ruas Jalan Cibukamanah-Babakan (Wanayasa);
 - d. ruas Jalan Wanayasa-Sawit;
 - e. ruas Jalan Cianting-Warungjeruk;
 - f. ruas Jalan Cilegong-Sukasari;
 - g. ruas Jalan Sukasari-Cijati;
 - h. ruas Jalan Citeko-Ciramahilir;
 - i. ruas Jalan Cibungur-Cikaobandung; dan
 - j. ruas Jalan Cilalawi-Panyindangan.
 2. jalan lokal
 - 1 Warungjeruk - Parungkalong
 - 2 Ciganea - Sulukuning
 - 3 Nanggaleng - Halte Cisomang
 - 4 Darangdan - Nanggaleng
 - 5 Linggasari - Pasanggrahan
 - 6 Plered - Nanggaleng
 - 7 Purwakarta - Cimaung
 - 8 Tegalmunjul - Warungkadu
 - 9 Cilandak - Cibukamanah
 - 10 Pasarminggu - Benteng
 - 11 Cirende - Batudatar
 - 12 Bojongbarat - Cibingbin
 - 13 Gandasoli - Halteu Cisomang
 - 14 Cibogohilir - Gandasoli
 - 15 Cikubang - Kiarapedes
 - 16 Sukadami - Taringgullandeu
 - 17 Sawahkulon - Cidahu
 - 18 Citalang - Munjul
 - 19 Legokhuhi - Pareang/Kiarapedes

- 20 Cikeris - Pondokbungur/Pondoksalam
- 21 Nangerang - Sindangpanon
- 22 Cipeundeuy - Cileunca - Kertasari
- 23 Garokgek - Ciracas
- 24 Benteng - Cirende
- 25 Citalang - Cilangkap
- 26 Anjun - Liunggunung
- 27 Simpang - Warungkadu
- 28 Cibukamanah - Kadubandeng
- 29 Bojong - Pasanggrahan
- 30 Bojongloa - Rawasari
- 31 Cisair - Sumurugul
- 32 Karang Sari - Mekarsari
- 33 Margasari - Cikolotok
- 34 Wanayasa - Cileungsing
- 35 Sukadami - SLTP 3 Wanayasa
- 36 Cianting - SLTP 2
- 37 Kadumekar - Maracang
- 38 Sulukuning - Cislada
- 39 Hegarmanah - Babakancikao
- 40 Ciasem - Cicadas
- 41 Cijaya - Kampung Duren
- 42 Jatimulya - Pasarminggu
- 43 Cikaliung - Munjul
- 44 Sindangpanon - Ciawi
- 45 Pasanggrahan - Cilanggohar
- 46 Gembong - Lebakanyar
- 47 Pasarkihiang - Cihuni
- 48 Sasakbeusi - Mekargalih
- 49 Pasirangka - Rawabolang
- 50 Pasawahan - Pasawahan Kidul
- 51 Cilalawi - Liunggunung
- 52 Taringgul - Pasirtaringgul
- 53 Cileunca - Sukajadi (Ex TMMD)
- 54 Sumpersari - Kiarapedes
- 55 Pameungpeuk- Cibeber

- 56 Ciomas - Warungkadu
- 57 Margasari - Madrasah
- 58 Conggeang -Narogtog
- 59 Cinangka -Polseksus
- 60 Bojong/ Pangkalan - Nangewer
- 61 Jatijajar - Cibodas
- 62 Cikopak/Sadang -Ciwareng
- 63 Cihideung - Mulyamekar
- 64 Cibodas - Karangmukti
- 65 Salammulya - Galudra
- 66 Dangdeur - Bungursari
- 67 Cikumpay - Cijaya
- 68 Cibatu - Pasirmalang
- 69 Pasanggrahan - Tajur
- 70 Cijanggot - Cisolada
- 71 Pusakamuya - Pasirmuncang
- 72 Margaluyu - Garokgek
- 73 Cilalawi - Cipicung
- 74 Jl. Pesantren Nurul Hidayah-Cikopak
- 75 Rawa Bebek - Pelita / Cilegong
- 76 Sodong - Kuta Batu
- 77 Cibodas - Sukatani
- 78 Ali Ramdan - Kopi
- 79 Cibodas - Bungursari
- 80 Jln. Desa Cijunti-Campaka
- 81 Jln. Stasiun - Bungursari
- 82 Kmp Sawah - Cilangkap
- 83 Cilalawak - Cikao Bandung
- 84 Ciirateun - Bongas
- 85 Jln. Minang Modern - Cikopo
- 86 Cikeris -Pasanggrahan
- 87 Pesantren Cikeris - Pasanggrahan
- 88 Cilalawi -Pasirmunjul
- 89 Sawit Kaler - Cilingga
- 90 Cilingga - Cileunca./ Kerta Sari
- 91 Bojong Barat -Nangewer

- 92 Gandasoli -Cilangkap
- 93 Batu Tumpang - Cisarua
- 94 Sempur - Gunung Hejo
- 95 Sindangsari - Liunggunung
- 96 Citeko -Cibinong
- 97 Simpang -Sukamulya
- 98 Ciakar - Batu Tumpang
- 99 Warung Jeruk - Galumpit
- 100 Sukatani - Gunung Sembung
- 101 Gunungputri - Perkebunan
- 102 Ciramagirang -Ciramahilir
- 103 Sukahaji - Warungjeruk
- 104 Sukatani - Malangnengah
- 105 Kembangkuning - Cibinong
- 106 Nagrak - Palingihan
- 107 Kembangkuning - Cikuya
- 108 Sadang - Cibungur / BIC
- 109 Cibening -Dangdeur
- 110 Cibungur - Dangdeur
- 111 Sirnagalih -Cikurba
- 112 Sukajaya - Cijantung
- 113 Darangdan - Sirnamanah
- 114 Citamiang - Gunung Karung
- 115 Cidahu - Cijati
- 116 Sukamanah -Cimanggu
- 117 Citamiang - Sirnagalih
- 118 Cijantung - Parakan Lima
- 119 Cinangka -Situ Kamojing
- 120 Munjuljaya - Cirende
- 121 Cileutak -Warungkandang
- 122 Pasar Minggu -Cikumpay/Cimahi
- 123 Cibatuh -Cibukamanah
- 124 Ds. Simpang - Pasanggrahan
- 125 Selaawi-Warungkadu - Cirende
- 126 Pasawahan - Margasari /Waung Kadu
- 127 Cidahu - Ciherang

- 128 Parakansalam-Tanjungsari-Pondok Bungur
- 129 Kiara Pedes / Pareang - Kadubandeng
- 130 Kiara Pedes - Mekarjaya / Ciseureuh
- 131 Babakan -Pameungpeuk
- 132 Wanasari - Gandasoli
- 133 Sukadami - Cikadu
- 134 Pusakamuya - Parakan Ceuri
- 135 Ciparungsari - Tanjung Garut
- 136 Bojong Timur - Depok
- 137 Cijolang - Cotak
- 138 Neglasari - Cilingga
- 139 Neglasari - Sukamanah
- 140 Linggasari - Cilingga
- 141 Sukatani - Chek Dam
- 142 Sukatani - Jatijajar
- 143 Sawit - Sadarkarya
- 144 Pasawahan - Salapiyah
- 145 Pasangrahan - Cihanjavar
- 146 Pasir Angin - Pojok
- 147 Nangewer - Cisomang
- 148 Cihuni - Margasari
- 149 Kertajaya - Ciirateun
- 150 Sawahkulon - Situ
- 151 Sukadami - Ciawi
- 152 Cibodas - Sukaati / Jomin
- 153 Cikopo - Cibodas - Karangmukti
- 154 Ciracas - Cilutung
- 155 Campakasari - Benteng
- 156 Benteng - Cirangkong
- 157 Cipinang - Cikadu
- 158 Buana Indah - Cigelam
- 159 Citeko Kaler - Liung Gunung
- 160 Kiarapedes - Ciracas
- 161 Rancadarah - Gurudug
- 162 Sukamulya - Cisarua
- 163 Gandasoli - Kiarapedes

- 164 Sukamaju - Cipicung
- 165 Cibukamanah - Gandawari
- 166 Nagrog - Cisair
- 167 Situ - Cisaray
- 168 Situ - Tanjungsari
- 169 Sempur - Babakan Simpang
- 170 Tajursindang - Panyindangan
- 171 Dangdeur - Cigelam
- 172 Cijunti - Menuju SLTP 4
- 173 Cijunti - Babakan Cirebon
- 174 Citeko - Liunggunung/Gunung Aseupan

Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten meliputi:

- a. pembangunan jalan bebas hambatan Cikopo-Palimanan;
- b. pembukaan gerbang tol Babakancikao, Sawit, dan Sukatani;
- c. pembangunan jalan akses kawasan peruntukan industri Cilangkap Kecamatan Babakancikao ke Simpang Susun Sadang Kecamatan Bungursari;
- d. pembangunan jalan akses kawasan peruntukan industri Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur ke Simpang Susun Ciganea.
- e. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas Lingkar Timur Luar menghubungkan ruas jalan Cikopo-Cilandak, Cibatu-Cibukamanah, Cibukamanah-Babakan (Wanayasa);
- f. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas Lingkar Timur Dalam menghubungkan Cimaung-Cigembong-Parakanlima-Cijantung; dan
- g. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas Lingkar Barat menghubungkan Cibungur-Babakancikao-Cikaobandung-Kutamanah-Kertamanah-Ciririp-Sukasari-Parungbanteng-Sukamukti-Cijati.

2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:
 - a. pengembangan terminal meliputi:
 1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di PKW Cikopo;
 2. pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Purwakarta;
 3. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - a. Terminal Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;
 - b. Terminal Darangdan berada di Kecamatan Darangdan;
 - c. Terminal Citeko berada di Kecamatan Plered; dan
 - d. Terminal Simpang berada di Kecamatan Purwakarta.
 4. pengembangan terminal penumpang tipe C berupa Terminal Ciganea berada di Kecamatan Jatiluhur.
 - b. penempatan alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa jembatan timbang berada di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari.
 - c. pengembangan perlengkapan jalan terutama pada jaringan jalan perkotaan dan jaringan jalan strategis meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. rambu pendahulu penunjuk jurusan;
 3. marka parkir;
 4. marka jalan;
 5. zebra cross (jalur penyeberangan);
 6. cermin tikungan; dan
 7. penerangan jalan umum.

3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang terdiri atas:
 - a. Jaringan trayek antar kota antar provinsi melayani perkotaan Purwakarta dengan kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. Jaringan trayek antar kota dalam provinsi melayani perkotaan Purwakarta ke kota-kota lain di dalam Provinsi Jawa Barat meliputi:
 1. Purwakarta-Bandung;
 2. Purwakarta-Subang;
 3. Purwakarta-Karawang;
 4. Purwakarta-Bekasi;
 5. Purwakarta-Bogor; dan
 6. Purwakarta-Cianjur.

- b. jaringan transportasi perkotaan terdiri atas:
 - (1) Jaringan trayek angkutan kota melayani pergerakan penduduk dalam wilayah kabupaten meliputi:
 1. Sadang-Jl.Veteran-Jl.Sudirman-Jl.RE.Martadinata-Jl.Kapt.Halim-l.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Ipik.Gandamanah-Sadang;
 2. Sadang-Jl.IpikGandamanah-Jl.Jend.Sudirman-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.RE.Martadinata-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Veteran-Sadang;
 3. Ciganea-Jl.Pemuda-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.Kapt.Halim-Jl.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Ibrahim.S-Jl.Jend.A.Yani-Jl.Basuki.Rahmat-Ciganea;
 4. Ciganea-Jl.Pemuda-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.A.Yani-Jl.Ibrahim.S-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Jend.Sudirman-

- Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-
Jl.Kap.Halim-Jl.Basuki.Rahmat-Ciganea;
5. Sadang-Jl.Veteran-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Ibrahim.S-
Jl.A.Yani-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.Pramuka-Ciganea-
Jl.Basuki.Rahmat-Jl.RE.Martadinata-Jl.Sudirman-
Jl.Veteran-Sadang;
 6. Sadang-Jl.Veteran-Jl.Jend.Sudirman-
Jl.RE.Martadinata-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.Pramuka-
Ciganea-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.A.Yani-Jl.Ibrahim.S-
Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Veteran-Sadang;
 7. Cilangkap-Jl.Industri-Jl.Taman.Pahlawan-
Jl.Jend.Sudirman-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-
Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.A.Yani-
Jl.Ibrahim.S-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Industri-Cilangkap;
 8. Cilangkap-Jl.Industri-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Kopi-
Perum.Griyamukti-Jl.Baru-Jl.Kemuning-
Jl.Ipik.Gandamanah-Jl.Kol.Rahmat-Warungkadu-
Pasawahan; dan
 9. Ciganea-Cilegong-Jatiluhur-Service PP.
- (2) Jaringan trayek angkutan perdesaan melayani pergerakan penduduk antara perkotaan Purwakarta dengan ibukota kecamatan di wilayah kabupaten meliputi:
1. Cikopo-Campaka-Cibatu-Kiarapedes-Wanayasa;
 2. Purwakarta-Sukatani-Jatiluhur-Plered-Tegalwaru-
Maniis;
 3. Ciganea-Ubrug;
 4. Ciganea-Sukatani-Plered;
 5. Ciganea-Cilegong-Cikaobandung;
 6. Simpang-Pasawahan-Wanayasa;
 7. Simpang-Taringgullandeh-Ciheulang;
 8. Simpang-Pasawahan-Ciherang;
 9. Sadang-Wanakerta (Perum BIC);
 10. Sadang-Ciparungsari;
 11. Sadang-Cisantri-Tanjunggarut;
 12. Terminal Plered-Simpang-Warungjeruk;
 13. Terminal Plered-Cilangkap-Warungjeruk;

14. Plered-Sawit-Bojong-Wanayasa;
 15. Terminal Plered-Cisomang;
 16. Babakancikao-Cilangkap-Curug;
 17. Simpang-Wanawali;
 18. Plered-Maniis; dan
 19. Terminal Ciganea-Jatiluhur-Sukasari
- (3) Jaringan trayek angkutan perbatasan melayani pergerakan penduduk antara perbatasan Purwakarta dengan perbatasan di wilayah kabupaten lain meliputi:
1. Terminal Wanayasa - Sagalaherang - Jalancagak di Kabupaten Subang;
 2. Simpang - Pasawahan - Wanayasa - Sagalaherang di Kabupaten Subang;
 3. Sadang - Cipeundeuy - Pabuaran di Kabupaten Subang;
 4. Plered - Cipeundeuy di Kabupaten Bandung Barat; dan
 5. Plered - Cikalong Kulon di Kabupaten Cianjur.
- b. sistem jaringan perkeretaapian meliputi:
1. peningkatan jalur Kereta Api lintas Cikampek-Purwakarta-Darangdan;
 2. peningkatan jalur Kereta Api Cisomang-Cikadongdong;
 3. pengembangan terminal peti kemas di Cibungur;
 4. pembangunan *shortcut* (jalan pintas) jalur kereta api lintas Cibungur-Tanjungrasa;
 5. pembangunan jalur ganda parsial lintas Purwakarta-Ciganea;
 6. penyediaan rambu pengaman pada perlintasan sebidang; dan
 7. penataan lingkungan stasiun berupa penataan jalan masuk, parkir stasiun, ruang tunggu penumpang, pergudangan, drainase, gedung, fasilitas jasa dan perdagangan serta pemeliharaan fasilitas pengoperasian kereta api meliputi:
 - a. Stasiun Purwakarta berada di Kecamatan Purwakarta;
 - b. Stasiun Plered berada di Kecamatan Plered;
 - c. Stasiun Cibungur berada di Kecamatan Bungursari;
 - d. Stasiun Sukatani berada di Kecamatan Sukatani;
 - e. Stasiun Cisomang berada di Kecamatan Darangdan;
 - f. Stasiun Sadang berada di Kecamatan Babakancikao; dan

- g. Stasiun Ciganea berada di Kecamatan Jatiluhur.

- c. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) terdiri atas:
 - 1. penetapan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - 2. rehabilitasi dermaga berada di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata; dan
 - 3. peningkatan kualitas dan jumlah sarana angkutan penyeberangan berada di Waduk Jatiluhur.

Sistem Prasarana Lainnya terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi terdiri atas:
 - 1. Jaringan pipa minyak dan gas bumi melewati Kecamatan Cibatu-Campaka-Purwakarta-Babakancikao-Jatiluhur.
 - 2. Pembangkit tenaga listrik dan gardu induk meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Waduk Jatiluhur berada di Kecamatan Jatiluhur dan Waduk Cirata di Kecamatan Maniis;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berada di Kecamatan Bojong, Kiarapedes dan Wanayasa; dan
 - c. Gardu Induk (GI) meliputi:
 - 1. Kecamatan Campaka dengan kapasitas daya 120 (seratus dua puluh) Mega Volt Ampere;
 - 2. Kecamatan Purwakarta dengan kapasitas daya 120 (seratus dua puluh) Mega Volt Ampere;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur (Waduk Jatiluhur) dengan kapasitas daya 145 (seratus empat puluh lima) Mega Volt Ampere; dan
 - 4. Kecamatan Maniis (Waduk Cirata) dengan kapasitas daya 1.150 (seribu seratus lima puluh) Mega Volt Ampere.
- 3. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi :
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) Kilo Volt meliputi:
 - 1. Kecamatan Maniis;
 - 2. Kecamatan Sukasari;
 - 3. Kecamatan Tegalwaru,
 - 4. Kecamatan Campaka;
 - 5. Kecamatan Bungursari; dan

6. Kecamatan Babakancikao.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt meliputi:
 1. Kecamatan Tegalwaru;
 2. Kecamatan Plered;
 3. Kecamatan Sukatani;
 4. Kecamatan Jatiluhur,
 5. Kecamatan Purwakarta; dan
 6. Kecamatan Campaka.
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) Kilo Volt meliputi:
 1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Babakancikao; dan
 3. Kecamatan Jatiluhur.
 - d. peningkatan dan pengembangan jaringan distribusi listrik berupa pemerataan pelayanan listrik di seluruh desa dalam wilayah kabupaten; dan
 - e. pengembangan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah pada kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten.
4. Jaringan prasarana energi lainnya meliputi:
- a. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:
 1. Kecamatan Campaka;
 2. Kecamatan Cibatu;
 3. Kecamatan Bungursari;
 4. Kecamatan Sukatani;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Wanayasa;
 7. Kecamatan Jatiluhur; dan
 8. Kecamatan Purwakarta.
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebar di wilayah kabupaten.

- b. sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan serat optik berada di koridor Cikopo-Sawit dan wilayah perkotaan;
 - 2. pengembangan dan peningkatan Sambungan Telepon Otomat (STO) dan menambah Rumah Kabel (RK) berada di kawasan perkotaan;
 - 3. pengembangan jaringan kabel dan nirkabel (seluler) ke seluruh pelosok desa; dan
 - 4. pengembangan sistem telekomunikasi nirkabel (selular) melalui pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama di seluruh wilayah kabupaten.

- c. sistem jaringan sumber daya air mengacu pada pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis pada wilayah sungai terdiri atas:
 - 1. Pengelolaan sungai, waduk, dan situ meliputi:
 - a. pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS) Citarum sebagai WS lintas provinsi.
 - b. pengelolaan sungai-sungai lintas kabupaten meliputi:
 - 1. Sungai Citarum; dan
 - 2. Sungai Cilamaya;
 - c. pengelolaan sungai-sungai dalam wilayah kabupaten meliputi :
 - 1. Sungai Cikao;
 - 2. Sungai Cilangkap;
 - 3. Sungai Ciampel;
 - 4. Sungai Ciherang;
 - 5. Sungai Cilalawi; dan
 - 6. sungai-sungai yang ada di wilayah kota.
 - d. pemeliharaan waduk meliputi:
 - 1. Waduk Jatiluhur; dan
 - 2. Waduk Cirata.
 - e. pemeliharaan situ meliputi:
 - 1. Situ Cibeber berada di Kecamatan Wanayasa;
 - 2. Situ Cibodas berada di Kecamatan Bungursari;
 - 3. Situ Cigangsa berada di Kecamatan Campaka;
 - 4. Situ Cikamar berada di Kecamatan Campaka;
 - 5. Situ Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;

6. Situ Buleud berada di Kota Purwakarta;
 7. Situ Cisaat berada di Kecamatan Campaka; dan
 8. Situ Cikumpay berada di Kecamatan Campaka.
2. Sistem jaringan irigasi berupa pengelolaan Daerah Irigasi (D.I) terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah meliputi:
 1. D.I. Selatan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 11.052 (sebelas ribu lima puluh dua) hektar; dan
 2. D.I. Tarum Timur 2 dengan luas kurang lebih 118 (seratus delapan belas) hektar.
 - b. Daerah Irigasi kewenangan provinsi meliputi:
 1. D.I. Pundong dengan luas kurang lebih 1.111 (seribu seratus sebelas) hektar;
 2. D.I. Cisomang dengan luas kurang lebih 2.117 (dua ribu seratus tujuh belas) hektar;
 3. D.I. Pondoksalam dengan luas kurang lebih 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) hektar; dan
 4. D.I. Wanayasa dengan luas kurang lebih 1.074 (seribu tujuh puluh empat) hektar.
 - c. Daerah Irigasi kewenangan kabupaten meliputi :
 1. D.I. Nangerang Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 250 Hektar
 2. D.I. Pasir Kadal Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 75 Hektar
 3. D.I. Cibingbin Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 171 Hektar
 4. D.I. Cilembang Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 350 Hektar
 5. D.I. Leuwi Kadu Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 17 Hektar
 6. D.I. Cigansa Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 157 Hektar
 7. D.I. Cilandak Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 100 Hektar
 8. D.I. Cikamar Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 160 Hektar

9. D.I. Cisaat Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 138 Hektar
10. D.I. Cibodas Kecamatan Cibatu dengan luas kurang lebih 76 Hektar
11. D.I. Cikawung Kecamatan Cibatu dengan luas kurang lebih 180 Hektar
12. D.I. Nangewer Kecamatan Darangdan dengan luas kurang lebih 375 Hektar
13. D.I. Citukang Kecamatan Darangdan dengan luas kurang lebih 50 Hektar
14. D.I. Ciwangun Kecamatan Darangdan dengan luas kurang lebih 145 Hektar
15. D.I. Cihamerang Kecamatan Darangdan dengan luas kurang lebih 42 Hektar
16. D.I. Cikao Kecamatan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 192 Hektar
17. D.I. Cilegong Kecamatan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 80 Hektar
18. D.I. Cikembang Kecamatan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 80 Hektar
19. D.I. Garokgek 1 Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 100 Hektar
20. D.I. Garokgek 2 Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 50 Hektar
21. D.I. Garokgek 3 Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 250 Hektar
22. D.I. Cipanas Leuweung Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 150 Hektar
23. D.I. Cipawada Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 300 Hektar
24. D.I. Ciloji Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 160 Hektar
25. D.I. Cibulakan Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 150 Hektar
26. D.I. Cihuni Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 31 Hektar

27. D.I. Ciherang 1 Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 30 Hektar
28. D.I. Ciherang 2 Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 50 Hektar
29. D.I. Ciater 1. Ki Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 33 Hektar
30. D.I. Ciater 2. Ki Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 65 Hektar
31. D.I. Ciater Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 40 Hektar
32. D.I. Cigandasoli Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 70 Hektar
33. D.I. Cicalibur 1 Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 10 Hektar
34. D.I. Cicalibur 2 Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 40 Hektar
35. D.I. Cicalibur 3 Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 50 Hektar
36. D.I. Cisadang Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 25 Hektar
37. D.I. Cibogo Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 50 Hektar
38. D.I. Plered Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 60 Hektar
39. D.I. Cidadapan Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 25 Hektar
40. D.I. Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 205 Hektar
41. D.I. Gengereng Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 68 Hektar
42. D.I. Pundong Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 299 Hektar
43. D.I. Leuwi Urug Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 70 Hektar
44. D.I. Cikajar Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 64 Hektar

45. D.I. Ciseuti Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 85 Hektar
46. D.I. Cisagu 1 Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 56 Hektar
47. D.I. Cisagu 2 Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 30 Hektar
48. D.I. Cisagu 3 Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 50 Hektar
49. D.I. Cisagu 4 Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 160 Hektar
50. D.I. Cilalawi Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 25 Hektar
51. D.I. Cinusa Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 140 Hektar
52. D.I. Cigalumpit Kecamatan Tegalwaru dengan luas kurang lebih 100 Hektar
53. D.I. Jelegong Kecamatan Tegalwaru dengan luas kurang lebih 50 Hektar
54. D.I. Cipedang Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 150 Hektar
55. D.I. Nagrog Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 50 Hektar
56. D.I. Sumurugul Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 50 Hektar
57. D.I. Cijamban Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 250 Hektar
58. D.I. Ciburial Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 118 Hektar
59. D.I. Cimalang Nengah Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 60 Hektar
60. D.I. Citengah 2 Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 30 Hektar
61. D.I. Cipurut Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 40 Hektar
62. D.I. Rancabali Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 50 Hektar

63. D.I. Citengah 1 Kecamatan Wanyasa dengan luas kurang lebih 30 Hektar

3. Prasarana air baku untuk air minum dilakukan dengan cara:
 - a. perlindungan dan rehabilitasi terhadap sumber-sumber air dan daerah resapan air;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya;
 - c. optimalisasi pemanfaatan potensi air baku; dan
 - d. pembangunan waduk-waduk kecil.
4. Pengendalian daya rusak air meliputi:
 - a. normalisasi sungai;
 - b. pengerukan sungai;
 - c. optimalisasi Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata;
 - d. optimalisasi sumur resapan;
 - e. penghijauan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- d. sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri atas:
 - (1) Sistem jaringan penyediaan dan pengelolaan air minum meliputi:
 - a. pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk melayani daerah yang belum terlayani meliputi:
 1. Kecamatan Bungursari;
 2. Kecamatan Cibatu;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Pondoksalam;
 5. Kecamatan Tegalwaru;
 6. Kecamatan Sukasari;
 7. Kecamatan Sukatani;
 8. Kecamatan Bojong; dan
 9. Kecamatan Maniis.
 - b. peningkatan kapasitas produksi air minum dan menurunkan kehilangan air meliputi:
 1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Babakancikao;

3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Wanayasa; dan
 8. Kecamatan Kiarapedes.
- c. perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi meliputi:
1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Babakancikao;
 3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Wanayasa; dan
 8. Kecamatan Kiarapedes.
- d. peningkatan cakupan pelayanan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- e. pengembangan sistem penyediaan air minum dengan pelibatan peran masyarakat;
- f. optimalisasi pelanggan dan jaringan eksisting dengan memanfaatkan sumber air baru;
- g. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali meliputi:
1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Wanayasa;
 3. Kecamatan Darangdan; dan
 4. Kecamatan Plered.
- h. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan;
- i. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum; dan
- j. pembangunan IPA (instalasi pengolahan air) di Kecamatan Plered.
- (2) Pengembangan jaringan drainase meliputi:
- a. pembangunan dan perbaikan sistem saluran drainase di setiap jaringan jalan (arteri primer, kolektor primer, dan lokal primer);

- b. operasional dan pemeliharaan saluran pembuangan permukiman;
 - c. perencanaan drainase terpadu dengan jaringan jalan; dan
 - d. pembangunan saluran drainase skala tersier di PPK;
 - e. pemeliharaan saluran drainase;
 - f. perbaikan dan normalisasi saluran drainase;
 - g. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem drainase; dan
 - h. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelolaan drainase.
- (3) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap wilayah kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga;
 - b. optimalisasi Tempat Pemrosesan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Ciklotok dengan sistem sanitary landfill di Desa Margasari Kecamatan Pasawahan;
 - c. pemantauan dan evaluasi tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan di sumber penghasil sampah;
 - e. pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R, meliputi reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang);
 - f. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem persampahan; dan
 - g. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan.
- (4) Pengelolaan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan permukiman;
 - b. penyediaan sarana pendukung pengelolaan limbah rumah tangga;

- c. penanganan limbah secara on site dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan mandi cuci kakus umum;
 - d. penanganan limbah secara off site dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
 - e. penanganan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
 - f. menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah;
 - g. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah; dan
 - h. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.
- (5) Pengelolaan limbah cair dan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu untuk kegiatan industri besar dan menengah meliputi:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bungursari;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur,
 - 4. Kecamatan Cibatu;
 - 5. Kecamatan Campaka; dan
 - 6. Kecamatan Sukatani.
 - b. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 terpadu di kawasan peruntukan industri.
- (6) Pengembangan evakuasi bencana alam terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana terdiri atas :
 - 1. jalan poros desa; dan
 - 2. jalan kolektor.
 - b. Ruang evakuasi bencana diarahkan berada di:
 - 1. balai desa/kelurahan;
 - 2. lapangan terbuka;
 - 3. bangunan sekolah di setiap desa/kelurahan; dan
 - 4. bangunan fasilitas umum lainnya.

Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (early warning system) yang memadai.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

Arahan pengembangan kawasan lindung meliputi:

- a. menetapkan kawasan lindung Daerah sebesar 49,58 (empat puluh sembilan koma lima delapan) persen dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2031;
- b. mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air; dan
- c. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Kawasan Lindung terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bojong; dan
- b. Kecamatan Wanayasa.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 31.695,4 (tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bojong;
- b. Kecamatan Darangdan;
- c. Kecamatan Kiarapedes;
- d. Kecamatan Wanayasa; dan
- e. Kecamatan Pondoksalam.

Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas:

- a. sempadan sungai berada di sepanjang aliran sungai yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten meliputi:
 1. Sungai Cilamaya;
 2. Sungai Cikao;
 3. Sungai Cilangkap;
 4. Sungai Ciampel;
 5. Sungai Citarum;
 6. Sungai Ciherang; dan
 7. Sungai Cilalawi.
- b. kawasan sekitar situ, danau atau waduk meliputi:
 1. Waduk Cirata meliputi:
 - a. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - b. Kecamatan Maniis.
 2. Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur) meliputi:
 - a. Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Kecamatan Sukasari; dan
 - c. Kecamatan Tegalwaru.
 3. Situ Cibeber berada di Kecamatan Wanayasa;
 4. Situ Cibodas berada di Kecamatan Bungursari;

5. Situ Cigangsa berada di Kecamatan Campaka;
 6. Situ Cikamar berada di Kecamatan Campaka;
 7. Situ Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;
 8. Situ Buleud berada di Kota Purwakarta;
 9. Situ Cisaat berada di Kecamatan Campaka; dan
 10. Situ Cikumpay berada di Kecamatan Campaka.
- c. kawasan sekitar mata air tersebar di wilayah kabupaten.
- d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 2.293 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar atau 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) dari luas kawasan perkotaan yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah kabupaten.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya terdiri atas:

- a. kawasan cagar alam berupa hutan konservasi Cagar Alam Burangrang dengan luas kurang lebih 2.677,3 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Kiarapedes;
 2. Kecamatan Bojong; dan
 3. Kecamatan Wanayasa.
- b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terletak di pusat perkotaan Purwakarta dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar meliputi:
 1. Makam Syech Baing Yusuf; dan
 2. Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II.

Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas:

- a. kawasan rawan banjir dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Jatiluhur; dan
 2. Kecamatan Babakancikao.

- b. kawasan rawan bencana kegagalan waduk berupa air limpasan waduk terdiri atas:
1. Waduk Jatiluhur meliputi:
 - a. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;
 - c. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan
 - d. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.
 2. Waduk Cirata meliputi:
 - a. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;
 - b. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;
 - c. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
 - d. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;
 - e. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;
 - f. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan
 - g. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:

- a. kawasan cagar alam geologi yang berupa kawasan karst dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Sukasari;
 2. Kecamatan Jatiluhur; dan
 3. Kecamatan Maniis.
- b. kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas:
 1. kawasan rawan letusan gunung berapi dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar terletak di bagian selatan kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Wanayasa; dan
 - b. Kecamatan Bojong.
 2. kawasan rawan gerakan tanah dengan luas kurang lebih 14.047,5 (empat belas ribu empat puluh tujuh koma lima) hektar meliputi:
 - a. Desa Cisalada dan Parakanlima berada di Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Desa Margaluyu dan Mekarjaya berada di Kecamatan Kiarapedes;
 - c. Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi berada di Kecamatan Wanayasa;
 - d. Desa Nagrak berada di Kecamatan Darangdan;

- e. Desa Ciramahilir dan Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
- f. Desa Bojong Barat berada di Kecamatan Bojong;
- g. Desa Pasanggrahan berada di Kecamatan Bojong;
- h. Desa Cibukamanah dan Wanawali berada di Kecamatan Cibatu;
- i. Desa Tegalwaru berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
- j. Desa Pasirmunjul dan Cijantung berada di Kecamatan Sukatani.

Kawasan Lindung Lainnya berupa kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah eksitu di Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar berada di Kecamatan Sukasari.

Kawasan Budidaya terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.237 (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Campaka;
 - 2. Kecamatan Cibatu;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur;
 - 4. Kecamatan Kiarapedes;
 - 5. Kecamatan Maniis;
 - 6. Kecamatan Plered;
 - 7. Kecamatan Pondoksalam;
 - 8. Kecamatan Sukasari;
 - 9. Kecamatan Sukatani; dan
 - 10. Kecamatan Tegalwaru.

- b. kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 14.270 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Campaka;
 3. Kecamatan Cibatu;
 4. Kecamatan Cibungur;
 5. Kecamatan Darangdan;
 6. Kecamatan Jatiluhur;
 7. Kecamatan Kiarapedes;
 8. Kecamatan Maniis;
 9. Kecamatan Plered;
 10. Kecamatan Pondoksalam;
 11. Kecamatan Purwakarta;
 11. Kecamatan Bungursari
 12. Kecamatan Sukasari;
 13. Kecamatan Sukatani; dan
 14. Kecamatan Wanayasa.

Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas:

- a. kawasan budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 10.071 (sepuluh ribu tujuh puluh satu) hektar meliputi:
1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Campaka;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Wanayasa; dan
 8. Kecamatan Pondoksalam.

kawasan budidaya tanaman pangan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.972 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:

1. Kecamatan Purwakarta;
2. Kecamatan Pasawahan;
3. Kecamatan Campaka;

4. Kecamatan Plered;
 5. Kecamatan Darangdan; dan
 6. Kecamatan Pondoksalam.
- b. kawasan budidaya hortikultura dengan luas kurang lebih 6.287 (enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Wanayasa;
 2. Kecamatan Plered;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Sukatani;
 5. Kecamatan Pasawahan;
 6. Kecamatan Pondoksalam;
 7. Kecamatan Bojong;
 8. Kecamatan Maniis;
 9. Kecamatan Kiarapedes;
 10. Kecamatan Bungursari;
 11. Kecamatan Darangdan; dan
 12. Kecamatan Tegalwaru.
- c. kawasan budidaya perkebunan dengan luas kurang lebih 13.388 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Kiarapedes;
 2. Kecamatan Sukatani;
 3. Kecamatan Plered;
 4. Kecamatan Maniis;
 5. Kecamatan Darangdan;
 6. Kecamatan Campaka;
 7. Kecamatan Cibatu;
 8. Kecamatan Bungursari;
 9. Kecamatan Wanayasa; dan
 10. Kecamatan Bojong.
- d. kawasan budidaya peternakan dengan luas kurang lebih 625 (enam ratus dua puluh lima) hektar terdiri atas:
1. ternak ruminansia besar skala perusahaan dengan jenis hewan sapi potong, sapi perah, dan kerbau meliputi:

- a. Kecamatan Tegalwaru;
 - b. Kecamatan Maniis;
 - c. Kecamatan Sukatani;
 - d. Kecamatan Sukasari;
 - e. Kecamatan Kiarapedes;
 - f. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - g. Kecamatan Pasawahan
2. ternak ruminansia kecil skala perusahaan dengan jenis hewan kambing dan domba meliputi:
 - a. Kecamatan Darangdan;
 - b. Kecamatan Bojong;
 - c. Kecamatan Wanayasa;
 - d. Kecamatan Pondok Salam;
 - e. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - f. Kecamatan Pasawahan
3. pembibitan ternak unggas meliputi:
 - a. Kecamatan Sukatani;
 - b. Kecamatan Darangdan;
 - c. Kecamatan Bojong;
 - d. Kecamatan Wanayasa; dan
 - e. Kecamatan Kiarapedes.
4. ternak unggas komersial meliputi:
 - a. Kecamatan Pondoksalam;
 - b. Kecamatan Pasawahan;
 - c. Kecamatan Tegalwaru;
 - d. Kecamatan Maniis;
 - e. Kecamatan Sukasari;
 - f. Kecamatan Sukatani; dan
 - g. Kecamatan Jatiluhur.

Kawasan Peruntukan Perikanan terdiri atas:

- a. kawasan perikanan tangkap diarahkan pada badan air terdiri atas:
 1. waduk meliputi:
 - a. Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Kecamatan Tegalwaru;
 - c. Kecamatan Sukasari; dan

- d. Kecamatan Maniis.
 2. situ meliputi:
 - a. Kecamatan Bungursari;
 - b. Kecamatan Campaka;
 - c. Kecamatan Wanayasa; dan
 - d. Kecamatan Purwakarta.
 3. sungai tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- b. kawasan budidaya perikanan dengan luas kurang lebih 8.192 (delapan ribu seratus sembilan puluh dua) hektar meliputi:
1. Kecamatan Jatiluhur;
 2. Kecamatan Sukatani;
 3. Kecamatan Darangdan;
 4. Kecamatan Pondoksalam;
 5. Kecamatan Pasawahan;
 6. Kecamatan Bojong;
 7. Kecamatan Maniis;
 8. Kecamatan Plered; dan
 9. Kecamatan Wanayasa.

Kawasan Peruntukan Pertambangan terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Sukatani.
- b. kawasan pertambangan mineral non logam meliputi :
 1. Kecamatan Plered;
 2. Kecamatan Sukatani; dan
 3. Kecamatan Tegalwaru.
- c. kawasan pertambangan batuan meliputi:
 1. Kecamatan Plered;
 2. Kecamatan Sukatani;
 3. Kecamatan Tegalwaru;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Campaka;
 6. Kecamatan Cibatu;
 7. Kecamatan Kiarapedes;
 8. Kecamatan Babakancikao; dan
 9. Kecamatan Bungursari.

- d. kawasan pertambangan migas meliputi:
 - 1. Kecamatan Kiarapedes; dan
 - 2. Kecamatan Cibatu.
- e. kawasan pertambangan panas bumi meliputi:
 - 1. Kecamatan Kiarapedes;
 - 2. Kecamatan Wanayasa; dan
 - 3. Kecamatan Bojong.

Kawasan Peruntukan Industri meliputi :

- a. kawasan peruntukan industri besar dan menengah dengan luas kurang lebih 7.848 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bungursari;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur,
 - 4. Kecamatan Cibatu;
 - 5. Kecamatan Campaka;
 - 6. Kecamatan Sukatani;
 - 7. Kecamatan Plered;
 - 8. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - 9. Kecamatan Maniis.
- b. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan;

Kawasan Peruntukan Pariwisata dengan luas kurang lebih 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) hektar terdiri atas:

- a. pariwisata alam;
- b. pariwisata budaya; dan
- c. pariwisata buatan.

Tabel 2.3

Daftar Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasarkan Jenisnya Di
Kabupaten Purwakarta

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
1	Purwakarta	Situ Buleud	pariwisata alam	Situ/ Alam, Taman kota, arena jogging
		Pabrik kain songket	pariwisata buatan	Kerajinan/ cinderamata
		Gedung Negara	pariwisata budaya	Bangunan sejarah
		Gedung Karesidenan	pariwisata budaya	Bangunan sejarah
		Makam Baing Yusuf	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Mesjid Agung	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Rumah Kuno Citalang	pariwisata budaya	Bangunan kuno
		Sanggar Seni	pariwisata budaya	Kesenian Daerah; Atraksi wisata
2	Jatiluhur	Pariwisata Jatiluhur	pariwisata alam	Danau/PLTA
		Bumi Satelit Indosat	pariwisata buatan	Teknologi; Satelit komunikasi
		Agro Wisata Ubrug	pariwisata alam	Perikanan
		Makam Wali Kuning	pariwisata budaya	Ziarah religius
3	Sukasari	Makam Mbah Panyingkiran	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Mbah Guha Pangatikan	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Mbah Kota Kembang	pariwisata budaya	Ziarah religius
4	Campaka	Situ Cikumpay	pariwisata alam	Situ/Perkebunan
		Makam Panembahan Gunung Jatiwangi	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Cakrabuana	pariwisata budaya	Ziarah religius
5	Cibatu	Makam Mbah Cakrayuda	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Mbah Parung	pariwisata budaya	Ziarah religius
6	Bungursari	Situ Kamojing	pariwisata alam	Situ
		Bukit Indah Purwakarta	pariwisata buatan	Kota Industri
7	Babakan Cikao	Makam Ibu Cikao	pariwisata budaya	Ziarah religius
8	Plered	Sentra Keramik Plered	pariwisata buatan	Kerajinan cinderamata
		Makam Mbah Sumadhita Anggatuda	pariwisata budaya	Ziarah religius

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
		Makam Balung Tunggal	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Dalem Kuwa	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Mama Sempur	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Curug Gandasoli	pariwisata alam	Air terjun
9	Tegalwaru	Panorama Galumpit	pariwisata alam	Panorama alam; rekreasi air
		Gunung Parang	pariwisata alam	Gunung/Alam ; Panjat Tebing
10	Sukatani	Gunung Cupu	pariwisata alam	Gunung/Alam; Mendaki
		Pusat Penjualan Makanan Khas	pariwisata buatan	Cinderamata/kerajinan
11	Maniis	PLTA Cirata	pariwisata buatan	PLTA; Turbin/teknologi
		Agro Wisata Maniis	pariwisata alam	Agro wisata/Alam; Jaring terbung
12	Darangdan	Makam Cotak	pariwisata budaya	Ziarah religius
13	Wanayasa	Situ Wanayasa	pariwisata alam	Situ/panorama alam
		Curug Cipurut	pariwisata alam	Air Terjun/panorama
		Agro Wisata Manggis	pariwisata alam	Agro Wisata; Perkebunan Manggis
		Makam Dalem Santri	pariwisata budaya	Ziarah religius
14	Kiarapedes	Makam Serpong	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Makam Eyang Parta Kusuma	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Agro Wisata Golden Melon	pariwisata alam	Agro wisata; Perkebunan Manggis
		Air Panas Ciracas	pariwisata alam	Sumber Air Panas/ Panorama
		Guha Garacina	pariwisata alam	Guha/sejarah
15	Bojong	Agro Wisata Perkebunan Teh	pariwisata alam	Perkebunan Teh; Agro Wisata/Alam
		Kampung Cikeris	pariwisata budaya	Desa wisata
16	Pondoksalam	Makam Mbah Garda	pariwisata budaya	Ziarah religius
		Ranca Darah	pariwisata alam	Perkemahan

Sumber : Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031

Kawasan Peruntukan Permukiman dengan luas kurang lebih 13.751 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar terdiri atas:

- a. kawasan permukiman perkotaan tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 8.845 (delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) hektar.

- b. kawasan permukiman perdesaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 4.906 (empat ribu sembilan ratus enam) hektar.

Kawasan Peruntukan Lainnya berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. kawasan latihan militer angkatan darat dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar berada di Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari;
- b. kawasan markas militer angkatan darat meliputi:
 1. Resimen Artileri Medan 2/Divisi Infanteri 1/Kostrad di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari; dan
 2. Batalyon Artileri Medan 9 Pasopati di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta;
- c. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) 0619 di Jl.Kol.Kornel Singawinata Kecamatan Purwakarta;
- d. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di setiap ibukota kecamatan;
- e. kantor Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta di Jl. Veteran Kecamatan Purwakarta; dan
- f. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di setiap ibukota kecamatan.

Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten berupa Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi berupa KSP Koridor Purwakarta-Padalarang.

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta sumber daya alam.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
1. KSK Perkotaan Cibatu;
 2. KSK Perkotaan Sawit-Darangdan;
 3. KSK Agropolitan Tenggara Purwakarta di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes;
 4. KSK Wisata Gunung Parang di Kecamatan Tegalwaru;
 5. KSK Ternak Besar Barat Daya Purwakarta;
 6. KSK Sadang;
 7. KSK Minapolitan di Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondoksalam, dan Kecamatan Darangdan; dan
 8. KSK Perkotaan Hijau Koridor Darangdan, Bojong dan Wanayasa.
- b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
1. KSK Jatiluhur; dan
 2. KSK Cirata.
- c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
1. KSK Kerajinan dan bahan bangunan keramik di Kecamatan Plered; dan
 2. KSK Situ Buleud.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
2. Tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
3. Terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
4. Terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
5. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.

Strategi Penataan Ruang meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
 - a) menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
 - b) meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
 - c) meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal

untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.

2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
 - a) meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
 - b) mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
 - c) meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
 - d) meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 - e) menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - f) pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi, meliputi:
 - a) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya- Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;

- b) mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
- c) mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
- d) mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
- e) mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
- f) mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
- g) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
- h) mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
- i) mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
- j) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
- k) meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk

serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.

4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:
 - a) meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
 - b) membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - c) meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
 - d) mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
 - e) mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f) meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
 - g) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
 - h) mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
 - i) meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - j) meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
 - k) mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - l) mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
 - a) mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
 - b) mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
 - c) melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
 - d) merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
 - e) memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
 - f) meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
 - g) pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.

6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
 - a) merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - b) mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - c) pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;

- d) mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
 - e) mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a) meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - b) menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
 - c) mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
 - d) mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek- Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
 - b) mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan

sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan

- c) strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, memuat arahan kebijakan penataan ruang yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Jaringan Jalan Bebas Hambatan antara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan kota-kota di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan di:
 1. Jakarta-Cikampek;
 2. Jakarta-Cikampek II elevated;
 3. Tangerang-Merak;
 4. Jatiasih-Setu-Purwakarta (koridor Jatiasih-Cipularang-Sadang); dan
 5. Ciawi-Sukabumi;
- ❖ Sumber air berupa air permukaan pada situ, danau, embung atau waduk berada di dalam dan di luar Kawasan Jabodetabek-Punjur yang terdiri atas:

Waduk Jatiluhur di Kecamatan Kutamanah dan Kecamatan Sukasari pada Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang berada di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
- ❖ Unit produksi air minum yang melayani Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan di dalam maupun di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi:
 1. SPAM Regional Cisadane pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
 2. SPAM Regional Ciawi pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
 3. SPAM Regional Jatiluhur 1 dan 2 di Kecamatan Jatiluhur pada Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat; dan
 4. SPAM Regional Karian pada Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

2.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana (KRB) pada daerah Purwakarta berdasarkan data yang didapatkan dari RTRW Kabupaten Purwakarta dan Badan Geologi Kementerian ESDM yaitu kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana kegagalan waduk, kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, dan kawasan rawan bencana gerakan tanah.

Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas:

- a. kawasan rawan banjir dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Jatiluhur; dan
 2. Kecamatan Babakancikao.

- b. kawasan rawan bencana kegagalan waduk berupa air limpasan waduk terdiri atas:
 1. Waduk Jatiluhur meliputi:
 - a. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;
 - c. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan
 - d. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.
 2. Waduk Cirata meliputi:
 - a. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;
 - b. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;
 - c. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
 - d. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;
 - e. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;
 - f. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan
 - g. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.

Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung api adalah Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi. Kriteria lokasi Kawasan rawan letusan gunung api adalah kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau Kawasan berupa lembah yang dapat

menjadi daerah terlanda awan panas, aliran lahar, lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun.

Lokasi Kawasan rawan letusan gunung api terletak di Kecamatan Wanayasa dan Bojong dengan luas kurang lebih 1 Ha. Rencana penanganan kawasan rawan letusan gunung api dilakukan melalui pengembangan *escape road* mitigasi bencana, serta penyusunan Rencana Rencana Rinci dan *zoning regulation* kawasan mitigasi bencana, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, serta Program penanganan mitigasi bencana.

Kabupaten Purwakarta merupakan daerah yang cukup memiliki potensi bencana gempa yang cukup besar. Hal ini dikarenakan terdapatnya sesar aktif pada bagian selatan terdapat Sesar Cimandiri dan Lembang di bagian utara yaitu Sesar Baribis. Hal ini membuat hampir 78% berada pada Kawasan Rawan Bencana Menengah dengan intensitas VII-VIII MMI. Sisanya adalah KRB Tinggi pada Kecamatan Maniis, Sukasari, Darangdan, Babakancikao, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes.

Tabel 2.4

Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Purwakarta

Kelas	Keterangan	Luas (Ha)	Kecamatan	Persentase (%)
Kawasan Rawan Bencana Menengah	Kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa bumi dengan intensitas VII-VIII MMI (<i>Modified Mercalli Intensity</i>).	71.617,23	Seluruh Kecamatan	77,96
Kawasan Rawan Bencana Tinggi	Kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa bumi kuat dengan skala intensitas lebih dari VIII MMI (<i>Modified Mercalli Intensity</i>).	20.249,63	Maniis, Sukasari, Darangdan, Babakancikao, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes	22,04

Sumber: Badan Geologi

Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Kriteria lokasi Kawasan rawan gerakan tanah Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Lokasi Kawasan rawan gerakan tanah dengan luas 14.047 Ha meliputi:

1. Desa Cisalada dan Parakanlima berada di Kecamatan Jatiluhur;
2. Desa Margaluyu dan Mekarjaya berada di Kecamatan Kiarapedes;
3. Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi berada di Kecamatan Wanayasa;
4. Desa Nagrak berada di Kecamatan Darangdan;
5. Desa Ciramahilir dan Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
6. Desa Bojong Barat berada di Kecamatan Bojong;
7. Desa Pasanggrahan berada di Kecamatan Bojong;
8. Desa Cibukamanah dan Wanawali berada di Kecamatan Cibatu;
9. Desa Tegalwaru berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
10. Desa Pasirmunjul dan Cijantung berada di Kecamatan Sukatani.

Untuk mewujudkan penataan Kawasan rawan gerakan tanah membutuhkan upaya pengembangan *escape road* (jalur penyelamatan), Penyusunan Rencana Rinci dan *Zoning Regulation* Kawasan rawan gerakan tanah, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan program penanganan mitigasi bencana.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah pada Kabupaten Purwakarta didominasi lebih dari setengah wilayahnya adalah KRB menengah yang hampir tersebar diseluruh kecamatan. Kawasan dengan potensi gerakan tanah tinggi hanya kurang dari 10% dan beberapa berada pada bagian Selatan hingga bagian tengah, Tenggara dan Barat. Sedangkan Kawasan dengan kerentanan rendah sampai sangat rendah memiliki persentase masing-masing 27,45% dan 12,66%. Kawasan ini cukup banyak tersebar di bagian utara Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.5

Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Purwakarta

Kelas	Keterangan	Luas (Ha)	Kecamatan	Persentase (%)
Sangat Rendah	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai.	11.670,28	Babakancikao, Bungursari, Campaka, Cibatu, Purwakarta, Tegalwaru, Maniis	12,66
Rendah	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada Zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali.	25.310,29	Seluruh Kecamatan di Purwakarta, hanya sedikit pada Kecamatan Pondoksalam	27,45
Menengah	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan.	47.677,32	Seluruh Kecamatan di Purwakarta, hanya sedikit pada Kecamatan Campaka dan Bungursari	51,70
Tinggi	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat	7.559,46	Sukasari, Tegal waru, Sukatani, Maniis, Plered Darangdan, Pasawahan, Pondoksalam, Bojong, Wanayasa	8,20

Sumber: Badan Geologi

Tabel 2.6

Antara Kawasan Rawan Bencana Gempa dengan Peruntukkan Permukiman Perkotaan

Kecamatan	Kelas	Luas (Ha)
Babakancikao	Kawasan Rawan Bencana Menengah	1218,998400
Bojong	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	238,488460
Bungursari	Kawasan Rawan Bencana Menengah	1391,025600
Campaka	Kawasan Rawan Bencana Menengah	292,289090
Cibatu	Kawasan Rawan Bencana Menengah	117,518920
Darangdan	Kawasan Rawan Bencana Menengah	25,276698
Darangdan	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	522,027860
Jatiluhur	Kawasan Rawan Bencana Menengah	959,190100
Kiarapedes	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	40,836198
Maniis	Kawasan Rawan Bencana Menengah	112,294550
Maniis	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	5,335957
Pasawahan	Kawasan Rawan Bencana Menengah	542,988790
Plered	Kawasan Rawan Bencana Menengah	302,468970
Pondoksalam	Kawasan Rawan Bencana Menengah	109,986170
Purwakarta	Kawasan Rawan Bencana Menengah	1583,489300
Sukasari	Kawasan Rawan Bencana Menengah	12,141346
Sukatani	Kawasan Rawan Bencana Menengah	395,611030
Tegalwaru	Kawasan Rawan Bencana Menengah	148,682990
Wanayasa	Kawasan Rawan Bencana Menengah	36,621561
Wanayasa	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	198,792000

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana diatas, maka dapat dilihat kriteria dan lokasi setiap komponen serta arahan kebijakan pengelolaan kawasan pada Tabel dibawah

Tabel 2.7

Kriteria Dan Lokasi Kawasan Bencana

Fungsi	Kriteria	Lokasi
Kawasan rawan banjir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah dataran banjir ▪ Daerah sempadan sungai ▪ Daerah cekungan 	Kawasan rawan banjir seluas 155 hektar di: a. Kecamatan Jatiluhur; b. Kecamatan Babakancikao.
Kawasan rawan bencana kegagalan waduk	Kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal-hal diluar perkiraan teknis pada Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata	Kegagalan Waduk Jatiluhur: 1. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur; 2. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;

Fungsi	Kriteria	Lokasi
		3. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan 4. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao. Kegagalan Waduk Cirata: 1. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru; 2. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru; 3. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru; 4. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru; 5. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru; 6. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan 7. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.
Kawasan rawan letusan gunung api	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; ▪ Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau ▪ Kawasan berupa lembah yang dapat menjadi daerah terlenda awan panas, aliran lahar, lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. 	Kecamatan Wanayasa, Bojong Dengan luas 1 Ha
Kawasan rawan gerakan tanah	Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.	Dengan luas 14.047 Ha terletak di a. Desa Cisalada dan Parakanlima di Kecamatan Jatiluhur; b. Desa Margaluyu dan Mekarjaya di Kecamatan Kiarapedes; c. Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi di Kecamatan Wanayasa; d. Desa Nagrak di Kecamatan Darangdan; e. Desa Ciramahilir dan Citamiang di Kecamatan Maniis; f. Desa Bojong Barat di Kecamatan Bojong; g. Desa Pasanggrahan di Kecamatan Bojong;

Fungsi	Kriteria	Lokasi
		h. Desa Cibukamanah dan Wanawali di Kecamatan Cibatuh; i. Desa Tegalwaru di Kecamatan Tegalwaru; dan j. Desa Pasirmunjul dan Cijantung di Kecamatan Sukatani.

Sumber : Keppres No. 32/1990, SK Menhut No. 419/Kpts II/1999, Perda No. 2/1996, PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Hasil Rencana, 2010

Tabel 2.8

Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Bencana

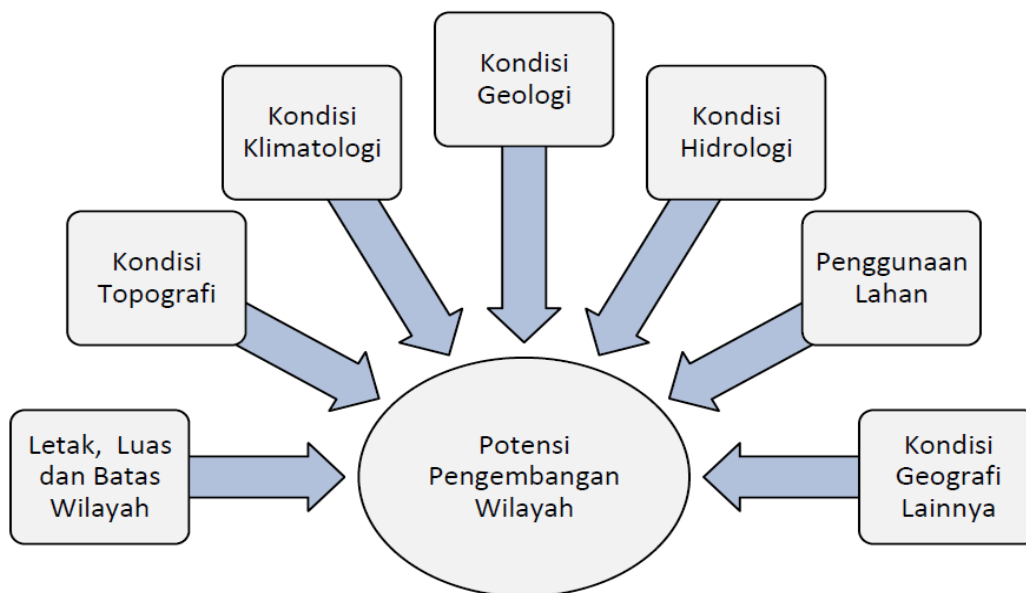
Fungsi	Arahan Kebijakan
Kawasan rawan letusan gunung api	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan Mitigasi Bencana • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang • Program penanganan mitigasi bencana
Kawasan rawan gerakan tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan rawan gerakan tanah • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang • Program penanganan mitigasi bencana

Sumber : Keppres No. 32/1990, SK Menhut No. 419/Kpts II/1999, Perda No. 2/1996, PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Hasil Rencana, 2010

Secara umum, gambaran kerangka pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Kabupaten Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta mengalami perlambatan di banding tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 melanda yang membuat perekonomian dunia, nasional dan daerah baik provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Purwakarta mengakibatkan laju perekonomian tersebut meranggak turun sangat signifikan pada angka -2,13 persen. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta beranjak mulai naik kembali ke angka 3,42 persen dan 5,24 persen.

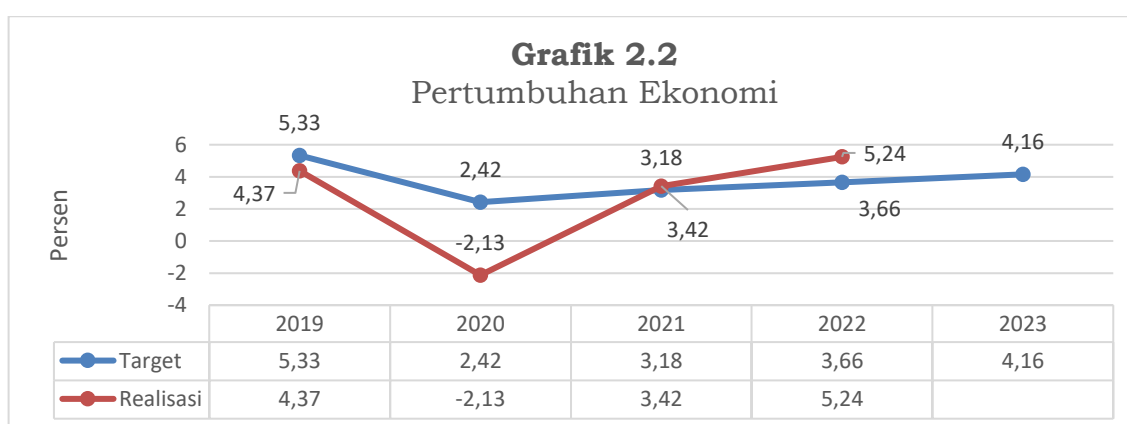
Adapun data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 2.9

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,33	4,37	2,42	-2,13	3,18	3,42	3,66	5,24	4,16

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

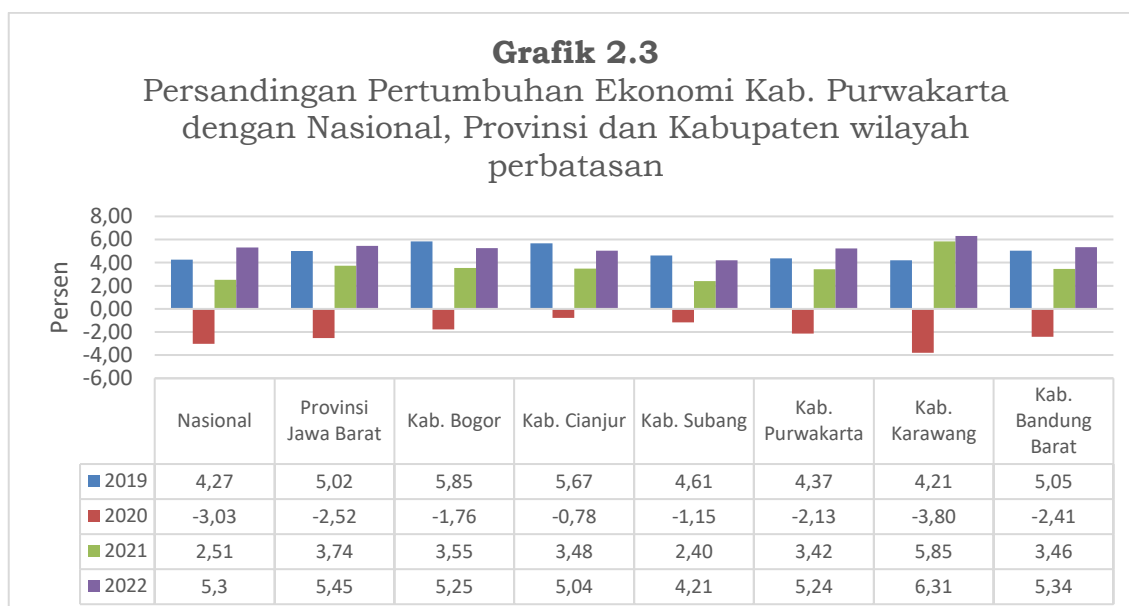
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.10

Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022

No.	Pertumbuhan Ekonomi / Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 (Persen)	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	4,27	-3,03	2,51	5,30
2	Provinsi Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	5,45
3	Kab. Bogor	5,85	-1,76	3,55	5,25
4	Kab. Cianjur	5,67	-0,78	3,48	5,04
5	Kab. Subang	4,61	-1,15	2,40	4,21
6	Kab. Purwakarta	4,37	-2,13	3,42	5,24
7	Kab. Karawang	4,21	-3,80	5,85	6,31
8	Kab. Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46	5,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

b. Produk Domestik Regional Bruto

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan,

sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n- 1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah),
Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 720,79	2 726,05	2 770,71	2 862,68
B	Pertambangan dan Penggalian	31,59	30,91	33,49	33,2
C	Industri Pengolahan	26 974,84	26 205,23	27 126,57	28 884,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	279,6	274,22	306,12	314,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,15	14,84	16,27	16,64
F	Konstruksi	3 247,02	3 081,79	3 243,27	3 293,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 665,63	5 393,40	5 506,10	5 717,88
H	Transportasi dan Pergudangan	1 060,28	1 029,85	1 037,98	1 091,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	574,21	556,41	561,28	595,94
J	Informasi dan Komunikasi	988,61	1 265,58	1 345,83	1 406,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 046,73	1 053,51	1 125,29	1 124,97
L	Real Estat	636,8	638,17	698,51	736,1
M, N	Jasa Perusahaan	214,89	202,6	219,43	240,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	522,5	499,32	488,12	480,35
P	Jasa Pendidikan	1 005,91	1 065,31	1 080,25	1 103,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227,64	225,61	240,38	251,87
R, S, T, U	Jasa lainnya	1 068,02	1 030,44	1 040,55	1 139,61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		46 278,21	45 293,24	46 840,15	49 293,37

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.12

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah),
Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 582,19	4 650,21	4 650,04	5 006,21
B	Pertambangan dan Penggalian	43,44	43,07	47,94	49,2
C	Industri Pengolahan	38 714,75	38 224,62	40 769,59	44 561,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	450,52	441,74	502,83	520,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,73	24,63	27,16	28,08
F	Konstruksi	5 166,05	4 926,75	5 342,72	5 640,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 122,54	7 828,29	8 048,88	8 492,28
H	Transportasi dan Pergudangan	1 687,67	1 669,51	1 720,99	1 892,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	762,19	745,1	778,21	855,08
J	Informasi dan Komunikasi	968,79	1 241,29	1 293,62	1 314,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 675,07	1 680,88	1 824,62	1 982,94
L	Real Estat	867,31	875,85	961,5	1 024,64
M, N	Jasa Perusahaan	327,99	316,27	343,89	380,77

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	903,63	868,07	856,85	841,98
P	Jasa Pendidikan	1 521,95	1 651,87	1 715,10	1 782,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333,17	337,35	363,37	386,03
R, S, T, U	Jasa lainnya	1 560,51	1 526,09	1 530,92	1 710,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		67 709,51	67 051,58	70 778,25	76 468,93

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.13

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2022

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,15	0,19	1,64	3,32
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,08	-2,13	8,32	-0,85
C	Industri Pengolahan	3,09	-2,85	3,52	6,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,28	-1,92	11,63	2,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	12,8	9,63	2,31
F	Konstruksi	5,88	-5,09	5,24	1,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,52	-4,8	2,09	3,85
H	Transportasi dan Pergudangan	6,48	-2,87	0,79	5,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,65	-3,1	0,88	6,17
J	Informasi dan Komunikasi	9,67	28,02	6,34	4,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,01	0,65	6,81	-0,03
L	Real Estat	9,3	0,22	9,46	5,38
M, N	Jasa Perusahaan	9,23	-5,72	8,31	9,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	-4,44	-2,24	-1,59
P	Jasa Pendidikan	5,24	5,9	1,4	2,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,38	-0,89	6,54	4,78
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,09	-3,52	0,98	9,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,37	-2,13	3,42	5,24

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.14

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2022

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,77	6,94	6,57	6,55
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,06	0,07	0,06
C	Industri Pengolahan	57,18	57,01	57,6	58,27

LAPANGAN USAHA		TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,66	0,71	0,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,63	7,35	7,55	7,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12	11,68	11,37	11,11
H	Transportasi dan Pergudangan	2,49	2,49	2,43	2,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,11	1,1	1,12
J	Informasi dan Komunikasi	1,43	1,85	1,83	1,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,47	2,51	2,58	2,59
L	Real Estat	1,28	1,31	1,36	1,34
M, N	Jasa Perusahaan	0,48	0,47	0,49	0,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,33	1,29	1,21	1,1
P	Jasa Pendidikan	2,25	2,46	2,42	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49	0,5	0,51	0,5
R, S, T, U	Jasa lainnya	2,3	2,28	2,16	2,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Adapun ringkasan data capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta secara garis besar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.15

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	46 278,21	45 293,24	46 840,15	49 293,37
2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	67 709,51	67 051,58	70 778,25	76 468,93
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	4,37	-2,13	3,42	5,24
4.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.16

Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	Kab. Purwakarta	46 278,21	45 293,24	46 840,15	49 293,37
	Kab. Karawang	163 732,48	157 849,53	166 941,49	177 470,89
	Kab. Subang	28 672,90	28 344,32	28 960,89	30 181,58
	Kab. Bandung Barat	31 398,35	30 640,41	31 701,79	33 393,29
	Kab. Cianjur	32 039,32	31 790,76	32 897,52	34 556,40
	Kab. Bogor	156 876,01	154 113,60	159 589,55	167 966,18
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	Kab. Purwakarta	67 709,51	67 051,58	70 778,25	76 468,93
	Kab. Karawang	230 021,38	225 063,63	243 713,20	268 228,78
	Kab. Subang	40 790,68	40 148,32	42 292,91	46 110,40
	Kab. Bandung Barat	47 180,08	46 478,90	48 764,31	52 921,29
	Kab. Cianjur	46 957,85	47 528,97	50 137,65	53 988,97
	Kab. Bogor	237 227,08	235 887,26	248 892,48	267 743,69
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	Kab. Purwakarta	4,37	-2,13	3,42	5,24
	Kab. Karawang	4,21	-3,80	5,85	6,31
	Kab. Subang	4,61	-1,15	2,40	4,21
	Kab. Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46	5,34
	Kab. Cianjur	5,67	-0,78	3,48	5,04
	Kab. Bogor	5,85	-1,76	3,55	5,25
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)	Kab. Purwakarta	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kab. Karawang	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kab. Subang	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kab. Bandung Barat	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kab. Cianjur	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kab. Bogor	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Dalam Angka Tahun 2023

c. Inflasi

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah.

Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

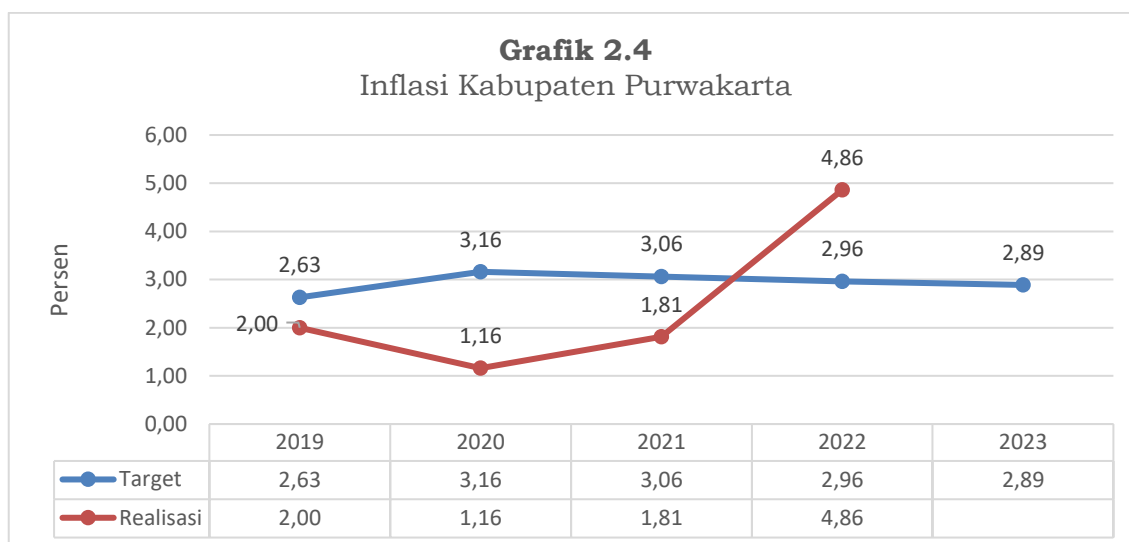
Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 mengacu pada pengukuran di Kota Cirebon, dimana dapat dilihat sesuai daftar tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 2.17

Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inflasi	Persen	2,63	2,00	3,16	1,16	3,06	1,81	2,96	4,86	2,89

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

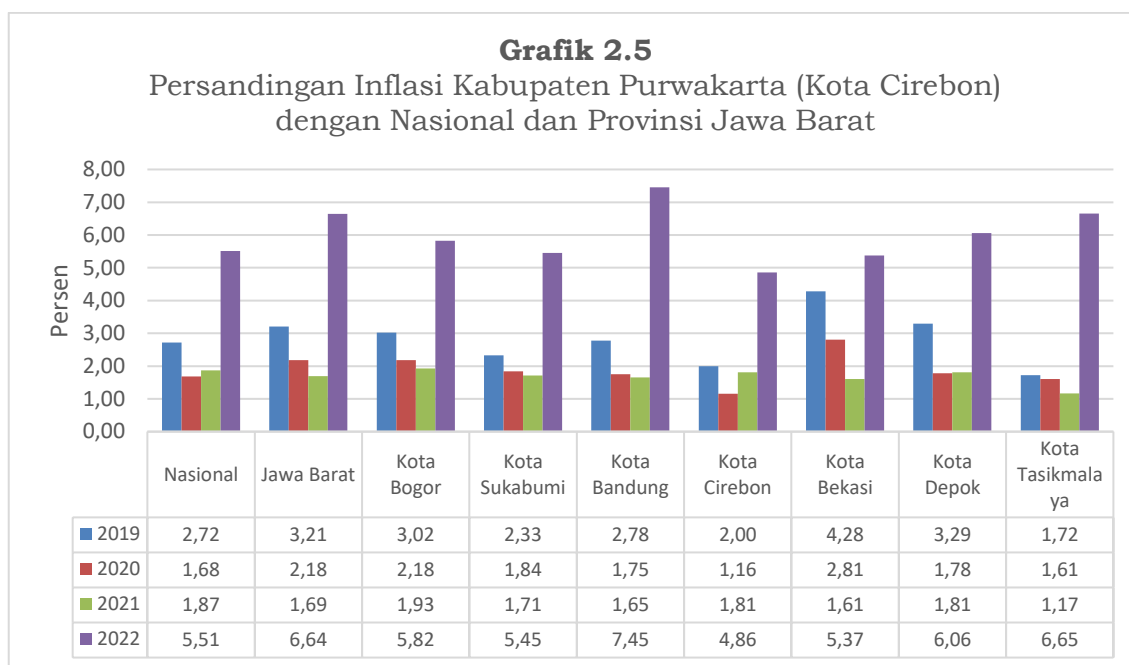
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.18

Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022

No.	Inflasi (persen)	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51
2	Jawa Barat	3,21	2,18	1,69	6,64
3	Kota Bogor	3,02	2,18	1,93	5,82
4	Kota Sukabumi	2,33	1,84	1,71	5,45
5	Kota Bandung	2,78	1,75	1,65	7,45
6	Kota Cirebon	2,00	1,16	1,81	4,86
7	Kota Bekasi	4,28	2,81	1,61	5,37
8	Kota Depok	3,29	1,78	1,81	6,06
9	Kota Tasikmalaya	1,72	1,61	1,17	6,65

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023

d. Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak.

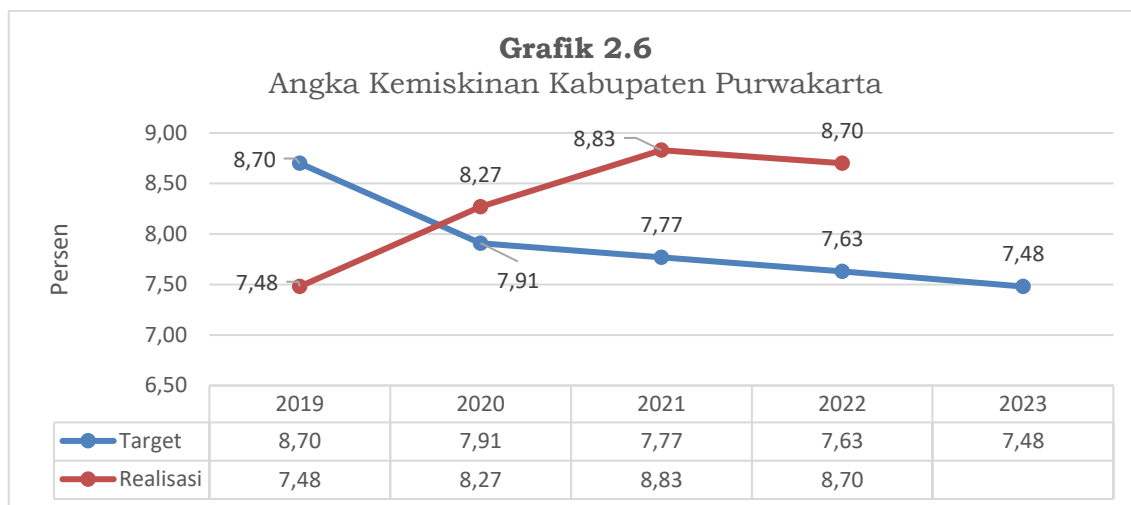
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.19

Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Angka Kemiskinan	Persen	8,70	7,48	7,91	8,27	7,77	8,83	7,63	8,70	7,48

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



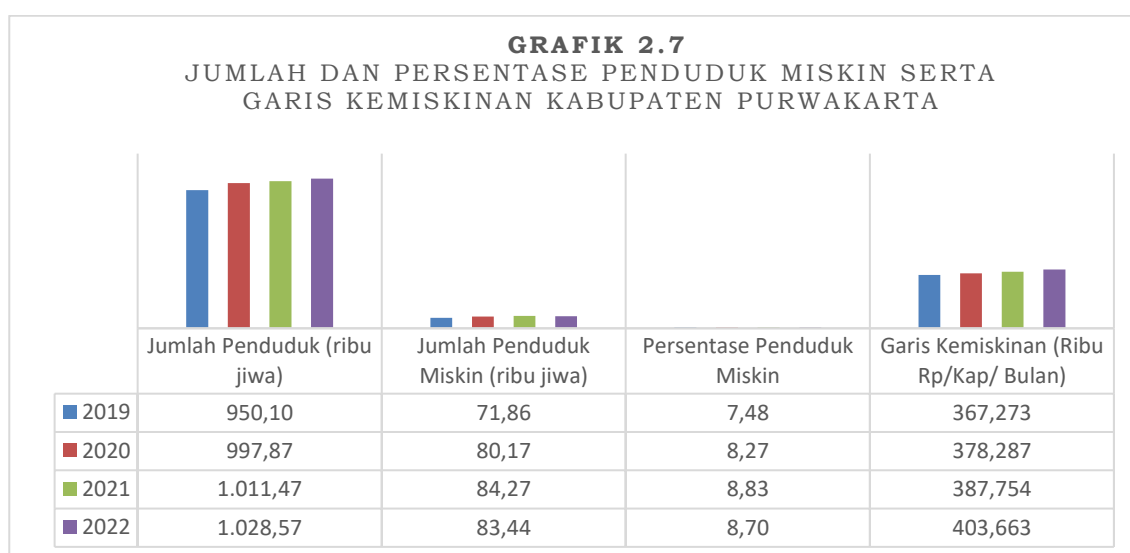
Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

Tabel 2.20

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	950,10	997,87	1.011,47	1.028,57
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	71,86	80,17	84,27	83,44
3.	Persentase Penduduk Miskin	7,48	8,27	8,83	8,70
4.	Garis Kemiskinan (Ribu Rp/Kap/ Bulan)	367,273	378,287	387,754	403,663

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.21

Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2022

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kab. Purwakarta	950,10	997,87	1.011,47	1.028,57
	Kab. Karawang	2 353,92	2 439,09	2 468,58	2 505,25
	Kab. Subang	1 595,83	1 595,32	1 608,59	1 624,39
	Kab. Bandung Barat	1 699,90	1 788,34	1 814,23	1 846,97
	Kab. Cianjur	2 263,07	2 477,56	2 506,68	2 542,79
	Kab. Bogor	5 965,41	5 427,07	5 489,54	5 566,84
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Kab. Purwakarta	71,860	80,170	84,270	83,440
	Kab. Karawang	171,721	195,410	210,780	199,910
	Kab. Subang	127,460	149,810	158,970	155,340
	Kab. Bandung Barat	163,437	179,460	190,770	183,670
	Kab. Cianjur	209,751	234,470	260,020	246,810
	Kab. Bogor	395,000	465,670	491,240	474,740
Persentase Penduduk Miskin (persen)	Kab. Purwakarta	7,48	8,27	8,83	8,70
	Kab. Karawang	7,39	8,26	8,95	8,44
	Kab. Subang	8,12	9,31	10,03	9,75
	Kab. Bandung Barat	9,38	10,49	11,30	10,82
	Kab. Cianjur	9,15	10,36	11,18	10,55
	Kab. Bogor	6,66	7,69	8,13	7,73
Garis Kemiskinan (Ribu Rp/Kap/ Bulan)	Kab. Purwakarta	367,273	378,287	387,754	403,663
	Kab. Karawang	440,347	466,152	496,201	521,158
	Kab. Subang	339,607	351,885	360,691	372,308
	Kab. Bandung Barat	341,307	362,212	374,470	393,956
	Kab. Cianjur	350,760	371,699	387,631	406,829
	Kab. Bogor	373,799	402,877	418,483	443,787

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah 70,82, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 ada peningkatan menjadi 70,98 dan 71,56 poin.

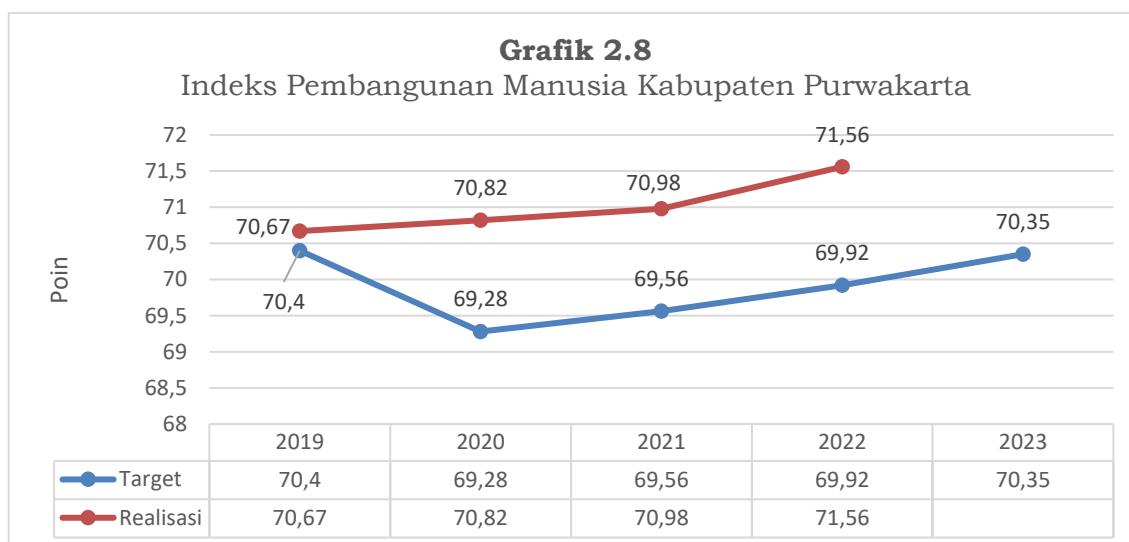
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Tahun 2019-2023, seperti terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.22

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,40	70,67	69,28	70,82	69,56	70,98	69,92	71,56	70,35
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,08	7,92	7,91	8,09	7,97	8,10	8,04	8,11	8,12
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,24	12,10	12,36	12,11	12,46	12,12	12,58	12,13	12,73
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,65	70,8	70,58	70,99	70,63	71,18	70,68	71,47	70,75
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rp	11,173	11,819	12,200	11,614	12,700	11,669	13,000	12,193	13,150

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

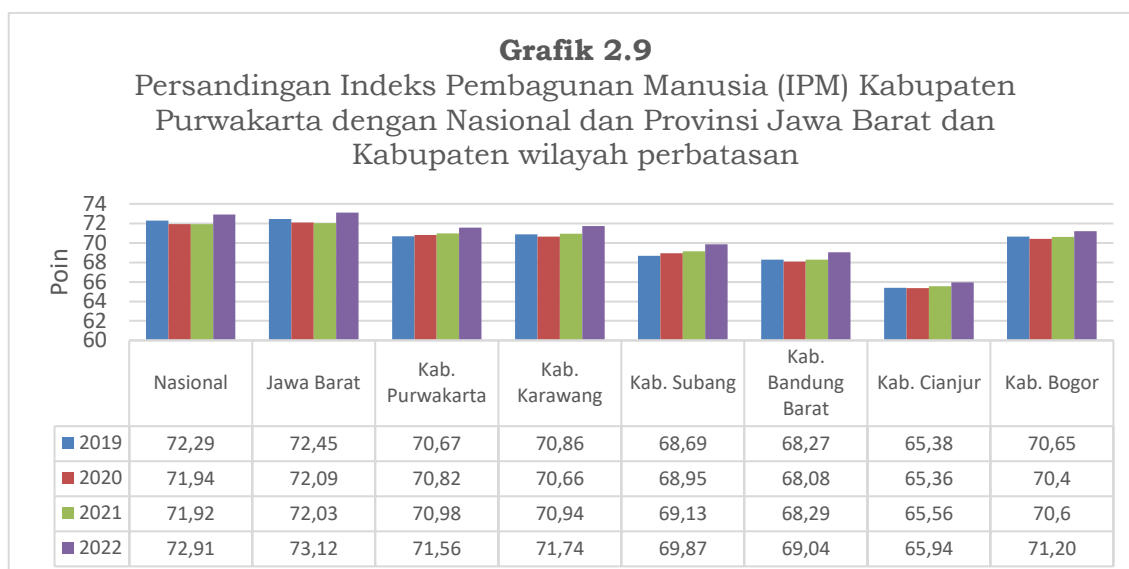
Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.23

Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022

No.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	72,29	71,94	71,92	72,91
2	Jawa Barat	72,45	72,09	72,03	73,12
3	Kab. Purwakarta	70,67	70,82	70,98	71,56
4	Kab. Karawang	70,86	70,66	70,94	71,74
5	Kab. Subang	68,69	68,95	69,13	69,87
6	Kab. Bandung Barat	68,27	68,08	68,29	69,04
7	Kab. Cianjur	65,38	65,36	65,56	65,94
8	Kab. Bogor	70,65	70,40	70,60	71,20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023

f. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru, dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini diakibatkan adanya dampak pandemi covid-19 yang menurunkan sisi perekonomian nasional dan daerah sehingga berdampak pada penurunan dari sector dunia usaha termasuk tenaga kerja yang banyak di PHK untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Akibat hal tersebut maka pada tahun 2020 TPT Kabupaten Purwakarta meningkat mencapai angka 11,07 dan TPAK turun ke angka 60,91.

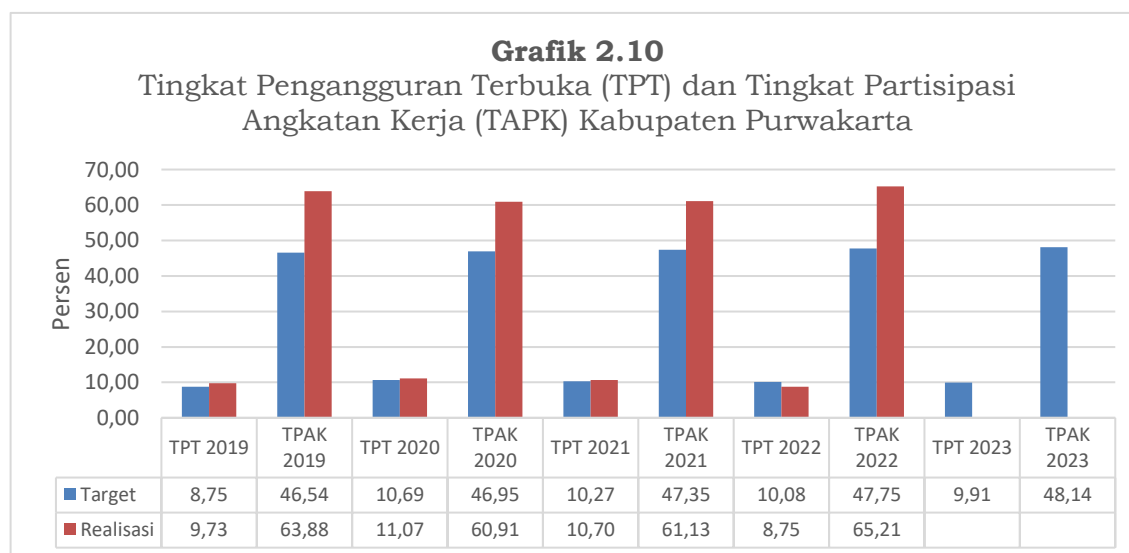
Berikut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 2.24

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,75	9,73	10,69	11,07	10,27	10,70	10,08	8,75	9,91
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	46,54	63,88	46,95	60,91	47,35	61,13	47,75	65,21	48,14

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.25

Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten diwilayah perbatasan Tahun 2019-2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2019	2020	2021	2022
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86
Provinsi Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31
Kab. Purwakarta	9,73	11,07	10,70	8,75
Kab. Karawang	9,68	11,52	11,83	9,87
Kab. Subang	8,68	9,48	9,77	7,77
Kab. Bandung Barat	8,24	12,25	11,65	9,63
Kab. Cianjur	9,81	11,05	9,32	8,41
Kab. Bogor	9,11	14,29	12,22	10,64

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK)	2019	2020	2021	2022
Nasional	67,53	67,77	67,80	68,63
Provinsi Jawa Barat	64,99	64,53	64,95	66,15
Kab. Purwakarta	63,88	60,91	61,13	65,21
Kab. Karawang	63,57	64,90	64,19	65,51
Kab. Subang	67,67	66,70	67,78	68,87
Kab. Bandung Barat	61,97	59,91	60,75	64,37
Kab. Cianjur	66,00	69,26	67,98	69,98
Kab. Bogor	65,41	62,65	62,55	63,75

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / Statistik Indonesia Tahun 2023

g. Ketimpangan

Pencapaian pembangunan daerah terkait pengukuran ketimpangan, digunakan indikator Gini Rasio. Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

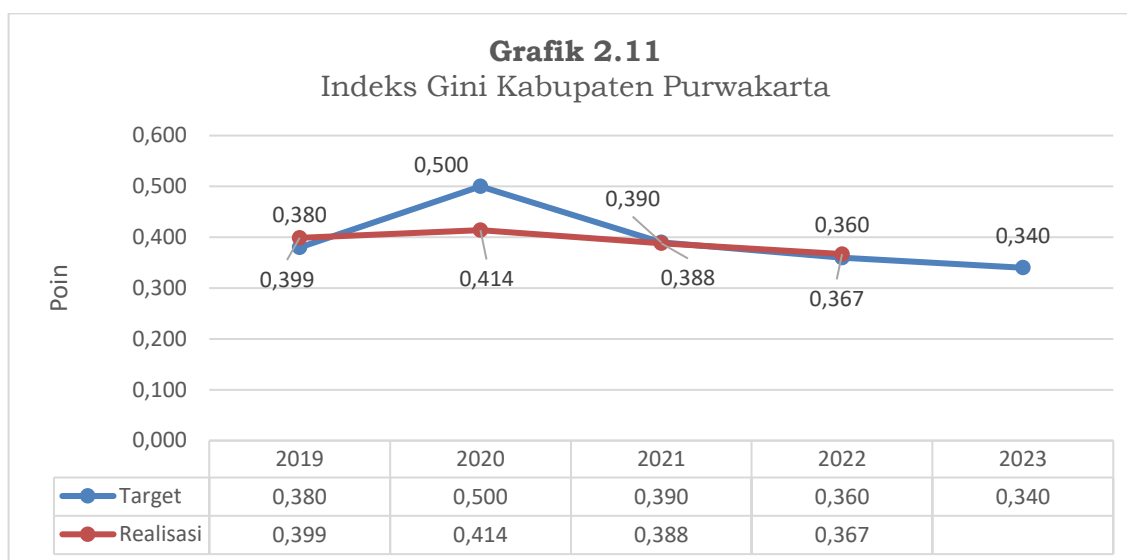
Tingkat ketimpangan atau Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.26

Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indeks Gini / Gini Rasio	Poin	0,38	0,399	0,50	0,414	0,39	0,388	0,36	0,367	0,34

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



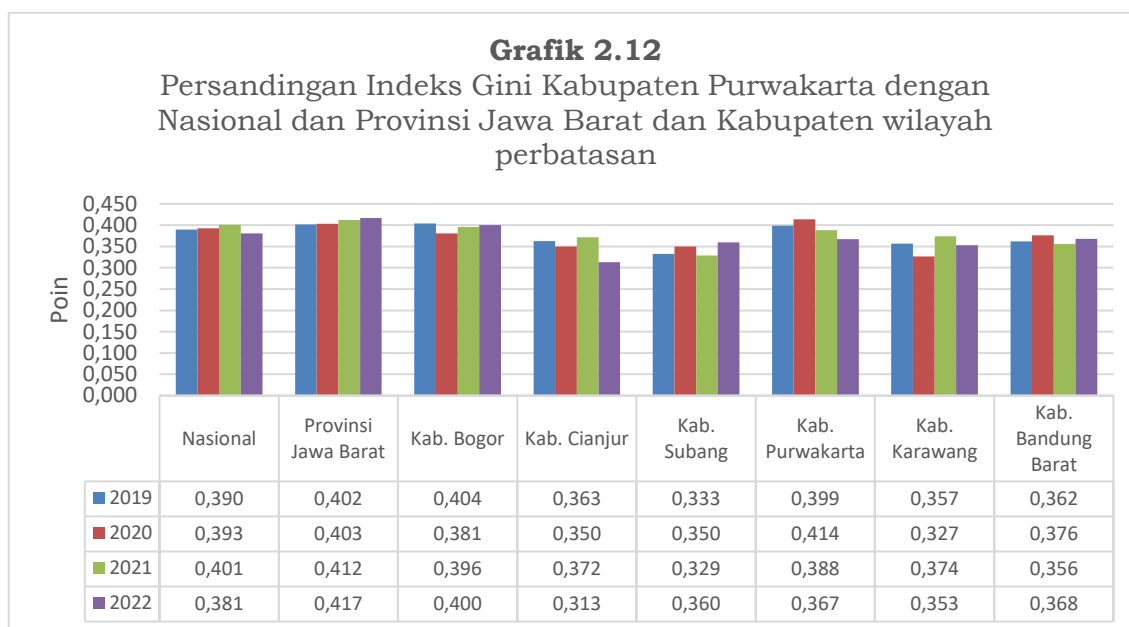
Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

Tabel 2.27

Persandingan Indeks Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022

No.	Indek Gini / Gini Rasio (poin)	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	0,390	0,393	0,401	0,381
2	Provinsi Jawa Barat	0,402	0,403	0,412	0,417
3	Kab. Bogor	0,404	0,381	0,396	0,400
4	Kab. Cianjur	0,363	0,350	0,372	0,313
5	Kab. Subang	0,333	0,350	0,329	0,360
6	Kab. Purwakarta	0,399	0,414	0,388	0,367
7	Kab. Karawang	0,357	0,327	0,374	0,353
8	Kab. Bandung Barat	0,362	0,376	0,356	0,368

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023

g. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Jadi, pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Pendapatan perkapita di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2020.

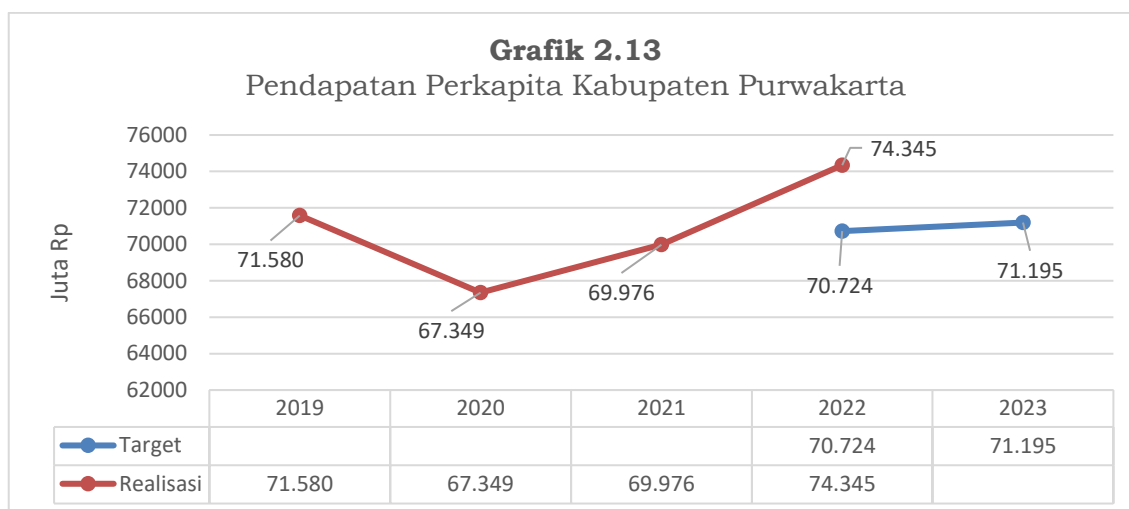
Berikut tingkat capaian pendapatan perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.28

Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	Ribu Rp.	-	71.580	-	67.349	-	69.976	70.724	74.345	71.195

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah, diperlukan sasaran pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya meningkatnya penanggulangan kemiskinan, meningkatnya aksesibilitas kesempatan kerja dan meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja.

Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung, seperti orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (difabel), serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Selain itu dalam pembangunan kesejahteraan sosial juga

harus diperhatikan terkait pembangunan manusianya agar peningkatan kesejahteraan sosial selaras dengan peningkatan pembangunan manusia.

Kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan melalui program pembangunan oleh perangkat daerah teknis. Adapun capaian indikator kinerja program dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,67	70,82	70,98	71,56	70,35
2	Angka Kemiskinan	Persen	7,48	8,27	8,83	8,70	7,48
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,73	11,07	10,70	8,75	9,91
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,16
5	Indeks Gini	Poin	0,399	0,414	0,388	0,367	0,340
6	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	Juta Rp.	71.580	67.349	69.976	74.345	71.195
6a	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	11.819.000	11.614.000	11.669.000	12.193.000	13.150.500
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,35	1,54	1,82	1,69	0,47
8	Inflasi	Persen	2,00	1,16	1,81	4,86	2,89
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	8,09	8,10	8,11	8,12
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,10	12,11	12,12	12,13	12,73
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,8	70,99	71,18	71,47	70,75
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63,88	60,91	61,13	65,21	48,14
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,19	87,19	86,78	86,93	90,18
14	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	72,04	72,04	74,39	77,89	77,46
15	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	85,63	87,88	83,25	84,00	89,63

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71	64,41	61,07	64,28	72,81
17	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	85,4	34,82	35,06	37,56	86
18	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	16	16	80,00	32	40
19	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	34	34	77,00	70,3	75,52
20	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan	Persen	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52
21	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Persen	35	7,71	6,36	6,36	55
22	Jumlah Wisatawan	Orang	1.942.213	97.421	783.171	783.171	2.515.000
23	Laju UMKM Yang Dibina	Persen	100	100	100	100	100
24	Laju Koperasi Aktif	Persen	80	80	90	90	100
25	Laju Pertumbuhan IKM	Persen	55	70	75	75	75
26	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	4,69	6,91	6,84	5,12	5
27	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	62,7	69,76	74,49	80,24	75
28	Skor Pola pangan Harapan	Poin	88,55	85,1	78,3	91,40	93,15
29	Laju Produksi Pertanian	Persen	1,22	2,97	4,9	4,9	1,1
30	Laju Produksi Peternakan	Persen	3	0,24	3,13	3,13	2
31	Laju Produksi Perikanan	Persen	14	16,48	2,27	2,27	14

Sumber : BPS Kab. Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023, Bappelitbangda 2023

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya sebagaimana tertuang di dalam Tujuan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diperlukan sasaran pembangunan yang salah satunya yaitu meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga. Sedangkan dalam pengembangan dan pembangunan seni budaya dititikberatkan pada pemeliharaan jati diri terhadap nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan dan memelihara nilai seni budaya daerah dan meningkatkan prestasi olahraga daerah dilaksanakan melalui program pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah teknis. Adapun capaian indikator kinerja program dalam rangka mengembangkan seni budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.30

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dalam Rangka Mengembangkan Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan	Persen	80	85	90	90	100
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	68,5	95	91	74,45	73
3	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	25	25	35	35	55

Sumber : Bappelitbangda 2023

2.2.4 Fokus Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk menurunnya capaian target pembangunan daerah, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan menyeluruh dari semua aspek. Dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta telah dilakukan langkah-langkah sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, diantaranya yaitu melakukan pergeseran anggaran dan *refocusing* program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19.

Penanganan dampak pandemi Covid-19 dilakukan pada tiga aspek utama yang terdampak, yaitu aspek kesehatan, aspek sosial masyarakat dan aspek ekonomi. Pada aspek kesehatan pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan upaya penanganan kesehatan diantaranya untuk pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD), desinfektan, *hand sanitizer*, pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan, penyediaan ruang untuk pasien covid-19, vaksinasi tahap I-II dan III (*booster*) dari segala sektor usia, sosialisasi dan penertiban lokasi yang rawan kerumunan masyarakat dll. Sedangkan pada aspek sosial masyarakat pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan upaya untuk pengamanan jaring sosial masyarakat bagi masyarakat miskin yang terkena dampak, melalui pemberian bantuan sosial baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Langsung Non Tunai, bantuan sembilan bahan pokok makanan (sembako), bantuan sosial ini dikolaborasikan dengan bantuan sosial yang bersumber dari Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Kemudian dari aspek ekonomi pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan upaya untuk pemulihan perekonomian masyarakat khususnya bagi yang terdampak pandemi Covid-19, diantaranya yakni dengan memberikan fasilitasi permohonan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, penataan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat, penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di tempat umum, penyediaan lapangan kerja melalui proyek pembangunan yang sifatnya padat karya, pelatihan dan pembinaan wirausaha baru, dll.

Dari hasil penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 sudah menunjukkan trend yang positif dimana jumlah penderita covid-19 sudah berkurang dikarenakan target pelaksanaan vaksinasi telah memenuhi harapan, selain itu pemulihan ekonomi masyarakat sudah mulai berangsur membaik dan merangkak naik. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam melewati masa-masa sulit akibat dampak pandemi di tahun pertama, terutama bagi masyarakat miskin, penanganan pandemi ini juga menjadikan masyarakat menjadi sadar akan hidup bersih dan sehat, disiplin dalam menjaga kesehatan dan semangat dalam bekerja dan berusaha sehingga perekonomian masyarakat secara berangsur ada peningkatan kembali.

Penanganan dampak pandemi Covid-19 untuk tahun 2022 dan 2023 masih tetap menjadi prioritas guna menekan penanganan masalah kesehatan akibat Covid-19, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan pemulihan ekonomi yang diharapkan terus membaik, diantaranya melalui normalisasi kunjungan wisatawan pada beberapa destinasi pariwisata unggulan.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan yakni Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.31

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendidikan							Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pendidikan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pendidikan
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Pendidikan
	1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pendidikan
	2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pendidikan
	3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pendidikan
	4 Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pendidikan
	5 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang – undangan						
	6 Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	55,43	53,10	-	-	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							Dinas Pendidikan
	1 Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persen	67,16	99,03	-	-	Dinas Pendidikan
	2 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi	Persen	63,89	97,29	-	-	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi	Persen	88,23	70,00	-	-	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan							Dinas Pendidikan
	1 Persentase Guru yang berkualifikasi S1 (%)	Persen	95,32	95,73	-	-	Dinas Pendidikan
	2 Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	Persen	0,45	0,77	-	-	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan							Dinas Pendidikan
	1 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Persen	59,19	67,09	-	-	Dinas Pendidikan
	2 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%)	Persen	99,53	99,53	-	-	Dinas Pendidikan
	3 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%)	Persen	99,72	99,72	-	-	Dinas Pendidikan
	4 Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik	Persen	18,45	49,78	-	-	Dinas Pendidikan
	5 Persentase Kondisi Ruang Kelas SMP dalam keadaan baik	Persen	31,91	67,12	-	-	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase realisasi program Manajemen pelayanan pendidikan (%)	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pendidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Pendidikan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	A	Dinas Pendidikan
	2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	-	-	100,00	92,13	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan							Dinas Pendidikan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	-	-	68,00	72,83	Dinas Pendidikan
	2 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	-	-	99,57	99,58	Dinas Pendidikan
	3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	Persen	-	-	99,54	99,53	Dinas Pendidikan
	4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	Persen	-	-	99,73	99,73	Dinas Pendidikan
	5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	Persen	-	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
	6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	Persen	-	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
	7 Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	Persen	-	-	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	-	-	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	9 Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	Persen	-	-	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	10 Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	Persen	-	-	86,23	86,23	Dinas Pendidikan
	11 Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	Persen	-	-	88,64	88,64	Dinas Pendidikan
	12 Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	-	-	57,57	43,65	Dinas Pendidikan
	13 Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	-	-	92,62	95,32	Dinas Pendidikan
	14 Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	-	-	93,41	97,22	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum							Dinas Pendidikan
	1 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	-	-	1,00	1,00	Dinas Pendidikan
	2 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dokumen	-	-	1,00	1,00	Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dokumen Hasil Pengawasan	Dokumen	-	-	0,00	1,00	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Prosentase keikutsertaan Sekolah dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra Daerah	Persen	-	-	95,00	0,00	Dinas Pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2. Kesehatan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kesehatan yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.32

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesehatan							Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	34,00	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Kesehatan
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	75,00	-	-	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	75,00	-	-	Dinas Kesehatan
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	75,00	-	-	Dinas Kesehatan
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Kesehatan
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Kesehatan
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	100,00	97,67	-	-	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian Target SPM Sesuai Wilayah Kerja	Persen	41,67	75,00	-	-	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	76,67	100,00	-	-	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							Dinas Kesehatan
	1 Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	Persen	62,02	63,76	-	-	Dinas Kesehatan
	2 Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	Persen	65,80	65,99	-	-	Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat							Dinas Kesehatan
	1 Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	71,35	62,50	-	-	Dinas Kesehatan
	2 Cakupan Pelayanan Bayi	Persen	99,90	107,06	-	-	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat							Dinas Kesehatan
	1 Cakupan Sarana Sanitasi dasar (Air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)	Persen	78,10	79,90	-	-	Dinas Kesehatan
	2 Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat	Persen	58,25	50,61	-	-	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	68,84	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Dinas Kesehatan
	1 Persentase Bayi Dengan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	95,70	90,00	-	-	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penyakit Menular (TB paru, HIV)	Persen	68,84	64,74	-	-	Dinas Kesehatan
	3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen	61,10	26,26	-	-	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin							Dinas Kesehatan
	1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	100,00	67,85	-	-	Dinas Kesehatan
	2 Persentase Kepesertaan Penduduk Miskin Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Dengan Kondisi Baik	Persen	61,16	61,54	-	-	Dinas Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Dibina	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak							Dinas Kesehatan
	1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	100,53	99,41	-	-	Dinas Kesehatan
	2 Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Persen	103,20	100,00	-	-	Dinas Kesehatan
	3 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	101,04	101,22	-	-	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Persen	76,50	-	-	-	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Minimal Madya	Persen	90,00	90,00	-	-	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan							Dinas Kesehatan
	1 Persentase Kunjungan Pemeriksaan Labkesda	Persen	80,00	89,41	-	-	Dinas Kesehatan
	2 Persentase Parameter Pemeriksaan Labkesda	Persen	84,47	83,50	-	-	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP Yang Masih Berlaku	Persen	83,54	100,00	-	-	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Kesehatan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	A	Dinas Kesehatan
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	60,00	80,00	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							Dinas Kesehatan
	1 Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	-	-	75,00	75,00	Dinas Kesehatan
	2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	-	-	91,74	100,00	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	-	-	50,00	98,41	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	%	-	-	99,00	100,00	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	%	-	-	68,00	68,09	Dinas Kesehatan
Kesehatan							RSUD Bayu Asih
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	RSUD Bayu Asih
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan dukungan administrasi perkantoran	Persen	100,00	96,00	-	-	RSUD Bayu Asih
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit							RSUD Bayu Asih
	1 Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis	Persen	69,94	71,50	-	-	RSUD Bayu Asih
	2 Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	68,53	71,50	-	-	RSUD Bayu Asih
	3 Cakupan pelayanan penunjang	Persen	65,88	71,50	-	-	RSUD Bayu Asih
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD							RSUD Bayu Asih
	1 Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis	Persen	60,00	88,00	-	-	RSUD Bayu Asih
	2 Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	60,00	75,00	-	-	RSUD Bayu Asih
	3 Cakupan pelayanan penunjang	Persen	60,00	75,00	-	-	RSUD Bayu Asih
Program Penguatan Penunjang Pelayanan BLUD							RSUD Bayu Asih

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	80,00	85,00	-	-	RSUD Bayu Asih
	2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana rumah sakit	Persen	70,00	75,00	-	-	RSUD Bayu Asih
	3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	-	-	RSUD Bayu Asih
	4 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	RSUD Bayu Asih
	5 Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	-	-	RSUD Bayu Asih
	6 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	Persen	90,00	90,00	-	-	RSUD Bayu Asih
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							RSUD Bayu Asih
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	A	RSUD Bayu Asih
	2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	-	-	20,00	100,00	RSUD Bayu Asih
	3 Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Opini	-	-	Madya	Madya	RSUD Bayu Asih
	4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	-	-	75,00	81,94	RSUD Bayu Asih
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							RSUD Bayu Asih
	1 Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis	Persen	-	-	75,00	75,00	RSUD Bayu Asih
	2 Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	-	-	75,00	75,00	RSUD Bayu Asih
	3 Cakupan Pelyanan Penunjang	Persen	-	-	75,00	75,00	RSUD Bayu Asih
	4 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana Rumah Sakit	Persen	-	-	85,00	75,00	RSUD Bayu Asih
	5 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	-	-	80,00	75,00	RSUD Bayu Asih
	6 Presentase Perencanaan dan Pelporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan	Persen	-	-	75,00	75,00	RSUD Bayu Asih
	7 Presentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	-	75,00	75,00	RSUD Bayu Asih

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	8 Presentase pemenuhan Kebutuhan Operasional	Persen	-	-	78,00	75,00	RSUD Bayu Asih

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	34,00	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	4 Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	5 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	6 Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program pembangunan jalan dan jembatan							Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	1 Panjang Ruas Jalan Baru	Km	1,00	0,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	2 Jumlah Jembatan Baru	Titik	1,00	1,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	-	13,69	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	4 Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	-	3,76	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	-	2,86	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen	10,00	0,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	-	6,25	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	87,80	87,88	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen	72,85	18,20	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	100,00	95,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen	-	25,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen	44,40	5,55	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	34,22	32,56	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan							Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	19,74	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	2 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen	97,11	20,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen	20,00	20,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong	Persen	-	4,18	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Pembangunan Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	-	3,10	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Irigasi	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen	-	25,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	-	32,56	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Pengujian Bahan dan Alat Laboratorium Teknik	Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen	-	23,00	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	-	-	80,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	1 Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	-	-	6,25	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	-	-	35,06	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	3 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen	-	-	22,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	1 Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen	-	-	25,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong	Persen	-	-	25,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
Program Penyelenggaraan Jalan							Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Panjang Ruas Jalan Baru	Km	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	2 Jumlah Jembatan Baru	Titik	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	-	-	15,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	4 Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	-	-	10,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	-	-	1,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	-	-	85,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen	-	-	18,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	-	-	90,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen	-	-	25,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	10 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen	-	-	5,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	11 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	12 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	13 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen	-	-	20,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	14 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	-	-	25,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
	15 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen	-	-	25,00	-	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun (Unit)	Unit	-	0,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (%)	Persen	-	18,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pemanfaatan Ruang							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	1 Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Perangkat Lunak	1,00	0,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	2 Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan)	Laporan	1,00	12,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	3 Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%)	Persen	100,00	70,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	4 Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang yang dibina/ ditinjau	Persen	80,00	70,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji	Dokumen	60,00	46,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum							Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	1,00	4,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km)	Km	1,59	2,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	987,50	175,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	A	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	100,0	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	-	-	20,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun	Km	-	-	0,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	3 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun	Unit	-	-	20,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai	Persen	-	-	0,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki	Unit	-	-	19,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	-	-	150,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Sarana dan Peasarana Permkiman Yang Dibangun	Unit	-	-	15,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan	Unit	-	-	220,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	-	-	7,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peserta Pembinaan	%	-	-	57,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	-	-	100,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-	BB	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	-	-	-	84,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1 Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	-	-	-	5,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	-	-	-	35,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	3 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen	-	-	-	19,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	-	-	-	2,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen	-	-	-	23,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1 Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen	-	-	-	24,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong	Persen	-	-	-	24,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan	Unit	-	-	-	1.905,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	-	-	-	14,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1 Panjang Ruas Jalan Baru	Km	-	-	-	1,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2 Jumlah Jembatan Baru	Titik	-	-	-	0,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	-	-	-	13,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	4 Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	-	-	-	7,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	-	-	-	1,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	-	-	-	75,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen	-	-	-	16,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	-	-	-	83,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen	-	-	-	22,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	10 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen	-	-	-	5,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	11 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	-	-	-	1,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	12 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	-	-	-	0,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	13 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen	-	-	-	20,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	14 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	-	-	-	33,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	15 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen	-	-	-	25,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peserta Pembinaan	%	-	-	-	64,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	-	-	-	10,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yakni Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.34

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Perumahan dan Kawasan Permukiman							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	1.840,00	1.400,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	2 Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi	Jumlah Menara	2,00	2,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit)	Unit	1,00	2,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/Permukiman	Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina	BKM	48,00	100,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda	Ha	4,20	8,40	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Keselamatan Gedung dan Bangunan							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	1 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Persen	20,73	30,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	2 Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari)	Hari	5,00	3,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Dibangun/Diperbaiki	Km	15,79	4,36	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik	Unit	3.801,00	3.200,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Unitilitas Penunjang Perumahan						Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dokumen	-	-	-	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE dan Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	71,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Persentase Gedung/Bangunan Yang Memiliki Proteksi Kebakaran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Persentase Sosialisasi dan Pelatihan / Simulasi Yang Akan Dilaksanakan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Kebakaran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana DPKPB							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana						Penanggulangan Bencana
	3 Persentase Perawatan dan Pemeliharaan Asset Sarana dan Prasarana	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Teknis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	3 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	4 Persentase Ketersediaan Data Kejadian Kebakaran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Persentase Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Persentase Data / Informasi tentang Informasi dan Resiko Bencana Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah / Legal	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Bencana	Persen	-	9,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	4 Persentase Tersedianya Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	-	10,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	5 Persentase Peralatan Perlindungan Terhadap Bencana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Persentase Instansi Terkait Dalam Penanggulangan Bencana	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Kedaruratan dan Logistik							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Persentase Jumlah SDM Yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan di Evakuasi Terhadap Kejadian Bencana	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	3 Persentase Kecepatan Response Time Kurang Dari 24 Jam Untuk Status Darurat Bencana	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	A	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	95,00	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Bencana							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	-	-	97,94	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	-	-	84,54	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
	3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	-	-	95,70	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	-	-	96,95	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	65,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	80,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pemeliharaan Trantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah	Frekuensi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekuensi Penertiban Trantibmas	Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Trantibmas	Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas dan Jenis Sarana Prasarana Penanganan Kantribmas	Jenis	4 Jenis dan 2 Jenis	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah							Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	Persen	-	100,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani	Persen	-	100,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat							Satuan Polisi Pamong Praja

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/Penertiban Trantibmas	Kegiatan	-	34,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	Kegiatan	-	8,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	-	48,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Trantibmas							Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Diklat/Bimtek Satpol PP Yang Diselenggarakan	Persen	-	85,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Persentase Anggota Satpol PP Yang Dibina	Persen	-	85,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Perlindungan Masyarakat							Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina	Persen	-	20,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Kegiatan	-	10,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	BB	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	90,00	90,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Satuan Polisi Pamong Praja
	1 Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	%	-	-	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani	%	-	-	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	3 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian / Penertiban Trantibmas	Kegiatan	-	-	34,00	40,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	4 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	Kegiatan	-	-	8,00	8,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	5 Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	-	-	60,00	60,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	6 Jumlah Anggota Satpol. PP. Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	Jumlah	-	-	98,00	98,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	7 Persentase Anggota Satpol. PP. Yang Dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS/Non PNS)	%	-	-	60,00	80,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	8 Frekuensi Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Anggota Satpol. PP. (PNS/Non PNS)	Kali	-	-	48,00	48,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	9 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina	%	-	-	20,00	20,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	10 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Kegiatan	-	-	10,00	10,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-	BB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	-	82,25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	-	-	-	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	-	-	-	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	-	-	-	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-	BB	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	-	92,14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	-	-	-	95,53	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

6. Sosial

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Sosial yakni Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.36

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sosial							Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5 Persentase Perencanaan dan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan						Perempuan dan Perlindungan Anak
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Diberdayakan	Persen	85,00	82,03	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	93,68	40,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dibina	Orang	14,00	40,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lembaga	24,00	31,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	88,60	90,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lembaga	-	-	26,00	29,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah migran yang terfasilitasi	persen	-	-	0,00	10,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	-	-	94,23	99,87	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1 Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina	Persen	-	-	206,00	25,06	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah	Persen	-	-	87,00	90,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayaankan						Perlindungan Anak
Program Penanganan Bencana	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana	Desa/Kel	-	-	99,77	90,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan	Persen	-	-	88,00	85,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Tenaga Kerja yakni Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.37

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tenaga Kerja							Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	1 Persentase Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	60,65	68,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	2 Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen	50,00	8,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	50,00	26,07	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	50,00	66,67	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Persen	60,00	24,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	BB	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	32,87	86,25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja							Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	1 Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja	Orang	-	-	70,16	95,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Jumlah Tenaga Kerja Produktif Pada Industri Kecil	Orang	-	-	0,00	54,87	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja							Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	1 Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	-	-	100,00	14,06	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	2 Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Persen	-	-	0,00	14,06	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	-	-	100,00	55,45	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.38

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penguatan Kelembagaan	Tingkat Penguatan Kelembagaan	Persen	63,88	35,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengarusutamaan Gender dan Anak						Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	86,82	70,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen	78,00	81,00	-	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peranserta Gender Dalam Pembangunan	Persen	-	-	74,67	85,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	-	-	80,84	90,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	-	-	80,00	90,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya Data Gender Anak	Persen	-	-	0,00	75,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	-	-	90,00	60,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak	Persen	-	-	11,74	60,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

3. Pangan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pangan yakni Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pangan							Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun	Unit	1,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Terpenuhinya Kebutuhan Beras	Ton	130.970,06	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	3 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi-Umbian	Ton	23.568,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	4 Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran dan Buah	Ton	182.632,80	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah	Persen	-	123,07	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	Persen	-	135,60	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase pengisian gudang cadangan pangan	Persen	-	80,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	BB	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	100,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Persen	-	-	75,00	80,00	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah	Persen	-	-	167,92	163,66	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	Persen	-	-	181,69	170,38	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	Persen	-	-	0,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

4. Pertanahan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pertanahan, yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pertanahan yakni Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pertanahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pertanahan							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Yang Diselesaikan	Persen	100,00	0,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	1 Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	3,00	0,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
	2 Persentase Lahan Tanah Aset Daerah Yang Disertifikatkan	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	3,00	-	-	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi	Persen	-	-	89,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik (Lokasi)	Lokasi	-	-	100,00	-	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Pertanahan							Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi Yang Direkomendasikan	Dokumen	-	-	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi	Persen	-	-	-	77,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik (Lokasi)	Lokasi	-	-	-	16,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Santunan Tanah Untuk Pembangunan							
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Tahun	Lokasi	-	-	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penetapan Tanah Ulayat	Jumlah Penetapan Tanah Ulayat	Lokasi	-	-	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah Tanah Kosong yang di Kelola Oleh Pemerintah Daerah	Lokasi	-	-	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Izin Lokasi Membuka Tanah Yang Direkomendasikan	Persen	-	-	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Konflik Perpenatagunaan Yang Terfasilitasi	Persen	-	-	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

5. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup yakni Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Lingkungan Hidup							Dinas Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Lingkungan Hidup
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	73,91	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	99,04	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	96,69	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	95,47	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	80,68	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	69,60	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah	Unit	63,00	69,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							Dinas Lingkungan Hidup
	1 Jumlah Target Pembinaan	perusahaan	30,00	30,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Jumlah Dokumen Amdal	dokumen	16,00	1,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air) Yang Terjaga dan Terlindungi	Persen	25,00	25,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan							Dinas Lingkungan Hidup
	1 Jumlah Perusahaan Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPERDA)	perusahaan	24,00	24,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Jumlah Titik Lokasi Pengelolaan DAS Citarum	Lokasi	2,00	0,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Jumlah Titik Pantau Kualitas Air	Titik	20,00	74,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	4 Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	Titik	23,00	4,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penyebaran dan Penegakkan Hukum Lingkungan							Dinas Lingkungan Hidup
	1 Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta	Kali	6,00	6,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Penerimaan Pengaduan	Kasus	4,00	0,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Aplikasi SIPP	Buah	1,00	0,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	4 Adipura	Titik pantau (Kecamatan)	3,00	0,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
	5 Jumlah Sosialisasi Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	lokasi (sekolah)	3,00	50,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi	jenis	4,00	5,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja	Adipura	Titik pantau	3,00	0,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	-	25,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA	Perusahaan	-	24,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Lingkungan Hidup
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	BB	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%	-	-	99,55	72,10	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	%	-	-	22,07	66,05	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	-	-	1,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Target Pembinaan	%	-	-	63,04	70,00	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta	Lokasi	-	-	6,00	6,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup yang ditangani	%	-	-	30,29	56,07	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kegiatan PROPERDA yang dilaksanakan	%	-	-	0,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditangani	%	-	-	0,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Layanan Persampahan	%	-	-	89,17	100,00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan :						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 Tingkat Kesadaran Masyarakat	Persen	50,00	95,60	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Tingkat Akurasi Data Kependudukan	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	Persen	85,00	100,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	75,00	85,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	Persen	50,00	85,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	Persen	50,00	85,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	Persen	50,00	85,00	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	80,00	80,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan:						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	%	-	-	90,00	100,05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	%	-	-	90,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan KIA	%	-	-	90,00	46,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 Tingkat Kesadaran Masyarakat	%	-	-	90,00	95,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pencatatan Sipil							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil :						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	%	-	-	90,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan Akta Kematian	%	-	-	90,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan	%	-	-	90,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	- Tingkat kepemilikan Akta Perceraian	%	-	-	90,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1 Tingkat Akurasi Data Kependudukan	%	-	-	90,00	95,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	%	-	-	90,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3 Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	-	-	90,00	90,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	4 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	%	-	-	90,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	5 Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	%	-	-	90,00	90,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	6 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	%	-	-	90,00	80,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	95,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	90,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	93,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yang Dibina	Buah	192,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pemberdayaan Ekonomi Desa							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1 Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM	Desa	28,00	35,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan IDM	Desa	132,00	140,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3 Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM	Desa	23,00	8,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4 Persentase Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas)	Persen	20,00	40,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5 Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan di Tiap Desa	Kegiatan	20,00	45,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	6 Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Dibina (LPM)	Persen	20,00	40,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	7 Jumlah Posyandu Yang Dibina	Unit	1.031,00	1.031,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Persen	7,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1 Jumlah Bumdes Yang Dibina	Bumdes	175,00	172,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Jumlah Potensi/Inovasi Desa Yang Dikembangkan	Jenis	230,00	120,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penguatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1 Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Desa	Orang	183,00	90,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Bagi Kades, Perangkat Desa dan Banmusdes	Orang	300,00	366,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Kawasan Pedesaan Yang Dibina	Persen	42,00	57,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	BB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	78,66	90,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa	Persen	-	-	87,18	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1 Persentase Kerjasama Desa yang terealisasi	Persen	-	-	0,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Persentase Pembangunan Kawasan Pedesaan yang dibentuk	Persen	-	-	61,89	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1. Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa	Persen	-	-	64,54	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa	Persen	-	-	80,76	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1. Persentase Pemberdayaan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	-	-	72,16	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2. Persentase Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Unggulan Desa	Persen	-	-	0,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dan Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Perkantoran						Keluarga Berencana
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1 Ratio Akseptor KB	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	81,04	81,37	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Persentase KB Mandiri (Cakupan PUS Menjadi Peserta KB Aktif)	Persen	45,01	45,02	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4 Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Orang	7.095,00	42.600,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5 Persentase Jumlah Peserta KB Yang Dilayani	Persen	31,00	32,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	6 Peserta KB Aktif Yang Drop Out Selama Satu Tahun	Persen	9,99	9,98	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	7 Persentase PUS Muda Usia Rendah Cakupan PUS Dibawah Usia 20 th	Persen	1,99	1,98	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	Persen	40,00	45,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Poin	33,00	30,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	40,00	45,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	33,00	30,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program pelayanan kontrasepsi							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1 Persentase Peserta KB Aktif Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	35,00	35,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Alat Kontrasepsi (Alekton)	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1 Persentase Jumlah PPKBD dan Sub. PPKBD (1500)	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Desa/Kelurahan	Rasio	1 : 1	1 : 1	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Ratio Pembantu Pembina Kel Berencana (PPKBD)	Rasio	1 : 1	1 : 1	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4 Persentase Data Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Jumlah Remaja Yang Dibina	Orang	150,00	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Kader	576,00	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1 Cakupan Kampung KB	Persen	45,00	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Keluarga Berencana
	2 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Persen	37,5	43,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Persentase Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS	Persen	60,00	70,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Orang	562,80	591,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Orang	568,05	591,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Orang	562,80	591,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB	PUS	562,80	591,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Kelompok	562,80	591,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	6 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Keluarga	562,80	591,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Persen	65,00	100,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	70,00	75,00	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan							Dinas Pengendalian Penduduk dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Daerah Kabupaten/Kota							Keluarga Berencana
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	A	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	persen	-	-	87,40	70,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	persen	-	-	86,90	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	persen	-	-	86,90	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	persen	-	-	82,66	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	persen	-	-	97,10	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenan

9. Perhubungan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perhubungan yakni Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Perhubungan							Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Perhubungan
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Perhubungan
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perhubungan
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	94,05	-	-	Dinas Perhubungan
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	94,81	-	-	Dinas Perhubungan
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perhubungan
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perhubungan
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perhubungan
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan							Dinas Perhubungan
	1 Jumlah Trayek Angkutan Umum	Trayek	50,00	-	-	-	Dinas Perhubungan
	2 Jumlah Armada Angkutan Umum	Unit	1.378,00	-	-	-	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan							Dinas Perhubungan
	1 Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	Persen	4,00	50,00	-	-	Dinas Perhubungan
	2 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrail) Pada Jalan Kabupaten	Jumlah	451,00	120,00	-	-	Dinas Perhubungan
	3 Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persen	2,00	100,00	-	-	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Yang Direhabilitasi dan Terpelihara						
	4 Persentase Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Sungai dan penyebrangan	Persen	-	30,00	-	-	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor							Dinas Perhubungan
	1 Persentase Angkutan Umum Yang Melakukan Uji KIR	Persen	105,00	165,92	-	-	Dinas Perhubungan
	2 Jumlah Dokumen Lalu Lintas	Jumlah	1,00	100,00	-	-	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas							Dinas Perhubungan
	1 Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah	Unit	243,00	-	-	-	Dinas Perhubungan
	2 Panjang Marka Jalan	Meter	428,45	-	-	-	Dinas Perhubungan
	3 Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu Lintas	Hari/Tahun	28,00	-	-	-	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan							Dinas Perhubungan
	1 Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	-	74,00	-	-	Dinas Perhubungan
	2 Jumlah Dokumen Lalu lintas	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	Jumlah	-	100,00	-	-	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dikembangkan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	Jumlah	-	100,00	-	-	Dinas Perhubungan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Perhubungan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	BB	Dinas Perhubungan
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	85,89	81,57	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase Prasarana Perlengkapan lalulintas dan Angkutan jalan	Persen	-	-	95,32	87,79	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayanan	Prosentase konektivitas dan perlengkapan Angkutan Sungai dan penyebrangan	Persen	-	-	79,89	84,57	Dinas Perhubungan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

10. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Komunikasi dan Informatika							Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	52,00	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	87,60	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	85,50	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	89,70	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	99,20	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	0,00	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentasikan	Persen	95,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	90,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Persentase Layanan Informasi Publik	Persen	90,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4 Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah	Persen	95,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Aplikasi Telematika	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika	Kegiatan	8,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Teknologi Informasi Pos dan Telekomunikasi	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi	Kegiatan	8,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	-	88,00	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	-	93,10	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	Persen	-	97,20	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Persen	-	81,10	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	-	93,20	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Teknologi Informatika							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	Persen	-	90,00	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Persen	-	70,00	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	Persen	-	70,00	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Persen	-	90,00	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Aplikasi Informatika							Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	Persen	-	99,70	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	Persen	-	0,00	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	Persen	-	99,70	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	BB	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	90,00	93,53	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	-	-	88,30	99,72	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	-	-	99,00	97,81	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	Persen	-	-	92,40	98,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Persen	-	-	98,90	82,30	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	-	-	98,40	98,50	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	Persen	-	-	98,30	97,58	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Persen	-	-	94,90	95,50	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	Persen	-	-	91,00	95,60	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Persen	-	-	97,60	98,40	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	Persen	-	-	0,00	98,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	Persen	-	-	0,00	99,70	Dinas Komunikasi dan Informatika
	7 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	Persen	-	-	85,50	35,36	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yakni Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	Unit	8.454,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	Unit	20,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses	Unit	15,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kredit Perbankan dan Non Perbankan						Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	Unit	15,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	Unit	105,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat	Persen	5,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi	Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan	Persen	25,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Daya Saing Koperasi							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh Koperasi	Even	-	0,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	Unit	-	8,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah Koperasi Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	Unit	-	60,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	Unit	-	50,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Laju Peningkatan Koperasi Sehat	Persen	-	5,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Laju Peningkatan Koperasi Aktif	Persen	-	10,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Laju Peningkatan Koperasi Bersertifikat	Persen	-	15,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Laju Peningkatan Koperasi Melakukan Audit Melalui Akuntan Publik	Persen	-	5,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	5 Laju Peningkatan Koperasi Melaksanakan RAT	Persen	-	7,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Daya Saing UMKM							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM	Even	-	0,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	Unit	-	100,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	Unit	-	24,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	Unit	-	0,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Kewirausahaan							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Persentase UMKM Yang Terbina	Persen	-	10,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	Unit	-	30,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	Unit	-	30,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	90,57	70,87	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	Unit	-	-	0,00	150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	Unit	-	-	80,00	150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Unit	-	-	150,00	150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Lainnya	Unit	-	-	0,00	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	UMKM	-	-	60,00	60,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	UMKM	-	-	30,00	40,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	UMKM	-	-	100,00	150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Persentase UMKM Yang Terbina	UMKM	-	-	60,00	60,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	5 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	UMKM	-	-	30,00	40,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan UMKM							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	UMKM	-	-	30,00	50,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	UMKM	-	-	25,00	10,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	UMKM	-	-	20,00	20,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM	UMKM	-	-	2,00	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	5 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	UMKM	-	-	0,00	15,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	6 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	UMKM	-	-	30,00	20,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	7 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	UMKM	-	-	100,00	100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Perdagangan dan Perindustrian

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

12. Penanaman Modal

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal yakni Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penanaman Modal							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	93,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	90,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	85,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	85,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	90,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah	Set	1,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi	Set	1,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	3,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	90,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Terpadu Satu Pintu
	2 Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat	Jumlah	1,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	10,16	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan	Persen	95,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4 Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5 Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Jumlah Buku Promosi Investasi	Buku	-	1,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi	Event	-	1,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Perbaikan Iklim Investasi							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dimonitoring Secara Berkala						Terpadu Satu Pintu
	2 Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3 Persentase Pengaduan Perizinan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4 Peningkatan Nilai IKM	Persen	-	85,59	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu	Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan	Persen	-	80,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi	Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	A	A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	93,00	95,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Investor	-	-	305,00	176,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Event	-	-	5,00	7,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	%	-	-	100,00	95,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	-	-	87,78	92,38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	%	-	-	89,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	%	-	-	99,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga yakni Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepemudaan dan Olahraga							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga,

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	93,25	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	93,25	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	93,25	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	93,25	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	93,25	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	93,25	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	10,56	29,83	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	19,61	20,00	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	4,73	11,00	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pembinaan Kepemudaan	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Persen	20,00	20,00	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pembangunan dan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan	Persen	-	18,88	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program pembangunan dan / Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Persen Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Persen	20,00	19,59	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan Wirausaha Muda	Persen	20,00	40,00	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pembangunan dan/Peningkatan Sarana dan Prasaran Olahraga	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	64,29	54,00	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	B	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	87,01	82,43	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	-	-	39,00	84,86	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Persen	-	-	19,50	19,97	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	3 Cakupan Wirausaha Muda	Persen	-	-	48,75	59,90	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Cakupan Pembinaan Olahraga;	Persen	-	-	19,46	22,26	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda;	Persen	-	-	10,92	12,30	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	-	-	63,82	60,83	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepramukaan	Persen	-	-	0,00	6,83	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

14. Statistik

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Statistik yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Statistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.50

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Statistik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Statistik							Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Persandian dan Statistik	Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang Disusun	Dokumen	5,00	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	100,00	97,70	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	Dokumen	100,00	96,00	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	Persen	-	-	96,80	99,56	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	Persen	-	-	75,00	82,50	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

15. Persandian

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Persandian yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.51

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persandian							Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Persandian Daerah							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	Persen	100,00	99,86	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	Persen	100,00	99,86	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	Persen	100,00	99,50	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	Persen	-	-	96,70	99,70	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	Persen	-	-	0,00	99,70	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	Persen	-	-	96,70	99,80	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

16. Kebudayaan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kebudayaan yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.52

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kebudayaan							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina	Kelompok	3,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pelestarian Budaya							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	88,89	88,53	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Persen	50,00	49,80	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Persentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina	Persen	50,00	49,70	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	50,00	49,70	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	3 Persentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Persen	36,00	35,78	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Presentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina	Persen	-	-	49,76	54,58	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Presentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	-	-	49,76	49,62	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	3 Presentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Persen	-	-	35,83	35,73	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina	kelompok	-	-	3,00	2,94	Dinas Kepemudaan, Olahraga,

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	persen	-	-	33,21	49,92	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	-	-	99,60	99,86	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Persen	-	-	49,80	59,93	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Persen	-	-	19,85	19,87	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

17. Perpustakaan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perpustakaan yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.53

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perpustakaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Perpustakaan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	244.820,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun	Orang	15.239,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Titik	156,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4 Jumlah Perpustakaan Binaan	Unit	417,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	5 Jumlah Buku Perpustakaan	Buah	4.134,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pengembangan dan Pelestarian Perpustakaan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	5,00	19,45	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Persentase Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta	Persen	100,00	0,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum dan Sekolah	Persen	26,00	8,30	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca di Ruang Publik	Persen	20,00	41,17	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	5 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Persen	0,06	0,11	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan Layanan Perpustakaan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Laju Pengunjung Perpustakaan	Persen	4,90	8,32	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Laju Anggota Perpustakaan	Persen	22,90	2,63	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	5,00	24,58	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Persen	5,00	16,89	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	5 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	49,00	64,43	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	0,00	0,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	7 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	Persen	19,80	57,61	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	8 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Persen	4,00	30,59	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	A	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	100,00	93,53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	-	-	7,90	14,13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah	Persen	-	-	-	29,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	-	-	0,00	4,78	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Persen	-	-	0,15	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	5 Laju Pengunjung Perpustakaan	Persen	-	-	8,80	7,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	6 Laju Anggota Perpustakaan	Persen	-	-	33,25	8,73	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	7 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	-	-	7,90	5,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	8 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Persen	-	-	3,98	2,90	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	9 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	-	-	12,40	40,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	10 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	-	-	49,80	0,10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	11 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	Persen	-	-	10,14	17,68	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	12 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Persen	-	-	5,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta	Persen	-	-	100,00	99,90	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

18. Kearsipan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kearsipan yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kearsipan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kearsipan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	42,00	40,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	63,00	63,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75,00	73,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	80,00	100,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	80,00	100,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Perangkat Daerah	43,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Persentase Akuisisi Arsip Daerah	Persen	96,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Depo Arsip Yang Mendapatkan Fumigasi dan Anti Rayap	Unit	4,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penataan Kearsipan Daerah	Kegiatan	2,00	-	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Kearsipan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	100,00	0,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	100,00	20,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	1,75	2,60	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	22,00	0,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	5 Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan	Persen	22,90	6,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	26,10	15,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Persentase Arsip Aktif, In Aktif dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar:						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- Arsip Aktif	Persen	20,00	20,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- Arsip In Aktif	Persen	20,00	37,80	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- Arsip Vital	Persen	20,00	6,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3 Persentase Penyusutan Arsip	Persen	20,00	6,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	70,00	0,00	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	5 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	19,99	19,99	-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pengelolaan Arsip							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	-	-	50,00	100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	-	-	33,04	100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	-	-	1,75	1,75	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4 Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan	Persen	-	-	2,67	9,35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	1 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	-	-	28,57	39,10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	-	-	27,00	27,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	3 Persentase Arsip Aktif, In Aktif Dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar:						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- Arsip Aktif	Persen	-	-	20,00	20,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- Arsip Inaktif	Persen	-	-	5,28	20,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- Arsip Vital	Persen	-	-	20,00	7,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4 Persentase Penyusutan Arsip	Persen	-	-	9,50	20,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	5 Indek Kepuasan Masyarakat (IkM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	-	-	73,00	75,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	6 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	-	-	19,99	19,99	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.3 Fokus Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Perternakan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yakni Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kelautan dan Perikanan							Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prasarana Kantor						
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan	Ekor	1.000,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	75.000,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu	Kegiatan	1,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	118,00	121,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	582.550.000,00	741.649.000,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Produksi Ikan Konsumsi	Ton	93.286,70	108.661,04	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Produksi Ikan Hias	Ekor	95.880,00	330.000,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Produksi Benih UPTD BBI	Ekor	6.323.494,00	6.650.000,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	6 Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan	Orang	11.668,00	9.190,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	7 Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi	Hektar	8,70	4,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan (Ton)	Ton	1.183,59	1.272,50	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	350.000,00	870.000,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap	Kelompok	52,00	48,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Jumlah Kawasan Perairan Umum Yang Dikelola	Jenis	3,00	3,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang Dikelola	Kecamatan	17,00	17,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Jumlah KJA	Petak	45.073,00	42.562,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Produksi Ikan KJA	Ton	91.529,63	106.833,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	Unit	100,00	93,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Produksi Olahan Produk	Ton	1.037,15	763,72	-	-	Dinas Perikanan dan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perikanan (ton)						Peternakan
	3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (Kelompok)	kelompok	19,00	14,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (Unit)	Unit	1.170,00	763,72	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	BB	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	100,00	84,79	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan	Ton	-	-	336,80	1.470,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking)	Ekor	-	-	954.700,00	100.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina	Kelompok	-	-	13,00	50,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	-	-	78.590,58	108.715,52	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	-	-	554.013.000,00	1.111.677.788,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	-	-	6.630.833,00	7.056.667,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Produksi Ikan Hias	Ekor	-	-	239.090,00	520.100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Kelompok	-	-	30,00	190,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya	Kecamatan	-	-	5,00	17,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/t h	-	-	35,81	36,20	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	-	-	250,00	320,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	-	-	11,00	14,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	-	-	111,00	131,00	Dinas Perikanan dan Peternakan

Sumber: Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2. Pariwisata

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pariwisata yakni Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.56

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pariwisata di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pariwisata							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan	Event	8,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah ODTW Yang Ditata	ODTW	4,00	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kepariwisataan							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan	Persen	-	10,81	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ tTersertifikasi	Persen	-	2,16	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkatkan/ Tersertifikasi	Persen	-	2,16	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Promosi Wisata Daerah	Persentase Event Promosi Yang Diikuti/Diselenggarakan	Persen	-	29,67	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	-	39,63	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program pembangunan dan / Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Persen	-	19,80	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	1 Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	-	-	13,24	15,49	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Persen	-	-	4,41	4,42	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkatkan/ Tersertifikasi	Persen	-	-	4,41	4,42	Dinas Kepemudaan, Olahraga,

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan	Persen	-	-	39,52	39,53	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Persen	-	-	39,74	39,83	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	-	-	39,42	39,69	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

3. Pertanian

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dan Perternakan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pertanian yakni Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.57

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pertanian							Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan	Orang	645,00	650,00	-	-	Dinas Perikanan dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemasaran Hasil Peternakan						Peternakan
	2 jumlah Ternak Yang Diperjual Belikan di Pasar Hewan	Ekor	67.908,00	60.917,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Keikutsertaan Dalam Pameran/Expo Produk Hasil Peternakan	Kegiatan	3,00	0,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Produksi Peternakan							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Lokasi)	Lokasi	5,00	6,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Budidaya Ternak Ruminansia Kecil	lokasi	5,00	14,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Budidaya Ternak Unggas	Lokasi	25,00	9,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Produksi Hasil Ternak	Persen	7,24	0,97	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	5 Jumlah Akseptor IB (Ekor)	Ekor	4.891,00	2.224,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	6 Jumlah Teknologi Yang Diterapkan	Jenis	3,00	1,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	7 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (Ekor)	Ekor	1.363,00	1.207,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	8 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (Lokasi)	Lokasi	2,00	4,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Jumlah Akseptor IB	Ekor	4.891,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Jumlah Paket Teknologi Yang Diterapkan	Paket	3,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak							Dinas Perikanan dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Peternakan
	1 Persentase Populasi Ternak Yang Divaksin	Persen	80,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Presentase Populasi Ternak Yang Diobati	Persen	20,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Sarana Kesehatan Hewan	Kegiatan	1,00	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Kasus Penyakit Hewan Menular	PHMS	-	0,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Terjaminnya Keamanan PAH/HPAH	kecamatan	-	17,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Jumlah Ternak dan Hewan Kesayangan Yang Ditangani	ekor	-	2.073,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Jumlah Ternak Ruminansia Yang Diperiksa kesehatanya Sebelum Dipotong	ekor	-	6.505,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Kesejahteraan Peternakan							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	kelompok	-	112,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Jumlah Kelompok Peternakan Yang Mengikuti Lomba (Kelompok)	kelompok	-	0,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Jumlah Peternak Yang Mengikuti Magang/Studi Banding/Kursus/Pelatihan (Orang)	Orang	-	50,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (Ekor)	Ekor	640,00	1.200,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (Ekor)	Ekor	120.000,00	65.000,00	-	-	Dinas Perikanan dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Peternakan
	3 Penyediaan Daging, Telur dan Susu Perbaikan Gizi Masyarakat :						Dinas Perikanan dan Peternakan
	Daging (Ton)	Ton	-	5,48	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Telur (Ton)	Ton	5,52	16,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Susu (Liter)	Liter	1.104,00	1.325,00	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Produksi Hasil Ternak	Persen	-	-	0,50	1,60	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Jumlah Akseptor IB	Ekor	-	-	2.867,00	2.733,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam	Ekor	-	-	1.569,00	1.941,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Budidaya Ternak Ruminansia Unggul	Lokasi	-	-	15,00	4,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	5 Budidaya Ternak Unggas Unggul	Lokasi	-	-	14,00	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	6 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)	Lokasi	-	-	1,00	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	7 Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina	Orang	-	-	30,00	30,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	8 Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina:	Produsen	-	-	1,00	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis	Unit	-	-	1,00	1,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan							Dinas Perikanan dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							Peternakan
	1 Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	-	-	70,25	71,20	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	-	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Kecamatan	-	-	17,00	17,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	4 Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	-	-	10.030,00	102.068,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	5 Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Kecamatan	-	-	17,00	17,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	6 Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) :						Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Daging	Ton	-	-	2,00	2,50	Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Telur	Ton	-	-	13,00	5,75	Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Susu	Liter	-	-	22,62	0,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Penyuluhan Pertanian							Dinas Perikanan dan Peternakan
	1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	Kelompok	-	-	101,00	123,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2 Jumlah Peternak Yang Terlatih	Orang	-	-	100,00	65,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3 Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi	Penghargaan	-	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Pertanian							Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pangan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	100,00	70,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Persentase Kelompok Tani Yang Mendapat Bantuan	Persen	30,92	20,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	2,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Produksi Padi	Ton	251.627,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Produksi Palawija	Ton	30.484,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	3 Produksi Teh	Ton	4.955,00	-	-	-	Dinas Pangan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan Pertanian
	4 Produksi Cengkeh	Ton	483,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	5 Produksi Sayuran	Ton	182.632,80	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	6 Produksi Buah-Buahan	Ton	145.149,20	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Oleh Penyuluh	Kegiatan	30,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Kelompok	450,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengembangan Agribisnis							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Penanaman Manggis	Pohon	4.500,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Penanaman /Rehabilitasi The	Ha	4,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	3 Penanaman Cengkeh	Ha	15,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	4 Penanaman Ubi Kayu	Ha	1.087,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	5 Penanaman Pala	Ha	350,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	6 Penerapan Pertanian Organik	Ha	60,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Produktivitas Padi Sawah	Ku/Ha	64,88	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Produktivitas Padi Ladang	Ton	32,57	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	3 Produktivitas Jagung	Ku/Ha	56,20	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	4 Produktivitas Ubi Kayu	Ku/Ha	193,00	-	-	-	Dinas Pangan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan Pertanian
	5 Produktivitas Cengkeh	Kg/Ha	456,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	6 Produktivitas Teh	Kg/Ha	1.507,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	7 Produktivitas Pala	Kg/Ha	546,00	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Laju Produksi Padi	Persen	-	1,30	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Laju Produksi Kacangkacangan	Persen	-	1,90	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	3 Laju Produksi Umbi-umbian	Persen	-	0,95	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	4 Persentase Kehilangan Hasil	Persen	-	15,30	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persen	-	25,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengembangan Perbenihan Pertanian	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	-	93,33	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	-	2,20	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	-	0,80	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan dan Holtikultura	Laju Produksi Perkebunan dan Holtikultura	Persen	-	0,09	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persen	-	-	25,00	25,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	-	-	75,00	95,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	3 Produksi Padi	Ton	-	-	270.538,00	260.425,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	4 Produksi Jagung	Ton	-	-	3.017,00	1.238,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	5 Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu	Hektar	-	-	50,00	50,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	6 Gerakan Pencanaan Tanam dan Panen Raya	kegiatan	-	-	0,00	2,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	7 Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Hektar	-	-	1.018,00	315,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	8 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	Unit	-	-	19,00	24,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	9 Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis	Hektar	-	-	10,00	15,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	10 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	Peserta	-	-	15,00	30,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	11 Peningkatan Luas Tanaman Durian	Hektar	-	-	20,00	9,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	12 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Hektar	-	-	10,00	5,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	13 Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	-	-	80,00	75,00	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	-	-	100,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	-	-	3,00	3,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	-	-	3,00	3,00	Dinas Pangan dan Pertanian

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Perizinan Usaha Pertanian	Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Persen	-	-	0,11	0,23	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian							Dinas Pangan dan Pertanian
	1 Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan	Persen	-	-	100,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih	Persen	-	-	100,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

4. Perdagangan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perdagangan yakni Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.58

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perdagangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Perdagangan							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	75,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	75,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	75,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Konsumen Yang Dibina	Orang	780,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Persentase Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen (BPSK)	Persen	69,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah Tera dan Tera Ulang Alat UTP	UTTP/Tahun	780,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Jumlah Pengukuran BDKT	BDKT/Tahun	40,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	5 Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan Barang / Jasa	Pelaku Usaha	300,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	6 Jumlah Komoditi Yang Diawasi Dalam Pengawasan Barang / Jasa	Komoditi	60,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	7 Jumlah Komoditi Yang Diuji (Lab) Pertahun	Komoditi	25,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern	Regulasi	1,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor.	Even	-	0,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Pelayanan Ekspor	Dokumen SKA	-	12.000,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Penataan Infrastruktur Perdagangan dan Usaha Serta Lembaga Perdagangan							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern	Pasar	9,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum'at	Pasar	1,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Terbangunnya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative	Unit	6,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional	Unit	6,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Pembinaan	Orang	-	200,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Fasilitas Pengaduan Konsumen	Kasus	-	150,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah Pelayanan Kemetrolgian	Unit	-	1.500,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Jumlah Pengawasan Alat UTTP dan BDKT	Unit	-	100,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	5 Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Kegiatan	-	12,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi	Pasar	-	1,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Persentase Capaian Target Retribusi Pasar	Persen	-	77,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah Pengunjung Pasar Tradisional	Orang	-	219,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kawasan	-	2,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Terfasilitasnya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dokumen	-	-	20,00	700,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di	Unit	-	-	0,00	3,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kabupaten Purwakarta						dan Perindustrian
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor	Pelaku Usaha	-	-	50,00	150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta	Pelaku Usaha	-	-	0,00	80,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen	Pelaku Usaha	-	-	80,00	80,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Even	-	-	0,00	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

5. Perindustrian

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perindustrian yakni Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.59

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perindustrian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Perindustrian							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI	Unit	100,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Desain Kemasan Produksi	Unit	120,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT	Unit	180,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk	Unit	3,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	2,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Bahan Baku Yang Standard Hasil Litbang	Jenis	10,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Percontohan Mesin Pengolahan Bahan Baku Keramik (TTG)	Unit	2,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah Percontohan Tungku Pembakaran Keramik Dengan Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan	Unit	3,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Penataan Struktur Industri							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Lahan Kawasan IKM	Ha	1,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri yang Up To Date	Jenis	10,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik	Paket	1,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter)	Desain	100,00	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah P2WKSS Terbina	Desa	-	1,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Kerajinan Daerah	Kegiatan	-	2,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah GKM Industri Yang Terbina	Unit	-	1,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Jumlah lokasi Sarana/Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	-	1,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	5 Jumlah Desain Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM)	Desain	-	5,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	6 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar/Spesifik	Desain	-	20,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	7 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri	Buku	-	0,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	8 Jumlah Pengrajin Sentra Industri Keramik Yang Terbina	Pengrajin	-	30,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	9 Jumlah Pengunjung ke Sentra Industri Keramik dan Gerabah	Orang	-	1,645,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Industri Hulu/Lembaga Keuangan	IKM	-	1,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Pemanfaatan Potensi Sumberdaya IKM	IKM	-	40,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah Bahan Baku Yang Standar Produk IKM	Unit	-	1,00	-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	Orang	-	-	240,00	100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	2 Jumlah Desiminsasi	Orang	-	-	0,00	160,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	3 Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan	Buah	-	-	9,00	25,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	4 Jumlah Perda	Buah	-	-	0,00	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	1 Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah	Unit Usaha	-	-	20,00	30,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	Unit Usaha	-	-	60,00	80,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pengembangan Diverifikasi Produk IKM	Buah	-	-	4,00	7,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

6. Transmigrasi

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Transmigrasi yakni Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.60

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Transmigrasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Transmigrasi							Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Transmigrasi Regional	Persentase Transmigran Yang Diberangkatkan	Persen	100,00	100,00	-	-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
							Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	-	-	0,00	100,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	-	-	0,00	100,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina	Persen	-	-	0,00	100,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenan

2.3.4 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pendukung yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pendukung Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi pendukung Sekretariat Daerah yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.61

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sekretariat Daerah							Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Sekretariat Daerah
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	85,00	80,00	-	-	Sekretariat Daerah
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	85,00	90,00	-	-	Sekretariat Daerah
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85,00	90,00	-	-	Sekretariat Daerah
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	95,00	0,00	-	-	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							Sekretariat Daerah
	1 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:						Sekretariat Daerah
	- Perda	Persen	88,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
	- Perbup	Persen	74,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
	- Kepbup	Persen	85,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
	2 Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	Persen	5,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
	3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	4,25	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							Sekretariat Daerah
	1 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:						Sekretariat Daerah
	- Perda	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	- Perbup	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	- Kepbup	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	2 Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	-	0,00	-	-	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rangkaian Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH	Bulan	12,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan							Sekretariat Daerah
	1 Paket Pelelangan Pertahun	Paket	250,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
	2 Dokumen Juknis Pengelolaan APBD	Dokumen	1,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
	3 Tambahan Aparat Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Orang	25,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	-	81,34	-	-	Sekretariat Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Capaian Penataan OPD Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kajian/Analisis Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	5,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	1,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase OPD Yang Terevaluasi Kinerjanya	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi WilayahWilayah Perbatasan	Kegiatan	2,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Fasilitasi Kemasyarakatan dan Keagamaan	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi	Persen	95,00	98,15	-	-	Sekretariat Daerah
Program Penataan Administrasi Pembangunan Daerah							Sekretariat Daerah
	1 Persentase Laporan Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	90,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	2 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi	Persen	25,00	50,00	-	-	Sekretariat Daerah
Program Fasilitasi Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Kegiatan Yang Menunjang Kelancaran Proses Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	10,00	-	-	-	Sekretariat Daerah
Program Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa							Sekretariat Daerah
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Persen	75,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	2 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	3 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Persen	61,54	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Biroktasi	Poin	45,00	60,01	-	-	Sekretariat Daerah
Program Penatausahaan Keuangan							Sekretariat Daerah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Peresentase Penyusunan Perencanaan Anggaran Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	2 Persentase Data Keuangan Yang Diverifikasi	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	3 Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah							Sekretariat Daerah
	1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	3,50	3,36	-	-	Sekretariat Daerah
	2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	3 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
	4 Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan	Persen	100,00	100,00	-	-	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Sekretariat Daerah
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	A	Sekretariat Daerah
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	100,00	93,71	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							Sekretariat Daerah
	1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	-	-	3,30	3,50	Sekretariat Daerah
	2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	3 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	4 Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	5 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:						Sekretariat Daerah
	- Perda	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	- Perbup	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	- Kepbup	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	7 Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	8 Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	-	-	55,00	62,00	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan							Sekretariat Daerah
	1 Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	2 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi	Persen	-	-	50,00	100,00	Sekretariat Daerah
	4 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	5 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	6 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Persen	-	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2. Sekretariat DPRD

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pendukung yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pendukung Sekretariat DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi pendukung Sekretariat DPRD yakni Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.62

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sekretariat DPRD							Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat DPRD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat DPRD
Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat DPRD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda Menjadi Perda	Kegiatan	10,00	-	-	-	Sekretariat DPRD
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Sekretariat DPRD
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	60,00	-	-	Sekretariat DPRD
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	90,00	-	-	Sekretariat DPRD
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	60,00	-	-	Sekretariat DPRD
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	90,00	-	-	Sekretariat DPRD
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	90,00	-	-	Sekretariat DPRD
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat DPRD
Program Fasilitasi Rapat DPRD							Sekretariat DPRD
	1 Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat DPRD
	2 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat DPRD
	3 Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat DPRD
Program Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan							Sekretariat DPRD
	1 Persentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan	Persen	-	90,00	-	-	Sekretariat DPRD

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	sesuai peraturan perundang-undangan						
	2 Persentase data keuangan yang diverifikasi	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat DPRD
	3 Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Hubungan Masyarakat dan Protokol							Sekretariat DPRD
	1 Persentase fasilitas hubungan antar lembaga	Persen	-	86,62	-	-	Sekretariat DPRD
	2 Persentase publikasi kegiatan DPRD	Persen	-	90,00	-	-	Sekretariat DPRD
	3 Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD	Persen	-	100,00	-	-	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Sekretariat DPRD
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	D	B	Sekretariat DPRD
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	61,78	64,74	Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD							Sekretariat DPRD
	1 Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen	-	-	75,00	100,00	Sekretariat DPRD
	2 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	-	-	75,00	100,00	Sekretariat DPRD
	3 Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	-	-	75,00	100,00	Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.5 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Perencanaan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Perencanaan yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perencanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.63

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perencanaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Perencanaan							Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pengembangan Daerah
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	80,00	82,50	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	82,00	82,50	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85,00	82,50	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	82,50	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	82,50	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	82,50	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	Persen	87,00	101,96	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen	6,00	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80,00	104,31	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persen	80,00	112,61	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Persen	80,00	103,87	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	80,00	98,02	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	AA	AA	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	89,06	81,58	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	%	-	-	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2 Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	%	-	-	90,85	95,60	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	3 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	%	-	-	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	-	-	90,75	89,42	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	-	-	85,79	84,47	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	-	-	87,47	87,80	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2. Keuangan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Keuangan yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.64

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keuangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Keuangan							Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	55,56	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	91,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	97,15	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	100,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Aset Daerah							Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Persentase Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersedia	Persen	50,00	66,66	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Persentase Inventarisasi Asset Daerah	Persen	60,24	61,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	3 Persentase Pengelola Aset OPD Yang Dibina	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Anggaran Daerah							Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Persen	-	100,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	-	100,00	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	3 Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	-	92,50	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	A	A	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah							Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan	Persen	-	-	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	-	-	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	3 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Persen	-	-	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	-	-	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5 Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	-	-	90,36	86,67	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1 Persentase Pengelola Asset OPD Yang Dibina	Persen	-	-	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	2 Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti Rekonsiliasi BMD	Persen	-	-	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Keuangan							Badan Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75,00	-	-	-	Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Badan Pendapatan Daerah
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Badan Pendapatan Daerah
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	Persen	-	100,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Perkantoran						
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	Persen	-	100,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,00	-	-	-	Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB							Badan Pendapatan Daerah
	1 Persentase Peningkatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	-	36,25	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	2 Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	-	36,26	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	3 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	-	36,27	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	4 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	-	36,28	-	-	Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB							Badan Pendapatan Daerah
	1 Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB	Persen	-	1,19	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	2 Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang Terekam	Persen	-	0,52	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	3 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2	Persen	-	2,50	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	4 Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB	Persen	-	2,50	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	5 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB	Persen	-	90,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah
Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah							Badan Pendapatan Daerah
	1 Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen	-	115,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	2 Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen	-	15,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	3 Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah kadaluwarsa	Persen	-	35,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/Pendapatan Lainnya	Persen	-	95,00	-	-	Badan Pendapatan Daerah
	5 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	-	3,50	-	-	Badan Pendapatan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Badan Pendapatan Daerah
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	A	A	Badan Pendapatan Daerah
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	100,00	100,00	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							Badan Pendapatan Daerah
	1 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);	%	-	-	63,40	48,08	Badan Pendapatan Daerah
	2 Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-	-	5,02	2,05	Badan Pendapatan Daerah

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

3. Kepegawaian

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Kepegawaian yakni Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.65

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kepegawaian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepegawaian							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1 Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	2,86	0,64	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	50,00	50,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	-	100,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penyelenggaraan Manajemen Manajemen Kepegawaian Negara							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	-	2,58	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan	Persen	66,59	99,64	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	3,62	9,64	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	20,34	82,73	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	100,00	94,07	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	6 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	-	0,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100,00	0,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Persentase ASN Berprestasi/Teladan/Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	1,26	1,36	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	4,30	5,10	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	0,00	62,25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1 Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Persen	-	-	0,43	5,88	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	-	-	0,00	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	-	-	100,00	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4 Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	-	-	1,50	4,85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	-	-	6,01	4,65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	6 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	-	-	5,58	0,27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Sumber Daya Manusia
	7 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persen	-	-	95,96	97,07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	8 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	-	-	72,00	91,93	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	9 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	-	-	82,73	84,54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	10 Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	-	-	92,97	98,48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	11 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	-	-	0,00	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan yakni Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.66

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pendidikan dan Pelatihan di
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendidikan dan Pelatihan							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	-	0,00	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	-	1,88	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	-	4,25	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	-	-	100,00	97,46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	-	-	0,20	0,99	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	-	-	4,98	12,15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

5. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.67

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penelitian dan Pengembangan							Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan IPTEK							Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	-	27,45	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah	Persen	-	27,45	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengembangan Data dan Pelaporan Informasi Pembangunan	Tingkat ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persen	-	85,87	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	%	-	-	90,68	74,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah	%	-	-	84,25	80,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenan

6. Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Pengelolaan Perbatasan Daerah yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.68

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pengelolaan Perbatasan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengelolaan Perbatasan							Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan	Persen	-	-	100	100,00	Sekretariat Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenan

2.3.6 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan

1. Inspektorat

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi pengawasan Inspektorat yakni Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.69

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pengawasan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Inspektorat Daerah							Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Inspektorat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	Kegiatan	43,00	-	-	-	Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Diklat Yang Telah Dilaksanakan Oleh Aparatur Pengawas	Kegiatan	4,00	-	-	-	Inspektorat
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Inspektorat
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	80,00	100,00	-	-	Inspektorat
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Inspektorat
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Inspektorat
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	Persen	100,00	100,00	-	-	Inspektorat

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Perkantoran						
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Inspektorat
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	-	-	Inspektorat
Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan							Inspektorat
	1 Opini Penilaian SAKIP Kabupaten	Opini	B	BB	-	-	Inspektorat
	2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	WTP	WTP	-	-	Inspektorat
	3 Persentase Penurunan Temuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Terhadap OPD	Persen	100,00	100,00	-	-	Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Inspektorat
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	A	Inspektorat
	2 Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	-	-	94,71	65,09	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan							Inspektorat
	1 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	OPD	-	-	24,00	47,00	Inspektorat
	2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	-	-	WTP	WTP	Inspektorat
	3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	Persen	-	-	79,00	50,07	Inspektorat
	4 Capaian SAKIP Kabupaten	Opini	-	-	B	BB	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi							Inspektorat
	1 Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	2,00	2,00	Inspektorat
	2. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	-	-	1,00	0,00	Inspektorat

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persen	-	-	37,50	100,00	Inspektorat

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenan

2.3.7 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan

1. Kecamatan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi kewilayahan Kecamatan yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.70

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kecamatan							Kecamatan Jatiluhur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Jatiluhur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Jatiluhur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Jatiluhur
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Jatiluhur
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Jatiluhur
	1 Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Kecamatan Jatiluhur
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Jatiluhur
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Jatiluhur
	4 Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Jatiluhur
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Jatiluhur

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	66,54	-	-	Kecamatan Jatiluhur
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Jatiluhur
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	C	CC	Kecamatan Jatiluhur
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	97,30	86,46	Kecamatan Jatiluhur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Jatiluhur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	100,00	80,00	Kecamatan Jatiluhur
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	41,81	0,00	Kecamatan Jatiluhur
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	80,00	Kecamatan Jatiluhur
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	30,05	51,00	Kecamatan Jatiluhur
Kecamatan							Kecamatan Sukasari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Sukasari
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Sukasari
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Sukasari
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Sukasari
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Sukasari
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	95,00	-	-	Kecamatan Sukasari
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Sukasari
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	80,00	-	-	Kecamatan Sukasari
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	95,00	-	-	Kecamatan Sukasari

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	82,00	-	-	Kecamatan Sukasari
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	54,39	-	-	Kecamatan Sukasari
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Sukasari
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	D	C	Kecamatan Sukasari
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	65,00	80,00	Kecamatan Sukasari
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Sukasari
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	10,00	100,00	Kecamatan Sukasari
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	80,00	Kecamatan Sukasari
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	80,00	Kecamatan Sukasari
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	97,59	80,00	Kecamatan Sukasari
Kecamatan							Kecamatan Maniis
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Maniis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Maniis
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Maniis
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Maniis
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Maniis
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Kecamatan Maniis
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Maniis
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Maniis

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Maniis
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Maniis
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	68,81	-	-	Kecamatan Maniis
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Maniis
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	CC	B	Kecamatan Maniis
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	97,00	90,57	Kecamatan Maniis
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Maniis
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Maniis
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Maniis
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	33,33	100,00	Kecamatan Maniis
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	39,74	100,00	Kecamatan Maniis
Kecamatan							Kecamatan Tegalwaru
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Tegalwaru
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Tegalwaru
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Tegalwaru
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Tegalwaru
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Tegalwaru
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Kecamatan Tegalwaru
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Tegalwaru

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Tegalwaru
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Tegalwaru
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Tegalwaru
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	35,06	-	-	Kecamatan Tegalwaru
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Tegalwaru
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	CC	B	Kecamatan Tegalwaru
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	29,00	100,00	Kecamatan Tegalwaru
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Tegalwaru
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	100,00	Kecamatan Tegalwaru
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	100,00	Kecamatan Tegalwaru
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	35,00	75,00	Kecamatan Tegalwaru
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	100,00	Kecamatan Tegalwaru
Kecamatan							Kecamatan Plered
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Plered
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Plered
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Plered
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Plered
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Plered
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Kecamatan Plered

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Plered
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Plered
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Plered
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Plered
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	54,41	-	-	Kecamatan Plered
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Plered
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	CC	CC	Kecamatan Plered
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	0,00	89,55	Kecamatan Plered
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	0,00	Baik	Kecamatan Plered
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	76,00	Kecamatan Plered
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	86,00	Kecamatan Plered
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	100,00	Kecamatan Plered
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	100,00	Kecamatan Plered
Kecamatan							Kecamatan Sukatani
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Sukatani
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Sukatani
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Sukatani
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Sukatani
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Sukatani

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Kecamatan Sukatani
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Sukatani
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Sukatani
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Sukatani
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Sukatani
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Sukatani
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Sukatani
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	CC	B	Kecamatan Sukatani
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	90,75	80,00	Kecamatan Sukatani
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Sukatani
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Sukatani
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Sukatani
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		%	-	-	14,30	80,00	Kecamatan Sukatani
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	24,00	51,00	Kecamatan Sukatani
Kecamatan							Kecamatan Darangdan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Darangdan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Darangdan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Darangdan
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Darangdan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Darangdan
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Kecamatan Darangdan
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Darangdan
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Darangdan
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Darangdan
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Darangdan
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	-	82,85	-	-	Kecamatan Darangdan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Darangdan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	CC	B	Kecamatan Darangdan
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	92,00	100,00	Kecamatan Darangdan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Darangdan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Darangdan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Darangdan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	90,32	100,00	Kecamatan Darangdan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	95,72	100,00	Kecamatan Darangdan
Kecamatan							Kecamatan Bojong
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Bojong
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Bojong
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Bojong

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Bojong
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Bojong
	1 Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	90,00	-	-	Kecamatan Bojong
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Bojong
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Bojong
	4 Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	87,26	-	-	Kecamatan Bojong
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100,00	97,27	-	-	Kecamatan Bojong
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	84,44	-	-	Kecamatan Bojong
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Bojong
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	B	Kecamatan Bojong
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	93,10	80,00	Kecamatan Bojong
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Bojong
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	50,00	Kecamatan Bojong
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	50,00	Kecamatan Bojong
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	72,71	0,00	Kecamatan Bojong
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	100,00	100,00	Kecamatan Bojong
Kecamatan							Kecamatan Wanayasa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Wanayasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Wanayasa

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Wanayasa
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Wanayasa
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Wanayasa
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Kecamatan Wanayasa
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Wanayasa
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Wanayasa
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Wanayasa
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	75,58	-	-	Kecamatan Wanayasa
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	70,04	-	-	Kecamatan Wanayasa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Wanayasa
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	B	Kecamatan Wanayasa
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	91,69	80,00	Kecamatan Wanayasa
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Wanayasa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	80,00	80,00	Kecamatan Wanayasa
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Wanayasa
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	80,00	80,00	Kecamatan Wanayasa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	56,96	61,00	Kecamatan Wanayasa
Kecamatan							Kecamatan Kiarapedes
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Kiarapedes

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Kiarapedes
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Kiarapedes
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Kiarapedes
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Kiarapedes
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	82,00	-	-	Kecamatan Kiarapedes
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Kiarapedes
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	81,11	-	-	Kecamatan Kiarapedes
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	95,21	-	-	Kecamatan Kiarapedes
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	86,75	-	-	Kecamatan Kiarapedes
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	99,85	-	-	Kecamatan Kiarapedes
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Kiarapedes
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	CC	C	Kecamatan Kiarapedes
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	18,97	73,35	Kecamatan Kiarapedes
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	0,00	Baik	Kecamatan Kiarapedes
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Kiarapedes
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Kiarapedes
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	97,35	97,00	Kecamatan Kiarapedes
Program Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	92,31	74,00	Kecamatan Kiarapedes

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kecamatan							Kecamatan Pasawahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Pasawahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Pasawahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Pasawahan
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Pasawahan
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Pasawahan
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	64,00	-	-	Kecamatan Pasawahan
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Pasawahan
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Pasawahan
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Pasawahan
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	97,00	-	-	Kecamatan Pasawahan
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	96,00	-	-	Kecamatan Pasawahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Pasawahan
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	B	Kecamatan Pasawahan
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	93,53	81,99	Kecamatan Pasawahan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	0,00	Baik	Kecamatan Pasawahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	100,00	100,00	Kecamatan Pasawahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Pasawahan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Pasawahan

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	100,00	100,00	Kecamatan Pasawahan
Kecamatan							Kecamatan Pondoksalam
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Pondoksalam
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Pondoksalam
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Pondoksalam
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Pondoksalam
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Pondoksalam
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	82,00	-	-	Kecamatan Pondoksalam
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Pondoksalam
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	81,11	-	-	Kecamatan Pondoksalam
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	94,88	-	-	Kecamatan Pondoksalam
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	84,81	-	-	Kecamatan Pondoksalam
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	88,62	-	-	Kecamatan Pondoksalam
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Pondoksalam
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	BB	B	Kecamatan Pondoksalam
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	80,16	84,58	Kecamatan Pondoksalam
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Pondoksalam
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Pondoksalam
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	95,81	0,00	Kecamatan Pondoksalam

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	81,38	98,71	Kecamatan Pondoksalam
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	93,40	99,01	Kecamatan Pondoksalam
Kecamatan							Kecamatan Purwakarta
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Purwakarta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Purwakarta
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Purwakarta
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Purwakarta
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Purwakarta
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	91,00	-	-	Kecamatan Purwakarta
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	35,00	-	-	Kecamatan Purwakarta
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	42,00	-	-	Kecamatan Purwakarta
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	58,00	-	-	Kecamatan Purwakarta
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	22,00	-	-	Kecamatan Purwakarta
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	91,64	-	-	Kecamatan Purwakarta
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Purwakarta
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	BB	Kecamatan Purwakarta
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	80,00	68,51	Kecamatan Purwakarta
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Purwakarta
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	83,09	57,68	Kecamatan Purwakarta

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	50,06	35,80	Kecamatan Purwakarta
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	36,15	51,80	Kecamatan Purwakarta
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	84,64	0,00	Kecamatan Purwakarta
Kecamatan							Kecamatan Babakan Cikao
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	72,05	-	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	91,70	-	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	43,84	-	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Babakan Cikao
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	83,33	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	96,90	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	86,92	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	79,17	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	83,33	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	60,64	49,47	-	-	Kecamatan Babakan Cikao
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Babakan Cikao
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	BB	Kecamatan Babakan Cikao
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	89,96	88,75	Kecamatan Babakan Cikao
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Babakan Cikao

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	57,58	100,00	Kecamatan Babakan Cikao
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Babakan Cikao
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	100,00	Kecamatan Babakan Cikao
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	14,76	0,00	Kecamatan Babakan Cikao
Kecamatan							Kecamatan Campaka
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Campaka
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Campaka
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Campaka
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Campaka
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Campaka
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	80,00	-	-	Kecamatan Campaka
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Campaka
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	70,33	-	-	Kecamatan Campaka
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	90,00	-	-	Kecamatan Campaka
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	71,43	-	-	Kecamatan Campaka
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	80,00	-	-	Kecamatan Campaka
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Campaka
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	B	Kecamatan Campaka
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	80,00	72,07	Kecamatan Campaka

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Campaka
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	80,00	Kecamatan Campaka
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	80,00	80,00	Kecamatan Campaka
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	80,00	80,00	Kecamatan Campaka
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	51,00	51,00	Kecamatan Campaka
Kecamatan							Kecamatan Cibatu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Cibatu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Cibatu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Cibatu
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Cibatu
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Cibatu
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	73,55	-	-	Kecamatan Cibatu
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	95,00	-	-	Kecamatan Cibatu
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	75,00	-	-	Kecamatan Cibatu
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	95,00	-	-	Kecamatan Cibatu
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	85,00	-	-	Kecamatan Cibatu
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	89,00	-	-	Kecamatan Cibatu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Cibatu
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	CC	CC	Kecamatan Cibatu

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	94,48	77,42	Kecamatan Cibatu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Cibatu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	75,00	Kecamatan Cibatu
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	75,00	Kecamatan Cibatu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Cibatu
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Cibatu
Kecamatan							Kecamatan Bungursari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Bungursari
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Bungursari
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kecamatan Bungursari
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	-	-	-	Kecamatan Bungursari
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kecamatan Bungursari
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	68,00	-	-	Kecamatan Bungursari
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	100,00	85,00	-	-	Kecamatan Bungursari
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	94,00	-	-	Kecamatan Bungursari
	4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	98,00	-	-	Kecamatan Bungursari
	5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Bungursari
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	95,94	-	-	Kecamatan Bungursari
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kecamatan Bungursari

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	BB	Kecamatan Bungursari
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	93,00	85,48	Kecamatan Bungursari
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	Baik	Baik	Kecamatan Bungursari
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Bungursari
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	100,00	90,00	Kecamatan Bungursari
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	96,00	100,00	Kecamatan Bungursari
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	68,00	100,00	Kecamatan Bungursari

Sumber: 17 Kecamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.8 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.71

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesatuan Bangsa dan Politik							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	100,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	-	100,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	-	100,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	0,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	100,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	100,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Jumlah Forum /Tim	4,00	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Jumlah LSM	LSM	27,00	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Jumlah Kegiatan	Kegiatan	5,00	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina	Jumlah forum	3,00	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	76,00	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Kesatuan Bangsa							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen	100,00	100,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Persentase tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama	Persen	100,00	100,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase jumlah penurunan konflik sosial di purwakarta	Persen	100,00	93,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Politik Dalam Negeri	Persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik	Persen	100,00	0,00	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	90,66	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:	Persen	-	-	91,66	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik	Persen	-	-	84,98	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	-	-	74,80	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina;	Persen	-	-	100,00	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Persen	-	-	100,00	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;	Persen	-	-	90,91	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	-	-	90,91	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta	Persen	-	-	41,99	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesatuan Bangsa dan Politik							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-	BB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	-	-	-	93,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Realisasi				Perangkat Daerah
			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:	Persen	-	-	-	68,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik	Persen	-	-	-	97,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	-	-	-	97,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina;	Persen	-	-	-	92,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Persen	-	-	-	92,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;	Persen	-	-	-	64,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	-	-	-	64,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta	Persen	-	-	-	86,13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.9 Pencapaian Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM di Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sudah dilakukan secara optimal namun masih terdapat beberapa indikator capaian SPM yang harus di dorong dan didukung baik dari aspek anggaran maupun SDM pelaksananya. Adapun Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 2.72

Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TARGET	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
A.	KABUPATEN PURWAKARTA		100 %	62,97%
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	82,09%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	44,29%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	62,54%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.73

Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TARGET	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
A.	KABUPATEN PURWAKARTA		100 %	86,89%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	99,43%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	96,67%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TARGET	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	100,00%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	89,88%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	67,27%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	79,89%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	57,42%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	80,76%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	97,64%
10.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	100,00%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 %	98,50%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	75,16%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.74

Hasil Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TARGET	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
A.	KABUPATEN PURWAKARTA		100 %	86,71%
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari	100 %	82,91%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TARGET	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 %	90,50%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.75

Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TARGET	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
A.	KABUPATEN PURWAKARTA		100 %	100,00%
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100,00%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100,00%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.76

Hasil Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TARGET	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
A.	KABUPATEN PURWAKARTA		100 %	100,00%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100 %	100,00%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100,00%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100,00%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TARGET	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100,00%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.77

Hasil Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TARGET	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
A.	KABUPATEN PURWAKARTA		100 %	99,82%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100,00%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	99,09%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100,00%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100 %	100,00%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100 %	100,00%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal baik level internasional, nasional maupun regional. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia termasuk negara yang menganut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan dengan gejolak eksternal. Kondisi perekonomian Kabupaten Purwakarta diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global.

Posisi daya saing global Indonesia yang terus menurun menjadi tantangan besar bagi Indonesia di masa mendatang untuk bangkit dan mampu berperan strategis dipercaturan ekonomi internasional. Selain itu,

Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan besar di era informasi dan globalisasi saat ini.

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, propinsi, nasional atau internasional. Kondisi daya saing yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Kabupaten Purwakarta yang memiliki struktur wilayah yang menarik, wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan disebelah selatan, tenggara dan barat, mendatar di tengah dan utara. Di Purwakarta juga terdapat Danau Jatiluhur sebagai pembangkit listrik besar pemasok Jawa Bali.
- b) Di Purwakarta berkembang kegiatan-kegiatan industri bersama dengan perkembangan di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Pertimbangan umumnya adalah aksesibilitas ke Jakarta sebagai pusat perdagangan dan outlet perdagangan nasional – internasional. Perkembangan ini cenderung bersifat alami mengikuti aglomerasi kegiatan ekonomi. Umumnya kegiatan ini terjadi di wilayah utara Purwakarta.
- c) Kabupaten Purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional (Jakarta, Bandung dan Cirebon). Masih banyak wisata lain yang belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Di masa yang akan datang potensi pariwisata di Kabupaten Purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya.
- d) Kabupaten Purwakarta juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang juga sebagai pemasok barang kebutuhan utama di Pasar Induk Bandung dan Jakarta. Kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah dapat di tanami banyak jenis pohon. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat masyarakat pada hamparan wilayah tertentu, misalnya persawahan, perkebunan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan skala ekonomi.

- e) Kedekatan dengan pusat-pusat permintaan (*demand*) seperti Jakarta dan Bandung adalah keunggulan geografis Purwakarta. Sektor finansial yang berkembang pesat di Purwakarta dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas ekonomi, namun masalah penjaminan bagi usaha kecil juga penting menjadi perhatian.
- f) Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. Zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. Momentum potensi investasi ini harus lebih dimanfaatkan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi dengan sektor pembangunan daerah lainnya.

Dalam penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdapat 4 aspek yakni aspek ekosistem inovasi, aspek penguat/enabling environment, aspek SDM/Human Capital, aspek pasar/market. Daerah dengan daya saing yang tinggi akan membuat daerah tersebut maju dan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, Informasi Indeks Data Saing Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 memperoleh Score/Nilai Indeks sebesar **2.7081**, dengan rincian aspek :

- 1). Faktor Penguat/ Enabling Environment, 3.6210;
- 2). Sumber Daya Manusia/ Human Capital, 3.0208;
- 3). Faktor Pasar/ Market, 2.5625;
- 4). Ekosistem Inovasi, 1.6281.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, dimana hasil capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.78

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,16
2	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	Juta Rp.	71.580	67.349	69.976	74.345	71.195
3	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	11.819.000	11.614.000	11.669.000	12.193.000	13.150.500
4	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Persen	35	7,71	6,36	6,36	55
5	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	4,69	6,91	6,84	5,12	5
6	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	62,7	69,76	74,49	80,24	75

Sumber : BPS Kab. Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, dimana hasil capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.79

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	85,63	87,88	83,25	84,00	89,63
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71	64,41	61,07	64,28	72,81
3	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	85,4	34,82	35,06	37,56	86
4	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	16	16	80,00	32	40
5	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	34	34	77,00	70,3	75,52
6	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan	Persen	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52

Sumber : Bappelitbangda 2023

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan fokus iklim berinvestasi dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, dimana hasil capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.80

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Iklim Berinvestasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	62,7	69,76	74,49	80,24	75
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	68,5	95	91	74,45	73
3	Status Indeks Desa Membangun	Status	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Berkembang

Sumber : Bappelitbangda 2023

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan fokus sumber daya manusia dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, dimana hasil capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.81

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,67	70,82	70,98	71,56	70,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,73	11,07	10,70	8,75	9,91
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	45	60,06	60,06	64,41	60
5	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	Predikat	B	B	B	B	A
6	Nilai LPPD Kab. Purwakarta	Poin	35	35	35	3,50	35
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Predikat	B	B	B	B	B

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	100	99,7	98	98,00	100
9	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	PD	0	0	1	1	2
10	Indeks Profesionalitas ASN	Sebutan/ Poin	Sangat Rendah (50)	Sangat Rendah (54,5)	Sangat Rendah (54,23)	Sangat Rendah	Rendah (61-70)
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63,88	60,91	61,13	65,21	48,14
12	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	25	25	35	35	55

Sumber : BPS Kab. Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023, Bappelitbangda 2023

2.5 CAPAIAN KINERJA RPJMD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

Pada dokumen Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 memuat Visi “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” dan dilaksanakan dengan 5 misi, 7 tujuan, 18 sasaran strategis, 19 strategi dan 49 indikator. Capaian kinerja pembangunan pada Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut telah menunjukkan hasil yang positif walau masih ada beberapa indikator kinerja yang masih belum optimal dalam pencapaiannya dikarenakan tersendat akibat dampak dari pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020-2021, bahkan sampai sekarang pun dampak pandemi covid-19 tersebut masih belum kembali normal namun Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya agar kinerja pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian realisasi kinerja pembangunan pada Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.82

Capaian dan Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8			
VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA										
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial										
1.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (poin)	70,67	70,82	70,98	71,56	70,35		
		1.1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	1	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,92	8,09	8,10	8,11	8,12
				2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,10	12,11	12,12	12,13	12,73
				3	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan (%)	80	85	90	90	100
				4	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	68,5	95	91	74,45	73
	5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,35	1,54	1,82	1,69	0,47			
	1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	1	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional (%)	25	25	35	35	55	
	1.1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,8	70,99	71,18	71,47	70,75	
1.2	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1	Angka Kemiskinan (%)	7,48	8,27	8,83	8,70	7,48	
			2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,73	11,07	10,70	8,75	9,91	
		1.2.1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan (%)	7,48	8,27	8,83	8,70	7,48
		1.2.2	Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,88	60,91	61,13	65,21	48,14
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,73	11,07	10,70	8,75	9,91
		1.2.3		1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	87,19	87,19	86,78	86,93	90,18

Tujuan	Sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	2 Indeks Perberdayaan Gender (IDG) (poin)	72,04	72,04	74,39	77,89	77,46			
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional										
2.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif		Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	45	60,06	60,06	64,41	60		
		2.1.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	1	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	45	60,06	60,06	64,41	60
				2	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta (predikat)	B	B	B	B	A
				3	Nilai LPPD Kab. Purwakarta (poin)	35	35	35	3,50	35
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (predikat)	B	B	B	B	B
2	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan (%)			100	99,7	98	98,00	100		
2.2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas		1 Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (PD)	0	0	1	1	2		
		2.2.1	Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (PD)	0	0	1	1	2
		2.2.2	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	1	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	Sangat Rendah (50)	Sangat Rendah (54,5)	Sangat Rendah (54,23)	Sangat Rendah	Rendah (61-70)

Tujuan	Sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan								
3.1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	85,63	87,88	83,25	84,00	89,63
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	71	64,41	61,07	64,28	72,81
	3.1.1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	85,63	87,88	83,25	84,00	89,63
		2	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	85,4	34,82	35,06	37,56	86
		3	Cakupan Layanan Persampahan (%)	52	52	0,00		64
		4	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik (%)	16	16	80,00	32	40
		5	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	34	34	77,00	70,3	75,52
	3.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	71	64,41	61,07	64,28	72,81
2		Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan (%)	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	
3.2 Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan		1	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD (%)	35	7,71	6,36	6,36	55
	3.2.1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1	Jumlah Wisatawan (Orang)	1.942.213	97.421	783.171	783.171
Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa								
4.1 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat		1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,16
		2	Indeks Gini (Poin)	0,399	0,414	0,388	0,367	0,34
		3	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp)	11.819.000	11.614.000	11.669.000	12.193.000	13.150.500

Tujuan	Sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
		4 Inflasi (%)	2,00	1,16	1,81	4,86	2,89
	4.1.1 Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	1 Laju UMKM Yang Dibina (%)	100	100	100	100	100
		2 Laju Koperasi Aktif (%)	80	80	90	90	100
	4.1.2 Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	1 Laju Pertumbuhan IKM (%)	55	70	75	75	75
		2 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	4,69	6,91	6,84	5,12	5
	4.1.3 Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	1 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	62,7	69,76	74,49	80,24	75
	4.1.4 Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1 Skor Pola pangan Harapan (poin)	88,55	85,1	78,3	91,40	93,15
		2 Laju Produksi Pertanian (%)	1,22	2,97	4,9	4,9	1,1
		3 Laju Produksi Peternakan (%)	3	0,24	3,13	3,13	2
		4 Laju Produksi Perikanan (%)	14	16,48	2,27	2,27	14
	4.1.5 Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Status Indeks Desa Membangun (status)	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Berkembang

Sumber : Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023, Hasil Evaluasi RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023

2.6. PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yang setelah berakhir periode kegiatannya akan dilanjutkan pada laporan panel tingkat tinggi (*High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP*) dengan lima pergeseran transformatif seperti:

- a) Mengakhiri kelaparan dan *extreme poverty*;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan growth dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi public yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor (pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain).

Konsep *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan kelanjutan dari konsep *Millenium Development Goals (MDG's)*. SDG's adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru dengan sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang.

Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepebisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDG's di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni **pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance**. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Upaya pencapaian SDG's di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh.

Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan. Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan SDG's antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

2.7. ANALISIS DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG KLHS

Keterbatasan sumber daya alam serta potensi penurunannya baik secara kuantitas maupun kualitas mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam agar dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perlu diperhatikan pula hubungan antar wilayah, untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu wilayah tertentu, sehingga dapat dipenuhi dengan penyediaan dari wilayah lainnya (prinsip ekspor-impor). Hal lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia yang diukur dengan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagaimana yang dilakukan dalam *Millenium Ecosystem Assessment –United Nation*. Manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Secara menyeluruh, manfaat ini dikenal dengan istilah jasa ekosistem dan meliputi produk seperti air minum dan proses seperti pemecahan (dekomposisi) sampah. Jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem (Hein *et al.* 2006). Ketersediaan jasa ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu, seperti tercantum dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 mengenai Pedoman

Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ketersediaan baik kuantitas dan kualitas jasa ekosistem akan berpengaruh dan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai panduan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

2.7.1 Daya Dukung Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu: *“Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya”*. Salah satu hasil kajian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem ini juga menghasilkan distribusi luasan dari jasa ekosistem tersebut. Berdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada data terkait jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem penyedia air bersih yaitu 57,48%. Tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut tersebut berkaitan dengan luasan satuan ekoregion yang mendominasi Kabupaten Purwakarta yaitu Dataran Fluvio Vulkanik.

Kondisi hidrologi pada ekosistem dataran fluvio vulkanik umumnya mempunyai akuifer yang sangat baik. Hal tersebut karena material penyusunnya berupa material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal yang merupakan komposisi material yang mampu mengalirkan air dengan baik (permeabilitas tinggi) sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. Ekosistem dataran fluvio vulkanik merupakan wilayah bertopografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga

landai dengan kemiringan lereng secara umum 0-3% dan pada beberapa lolasi mempunyai kemiringan lereng 3-8%. Dukungan morfologi yang datar hingga cekung menjadikan satuan ini sebagai daerah cadangan air tanah sangat potensial sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi.

Tabel 2.83

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Purwakarta

Jenis Jasa Ekosistem	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Penyedia Pangan	0,81	0,002	387,48	1,082	3.536,74	9,877	4.239,97	11,841	4.412,92	12,324
Penyedia Air Bersih	-	-	6544,68	7,407	65.881,57	74,564	15.928,53	18,027	0,86	0,0009
Pendukung Biodiversitas	-	-	46,59	1,599	173,20	5,946	1.131,70	38,856	1.561,00	53,596

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

2.7.2 Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu: *“Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”* Salah satu hasil kajian daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem ini juga menghasilkan distribusi luasan dari jasa ekosistem tersebut yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84

Distribusi Kelas dan Luasan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Jenis Jasa Ekosistem	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Pengaturan Iklim	298.08	0,29	14409.1 1	15,23	4125.34	6,10	54371.7 8	57,92	32029.4 0	19,97
Pengaturan tataaliran air dan banjir	8994.72	7,89	7869.19	6,32	11493.3 6	8,95	49791.4 2	62,11	19887.9 3	19,79

Jenis Jasa Ekosistem	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Pencegahan Dan perlindungan dari bencana	17154.30	14,92	501.23	0,67	21997.31	22,01	64767.02	60,07	7233.09	7,09
Pemeliharaan kualitas udara	9097.11	7,98	15994.32	14,87	26114.	21,88	42332.06	35,27	20009.1	17,84

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada Tabel jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yaitu 19,79%. Tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut berkaitan dengan luasan kawasan non terbangun yang meliputi kawasan hutan, kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau yang masih cukup besar. Keberadaan hutan, sawah, dan ruang terbuka hijau akan mampu menginfiltrasi air ke dalam tanah sehingga larian air (*run off*) akan semakin kecil sehingga siklus hidrologi dalam kondisi yang stabil.

2.7.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan juga dapat diukur dan didekati dengan menggunakan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan asumsi semakin tinggi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, semakin terjaga kemampuan lingkungan sehingga daya dukungnya juga semakin meningkat. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal:

1. Membantu perumusan kebijakan;
2. Membantu dalam mendesain program lingkungan; dan
3. Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan

salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan. Dalam perhitungannya, masing-masing parameter diberikan bobot yang berbeda. Pemberian bobot berbeda dari ketiga indeks kualitas berdasarkan dampak serius dari kelangkaan yang meliputi Indeks Kualitas Air dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan dengan bobot 40%.

Berdasarkan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, pengukuran masing-masing parameter IKLHD Kabupaten Purwakarta ialah sebagai berikut.

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pengukuran kualitas udara di Kabupaten Purwakarta dilakukan di 10 (sepuluh) titik pemantauan pada dua periode yaitu bulan Juli dan Oktober Tahun 2017. Hasil pengukuran kualitas udara tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.85

Kualitas Udara Ambien Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Lokasi	Lama Pengukuran	Tanggal Pengukuran	SO ² (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	18/07/2017	2	8
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	18/07/2017	< 1,4	12
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	14/08/2017	15	16
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	14/08/2017	2	37
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	23/08/2017	6	14
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	23/08/2017	15	39
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	3/10/2017	< 1,4	17

Lokasi	Lama Pengukuran	Tanggal Pengukuran	SO ² (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	3/10/2017	< 1,4	43
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	26/10/2017	26	16
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	26/10/2017	24	48

Keterangan: Berdasarkan Hasil Sampling Passive Sampler

Tanda (-) menunjukkan parameter tersebut tidak dianalisa Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada periode waktu pengukuran bulan Agustus tahun 2017, kadar SO₂ tertinggi berada di kawasan Kantor Pemkab Purwakarta dan kadar NO₂ tertinggi berada di Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta. Sedangkan pada periode bulan Oktober tahun 2017, kadar SO₂ tertinggi berada di lokasi Kantor Pemkab Purwakarta dan kadar NO₂ tertinggi berada di Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta. Atas dasar hasil perhitungan tersebut, maka dihitung Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purwakarta. Parameter uji kualitas udara ambien jalan raya yang diukur mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Parameter yang diukur dengan menggunakan passive sampler yang tersebar di wilayah kota dan wilayah yang berpotensi sumber pencemar lebih tinggi dengan rentang waktu pengukuran dimulai dari bulan Juli – Oktober 2017 terdiri dari parameter Nitrogen Dioksida (NO₂), Sulfur Dioksida (SO₂), dilakukan dengan waktu pengukuran 24 Jam.

Berdasarkan hasil pengamatan semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan PP RI No. 41 Tahun 1999 Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Terlihat semua parameter SO₂, NO₂ yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan PPRI No. 41 Tahun 1999 Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan debu dari lalu lintas pada daerah titik sampling. Keberadaan konsentrasi dari parameter yang terukur di lokasi ini lebih disebabkan oleh aktifitas jalan raya yang pada saat ini bila melihat data faktual terjadi peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor serta penambahan ruas jalan alternatif yang ada di Kabupaten Purwakarta, dan aktifitas mobilisasi kendaraan angkut industri dimana pesatnya

perkembangan industri baru ditambah dengan berubahnya pola penggunaan energy bagi kalangan industri dari penggunaan bahan bakar minyak berubah menjadi bahan bakar batubara, kadar dari parameter tersebut merupakan disversi dari kegiatan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga parameter yang terjadi di jalan akan menyebarkan dalam radius yang cukup luas, hal ini juga diiringi oleh keadaan iklim setempat.

Tindakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah dilakukan untuk dapat meminimalkan dampak tersebut antara lain melakukan pengawasan dan pembinaan secara simultan terhadap pelaku industri khususnya mengenai pengelolaan pencemaran udara serta melakukan kegiatan operasi KIR untuk kendaraan bermotor khusus niaga. Sedangkan untuk wilayah perkotaan pemerintah daerah telah menambah dan merevitalisasi ruang terbuka hijau dengan menambah jenis tanaman yang dapat menyerap sumber polutan yang ada.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air dihitung berdasarkan analisis air sungai untuk parameter TSS, DO, dan COD. Pengambilan sampel air dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Purwakarta terhadap aliran sungai selama tahun 2017 dengan jumlah sampel sebanyak 5 Sungai sebagai berikut:

1) Sungai Cikao

Diantara parameter yang diukur hanya parameter khususnya Zat Terlarut dan sulfat (SO₄) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Cikao umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas I PP. 82 tahun 2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l .

2) Sungai Citarum

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Citarum dilakukan pada lokasi sebelum dan sesudah PT. Indo Bharat Rayon. Diantara

parameter yang diukur hanya parameter zat terlarut dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Sedangkan parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya algae dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Citarum umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l

3) Sungai Ciherang

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Ciherang dilakukan pada lokasi sekitar wilayah Kecamatan Bungursari. Diantara parameter yang diukur hanya parameter zat terlarut, COD dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Sedangkan parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya alga dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Parameter COD menunjukkan jumlah

oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Cihorang umumnya masih memenuhi kriteria mutu air namun untuk parameter COD berada diatas ambang baku mutu berdasarkan PP. 82 tahun 2001 dengan ruang kelas 1 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l COD sebesar 10 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l.

4) Sungai Cilamaya

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Cilamaya yang melintas di Kabupaten Purwakarta dilakukan pada lokasi sesudah PT. San Fu. Diantara parameter yang diukur hanya parameter Zat Terlarut, COD, BOD dan sulfat (SO₄) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya alge dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Nilai BOD yang tinggi mencerminkan tingginya kegiatan mikroorganisme di dalam air akibat pencemaran baik limbah penduduk, industri maupun sumber pencemaran lainnya yang masuk ke badan air, Sedangkan parameter COD menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses

mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Cilamaya umumnya masih memenuhi kriteria mutu air namun untuk parameter BOD dan COD berada diatas ambang baku mutu berdasarkan PP. 82 tahun 2001 dengan ruang kelas 1 dengan nilai baku mutu kelas II PP. 82/2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l, COD sebesar 10 mg/l, bod sebesar 2 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l.

5) Sungai Cikembang

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Cikembang yang melintas I Kabupaten Purwakarta dilakukan pada lokasi kampung Cikembang. Diantara parameter yang diukur hanya parameter Zat Terlarut dan Klorida yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. parameter tersebut diatas di sungai Cikembang umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas II PP. 82/2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l. Di Kabupaten Purwakarta terdapat sekitar 2 Waduk, 18 embung. Waduk Juanda atau Jatiluhur, waduk Cirata merupakan waduk utama di Kabupaten Purwakarta. Secara administratif waduk Juanda berada di Kecamatan Jatiluhur, Sukatani dan Sukasari dan merupakan waduk terbesar. Utamanya kedua waduk tersebut dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan cakupan distribusi Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan sumber laporan analisis kualitas air sungai periode Januari-Desember 2017 Perum Jasa Tirta II, menyatakan hasil pantau kualitas air pada bulan Januari-Desember 2017 dengan melihat data seri waduk Ir. H. Djuanda ada parameter yang melebihi baku mutu lingkungan dan bila dianalisa dengan menggunakan metode pengujian yang ada keadaan atau status Ir. H. Djuanda ada indikasi parameter parameter yang diatas nilai baku mutu yang ditetapkan dan diupayakan ada tindakan yang lebih komprehensif lintas sektor. Sedangkan kondisi danau, waduk, situ, embung lainnya yang berada

di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Alasan dilakukan pengukuran terhadap sungai dan danau, situ tersebut dikarenakan sebagai fungsi badan air penerima dari segala kegiatan yang potensial misalnya sebagai penerima outfall dari segala kegiatan antara lain industri, permukiman dan lain-lain. Gambaran tersebut menunjukkan tingkat kesadaran pelaku usaha ekonomi yang masih kecil dimana untuk setiap buangan limbah cairnya masih ada yang tidak mengolahnya ataupun tindakan pengolahannya masih belum optimal, sedangkan untuk tekanan yang menimbulkan keadaan sungai tersebut tercemar adalah dari banyaknya permukiman disekitar bantaran sungai tersebut bila dilihat dari cakupan sarana air bersih untuk fasilitas tempat buang air besar dari lingkup kecamatan masih didominasi dilakukan secara sendiri - sendiri langsung membuang buangan rumah tangga kedalam badan air penerima.

c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, adapun Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.86

Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Luas Wilayah	Luas utupan Hutan (km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan	Indeks utupan Hutan
971,72 km ² .	681,86 km ²	70,17%	85

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks tutupan lahan Kabupaten Purwakarta, selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap masing-masing indeks

sehingga didapatkan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2017

Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Lahan	IKLHD
70,56	52,15	85	69,23

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah 69,23 sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta termasuk dalam kategori **CUKUP**. Nilai IKLH mencerminkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah dan tekanan lingkungan hidup oleh penduduk. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta yang dilakukan pemerintah cukup baik sehingga nilai IKLH Kabupaten Purwakarta juga Cukup. Selain itu, nilai IKLH ini juga dapat mencerminkan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi.

2.8 KERJASAMA DAERAH

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan, sebagaimana disebutkan dalam PP. Nomor 28/2018.

Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga guna membantu pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Adapun laporan kegiatan kerjasama daerah di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.88

Laporan Kegiatan Kerjasama Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2020

NOMOR URUT	PARA PIHAK	URAIAN JUDUL NASKAH	WAKTU PERJANJIAN
1	1. KEPALA BAPENDA PROV JAWA BARAT 2. BUPATI PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG SINERGITAS PROGRAM INTENSIFIKASI, PENGEMBANGAN LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KAB PURWAKARTA	-
2	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KOMANDAN RESIMEN ARMED 2 KOSTRAD	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PSBB PARSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGAN COVID 19 DI KABUPATEN PURWAKARTA	-
3	1. KEPALA SATUAN POLISI PP KAB PURWAKARTA 2. KOMANDAN RESIMEN ARMED 2 KOSTRAD	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PSBB PARSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGAN COVID 19 DI KABUPATEN PURWAKARTA	-
4	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KESEHATAN CABANG KARAWANG	ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020	-
5	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL YANG TERKENA TRACE PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG DI KABUPATEN PURWAKARTA	-
6	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PT. MEGATAMA PUTRA SEJAHTERA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG SUSUN (INTER CHANGE) PADA KILO METER 77+800 JALAN TOL CIKOPO PALIMANAN, JALAN PENGHUBUNG, PERSIMPANGAN (INTERSECTION) DAN PENINGKATAN JALAN KOLEKTOR RUAS CIKOPO – CILANDAK.	-

NOMOR URUT	PARA PIHAK	URAIAN JUDUL NASKAH	WAKTU PERJANJIAN
7	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	PERJANJIAN ANTARA IPDN DENGAN PEMERINTAH KAB PURWAKARTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN BAGI ASN PEMDA KAB PURWAKARTA PERJANJIAN ANTARA IPDN DENGAN PEMERINTAH KAB PURWAKARTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN BAGI ASN PEMDA KAB PURWAKARTA	-
8	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. SEKRETARIS DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT	PERJANJIAN HIBAH DAERAH TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA PENGADAAN 1 (SATU) UNIT BUS SEKOLAH/UMUM/PELAJAR/KAMPUS	-
9	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	-
10	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KEPALA PT. BJB SYARIAH CABANG BRAGA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	-
11	1. DIRJEND PAJAK 2. DIRJEND PERIMBANGAN KEUANGAN 3. PEMDA KAB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA	-
12	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KESEHATAN CABANG KARAWANG	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	-
13	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KETUA YAYASAN CARE PEDULI	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PROGRAM WORKER DIGNITY HEALTH AND LEADERSHIP (WDHL) DI KABUPATEN PURWAKARTA	-
14	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PURWAKARTA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BAMUSDES,RW/RT DAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	-
15	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KASDAM III SILIWANGI	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DARURAT DAN PENINGKATAN JALAN (KARYA BAKTI TNI - AD)	-
16	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	-
17	1. KEPALA DPUBMP KAB PURWAKARTA 2. PT. MEGATAMA PUTRA SEJAHTERA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG SUSUN (INTER CHANGE) PADA KILO METER 77+800 JALAN TOL CIKOPO PALIMANAN, JALAN PENGHUBUNG, PERSIMPANGAN (INTERSECTION) DAN PENINGKATAN JALAN KOLEKTOR RUAS CIKOPO – CILANDAK.	-

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setda Kab. Purwakarta

Tahun 2021

NOMOR URUT	PARA PIHAK	URAIAN JUDUL NASKAH	WAKTU PERJANJIAN
1	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BMKG PUSAT	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1 TAHUN
2	1 SEKRETARIS DAERAH CQ. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 2 KEPALA STASIUN GEOFISIKA BANDUNG	PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMDA KAB PURWAKARTA UNTUK PENEMPATAN SENSOR PEMANTAUAN GEMPA BUMI (SEISMOGRAFH BROAD BAND)	5 TAHUN
3	1 PEMDA KAB PURWAKARTA 2 KETUA STT WASTUKENCANA PURWAKARTA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3 TAHUN
4	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PT. POS INDONESIA KANREG 5 BANDUNG	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG JASA PELAYANAN POS	2 TAHUN
5	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KODIM 0619 PURWAKARTA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI BERSAMA KODIM 0619 PURWAKARTA UNTUK KEGIATAN RELOKASI JALAN CIKAO BANDUNG – KUTAMANAH KP. CIPUTAT DESA KUTAMANAH KEC SUKASARI	2 BULAN
6	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PEMDA KAB SUBANG	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK	3 TAHUN
7	1. PEMPROV JAWA BARAT 2. PEMDA KAB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	3 TAHUN
8	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KODIM 0619 PURWAKARTA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI DALAM LINGKUP KEGIATAN KEBINAMARGAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PURWAKARTA	6 BULAN
9	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. FORUM TJS LP KAB PURWAKARTA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN MEKANISME TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJS LP) DALAM RANGKA Mendukung PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PURWAKARTA	5 TAHUN
10	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA 3. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PURWAKARTA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU PENGESAHAN PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA	3 TAHUN

NOMOR URUT	PARA PIHAK	URAIAN JUDUL NASKAH	WAKTU PERJANJIAN
11	1. KADISDUKCAPIL KAB PURWAKARTA 2. PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA 3. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU PENGESAHAN PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA	3 TAHUN
12	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KESEHATAN CAB KARAWANG	NOTA KESEPAKATAN OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	2 TAHUN
13	1. SEKRETARIS DAERAH KAB PURWAKARTA 2. KEPALA BPJS KESEHATAN CABANG KARAWANG	RENCANA KERJA KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022	2 TAHUN
14	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KETENAGAKERJAAN CAB PURWAKARTA	KESEPAKATAN BERSAMA PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	3 TAHUN
15	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KETENAGAKERJAAN CAB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	-

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setda Kab. Purwakarta

Tahun 2022

NOMOR URUT	PARA PIHAK	URAIAN JUDUL NASKAH	WAKTU PERJANJIAN
1	1. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT 2. PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG SINERGI PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2 TAHUN
2	1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2. KEPALA PT. BJB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG LAYANAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENERIMAAN SETORAN RETRIBUSI DAERAH	1 TAHUN
3	1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT 2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA BARAT	3 TAHUN
4	1. KEPALA DPMD KAB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JAMINAN SOSIAL	1 TAHUN

NOMOR URUT	PARA PIHAK	URAIAN JUDUL NASKAH	WAKTU PERJANJIAN
	2. KEPALA CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN PURWAKARTA	KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BAMUSDES, RW/RT DAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	
5	1. SEKRETARIS DAERAH KAB PURWAKARTA 2. KEPALA CABANG BPJS KESEHATAN KARAWANG	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022	2 TAHUN
6	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KOMANDAN KODIM 0619 PURWAKARTA	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI KODIM 0619/PURWAKARTA LINGKUP KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA	1 TAHUN
7	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PEMDA KAB BANDUNG BARAT	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK	2 TAHUN
8	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PEMDA KAB MAMUJU TENGAH	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI UMUM (TU) DI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKASI SALULISU KAWASAN TOBADAK DESA BATU PARIGI KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022	5 TAHUN
9	1. KEPALA DISNAKERTRAN KAB PURWAKARTA 2. KEPALA DISNAKERTRAN KAB MAMUJU TENGAH	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI UMUM (TU) DI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKASI SALULISU KAWASAN TOBADAK DESA BATU PARIGI KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022	5 TAHUN
10	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KOMANDAN RESIMEN ARMED 1 KOSTRAD	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI RESIMEN ARMED 1/SY/1 KOSTRAD LINGKUP KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	1 TAHUN
11	1. KOMANDAN RESIMEN ARMED 1 KOSTRAD 2. PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI RESIMEN ARMED 1 STHIRA YUDHA 1 KOSTRAD LINGKUP KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	1 TAHUN
12	3. PEMDA KAB PURWAKARTA 4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	2 TAHUN

NOMOR URUT	PARA PIHAK	URAIAN JUDUL NASKAH	WAKTU PERJANJIAN
13	1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA DISNAKAN KAB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	2 TAHUN
14	1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA DISKOMINFO KAB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	2 TAHUN
15	1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA DISPANGTAN KAB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	2 TAHUN
16	1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA DPMD KAB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	2 TAHUN
17	1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA PELAKSANA BPBD KAB PURWAKARTA	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	2 TAHUN
18	1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KETUA YAYASAN CARE PEDULI	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PROGRAM STRIVING FOR WOMEN'S RIGHTS (SWIR) DI KABUPATEN PURWAKARTA	1 TAHUN
19	1. KETUA YAYASAN CARE PEDULI 2. KEPALA DINAS SOSIAL DAN P3A 3. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PEMBERDAYAAN, PENGUATAN, DAN PEMENUHAN HAK – HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (EKOSOB) PEREMPUAN DI LINGKUP KELUARGA, MASYARAKAT, DAN TEMPAT KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA	1 TAHUN
20	1. PEMKAB PURWAKARTA 2. REKTOR UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	5 TAHUN
21	1. PEMKAB PURWAKARTA 2. REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	5 TAHUN

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setda Kab. Purwakarta

2.9 KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bergerak pada sektor usaha air minum dan jasa keuangan, yaitu terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gapura Tirta Rahayu, PT. Bank Jabar Banten, PT. LKM Mekar Asih, dan PD. BPR Raharja Wanayasa. Sebagian dari APBD Kabupaten Purwakarta dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah atau BUMD tersebut. Adapun kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.89

Kinerja BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

Tahun 2019

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama BUMD	Aset (Rp)	Ekuitas (Rp)	Pendapatan (Rp)	Biaya/Beban (Rp)	Laba/(Rugi) setelah Pajak (Rp)	Kontribusi Pemda terhadap BUMD (Rp)	Kontribusi BUMD terhadap PAD Pemda (Rp)	Status	Bentuk	Jenis	Laporan Keuangan	Ket.
1	Kab. Purwakarta	PT. Bank Jabar Banten	116.996.377.000.000	12.620.880.000.000	12.292.992.000.000	10.366.617.000.000	1.541.852.000.000	12.804.792.750	4.578.993.887	beroperasi	Perseroda	Perbankan	Audited	
2		PT. LKM Mekar Asih	3.468.324.178	2.046.801.227	660.888.379	599.171.717	57.800.592	1.524.454.097	17.370.226	beroperasi	Perseroda	Perbankan	Audited	
3		PD. BPR Raharja Wanayasa	36.267.085.000	17.270.455.000	7.744.064.000	6.106.243.000	1.328.940.000	14.275.000.000	514.152.120	beroperasi	Perusda	Perbankan	Audited	
4		Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu	53.557.811.911	36.874.620.346	30.134.221.044	30.017.045.239	52.274.805	22.331.405.349	-	beroperasi	Perusda	PDAM	Audited	

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta

Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama BUMD	Aset (Rp)	Ekuitas (Rp)	Pendapatan (Rp)	Biaya/Beban (Rp)	Laba/(Rugi) setelah Pajak (Rp)	Kontribusi Pemda terhadap BUMD (Rp)	Kontribusi BUMD terhadap PAD Pemda (Rp)	Status	Bentuk	Jenis	Laporan Keuangan	Ket.
1	Kab. Purwakarta	PT. Bank Jabar Banten	133.559.935.000.000	12.581.533.000.000	13.369.736.000.000	11.239.184.000.000	1.682.122.000.000	12.804.792.750	4.815.626.457	beroperasi	Perseroda	Perbankan	Audited	
2		PT. LKM Mekar Asih	3.446.200.765	2.052.885.570	631.190.726	621.414.806	6.084.343	1.527.028.242	-	beroperasi	Perseroda	Perbankan	Audited	
3		PD. BPR Raharja Wanayasa	44.440.049.000	22.184.429.000	8.045.187.000	6.220.132.000	1.477.137.000	18.775.000.000	730.917.172	beroperasi	Perusda	Perbankan	Audited	
4		Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu	55.127.837.398	31.293.670.718	29.404.170.481	29.121.440.977	172.134.504	22.331.405.349	16.064.738	beroperasi	Perusda	PDAM	Audited	

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta

Tahun 2021

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama BUMD	Aset (Rp)	Ekuitas (Rp)	Pendapatan (Rp)	Biaya/Beban (Rp)	Laba/(Rugi) setelah Pajak (Rp)	Kontribusi Pemda terhadap BUMD (Rp)	Kontribusi BUMD terhadap PAD Pemda (Rp)	Status	Bentuk	Jenis	Laporan Keuangan	Ket.
1	Kab. Purwakarta	PT. Bank Jabar Banten	158.356.097.000.000	13.084.033.000.000	9.618.774.000.000	7.020.159.000.000	2.018.654.000.000	12.804.792.750	4.903.723.432	beroperasi	Perseroda/Perusda/Lainnya	Perbankan	Audited/Unaudited	
2		PT. LKM Mekar Asih	3.833.107.026	2.012.080.155	836.704.217	822.218.161	10.302.534	1.500.000.000	27.028.242	beroperasi	Perseroda/Perusda/Lainnya	PDAM/Perbankan/Lainnya	Audited/Unaudited	
3		PD. BPR Raharja Wanayasa	50.172.658.901	22.854.454.242	8.495.861.752	6.281.231.865	1.849.393.025	18.775.000.000	818.834.811	beroperasi	Perseroda/Perusda/Lainnya	PDAM/Perbankan/Lainnya	Audited/Unaudited	
4		Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu	54.227.118.844	31.417.560.862	28.194.433.281	28.245.509.823	(51.076.542)	22.331.405.349	-	beroperasi	Perseroda/Perusda/Lainnya	PDAM	Unaudited	

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kebijakan fiskal, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis keuangan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Selanjutnya sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat digunakan analisis keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kerangka anggaran pembangunan daerah akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.

Dalam penerapan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purwakarta secara umum tercermin atas tiga aspek, yaitu:

- A. Aspek Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- B. Aspek Pengelolaan Belanja Daerah; dan
- C. Aspek Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Purwakarta diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat dan antar daerah), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purwakarta antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana transfer dan pendapatan lainnya yang sah;
3. Merasionalisasikan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
5. Meningkatkan pelayanan publik terkait pendapatan daerah berupa pelayanan konsultasi, pengaduan, penelusuran dan pemberian apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak teladan;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Meningkatkan dan mengoptimalisasi sarana dan prasarana teknis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
8. Mengoptimalisasi kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
10. Meningkatkan iklim investasi dalam penanaman modal di daerah yang ramah, cepat, transparan dan mudah diakses;
11. Meningkatkan promosi daerah dan penataan destinasi wisata yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan perkembangan penyebaran Covid-19;
12. Meningkatkan penataan sarana dan prasarana lokasi/tempat yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah;

13. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada obyek pendapatan yang menjadi hak dan kewenangan Kabupaten Purwakarta; dan
4. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta pada kurun waktu Tahun 2019 – 2021, secara umum dari aspek pengelolaan Pendapatan Daerah memperlihatkan trend yang positif dimana setiap tahun ada kenaikan rata-rata sebesar 5,31%, yaitu dari Rp. 2.169.865.594.847 di tahun 2019 menjadi Rp. 2.402.816.479.087 pada tahun 2021.

Dari sektor Pendapatan Asli Daerah terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 11,16%, yaitu dari Rp. 420.353.733.502 di tahun 2019 menjadi Rp. 515.746.568.984 pada tahun 2021.

Kemudian dari sektor Pendapatan Transfer terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 10,05%, yaitu dari Rp. 1.466.082.804.899 di tahun 2019 menjadi Rp. 1.763.835.158.455 pada tahun 2021.

Sedangkan pada sektor Pendapatan Lain-lain yang Sah terlihat rata-rata realisasinya menurun yakni sebesar -27,91%, yaitu dari Rp. 283.429.056.446 di tahun 2019 menjadi Rp. 123.234.751.648 pada tahun 2021.

Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini :

Tabel 3.1

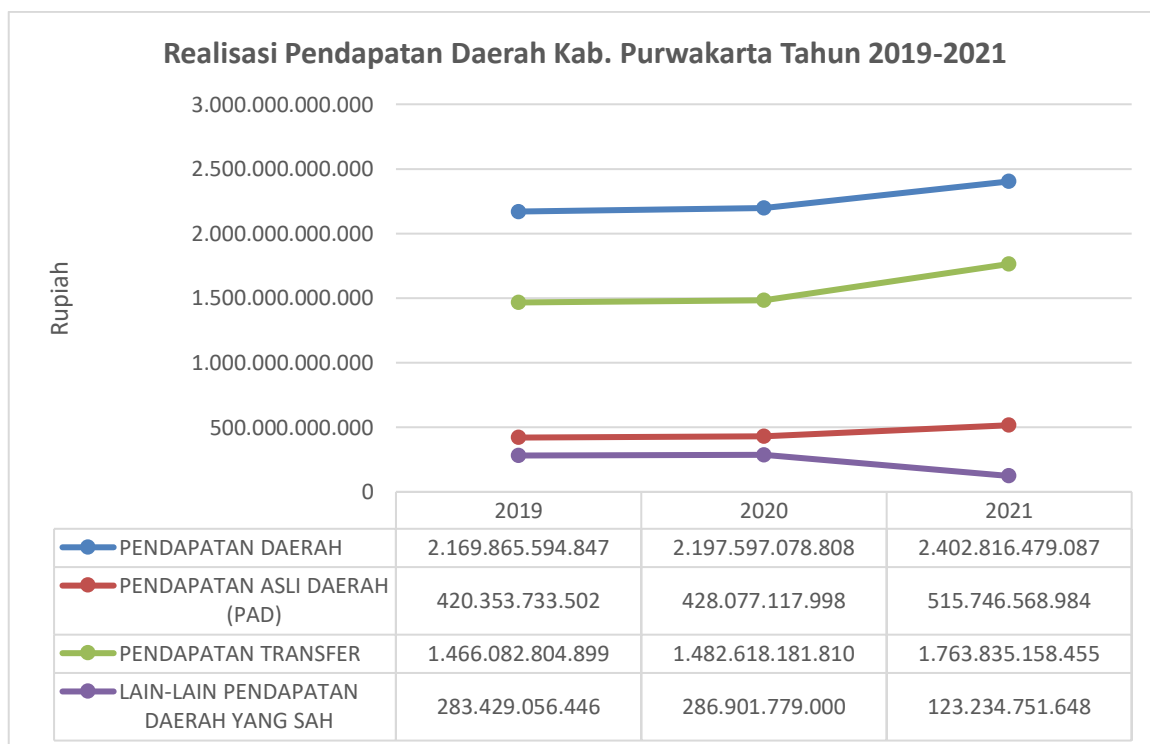
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.169.865.594.847	2.197.597.078.808	2.402.816.479.087	5,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	420.353.733.502	428.077.117.998	515.746.568.984	11,16
4.1.01	Pajak Daerah	244.826.953.244	250.048.366.305	286.064.771.702	8,27
4.1.02	Retribusi Daerah	21.438.760.660	27.806.891.170	22.984.397.619	6,18
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.349.792.210	5.901.060.417	5.964.612.631	5,69
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	148.738.227.388	144.320.800.106	200.732.787.032	18,06
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.466.082.804.899	1.482.618.181.810	1.763.835.158.455	10,05
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.254.756.529.989	1.257.384.044.758	1.471.176.858.725	8,61
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	211.326.274.910	225.234.137.052	292.658.299.730	18,26
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	283.429.056.446	286.901.779.000	123.234.751.648	-27,91
4.3.01	Pendapatan Hibah	116.030.301.446	119.433.257.000	123.234.751.648	3,06
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	167.398.755.000	167.468.522.000	0	-49,98

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Grafik 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021

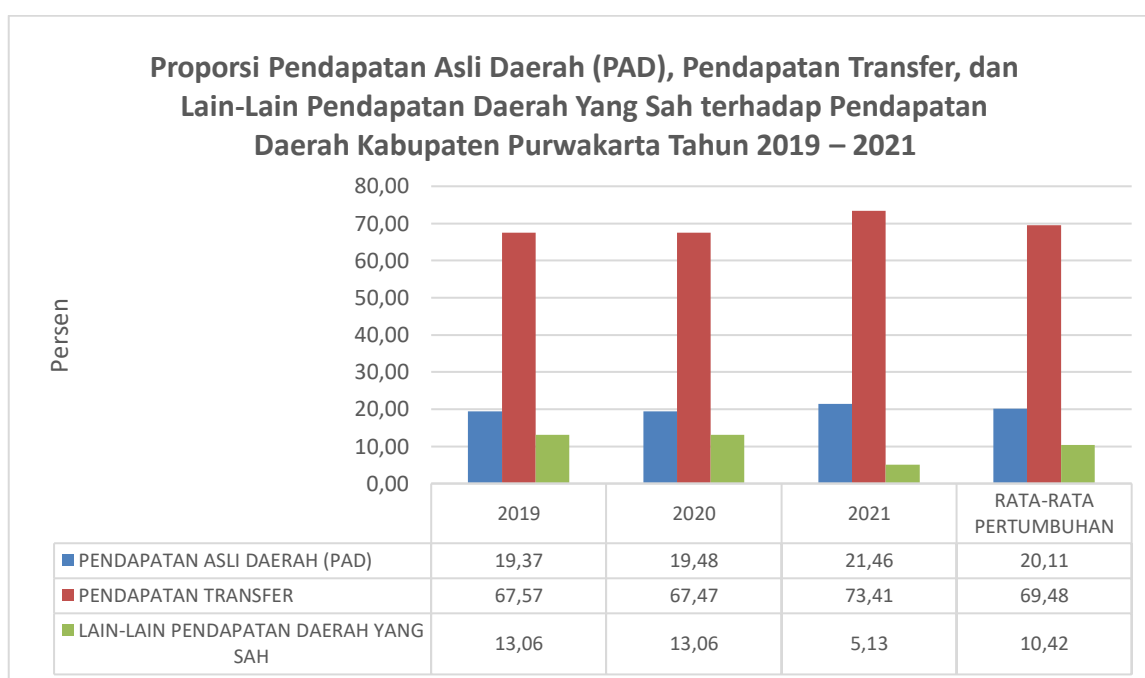


Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD 2022

Sedangkan bila dilihat dari proporsi persentase setiap sektor Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 3.2

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat bahwa proporsi Pendapatan Transfer sangat mendominasi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu tahun 2019-2021 yakni rata-rata sebesar 69,48%, kemudian sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 20,11% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 10,42%.

3.1.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan belanja daerah harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran,

berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai, yaitu menjamin dijalankannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Manajemen belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah daerah seperti : pro poor, pro job dan pro growth.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, meliputi belanja pegawai, belanja listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi kesehatan, dll;
2. Dukungan pendanaan dalam penanganan kesehatan masyarakat, insentif tenaga kesehatan, belanja kesehatan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan lainnya;
3. Dukungan pelaksanaan pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang masih terdampak akibat pandemi Covid-19;
4. Dukungan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah;
5. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) bidang, urusan wajib non pelayanan dasar sejumlah 18

- (delapan belas) bidang dan urusan pilihan sejumlah 8 (delapan) bidang serta fungsi penunjang, fungsi pendukung dan fungsi pemerintahan lainnya sejumlah 10 (sepuluh) bidang;
7. Dukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
 8. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan;
 9. Pemenuhan dana fungsi kesehatan sebesar 10% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan kesehatan;
 10. Pemenuhan dana fungsi infrastruktur sebesar 40% secara bertahan dalam rangka peningkatan pemenuhan infrastruktur daerah;
 11. Penyediaan bantuan keuangan desa, hibah dan bantuan sosial serta pemberian subsidi yang dibutuhkan;
 12. Penyediaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja yang sifatnya darurat dan mendesak; dan
 13. Penyediaan belanja modal pembangunan daerah, seperti, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi;

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta pada kurun waktu Tahun 2019 – 2021, secara umum dari aspek pengelolaan Belanja Daerah memperlihatkan trend dimana setiap tahun ada kenaikan kebutuhan pagu anggaran untuk belanja daerah dengan rata-rata sebesar 2,71%. Dari sektor Belanja Operasi terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 3,33%. Kemudian dari sektor Belanja Modal terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 0,86%. Pada sektor Belanja Tidak Terduga terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 8.638,47%. Sedangkan pada sektor Belanja Transfer terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 2,03%.

Realisasi kinerja pada sektor Belanja Tidak Terduga terlihat sangat signifikan kenaikannya, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pemenuhan kebutuhan anggaran Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 diantaranya untuk penanganan kesehatan, pengamanan jaring sosial masyarakat dan pemulihan ekonomi. Pemenuhan anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 ini telah menguras cukup banyak pagu anggaran belanja pada semua sektor, dimana dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut, dilakukan pergeseran anggaran dan refocusing target capaian kinerja pembangunan,

dengan tujuan agar penanganan pandemi ini dapat lebih fokus dan menyeluruh dengan didukung oleh anggaran belanja daerah yang optimal.

Adapun Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini :

Tabel 3.2

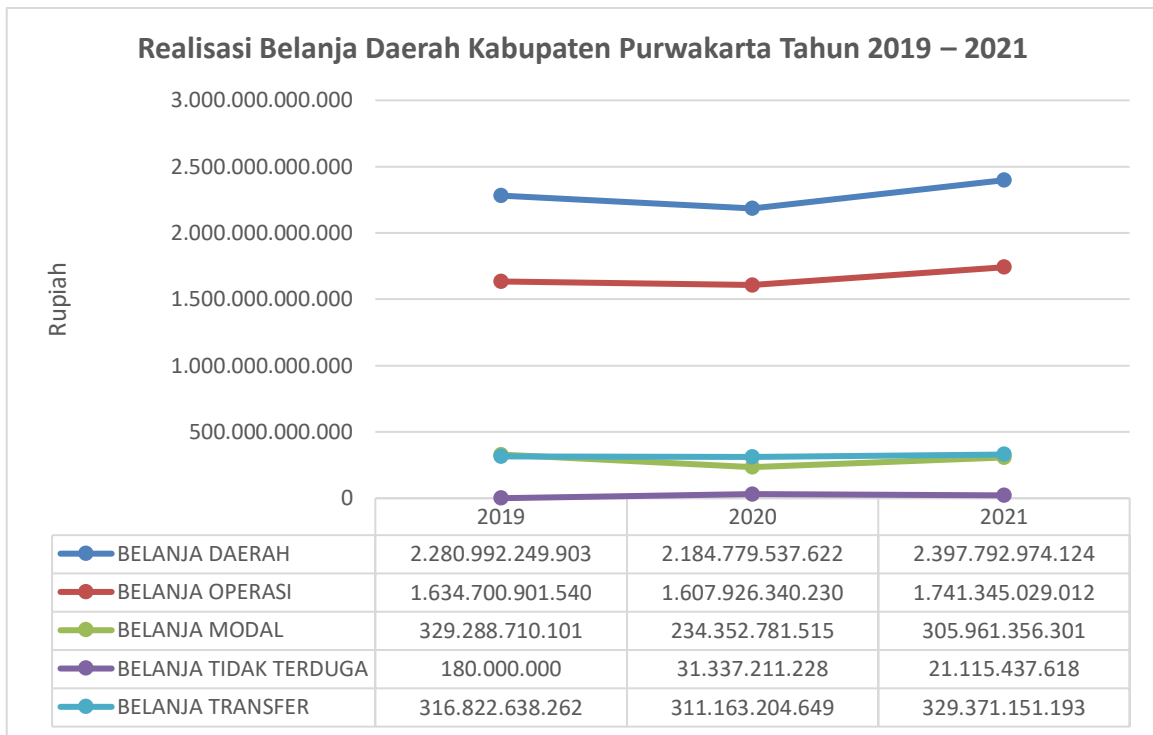
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	2.280.992.249.903	2.184.779.537.622	2.397.792.974.124	2,77
5.1	BELANJA OPERASI	1.634.700.901.540	1.607.926.340.230	1.741.345.029.012	3,33
5.1.01	Belanja Pegawai	1.009.252.000.724	961.918.101.977	918.150.922.272	-4,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.993.092.744	572.476.121.676	746.409.752.174	14,89
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	47.457.805.150	45.435.142.660	74.666.814.566	30,04
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.998.002.922	28.096.973.917	2.117.540.000	606,89
5.2	BELANJA MODAL	329.288.710.101	234.352.781.515	305.961.356.301	0,86
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.714.095.515	9.601.145.726	229.500.000	-49,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.992.097.488	94.587.063.837	164.933.700.271	29,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.680.019.087	82.510.483.630	95.517.889.109	4,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.917.571.047	35.450.120.200	38.157.250.021	-27,31
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.984.926.964	12.203.968.122	7.123.016.900	-46,39
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	180.000.000	31.337.211.228	21.115.437.618	8.638,47
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	180.000.000	31.337.211.228	21.115.437.618	8.638,47
5.4	BELANJA TRANSFER	316.822.638.262	311.163.204.649	329.371.151.193	2,03
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	48.663.409.140	29.927.822.558	27.860.059.993	-22,70
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	268.159.229.122	281.235.382.091	301.511.091.200	6,04

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Grafik 3.3

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD 2022

Sedangkan bila dilihat dari proporsi persentase setiap sektor Belanja terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 3.4

Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Operasi sangat mendominasi terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu tahun 2019-2021 yakni rata-rata sebesar 72,63%, kemudian sektor Belanja Transfer rata-rata sebesar 13,96%, Belanja Modal rata-rata sebesar 12,64% dan Belanja Tak Terduga rata-rata sebesar 0,77%.

Dari Belanja Operasi tersebut yang paling mendominasi yaitu kebutuhan untuk Belanja Pegawai yang mencapai rata-rata sebesar 42,19%. Besarnya anggaran tersebut untuk kebutuhan pembayaran Gaji dan Tunjangan.

3.1.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja keuangan masa lalu pada pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021, khususnya pada pengelolaan Pembiayaan Daerah memperlihatkan trend dimana setiap tahun ada penurunan pembiayaan dengan rata-rata sebesar -19,79%. Dari sektor Penerimaan Pembiayaan terlihat rata-rata penurunannya sebesar -26,93%. Kemudian dari sektor Pengeluaran Pembiayaan terlihat rata-rata penurunannya sebesar -57,05%.

Penurunan Pembiayaan Daerah dikarenakan pada sektor Penerimaan Pembiayaan terutama pada pos rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) terdapat penyerapan anggaran yang optimal ditahun sebelumnya.

Adapun Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini :

Tabel 3.3

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021

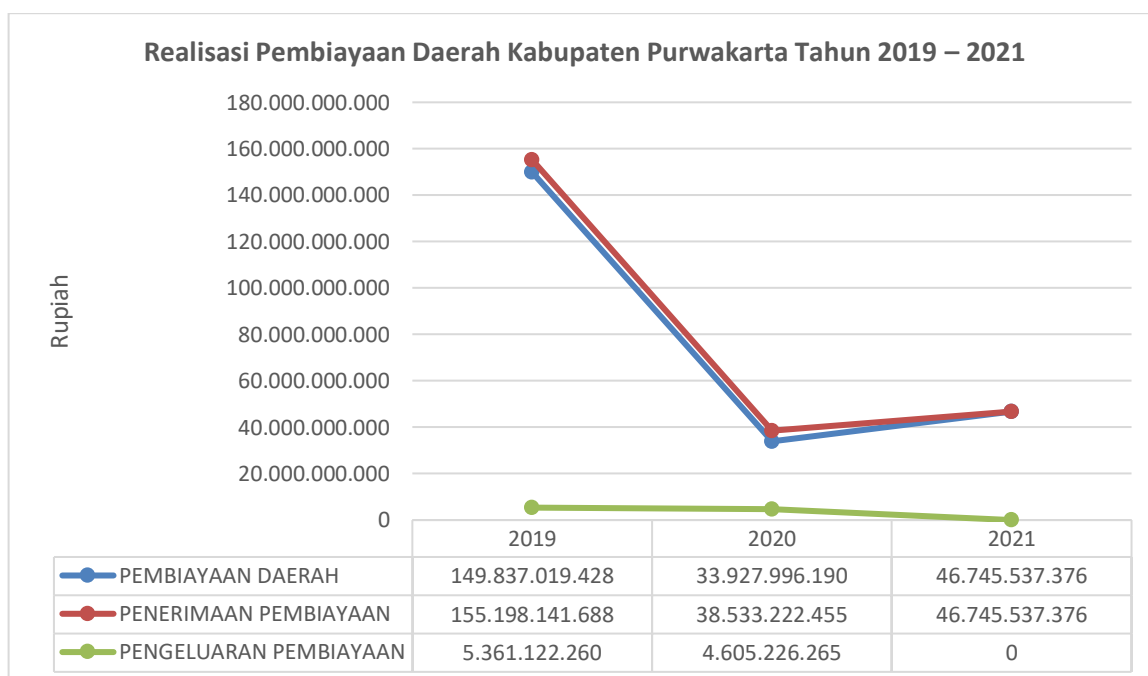
KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	149.837.019.428	33.927.996.190	46.745.537.376	-19,79
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.198.141.688	38.533.222.455	46.745.537.376	-26,93
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155.198.141.688	38.533.222.455	46.745.537.376	-26,93
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0	0,00

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.361.122.260	4.605.226.265	0	-57,05
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.050.000.000	4.500.000.000	0	-55,45
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	311.122.260	105.226.265	0	-83,09
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0	0,00

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Grafik 3.5

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



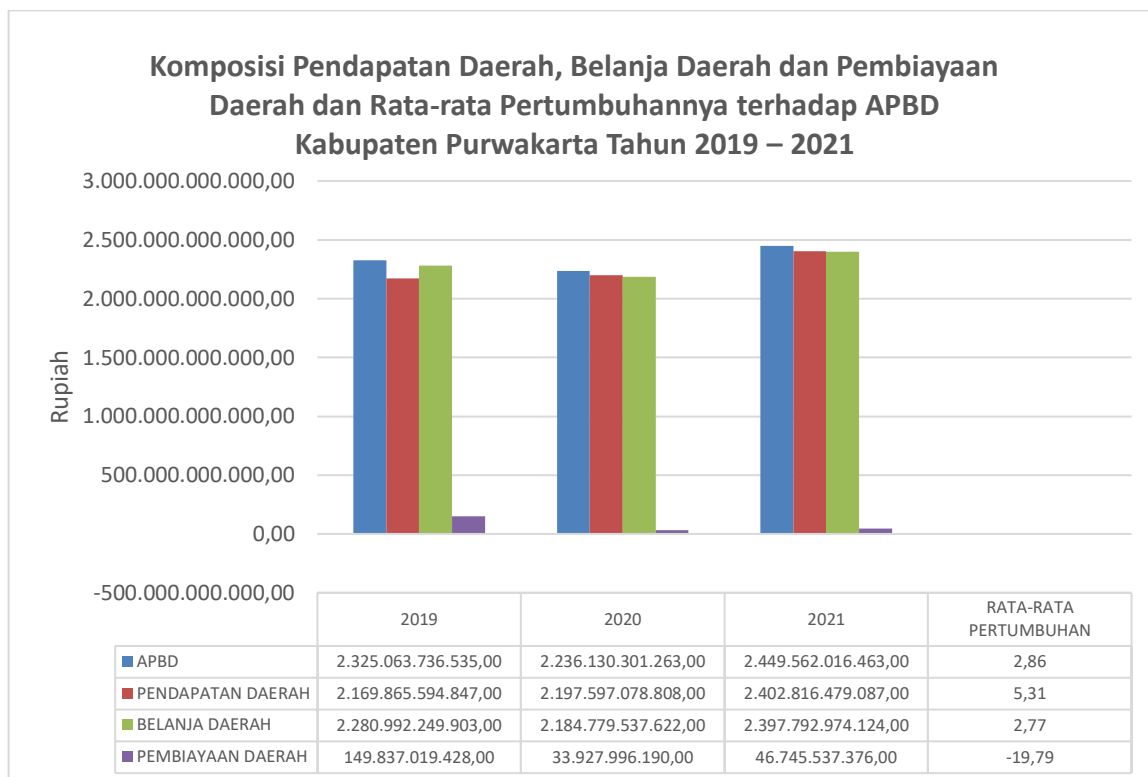
Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta pada kurun waktu Tahun 2019 – 2021, secara umum dari aspek pengelolaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat bahwa APBD Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dari Rp. 2.325.063.736.535 ditahun 2019 menjadi Rp. 2.449.562.016.463 pada tahun 2021, atau rata-rata pertumbuhan kenaikannya sebesar 2,86%.

Berikut kami sajikan komposisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dan rata-rata pertumbuhannya pada komponen APBD Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu tahun 2019-2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Grafik 3.6

Komposisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhannya terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Tabel 3.4

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.169.865.594.847	2.197.597.078.808	2.402.816.479.087	5,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	420.353.733.502	428.077.117.998	515.746.568.984	11,16
4.1.01	Pajak Daerah	244.826.953.244	250.048.366.305	286.064.771.702	8,27
4.1.02	Retribusi Daerah	21.438.760.660	27.806.891.170	22.984.397.619	6,18
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.349.792.210	5.901.060.417	5.964.612.631	5,69
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	148.738.227.388	144.320.800.106	200.732.787.032	18,06
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.466.082.804.899	1.482.618.181.810	1.763.835.158.455	10,05
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.254.756.529.989	1.257.384.044.758	1.471.176.858.725	8,61
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	211.326.274.910	225.234.137.052	292.658.299.730	18,26
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	283.429.056.446	286.901.779.000	123.234.751.648	-27,91
4.3.01	Pendapatan Hibah	116.030.301.446	119.433.257.000	123.234.751.648	3,06
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	167.398.755.000	167.468.522.000	0	-49,98
5	BELANJA DAERAH	2.280.992.249.903	2.184.779.537.622	2.397.792.974.124	2,77
5.1	BELANJA OPERASI	1.634.700.901.540	1.607.926.340.230	1.741.345.029.012	3,33
5.1.01	Belanja Pegawai	1.009.252.000.724	961.918.101.977	918.150.922.272	-4,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.993.092.744	572.476.121.676	746.409.752.174	14,89

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	47.457.805.150	45.435.142.660	74.666.814.566	30,04
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.998.002.922	28.096.973.917	2.117.540.000	606,89
5.2	BELANJA MODAL	329.288.710.101	234.352.781.515	305.961.356.301	0,86
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.714.095.515	9.601.145.726	229.500.000	-49,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.992.097.488	94.587.063.837	164.933.700.271	29,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.680.019.087	82.510.483.630	95.517.889.109	4,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.917.571.047	35.450.120.200	38.157.250.021	-27,31
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.984.926.964	12.203.968.122	7.123.016.900	-46,39
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	180.000.000	31.337.211.228	21.115.437.618	8.638,47
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	180.000.000	31.337.211.228	21.115.437.618	8.638,47
5.4	BELANJA TRANSFER	316.822.638.262	311.163.204.649	329.371.151.193	2,03
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	48.663.409.140	29.927.822.558	27.860.059.993	-22,70
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	268.159.229.122	281.235.382.091	301.511.091.200	6,04
	Total Surplus/(Defisit)	-111.126.655.056	12.817.541.186	5.023.504.963	-86,17
6	PEMBIAYAAN DAERAH	149.837.019.428	33.927.996.190	46.745.537.376	-19,79
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.198.141.688	38.533.222.455	46.745.537.376	-26,93
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155.198.141.688	38.533.222.455	46.745.537.376	-26,93

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.361.122.260	4.605.226.265	0	-57,05
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.050.000.000	4.500.000.000	0	-55,45
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	311.122.260	105.226.265	0	-83,09
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	38.710.364.372	46.745.537.376	51.769.042.339	15,75
	TOTAL APBD	2.325.063.736.535	2.236.130.301.263	2.449.562.016.463	2,86

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Laporan Neraca Daerah memberikan informasi penting kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah Daerah, DPRD, pemberi pinjaman, investor dan masyarakat luas lainnya) tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Neraca Daerah ini terdiri atas:

1. **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung

maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Dari Neraca Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2021 dapat diperoleh gambaran bahwa rata-rata pertumbuhan aset yang menjadi hak dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah 3,67%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kekayaan yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rata-rata pertumbuhan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah 6,72% menandakan bahwa roda pemerintahan dijalankan dengan tidak sepenuhnya mengandalkan pinjaman.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas dana meliputi (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan.

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019–2021 rata rata pertumbuhannya adalah sebesar 3,56% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kekayaan bersih yang menjadi modal kerja dalam pelaksanaan program kegiatan.

Adapun Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

URAIAN	2019	2020	2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	17.587.753.927	33.155.076.596	14.067.613.038	15,47
Kas di pemegang kas				
Kas di bendahara pengeluaran	54.751.819	105.242		-99,90
Kas di bendahara penerimaan			166.249.475	
Kas di BLUD	4.227.185.263	4.250.922.606	34.987.065.309	361,80
Kas Dana JKN	12.463.323.288	7.145.850.034	2.202.624.905	-55,92
Kas di BOS	4.407.114.847	2.196.235.941	345.489.612	-67,22
Kas Lainnya			59.526.857	
Piutang Pajak	86.064.185.001	100.648.023.433	111.172.840.314	13,70
Penyisihan Piutang Pajak	-47.739.812.563	-55.451.646.227	-63.278.662.349	15,13
 Piutang Pajak netto	38.324.372.438	45.196.377.206	47.894.177.965	11,95
Piutang Retribusi	3.509.330.165	3.540.825.165	11.410.020.800	111,57
Penyisihan Piutang Retribusi	-1.993.864.705	-2.475.258.795	-6.794.752.870	99,33
 Piutang Retribusi netto	1.515.465.460	1.065.566.370	4.615.267.930	151,72
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	25.965.807.343	18.483.548.911	14.075.011.941	-26,33
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-129.829.036			-100,00
 Piutang Transfer Pemerintah Pusat netto	25.835.978.307	18.483.548.911	14.075.011.941	-26,15

URAIAN	2019	2020	2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
Belanja Dibayar di Muka (Uang muka)	131.862.750	237.196.083	498.821.667	95,09
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran				
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	163.000.000	11.600.000		-96,44
Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	-16.300.000	-58.000		-99,82
 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	146.700.000	11.542.000		-96,07
Piutang Lainnya	46.030.545.629	49.726.072.152	86.113.244.627	40,60
Penyisihan Piutang Lainnya	-4.376.038.893	-6.528.637.712	-8.051.755.785	36,26
 Piutang Lainnya Netto	41.654.506.736	43.197.434.440	78.061.488.842	42,21
Persediaan	39.920.823.155	44.678.256.630	51.799.278.597	13,93
 Jumlah Aset Lancar	186.269.837.990	199.618.112.059	248.772.616.138	15,90
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Permanen				
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	52.779.393.033	57.406.719.284	57.554.289.060	4,51
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-BJB	12.804.792.750	12.804.792.750	12.804.792.750	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-BPR Raharja	15.005.917.172	19.593.834.811	19.792.166.164	15,79
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-PDAM	23.444.229.014	23.481.063.481	23.452.971.382	0,02
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-LKM Mekar Asih	1.524.454.097	1.527.028.242	1.504.358.764	-0,66
 Jumlah Investasi Permanen	52.779.393.033	57.406.719.284	57.554.289.060	4,51
Investasi Non Permanen				
 Jumlah Investasi Jangka Panjang	52.779.393.033	57.406.719.284	57.554.289.060	4,51

URAIAN	2019	2020	2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
ASET TETAP				
Tanah	284.863.397.012	294.430.832.738	294.763.215.238	1,74
Peralatan dan Mesin	800.462.427.113	911.046.928.665	1.082.932.791.460	16,34
Gedung dan Bangunan	1.159.936.793.406	1.218.250.849.340	1.329.615.168.282	7,08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.404.732.800.195	1.437.694.541.385	1.473.321.515.115	2,41
Aset Tetap Lainnya	176.297.666.152	196.687.784.201	203.635.603.801	7,55
Kontruksi dalam Pengerjaan	20.883.435.584	36.526.260.270	14.463.980.084	7,25
Akumulasi Penyusutan	-1.388.173.719.948	-1.597.502.150.400	-1.796.109.112.121	13,76
Jumlah Aset Tetap	2.459.002.799.514	2.497.135.046.199	2.602.623.161.859	2,89
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran	50.899.000	50.899.000	50.899.000	0,00
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	50.899.000	50.899.000	50.899.000	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	4.148.736.385	4.311.736.385	4.192.198.285	0,58
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi				
Tuntutan Ganti Rugi Netto	4.148.736.385	4.311.736.385	4.192.198.285	0,58
Dana Talangan dari BI (Eks BKPD-BBKO)				
Dana Talangan dari Kas Daerah (Eks BKPD-BBKO)				
Kemitraan dengan pihak ketiga	4.507.174.733	4.507.174.733	4.507.174.733	0,00

URAIAN	2019	2020	2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
Tanah Sadang Terminal Square	3.625.500.000	3.625.500.000	3.625.500.000	0,00
Bangunan Sadang Terminal Square				
Hewan Ternak yang Dikerjasamakan dengan masyarakat				
Aset Tanah yang dikerjasamakan dengan PT. SHP	881.674.733	881.674.733	881.674.733	0,00
Aset Tak Berwujud				
Amortisasi Aset Tidak berwujud				
Aset Tak Berwujud Netto				
Aset Lain-lain	11.714.928.817	2.721.516.317	2.916.366.317	-34,80
BKPD (BBO)				
BKPD Kecamatan Purwakarta				
BKPD Kecamatan Plered				
BKPD Kecamatan Campaka				
Dana Bergulir BPR Raharja (Invest. Non Permanen)	115.660.664	115.660.664	115.660.664	0,00
Aset lainnya yang dihibahkan kepada masyarakat				
Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga	9.646.602.000		194.850.000	
Hewan ternak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	378.265.999	378.265.999	378.265.999	0,00
Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat	1.574.400.154	2.227.589.654	2.227.589.654	20,74
Jumlah Aset Lainnya	20.421.738.935	11.591.326.435	11.666.638.335	-21,30
JUMLAH ASET	2.718.473.769.472	2.765.751.203.977	2.920.616.705.392	3,67

URAIAN	2019	2020	2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Hutang Pajak				
Utang pada Pihak Ketiga				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	29.764.772	2.653.043	59.526.857	1.026,32
Utang Bunga	0	0	0	
Pendapatan diterima dimuka	5.772.398.200	5.712.176.865	3.745.980.565	-17,73
Utang Belanja	83.880.854.240	89.930.306.855	99.000.975.355	8,65
Utang jangka pendek lainnya	1.663.319.704	2.931.607.116	1.225.330.650	9,02
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	91.346.336.916	98.576.743.879	104.031.813.427	6,72
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Hutang Kepada Lembaga Keuangan				
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan				
Utang Jangka panjang lainnya				
Hutang Kepada Pemerintah Pusat				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
JUMLAH KEWAJIBAN	91.346.336.916	98.576.743.879	104.031.813.427	6,72

URAIAN	2019	2020	2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)				
Pendapatan yang Ditangguhkan				
Cadangan Piutang				
Cadangan Persediaan				
Cadangan untuk Biaya dibayar dimuka				
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek				
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya				
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang				
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	
JUMLAH EKUITAS/ EKUITAS DANA				
JUMLAH EKUITAS	2.627.127.432.556	2.667.174.460.098	2.816.584.891.965	3,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.718.473.769.472	2.765.751.203.977	2.920.616.705.392	3,67

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, 2022

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat menentukan hasil pembangunan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, sehingga perlu mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis daerah.

Kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Purwakarta periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Purwakarta diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat dan antar daerah), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purwakarta antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana transfer dan pendapatan lainnya yang sah;
3. Merasionalisasikan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;

4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
5. Meningkatkan pelayanan publik terkait pendapatan daerah berupa pelayanan konsultasi, pengaduan, penelusuran dan pemberian apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak teladan;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana teknis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
8. Mengoptimalkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
10. Meningkatkan iklim investasi dalam penanaman modal di daerah yang ramah, cepat, transparan dan mudah diakses;
11. Meningkatkan promosi daerah dan penataan destinasi wisata yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan perkembangan penyebaran Covid-19;
12. Meningkatkan penataan sarana dan prasarana lokasi/tempat yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah;
13. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;

2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada obyek pendapatan yang menjadi hak dan kewenangan Kabupaten Purwakarta; dan
4. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, meliputi belanja pegawai, belanja listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi kesehatan, dll;
2. Dukungan pendanaan dalam penanganan kesehatan masyarakat, insentif tenaga kesehatan, belanja kesehatan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan lainnya;
3. Dukungan pelaksanaan pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang masih terdampak akibat pandemi Covid-19;
4. Dukungan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah;
5. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;

6. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) bidang, urusan wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang dan urusan pilihan sejumlah 8 (delapan) bidang serta fungsi penunjang, fungsi pendukung dan fungsi pemerintahan lainnya sejumlah 10 (sepuluh) bidang;
7. Dukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
8. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan;
9. Pemenuhan dana fungsi kesehatan sebesar 10% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan kesehatan;
10. Pemenuhan dana fungsi infrastruktur sebesar 40% secara bertahap dalam rangka peningkatan pemenuhan infrastruktur daerah;
11. Penyediaan bantuan keuangan desa, hibah dan bantuan sosial serta pemberian subsidi yang dibutuhkan;
12. Penyediaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja yang sifatnya darurat dan mendesak; dan
13. Penyediaan belanja modal pembangunan daerah, seperti, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi;

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan pengelolaan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

- a) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

- b) Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja.
- c) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis Penggunaan Anggaran dapat dilihat dari pengelolaan belanja daerah dimana rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama kurun waktu tahun 2019-2021 sebesar 2,77%.

Pada komponen Belanja Operasi khususnya untuk Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Belanja Pegawai) di Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu tahun 2019-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhannya menurun sebesar -4,62%.

Sedangkan bila dilihat dari proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Belanja Pegawai) terhadap Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran selama kurun waktu tahun 2019-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 42,12%.

Adapun analisis pertumbuhan dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	2	3	4	5 (3/4 x 100)
1	Tahun 2019	1.009.252.000.724	2.286.353.372.163	44,14
2	Tahun 2020	961.918.101.977	2.189.384.763.887	43,94
3	Tahun 2021	918.150.922.272	2.397.792.974.124	38,29

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Grafik 3.7

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai / Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran trendnya menurun, dimana nilai proporsi rata-rata sebesar 42,12%. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan yang baik dalam hal peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan pembangunan daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang – Undangan.

Penghitungan defisit riil anggaran di Kabupaten Purwakarta dihitung melalui Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan Total Kebutuhan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan perhitungan ini akan terlihat berapa besaran defisit sesuai dengan kemampuan Pendapatan Daerah.

Adapun perhitungan analisis Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.169.865.594.847	2.197.597.078.808	2.402.816.479.087
	Dikurangi Realisasi			
2	Belanja Daerah	2.280.992.249.903	2.184.779.537.622	2.397.792.974.124
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.361.122.260	4.605.226.265	0
	Defisit Riil	-116.487.777.316	8.212.314.921	5.023.504.963

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Dalam upaya mengatasi defisit ini salah satunya adalah melalui pemanfaatan anggaran dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya. Dimana dalam menghitung komponen penutup defisit riil ini adalah dengan membagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya dengan Total Defisit Riil setiap tahunnya.

Adapun Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)		
		2019	2020	2021
A.	Defisit Riil	-116.487.777.316	8.212.314.921	5.023.504.963
	ditambah			
B.	Penerimaan Pembiayaan :	155.198.141.688	38.533.222.455	46.745.537.376

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)		
		2019	2020	2021
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155.198.141.688	38.533.222.455	46.745.537.376
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0
C.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	38.710.364.372	46.745.537.376	51.769.042.339

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Tabel 3.9

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Realisasi Tahun			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
1	Jumlah SILPA	38.710.364.372	46.745.537.376	51.769.042.339	15,75
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Sebelum terselesaikan	-	-	-	
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu tiga tahun mendatang.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam menyusun analisis kerangka pendanaan pembangunan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diterbitkan turunan peraturan pelaksanaannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, analisis proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Purwakarta untuk 3 (tiga) tahun mendatang harus mempertimbangkan pemenuhan mandatory spending sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dan pemenuhan kebutuhan prioritas pembangunan nasional maupun daerah sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan, dengan memperhitungkan tren pertumbuhan capaian realisasi kinerja keuangan pada tahun sebelumnya

agar proyeksi anggaran yang disusun dapat sesuai dengan kemampuan target anggaran keuangan yang akan dicapai.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

Dengan memperhatikan kondisi sekarang dimana kebijakan pengelolaan keuangan daerah masih diarahkan pada penanganan sisa dampak pandemi Covid-19 dan penanganan dampak inflasi daerah, tentunya akan mempengaruhi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang sama-sama memerlukan dukungan anggaran untuk mewujudkan program prioritas yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan keuangan daerah harus dapat mengukur kemampuan kapasitas riil dalam membiayai atau mendanai program prioritas pembangunan daerah agar dapat berjalan sesuai target yang telah dilakukan penyesuaian.

Sejalan dengan hal itu, pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU HKPD”) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah terutama peningkatan pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer daerah dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH).

Realisasi pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun 2019-2021 dimana pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah sebesar 5,31%.

Kemudian untuk realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun 2019 - 2021 dimana pertumbuhan rata-rata kebutuhan belanja daerah sebesar 2,77%.

Sedangkan realisasi pembiayaan daerah dari pos penerimaan pembiayaan apabila memperhatikan realisasi anggaran tahun 2019-2021 dimana pertumbuhan rata-rata pembiayaan daerah sebesar -19,79%.

Dari uraian diatas, maka proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dapat disimpulkan bahwa

proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purwakarta dalam kurun waktu 2024 – 2026 rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,64%

Adapun Proyeksi APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Proyeksi APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.451.297.029.258	2.487.389.549.811	2.536.888.117.380	1,72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	749.285.264.555	760.752.492.323	782.467.778.588	2,18
4.1.01	Pajak Daerah	493.164.444.405	497.264.183.455	503.049.354.401	0,99
4.1.02	Retribusi Daerah	40.131.794.939	41.488.739.139	42.976.405.759	3,43
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.635.881.071	7.998.828.832	8.386.353.432	4,69
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	208.353.144.140	214.000.740.897	228.055.664.996	4,60
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.702.011.764.703	1.726.637.057.488	1.754.420.338.792	1,52
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.506.316.436.671	1.525.561.517.921	1.546.828.734.834	1,33
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.695.328.032	201.075.539.567	207.591.603.958	2,96
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
5	BELANJA DAERAH	2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243	1,64
5.1	BELANJA OPERASI	1.955.085.354.777	1.970.743.893.225	2.003.231.802.963	1,22
5.1.01	Belanja Pegawai	995.261.945.631	994.691.735.221	995.691.735.221	0,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.632.645.891	921.651.823.691	949.860.491.560	2,24
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.698.163.255	46.888.972.328	46.888.972.328	1,27
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.492.600.000	7.511.361.985	10.790.603.854	35,27
5.2	BELANJA MODAL	162.486.404.445	182.005.946.954	196.389.605.672	9,31
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.237.828.888	1.361.982.438	1.591.637.826	12,99
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.964.513.876	75.951.602.386	78.332.961.485	4,19
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.631.694.266	47.331.694.266	52.218.933.269	12,24
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.953.645.869	43.661.946.318	49.145.809.867	15,11
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.698.721.546	13.698.721.546	15.100.263.225	8,77
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.348.210.605	23.511.954.478	23.708.989.850	0,77
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.348.210.605	23.511.954.478	23.708.989.850	0,77
5.4	BELANJA TRANSFER	348.669.312.558	348.779.081.017	349.209.044.758	0,08
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	44.927.822.558	44.962.193.106	44.692.156.847	-0,26
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	303.741.490.000	303.816.887.911	304.516.887.911	0,13
	Total Surplus/(Defisit)	-38.292.253.127	-37.651.325.863	-35.651.325.863	-3,51
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243	1,64
6	PEMBIAYAAN DAERAH	38.292.253.127	37.651.325.863	35.651.325.863	-3,51
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.292.253.127	42.651.325.863	40.651.325.863	-3,10
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.292.253.127	42.651.325.863	40.651.325.863	-3,10

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiIpa)	0	0	0	
	TOTAL APBD	2.494.589.282.385	2.530.040.875.674	2.577.539.443.243	1,64

Sumber : Analisa TAPD tahun 2022

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk mengetahui besaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Dalam menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah terdapat penentuan Proyeksi SILPA, Proyeksi SiLPA berdasarkan analisis pertumbuhan realisasi besaran SiLPA pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2019 - 2021. Pada periode tahun 2024 - 2026 diproyeksikan menurun sebesar -3,10%. Penurunan SiLPA tersebut diharapkan penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi dan diganti dengan Belanja Daerah yang terdiri dari : a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer, sehingga perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah sama dengan Belanja Daerah.

Dengan kondisi tersebut maka proyeksi belanja Tahun 2024 - 2026 disusun sesuai konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Berikut adalah proyeksi SiLPA, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 -2026 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

Uraian	Proyeksi		
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	43.292.253.127	42.651.325.863	40.651.325.863

Sumber: Analisa Tim, 2023

Tabel 3.12

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta

No.	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Daerah	2.451.297.029.258	2.487.389.549.811	2.536.888.117.380
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	43.292.253.127	42.651.325.863	40.651.325.863
	Total penerimaan	2.494.589.282.385	2.530.040.875.674	2.577.539.443.243
	Dikurangi:			
4	Belanja Tidak Langsung	0	0	0
5	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243

Sumber: Analisa Tim, 2023

Tabel 3.13

Belanja Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243
5.1	BELANJA OPERASI	1.955.085.354.777	1.970.743.893.225	2.003.231.802.963
5.1.01	Belanja Pegawai	995.261.945.631	994.691.735.221	995.691.735.221
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.632.645.891	921.651.823.691	949.860.491.560
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	45.698.163.255	46.888.972.328	46.888.972.328
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.492.600.000	7.511.361.985	10.790.603.854
5.2	BELANJA MODAL	162.486.404.445	182.005.946.954	196.389.605.672
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.237.828.888	1.361.982.438	1.591.637.826
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.964.513.876	75.951.602.386	78.332.961.485
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.631.694.266	47.331.694.266	52.218.933.269
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.953.645.869	43.661.946.318	49.145.809.867
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.698.721.546	13.698.721.546	15.100.263.225
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.348.210.605	23.511.954.478	23.708.989.850
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.348.210.605	23.511.954.478	23.708.989.850
5.4	BELANJA TRANSFER	348.669.312.558	348.779.081.017	349.209.044.758

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	44.927.822.558	44.962.193.106	44.692.156.847
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	303.741.490.000	303.816.887.911	304.516.887.911
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243

Sumber: Analisa Tim, 2023

Selanjutnya dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program prioritas*).

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purwakarta selama 3 (tiga) tahun dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Adapun penjelasan masing-masing prioritas, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Adapun Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

No.	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243
1	Prioritas I (untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar)	1.753.410.835.082	1.773.519.089.141	1.801.349.728.465
2	Prioritas II (untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah)	720.068.413.238	735.097.148.287	754.254.183.910
3	Prioritas III (untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya)	16.110.034.065	16.424.638.246	16.935.530.868

Sumber: Analisa Tim, 2023

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Secara umum dengan adanya pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai capaian kinerja pembangunan daerah, termasuk dampak dari kenaikan inflasi daerah. Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, serta diurai menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Ketiga aspek permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan dalam mendukung proses pembangunan daerah;

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta apabila dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat

peningkatan dari tahun 2019 – 2022 dimana nilai IPM Kab. Purwakarta tahun 2022 mencapai 71,56 poin. Namun demikian apabila dilihat dari aspek lain seperti nilai Indeks Profesionalitas ASN, sampai dengan tahun 2022 masih menyandang predikat Sangat Rendah, sehingga kualitas SDM yang mendukung dalam pembangunan daerah masih kurang optimal. Sedangkan dari aspek pemajuan kebudayaan terutama kebudayaan khas daerah yang menjadi kekayaan dan keanekaragaman budaya juga masih perlu ditingkatkan dari sisi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaannya agar pemajuan kebudayaan tersebut dapat lebih optimal dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah.

2. Kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/ prasarana bidang Kesehatan dan KB masih perlu ditingkatkan secara optimal

Sejak pandemi Covid-19 melanda diberbagai daerah termasuk Kabupaten Purwakarta, telah menguji kesiapan dan kualitas mutu pelayanan kesehatan di daerah, akses pelayanan dan sarana prasarana kesehatan yang belum optimal dan memadai telah menjadi kendala yang harus diatasi, mulai dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penyediaan SDM tenaga kesehatan yang merata, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan memadai termasuk ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan serta penyuluhan dan pemberdayaan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat harus terus ditingkatkan secara optimal.

3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan;

Dalam merespon setiap kejadian bencana yang tidak dapat di prediksi sebelumnya tentu perlu dilakukan langkah antisipatif guna memperoleh informasi/ peringatan awal (early warning) terhadap potensi bencana yang akan terjadi, baik bencana alam maupun bencana karena kelalaian manusia, termasuk bencana akibat kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Dalam penanganan bencana daerah tidak hanya terpusat pada penanganan pasca bencana saja namun harus dilakukan secara sistemis dan sistematis mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat kejadian dan penanganan pasca kejadian bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi terhadap sistem ketahanan bencana dan

pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan guna mengukur kesiapan daerah dalam penanganan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui terobosan inovasi;

Semenjak pandemi Covid-19 melanda berbagai daerah bahkan melanda diberbagai belahan daerah di dunia, sosial ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan mengakibatkan perekonomian daerah menurun secara signifikan, dan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta perkembangannya naik-turun, dimana angka 7,48% ditahun 2019 menjadi 8,83% pada tahun 2021, kemudian turun di tahun 2022 ke angka 8,70%. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2020 menurun sampai pada level -2,13 persen namun pada 2021 dan 2022 beranjak naik ke angka 3,42 dan 5,24 persen. Meskipun ada peningkatan tiap tahunnya namun pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat lebih berkembang, maju dan mandiri.

Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat tersebut perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang.

Selain itu upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih harus terus digalakkan, disisi lain program pemulihan ekonomi sangat perlu untuk terus diprioritaskan guna menurunkan angka kemiskinan pada level terendah.

Kebijakan ini tentu harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan program prioritas pembangunannya dalam upaya penurunan angka kemiskinan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor urusan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

5. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara maju dan modern;

Dalam penerapan reformasi birokrasi di daerah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih harus di tingkatkan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat baik secara efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai dengan kategori Baik, namun tentunya efektifitas pelaksanaannya mesti terus dioptimalkan agar pelayanan dan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Purwakarta terus meningkat.

Dari aspek akuntabilitas dan maturitas pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan juga masih perlu terus ditingkatkan terutama dari aspek tata kelola pemerintahan (good governance), tata kelola keuangan, pengelolaan manajemen SDM, dll. termasuk peningkatan dan pemanfaatan inovasi daerah baik secara teknologi informasi maupun regulasi, sehingga dapat menyikapi setiap perubahan dinamika dan regulasi yang terus berkembang setiap waktu.

6. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang masih belum merata;

Ketersediaan infrastruktur dasar sebagai sarana konektivitas antar wilayah (jalan dan jembatan) sudah sepatutnya menjadi prioritas pembangunan daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap wilayah, capaian ketersediaan infrastruktur (Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap) di Kab. Purwakarta tahun 2021 terdapat penurunan dibanding tahun 2020, yakni hanya 83,25 persen atau turun - 4,63 persen. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga berdampak pada pembangunan fisik terutama pembangunan akses jalan, akibatnya penyediaan sarana infrastruktur konektivitas masih belum merata di setiap wilayah.

7. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan penanganan masalah kesehatan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan jumlah pengangguran, kemiskinan serta penurunan kesejahteraan sosial.

Penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 – 2021 telah dilakukan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta termasuk pendudukan anggaran dan refocusing target kinerja pembangunan untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengamanan jaring sosial. Meskipun secara berangsur upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 ini telah membuahkan hasil dari sebagian aspek yang terdampak, namun dikarenakan dampak dari pandemi ini masih membayangi masyarakat, walaupun Pemerintah Pusat telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tetapi pencegahan dan pengendalian Covid-19 menuju Endemi masih tetap dilakukan dan masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta termasuk penanganan penanggulangan kemiskinan yang setiap tahun kecenderungannya terus meningkat.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

1. Bidang Pendidikan

1. Masih kurang meratanya pelayanan pendidikan;
2. Sarana dan Prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan;
3. Kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan;
4. Masih kurangnya guru PNS sehingga banyak sekolah yang mengandalkan tenaga guru dari guru bantu maupun guru tidak tetap;
5. Akibat pandemi Covid-19, proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka menjadi terganggu sehingga harus dilakukan pola pembelajaran dengan cara jarak jauh atau daring, namun dari segi fasilitas pendukung yang digunakan masih kurang, selain itu metode pembelajarannya masih belum efektif dilaksanakan.

2. Bidang Kesehatan

1. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi lansia dan penyandang cacat;
2. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir;
3. Masih adanya balita gizi buruk dan kasus *stunting*;
4. Masih adanya penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, leptospirosis, ISPA, diare, dan sebagainya);
5. Penyakit degeneratif, penyakit tidak menular pada usia diatas 15 tahun masih belum optimal penanganannya;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
7. Fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal mutu pelayanannya;
8. Jumlah peserta penjaminan kesehatan menurun;
9. Meningkatnya jumlah pasien akibat covid-19, yang menyebabkan daya tampung fasilitas kesehatan dan rumah sakit meningkat bahkan tidak terlayani dengan baik karena keterbatasan ruang perawatan dan tenaga medis kesehatan;

10. Masih kurangnya tenaga medis kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensi serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata sesuai kebutuhan, serta kualitas sehingga pelayanan kesehatan belum optimal;
11. Masih adanya penduduk miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Tertundanya pekerjaan fisik akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi covid-19;
2. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
3. Cakupan air bersih/air minum masih ada yang belum memenuhi SPM;
4. Belum optimalnya pengelolaan drainase pada beberapa titik kawasan permukiman maupun jalan, sehingga menyebabkan potensi genangan air yang cukup tinggi;
5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional, dimana prasarana TPA/TPS masih kurang sehingga daya tampung sampah belum optimal;
6. Masih banyak kerusakan jalan dan jembatan yang kondisinya kurang baik akibat beban yang melebihi tonase, kontur tanah yang labil, maupun akibat bencana alam;
7. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum adanya peraturan pengelolaan PSU di lingkungan permukiman;
2. Terbatasnya penyediaan lahan dan pemenuhan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
3. Masih terdapat kawasan yang perlu penanganan lebih lanjut untuk mencegah menjadi kawasan kumuh;

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya pelayanan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan resiko bencana;
2. Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku, terutama Perda terkait Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban (K3);

6. Bidang Sosial

1. Belum adanya tempat dan sarana prasarana penampungan hasil penjangkauan dan penertiban dalam upaya koersif anak jalanan dan orang terlantar;
2. Data PMKS daerah belum bisa terintegrasi dengan data pusat;
3. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap permasalahan sosial (kondisi anak terlantar, penyandang disabilitas);
4. Dampak penanganan pandemi Covid-19 dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih terdapat data penerima bantuan yang kurang tepat sasaran dan masih yang belum dapat menerima bantuan dikarenakan terbatasnya kuota jumlah penerima bantuan;
5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas dan lansia;
6. Penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk layanan program jaminan dan perlindungan sosial secara nasional belum optimal;
7. Terjadinya Pandemi Covid-19 berdampak pada potensi meningkatnya jumlah keluarga miskin;

7. Bidang Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan kerja karena keterbatasan sarana prasarana dan instruktur, serta kurikulum yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
4. Belum tersedianya data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja, Persentase tenaga kerja yang siap kerja, AKAD (antar kerja antar daerah) yang dikarenakan tidak adanya penganggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Belum sepenuhnya semua pekerja memahami hukum ketenagakerjaan;
6. Relatif masih minimnya kualitas angkatan kerja untuk bersaing di dunia kerja, terlebih dengan akan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) beserta konsekuensi yang harus dihadapi oleh para pekerja dan calon;
7. Isu terkait pasar kerja didorong menjadi inklusi, perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan;
8. Terjadinya Pandemi Covid-19 berdampak pada potensi meningkatnya jumlah pengangguran;

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG dikarenakan kurangnya komitmen masing-masing perangkat daerah;
2. Masih banyak fasilitas umum yang belum ramah anak, remaja dan lansia;
3. Masih banyak ditemukan kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak;
4. Masih kurangnya sharing dana desa untuk keberlanjutan P2WKSS;

5. Belum optimalnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

9. Bidang Pangan

1. Serangan OPT yang masih tinggi;
2. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang masih tinggi;
3. Pengawasan ketersediaan dan harga pangan belum optimal;
4. Pengadaan beras dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah belum optimal.

10. Bidang Pertanahan

1. Lambatnya proses administrasi pertanahan;
2. Kurangnya kesadaran hukum terkait pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat, sehingga banyak menimbulkan konflik;
3. Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah desa;
4. Minimnya bukti otentik tentang kepemilikan maupun tukar menukar tanah;

11. Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3;
2. Masih belum optimalnya penanganan sampah;
3. Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL;
4. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan;

12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Data kependudukan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk proses pembangunan;

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan/memperbarui data kependudukan;

13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian desa;
2. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes sebagai katalis perekonomian desa;
3. Menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
5. Hasil temuan inovasi alat teknologi tepat guna rawan plagiarisme/duplikasi;
6. Salah satu indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu aspek ekologi di beberapa desa belum terpenuhi;
7. Belum adanya dukungan terhadap program Rumah Desa Sehat (RDS) yang dicanangkan oleh Kementerian Desa dan PDT di tingkat Kabupaten

14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber KB.
2. Masih Rendahnya Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja.
3. Rendahnya Ratio Petugas Lapangan KB dibanding dengan jumlah Wilayah Pemerintahan (Desa/Kelurahan)
4. Pertumbuhan penduduk yang cepat akibat banyaknya migrasi penduduk dan tingginya angka kelahiran;
5. Masih banyaknya usia kawin pertama di usia dini;

15. Bidang Perhubungan

1. Masih rendahnya ketersediaan angkutan darat.
2. Masih rendahnya Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan).
3. Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik masih belum memadai.
4. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar.
5. Penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan penambahan kendaraan.
6. Belum adanya Terminal Angkutan Penumpang.
7. Kurangnya tertib hukum pengendara kendaraan.
8. Kurangnya sarana dan Prasaran yang dimiliki .
9. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian khusus di bidang Perhubungan

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum tersedianya rencana induk (master plan) dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola IT di perangkat daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan layanan data informasi publik;
4. Masih kurangnya infrastruktur sarana komunikasi dan informasi;
5. Belum semua layanan publik berbasis SPBE yang terintegrasi;

17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi, sehingga masih banyak koperasi yang tidak aktif;
2. Rendahnya daya saing UKM;
3. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri;
4. Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang;

5. Terbatasnya kompetensi SDM koperasi dan UMKM, sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan kurang berkualitas sesuai permintaan pasar;

18. Bidang Penanaman Modal

1. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
2. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Purwakarta yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Purwakarta;
3. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung promosi investasi;
4. Adanya ijin-ijin tertentu yang memerlukan rekomendasi teknis dari instansi terkait, sehingga memperlambat proses perijinan;
5. Banyak ijin yang belum diambil oleh pemohon;

19. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Masih rendahnya pembangunan kepemudaan di Kabupaten Purwakarta, hal ini terlihat dari cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan masih rendah;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga;
3. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan;
4. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan
5. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Purwakarta;
6. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina dan tenaga keolahragaan;
7. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Purwakarta yang memenuhi standar nasional dan internasional;
8. Mempertahankan prestasi Purwakarta pada berbagai olahraga multi event;

9. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di Purwakarta;
10. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Purwakarta yang memenuhi standar nasional dan internasional;

20. Bidang Statistik

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time;
2. Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistic sektoral;
3. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan menyampaikan data tepat waktu;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan;

21. Bidang Persandian

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian;
2. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah;
3. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness);
4. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang masih terbatas;

22. Bidang Kebudayaan

1. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya, dibandingkan dengan banyaknya potensi seni dan budaya yang ada (belum dikelola secara profesional serta belum terintegrasi dengan sektor yang lain);
2. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya.
3. Belum tersedia gedung kesenian daerah.

4. Lemahnya database bidang kebudayaan sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan.
5. Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah. Perkembangan pariwisata tidak diimbangi dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan sebagai salah satu produk yang dapat dijadikan sarana rekreasi, pengembangan kebudayaan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia Sebagai Tenaga Ahli. Berkembangnya sanggar seni, baik seni musik, tari di purwakarta cukup baik. akan tetapi blm diimbangi dengan tenaga ahli dari setiap sanggar.
7. Sarana Pendukung/ Alat Kesenian. Kurangnya perhatian terhadap sanggar kesenian dalam fasilitas sarana dan prasarana alat kesenian., dalam upaya pengembangan dan pelestarian kesenian yang ada di daerah.
8. Belum Optimalnya Pendataan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya (BCB) merupakan ciri peninggalan sejarah di daerah tersebut. Sekaligus menjadi daya tarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlihat dari banyaknya peninggalan suatu daerah yang belum diteliti.
9. Pendataan Sanggar. Berkembangnya kesenian di Purwakarta menjadikan banyak berdirinya sanggar seni yang belum di ketahui tempat dan pendiri sanggar tersebut.

23. Bidang Perpustakaan

1. Masih kurangnya pustakawan yang terampil dan bersertifikasi;
2. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan;
4. Terbatasnya koleksi perpustakaan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan e-book sebagai media literasi digital;
6. Belum optimalnya dukungan dari para stakeholder terhadap perkembangan perpustakaan;

24. Bidang Kearsipan

1. Rendahnya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan;
2. Masih rendahnya unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip);
3. Masih minimnya sarana dan prasarana Kearsipan;
4. Masih belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, dan pengelolaan serta pelayanan kearsipan;
5. Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif;

25. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik;
2. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh bantuan sarana produksi;
3. Sumberdaya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang teknis peternakan dan Perikanan masih relatif terbatas;
4. Pertumbuhan produksi perikanan dan peternakan relatif lambat, sehingga penyediaan daging, telur susu dan ikan masih terbatas;
5. Potensi sumberdaya Peternakan dan perikanan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi peternakan dan perikanan dalam upaya penyediaan pangan hewani;
6. Kemampuan peternak dalam menerapkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah, relatif masih terbatas;
7. Masih terbatasnya penyediaan produksi daging, telur dan susu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Purwakarta. Dalam hal ini penyediaan sapi potong dan ayam buras, Kabupaten Purwakarta sebagian besar masih bergantung kepada pasokan dari luar Kabupaten;
8. Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang berkembangnya sentra-

sentra bibit/benih komoditas unggulan peternakan dan perikanan;

26. Bidang Pariwisata

1. Rata-rata lama tinggal wisatawan masih belum optimal, yaitu antara 2-3 hari, oleh karenanya perlu peningkatan destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Purwakarta;
2. Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata Kabupaten Purwakarta guna meningkatkan kunjungan wisatawan;
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan;
4. Belum Optimalnya Daya Saing Destinasi Pariwisata, dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur;
5. Masih Kurangnya Penataan dan Pengamanan Objek Wisata. Kondisi potensi objek pariwisata Purwakarta umumnya belum siap jual, namun seiring dengan pengembangan kawasan pariwisata maka perlu penataan yang lebih baik;
6. Penambahan destinasi wisata belum diimbangi dengan infrastruktur dan pengelolaan yang baik;
7. Adanya pandemi covid-19, menyebabkan kunjungan wisatawan dan industri wisata menurun;

27. Bidang Pertanian

1. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas;
2. Terbatasnya lahan pertanian dan belum maksimalnya pemanfaatan lahan;
3. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berstatus PNS yang terus berkurang karena mencapai Batas Usia Pensiun;
4. Terbatasnya permodalan dan masih rendahnya regenerasi petani;
5. Meningkatnya resiko kerugian usaha tani akibat dampak perubahan iklim;
6. Pemasaran hasil pertanian belum maksimal;
7. Perubahan iklim global dan meningkatnya populasi organisme tanaman yang dapat mempengaruhi produksi pertanian.

28. Bidang Perdagangan

1. Masih rendahnya serapan resi Gudang;
2. Masih rendahnya pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat;
3. Masih ditemukannya kasus peredaran barang rusak/kadarluarsa, dan produk makanan dengan bahan berbahaya;

29. Bidang Perindustrian

1. Industri kecil belum optimal dalam memanfaatkan e-commerce;
2. Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi;
3. Masih rendahnya pelaksanaan pembinaan terhadap sentra industry;
4. Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang berdaya saing dibandingkan produk serupa dari daerah lain;
5. Dalam penerbitan perijinan usaha industri belum bersinergi antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten;

30. Bidang Transmigrasi

1. Terbatasnya kuota pemberangkatan transmigran yang disediakan oleh pemerintah provinsi maupun pusat yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya;
2. Dokumen perjanjian kerjasama antar daerah terkadang terlambat ditanda tangani oleh kepala daerah kabupaten penerima;
3. Kementerian PDT belum menyiapkan lahan dan pemukiman pada lokasi penerima;

31. Unsur Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, SP, penerapan standar pelayanan minimal

dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik;

2. Belum optimalnya perbaikan manajemen layanan publik berbasis *reinventing government*;
3. Masih belum optimalnya kebutuhan organisasi yang sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Masih belum optimalnya penilaian penyelenggaraan LPPD dan RB Kabupaten.

32. Unsur Sekretariat DPRD

1. Belum optimalnya pemahaman ketugasan dari anggota dewan;
2. Belum optimalnya pemenuhan ketepatan jadwal pembahasan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

33. Unsur Perencanaan

1. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
2. belum optimalnya pelibatan stakeholder nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
3. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
4. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
5. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
6. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
7. Penggunaan aplikasi SIPD perencanaan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;

34. Unsur Keuangan

1. Penggunaan aplikasi SIPD keuangan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;
2. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi Asset Daerah;
3. Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, terutama saat terjadi pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan daerah;

35. Unsur Kepegawaian

1. Masih rendahnya ASN struktural yang mengikuti kegiatan assessment;
2. Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;

36. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih rendahnya peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan;

37. Unsur Penelitian dan Pengembangan

1. Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Purwakarta.

38. Unsur Pengelolaan Perbatasan

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan di Kabupaten Purwakarta.

39. Unsur Pengawasan (Inspektorat)

1. Masih sedikit unit kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kab. Purwakarta;

2. Masih belum optimalnya laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti;
3. Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/ pemantauan SPIP belum optimal;

40. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

1. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa/kelurahan;

41. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan kehidupan demokrasi dan pendidikan politik, serta pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang masih perlu di tingkatkan;

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal baik level internasional, nasional maupun regional. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia termasuk negara yang menganut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan dengan gejolak eksternal. Kondisi perekonomian Kabupaten Purwakarta diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang menyangkut pada aspek daya saing daerah yakni masih belum optimalnya upaya pemulihan ekonomi dan sumber daya manusia yang profesional dan terampil serta ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan masih terbatas dan belum merata. Selain itu inovasi kebijakan daerah dan pelayanan publik termasuk promosi dan pengembangan kepariwisataan juga masih kurang optimal dan tepat sasaran, sehingga hal ini mempengaruhi dalam peningkatan nilai daya saing daerah dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdapat 4 aspek yakni aspek ekosistem inovasi, aspek penguat/enabling environment, aspek SDM/Human Capital, aspek pasar/market. Daerah dengan daya saing yang tinggi akan membuat daerah tersebut maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, Informasi Indeks Data Saing Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 memperoleh Score/Nilai Indeks sebesar **2.7081**, dengan rincian aspek : 1). Faktor Penguat/ Enabling Environment,

3.6210; 2). Sumber Daya Manusia/ Human Capital, 3.0208; 3). Faktor Pasar/ Market, 2.5625; 4). Ekosistem Inovasi, 1.6281.

4.2 ISU STRATEGIS

Penetapan Isu Strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional dan lokal. Isu Strategis tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.

Mengingat permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta masih dirasakan cukup banyak dan kompleks seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dahulu isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Pada pertemuan Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan di Bali, 15-16 November 2022 yang lalu, sebagaimana diketahui, terdapat lima isu strategis global yang dihadapi oleh otoritas pengambil kebijakan di dunia saat ini. **Pertama**, bagaimana mengatasi isu kesehatan akibat pandemi covid dan ketahanan pangan yang disebabkan gangguan pasokan. **Kedua**, bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif. **Ketiga**, bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan ekonomi. **Keempat**, bagaimana CBDC dapat dirancang sehingga dapat memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara namun tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, lebih lanjut meramu mitigasi dampak negatif dari asset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dan **Kelima**, bagaimana sinergi antara upaya transisi, termasuk dukungan keuangan berkelanjutan menuju net zero carbon emissions.

Kelima isu tersebut dilatarbelakangi kerentanan perekonomian global dengan tingkat inflasi yang tinggi dengan pemulihan yang lebih lemah. Perang yang tengah berlangsung di Ukraina, disertai dengan tindakan kebijakan dalam merespon perang dan kebangkitan COVID-19 di beberapa negara, telah memperpanjang gangguan rantai pasokan. Kondisi tersebut, seiring dengan meluasnya kebijakan inward looking, khususnya komoditas pangan di sejumlah negara, telah mendorong kenaikan harga komoditas internasional secara signifikan sehingga meningkatkan tekanan inflasi global. Sebagai tanggapan, beberapa negara telah memulai pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ekonomi utama juga diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Secara berkepanjangan, hal ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global sekaligus menahan aliran modal asing dan memperburuk tekanan mata uang di negara berkembang. Selanjutnya, dalam gala seminar yang berlangsung, dielaborasi respon terhadap kelima isu global dimaksud.

Respon pertama terkait food security dan health dibahas pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global (Global Collaboration and Cooperation) untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (food insecurity) yang terus meningkat. Kolaborasi dan kerjasama global tersebut akan memiliki fokus pada upaya mendukung ketahanan pangan dengan memastikan keterjangkauan (affordability) dan kemudahan perolehan (accessibility) pangan, serta meningkatkan ketersediaan data untuk pupuk. Di samping itu, disepakati pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund) untuk membantu memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk tindakan pencegahan (prevention), kesiapsiagaan (preparedness), dan penanggulangan (response) terhadap pandemi di masa depan. Dana tersebut dikelola oleh World Bank dengan komitmen awal sebesar US\$1,1 miliar.

Respon kedua mengulas bauran kebijakan makroekonomi, membahas upaya untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Pertama, fundamental makroekonomi yang kuat yang dapat dicapai melalui

kebijakan fiskal, moneter, serta stabilitas keuangan yang terencana, terukur, dan terkomunikasi dengan baik. Kedua, kebijakan moneter yang pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve. Hal ini dicapai tidak hanya melalui suku bunga, melainkan juga instrumen lainnya antara lain stabilisasi nilai tukar, pengelolaan aliran modal, serta koordinasi dengan Pemerintah. Ketiga, memperkuat sisi suplai melalui kebijakan sektor riil dan reformasi struktural.

Respon ketiga bertajuk kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk stabilitas dan pemulihan. Pertama, kebijakan moneter perlu kembali menitikberatkan pada stabilitas harga secara pre-emptive dan forward-looking untuk mengendalikan ekspektasi inflasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Kebijakan suku bunga tetap menjadi instrumen utama, dilengkapi dengan intervensi nilai tukar dan manajemen arus modal, terutama di negara berkembang dengan pasar keuangan yang belum dalam. Kedua, pentingnya pendekatan yang semakin granular dan mikro untuk menjaga kestabilan keuangan, terutama sektor korporasi dan rumah tangga. Di samping kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial juga perlu diterapkan dalam rangka memitigasi risiko-risiko terhadap stabilitas keuangan. Ketiga, mengingat persoalan stabilitas harga saat ini bersumber pada sisi penawaran, maka koordinasi antara bank sentral dan pemerintah semakin diperlukan. Koordinasi tersebut tidak terbatas pada sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, namun juga terkait reformasi struktural. G20 berhasil menggabungkan Integrated Policy Framework (IPF) dari IMF dengan Macro Financial Stability Framework (MFSF) dari BIS untuk mengakselerasi terwujudnya stabilitas harga global.

Respon keempat menghadirkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan asset kripto, disambut baik berbagai inisiatif rancangan CBDC, khususnya dalam penggunaan untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas (cross-border payments). Di samping itu, rancangan CBDC juga perlu menjamin stabilitas moneter dan keuangan internasional. Diskusi juga membahas pentingnya kerangka regulasi dan pengawasan yang kokoh dari asset kripto, termasuk yang disebut stablecoin, dengan menerapkan prinsip 'same activity, same risk, same regulation'. Tujuan yang ingin dicapai adalah memitigasi risiko dari penggunaan asset kripto dan memastikan level playing field, dengan tanpa menghambat inovasi dan

inklusi. Membangun kesadaran public akan risiko penggunaan asset kripto merupakan hal penting.

Respon kelima terkait ekonomi dan keuangan hijau membahas berbagai rekomendasi dalam rangka mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju net zero emission, meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan menuju tujuan tersebut, dan meningkatkan inovasi pada instrument dan pasar keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam rangka mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi menuju net zero emission.

Presidensi G20 Indonesia memberikan referensi untuk melakukan exit strategy dari kebijakan luar biasa di masa pandemi untuk mendukung pemulihan, serta mengatasi efek luka memar (scaring effect) untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang tinggi. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia berhasil mengajak semua anggota untuk berkomitmen mempertahankan stabilitas keuangan global, termasuk dengan terus berkoordinasi dalam langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional. Presidensi G20 Indonesia berhasil meyakinkan anggota untuk memperkuat komitmen mendukung transisi yang berjalan mulus (orderly), adil (just), dan terjangkau (affordable) menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sumber :

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2419222.aspx

4.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Gambar 4.1

Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan



2. Penanganan Pandemi Covid-19 belum selesai

Sejak mulai masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke Indonesia, dan menyebar keseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Purwakarta, pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kesehatan, perekonomian dan sosial masyarakat. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat dan para pelaku usaha agar pandemi covid-19 tidak menyebar luas dan segera hilang.

Penanganan terhadap dampak pandemi covid-19 telah dilakukan pemerintah dengan memfokuskan pada penanganan kesehatan,

pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Selama tahun 2020 – 2021 penanganan dampak pandemi covid-19 telah cukup banyak menguras anggaran daerah dan mempengaruhi terhadap capaian target pembangunan daerah secara nasional.

Walaupun di tahun 2022 perkembangan Covid-19 sudah mulai reda dan perekonomian masyarakat dan daerah secara nasional sudah mulai berangsur naik dari tahun sebelumnya dibanding pada saat pandemi covid-19 melanda, namun demikian pemerintah masih terus waspada terhadap perkembangan virus tersebut yang sewaktu-waktu dapat bermutasi dan menyerang kembali. Oleh karena itu, penanganan dampak pandemi covid-19 ini masih menjadi isu strategis dan prioritas kesehatan di berbagai daerah.

3. Keamanan Data Pribadi

Data pribadi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan perlu dijaga dengan baik. Terlebih di era digital seperti saat ini, data pribadi bisa diakses dengan mudah dengan adanya internet dan sosial media, namun siapa sangka data pribadi bisa disalahgunakan dan bisa saja menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Pencurian data pribadi adalah hal yang paling sering terjadi, baik secara besar-besaran maupun dalam skala kecil sekalipun. Biasanya, hasil dari pencurian data pribadi ini akan dijual di dark web. Apapun motif pencurian data pribadi ini, tentunya akan memberikan dampak buruk untuk pemiliknya.

Masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya melindungi data pribadi, ada berbagai alasan mengapa kita perlu menjaga data pribadi. **Pertama**, perlindungan data pribadi dibutuhkan untuk menghindari ancaman pelecehan seksual, perundungan online, hingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). **Kedua**, perlindungan data pribadi perlu dilakukan untuk mencegah oknum atau pihak tidak bertanggungjawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik. Kemudian alasan terakhir adalah untuk memberikan hak kendali atas data pribadi kita.

4. Pemilu dan Pilkada Serentak

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sebelum ini, pemilu terakhir digelar pada 2019. Artinya, pemilu selanjutnya harus diselenggarakan pada 2024. Sementara, ketentuan mengenai pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

4.2.3 Isu Strategis Regional

1. Telaahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

Penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 salah satunya dengan mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019. Pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V (2023-2025). Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V disusun dengan mempertimbangkan isu strategis dan merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

1) Isu Strategis

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- a) Kuantitas dan kualitas penduduk serta persebarannya;
- b) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan;
- c) Pengangguran dan ketenagakerjaan;
- d) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
- e) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- f) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
- g) Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan
- h) Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

2) Visi dan Misi

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah:

“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU
DI INDONESIA”.

Pernyataan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat diatas, memiliki makna:

1. **Iman dan Takwa** sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.
2. **Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia** dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut yaitu dalam 7 (tujuh) bidang yang sekaligus penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (beyond the expectation), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat, energi baru dan terbarukan; kelima, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai Tahun 2025.

1. Misi Satu: **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing** adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. Misi Dua: **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah**; adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi

pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Misi Tiga: **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;** adalah mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. Misi Empat: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;** adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat; membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
5. Misi Lima: **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;** adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

2. Telaahan Rancangan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026

Dokumen RPD Daerah Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan **visi** RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa barat Termaju di Indonesia”**, melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Tujuan pertama RPD adalah **Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia** diarahkan untuk menjawab isu strategis kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Tujuan tersebut memiliki 5 (lima) sasaran, meliputi: 1). Meningkatnya akses dan mutu pendidikan; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3). Meningkatnya standar hidup layak masyarakat; 4). Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, dan 5). Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan kedua RPD adalah **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan** merupakan respon atas isu strategis daerah pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan kedua dilaksanakan dengan 8 (delapan) sasaran, yaitu: 1). Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan; 2). Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; 3). Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif; 4). Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha; 5). Terkendalinya tingkat kemiskinan; 6). Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja; 7). Meningkatnya ketahanan pangan daerah; dan 8). Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah.

Tujuan ketiga RPD adalah **Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan** memiliki keterhubungan dengan isu strategis daerah pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur

berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan ketiga memiliki 2 (dua) sasaran strategis, yaitu 1). Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan; dan 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan RPD yang terakhir adalah **Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah**, memiliki keterkaitan dengan isu strategis reformasi birokrasi dan inovasi daerah. Tujuan ini diturunkan kedalam 5 (lima) sasaran strategis, yaitu: 1). Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien; 2). Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera; 3). Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel; 4). Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas; dan 5). Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan yang Mengoptimalkan Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Serta Dan Kelautan Dan Perikanan.
3. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu.
4. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
5. Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

3. Telaahan RTRW Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 menjadi salah satu dokumen yang harus dipedomani dalam penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Mepedomani RTRW bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana tata ruang.

Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
2. Tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
3. Terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
4. Terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
5. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.

Strategi Penataan Ruang meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
 - a) menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;

- b) meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
 - c) meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
- a) meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
 - b) mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
 - c) meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
 - d) meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 - e) menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - f) pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi, meliputi:

- a) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya- Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
- b) mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
- c) mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
- d) mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
- e) mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
- f) mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
- g) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
- h) mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
- i) mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;

- j) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
 - k) meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:
- a) meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
 - b) membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - c) meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
 - d) mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
 - e) mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f) meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
 - g) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
 - h) mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
 - i) meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - j) meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;

- k) mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - l) mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
- a) mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
 - b) mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
 - c) melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
 - d) merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
 - e) memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
 - f) meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
 - g) pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.

6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
 - a) merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - b) mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - c) pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
 - d) mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
 - e) mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
 - a) meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - b) menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
 - c) mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
 - d) mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek- Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.

8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
 - b) mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
 - c) strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Telaahan RPJMD/RPD Daerah Lain

Penyusunan RPD juga memperhatikan dokumen RPJMD/RPD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.1

Telaahan RPJMD/RPD Daerah Lain

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Kebijakan RPJMD/RPD	Keterangan
1	Kab. Cianjur	2021-2026	<p>VISI :</p> <p>“CIANJUR MANJUR BERAKHLAK MULIA”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0; 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi; 4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup; 5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0; 	Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2021-2026

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Kebijakan RPJMD/RPD	Keterangan
2	Kab. Subang	2024-2026	<p>TUJUAN DAN SASARAN :</p> <p>T.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, dengan 3 (tiga) sasaran :</p> <p>S.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan;</p> <p>S.2 Meningkatnya Derajat Pendidikan;</p> <p>S.3 Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Lokal.</p> <p>T.2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan 2 (dua) sasaran :</p> <p>S.4 Meningkatnya Kesempatan Kerja;</p> <p>S.5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>T.3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dengan 4 (empat) sasaran :</p> <p>S.6 Meningkatkan Perekonomian Daerah;</p> <p>S.7 Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi;</p> <p>S.8 Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur;</p> <p>S.9 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.</p> <p>T.4 Mewujudkan pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, dengan 2 (dua) sasaran :</p> <p>S.10 Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;</p> <p>S.11 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui Penataan Ruang.</p>	Rancangan Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang 2024-2026

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Kebijakan RPJMD/RPD	Keterangan
			T.5 Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, dengan 2 (dua) sasaran : S.12 Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah; S.13 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	
3.	Kab. Karawang	2021-2026	<p>VISI :</p> <p>“MEWUJUDKAN KARAWANG MANDIRI,BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 2. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal; 3. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan; 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas; 	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang 2021-2026
4.	Kab. Bogor	2024-2026	<p>TUJUAN DAN SASARAN :</p> <p>T.1 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>S.1 Meningkatkan pelayanan pendidikan</p> <p>S.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan</p> <p>S.3 Meningkatkan ketahanan pangan</p> <p>S.4 Meningkatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>S.5 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>S.6 Meningkatkan pelayanan infrastruktur publik</p> <p>S.7 Meningkatkan aksesibilitas ekonomi masyarakat</p>	Rancangan Peraturan Bupati Bogor Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Kebijakan RPJMD/RPD	Keterangan
			<p>S.8 Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat</p> <p>T.2 Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik</p> <p>S.1 Meningkatkan profesionalitas ASN</p> <p>S.2 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>S.3 Meningkatkan pelayanan kewenangan daerah</p> <p>T.3 Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing</p> <p>S.1 Meningkatkan inovasi daerah yang implementatif</p> <p>S.2 Meningkatkan investasi</p> <p>S.3 Meningkatkan pendapatan daerah</p> <p>T.4 Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi</p> <p>S.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p> <p>S.2 Menurunkan tingkat risiko bencana</p>	
5.	Kab. Bandung Barat	2018-2023	<p>VISI :</p> <p>“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH”</p> <p>MISI :</p> <p>1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Kualitas Birokrasi Dalam Melayani Masyarakat;</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Dalam</p>	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD/RPD	Kebijakan RPJMD/RPD	Keterangan
			<p>Bidang Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat;</p> <p>3. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, Untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan;</p> <p>4. Memantapkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Berkelanjutan;</p> <p>5. Meningkatkan Kesalehan dan Modal Sosial Berdasarkan Nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal;</p> <p>6. Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa;</p>	

Sumber : RPJMD/RPD Kabupaten terkait

4.2.4 Isu Strategis Lokal

1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD karena tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Purwakarta. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 adalah **“Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah”**.

Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusun **5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025**, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, **RPJMD tahap ke-4** ditujukan untuk mencapai keunggulan masyarakat Purwakarta dalam segala bidang dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kabupaten Purwakarta memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Kabupaten Purwakarta relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Purwakarta terhadap pembangunan regional Jawa Barat juga relatif lebih tinggi daripada kabupaten/kota lain.

Perhatian bidang pendidikan pada periode 2018-2023 adalah target akselerasi penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya memasuki saat-saat menentukan pada periode ini. Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala regional dan nasional. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum nasional dan internasional.

Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah diperoleh. Fokus pembangunan kurun 2018-2023 pada aspek kesehatan diutamakan pada peran serta dan partisipasi masyarakat dan penguatan institusi dalam peningkatan kesehatan, yaitu peningkatan fungsi institusi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan pelayanan kesehatan yang terjangkau, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam

kesehatan lingkungan, dan peningkatan pendidikan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Pembangunan bidang keagamaan pada tahapan ini diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran forum-forum keagamaan sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagi segi kehidupan. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan meningkatkan fungsi dan peran forum keagamaan sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk perluasan sarana, prasarana dan kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal pada pelatihan peningkatan ketrampilan serta membangun jiwa wirausaha dibarengi kemampuan manajemen pengelolaan usaha calon tenaga kerja. Dalam upaya menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja dan harmonisasi dalam lingkungan kerja, ditumbuhkembangkan pelaksanaan hubungan industrial berdasarkan norma yang berlaku.

Dari segi pengendalian jumlah penduduk secara alamiah diarahkan pada pemberdayaan keluarga, sedangkan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara migrasi adalah melalui peningkatan kualitas data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan yang terintegarsi. Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Purwakarta pada periode tahapan ini unggul dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, pada aspek pengembangan kesadaran dan peran masyarakat perlu terus dioptimumkan, tidak hanya terbatas kepada kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang sedang di hadapi pemerintah daerah. Pada tahapan ini perlu pula dikembangkan kesadaran dan peran

masyarakat untuk turut serta memikirkan dan melakukan hal-hal lain dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya lokal, pada periode ini perhatian lebih diupayakan melalui penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Purwakarta. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jati diri masyarakat Purwakarta.

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan daerah, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui meningkatnya perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan dengan memberikan nilai tambah terhadap potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup serta mengembangkan substitusi pemanfaatan sumber daya alam.

Pada tahap ini, pengembangan agribisnis harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas, terutama pada wilayah regional Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis. Untuk itu diperlukan: (1).Perusahaan induk (*Holding Company*) dan integrasi vertikal tingkat lokal, regional, dan internasional, (2).Kolaborasi bisnis, dan (3).Jejaring bisnis. Pada tahap ini agribisnis Kabupaten Purwakarta sudah berkembang menembus batas-batas wilayah, sehingga sebagai konsekuensinya adalah pada tahap ini persaingan global di bidang agribisnis akan semakin kuat.

Berdasarkan potensi yang ada, daerah-daerah yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta secara umum merupakan penghasil produk agro. Pada RPJMD tahap ke-4, komoditi-komoditi agro unggulan spesifik lokal yang dihasilkan oleh daerah-daerah di Kabupaten Purwakarta harus terus dikembangkan, dikemas dan ditata aspek

pemasaran dan distribusinya. Diharapkan Kabupaten Purwakarta memiliki produk unggulan lokal yang berstandar nasional dan internasional. Pada aspek industri dan perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi serta perluasan jaringan perdagangan daerah.

Sementara itu, pada aspek pariwisata, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata. Pada tahapan ini, pengembangan KUKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUKM. Pada tahap ini KUKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan regional, nasional dan internasional.

Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai dengan lebih mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Kabupaten Purwakarta semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya. Pada tahapan ini, kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan rencana tata ruang sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud.

Hal ini ditandai dengan tercapainya alokasi ruang kawasan lindung dan terjaminnya lahan untuk sawah serta tersedianya alokasi ruang di kawasan perkotaan untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas

perkotaan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada pemantapan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Sedangkan aspek hukum pada tahapan ini diarahkan guna pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan.

Pada tahap ini pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada pemantapan capaian pada tahap ketiga. Aspek politik diarahkan pada pemantapan praktik demokrasi, memperkuat kemitraan dan pengawasan (*check and balances*) antarlembaga di daerah dan masyarakat madani (*civil society*) serta pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Aspek Aparatur diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan standar pelayanan yang teruji.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;

- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Purwakarta;
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas:

- a. Strategi pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) meliputi:
 - 1) Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
 - 2) Mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
 - 3) Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan-kegiatan industri di luar kawasan industri; dan
 - 4) Merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.

- b. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten meliputi:
- 1) Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 3) Mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten; dan
 - 5) Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.
- c. Strategi pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri meliputi:
- 1) Mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
 - 3) Mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten purwakarta;
 - 4) Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
 - 5) Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan
 - 6) Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- d. Strategi pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhirarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis meliputi:
- 1) Mengembangkan PKW, PKL, pklp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;

- 2) Mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3) Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
 - 4) Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
 - 5) Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
- e. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi:
- 1) Memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
 - 2) Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - 3) Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - 4) Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - 5) Meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ; dan
 - 6) Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;
- f. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;

- 3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
- 4) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara

pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan dijabarkan sebagai berikut, antara lain:

a. Dimensi Sosial

Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi sosial disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Sosial

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.	2.1 Menghilangkan segala bentuk Kekurangan gizi, dan memenuhi kebutuhan gizi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta.	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian.
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Malnutrisi	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi anemia pada ibu hamil. Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) Bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Kualitas konsumsi	

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
			Pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	
	Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Rata-rata pendapatan Produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	
	Menjamin system produksi pangan yang berkelanjutan	Program Pemetaan Kawasan LP2B	Penetapan kawasan pertanianpangan berkelanjutan.	
	Mengelola keragaman genetic benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Holtikultura, dan Perikanan	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	
		Program Pengembangan Data Proporsi Hewan Ternak	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menuruttingkat risiko kepunahan: berisiko tidak berisiko, dan risiko yangtidak diketahui.	
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1 Mengurangi Rasio angka kematian ibu	Program Bimbingan Ibu Hamil	Angka Kematian Ibu (AKI).	
		Program Bimdal Kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	
			Persentase Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	
	3.2 Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita	Program Bimdal Kesehatan Bagi Ibu Menyusui	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatal (AKN)	

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
			per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	
		Program Imunisasi Kepada Bayi	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	
	3.3 Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.				
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB		Kejadian TB per 1000 orang.		
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria		Kejadian Malaria per 1000 orang. Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hepatitis	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	
Persentase Kecamatan yang Melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.				
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tropis		Jumlah orang yang memerlukan Intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		
	Jumlah Kecamatan dengan eliminasi Kusta.			

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
			Jumlah Kecamatan denganeliminasi filariasis(berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4.7 Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengarusutaman pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaandunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian	

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta, 2018

b. Dimensi Ekonomi

Rekomendasi pada subbab ini disusun dengan harapan dilakukan pengintegrasian ke dalam RPJMD demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta. Program-program yang direkomendasikan ialah program yang yang dalam targetnya telah terskenariokan untuk ditambahkan. Setelah dilakukan identifikasi, maka diketahui beberapa target yang perlu ditambahkan dalam bentuk program dengan uraian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Ekonomi

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern unuk Semua	7.2.Meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Program Diversifikasi Energi Dengan Mengoptimalkan Potensi Energi Terbarukan Seperti LimbahKotoran Hewan dan Panas Bumi.	Konsumsi energi terbarukan meningkat	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian.
		Program Pelatihan Untuk Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia Terkait Pemanfaatan Energi Terbarukan Yang Lebih Optimal		
	7.a. 7.3. Melakukan perbaikan efisiensi energi sebanyak dua kali lipat.	Program Pengoptimalan Konservasi Energi DalamBerbagai Sektor	Intensitasenergi primer	
	7.b. Memperkuat Kerjasama dan mempromosikan investasi terkait infrastruktur dan teknologi dalam hal energi bersih.	Program Perluasan Jaringan dan Upaya Pemanfaatan Sister City Promosi Secara Aktif Dalam Hal Investasi Infrastrukturdan TeknologiEnergi Bersih	Peningkatan kerjasama dan pendanaan utuk infrastrktur dan teknologi dalam energi bersih	
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi ang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan	8.b.Mengoperasionalkan strategiglobal untuk ketenagakerjaan pemuda.	Program Perluasan Infrastruktur	Dana investasi untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan energi	Tersedianya anggaranuntuk program terkait ketenagakerjaan dan meningkatnya keterampilan pemuda
		Peningkatan Kerjasama Bidang Energi		
		Program Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda		
		Program Pengoptimalan Sumber Dana UntukPelatihan		

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto.	Keterampilan		Peningkatan nilai tambah sektor industri
		Program Peningkatan Infrastruktur Industri		
		Program Peningkatan Kualitas SDM Dalam Sektor Industri		
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	9.b. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas	Program Pengembangan Riset Industri	Meningkatnya diversifikasi industri dan nilai tambah komoditas	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		
	9.c. Secara signifikan meningkatkan akses TIK dan internet untuk semua.	Program Perluasan Jaringan Akses Internet	Peningkatan penduduk yang memanfaatkan internet	
		Program Pelatihan Penggunaan Internet		
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, ke negara-negara yang paling membutuhkan sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Terkait Baik Didalam Maupun Luar Negeri	Total aliran sumber daya yang masuk untuk pembangunan	
Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan Internasional untuk Meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Total pendapatan pemerintah	
	17.3. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Terkait Baik didalam Maupun Luar Negeri	Bantuan biaya pembangunan	
	17.8. Mengoperasionalkan Secara penuh bank	Program Perluasan Jaringan Akses Internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
	Teknologi dansains, Mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan Penggunaan teknologi Yang memampukan, Khususnya teknologi Informasi dan komunikasi.			
	17.14.Meningkatkan Keterpaduan kebijakan Untuk pembangunan berkelanjutan	Program Fasilitasi Untuk Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Keterpaduan Kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	
	17.17. Meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Program Fasilitasi Untuk Menunjang Kemitraan Publik Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Sipil	Proyek atau kegiatan yang dilaksanakan dengan skema kerjasama	

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta 2018

c. Dimensi Lingkungan

Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dimensi lingkungan didasarkan pada hasil analisis. Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi lingkungan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4

Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Lingkungan

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD	
		PROGRAM	SASARAN		
Tujuan 6: Menjamin Keterseediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk Semua	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan menghentikan praktik buang air besa di tempat terbuka	Pembangunan dan peningkatan jumlah fasilitas cuci tangan dengan sabun pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum masyarakat	Meningkatnya Proporsi fasilitas umum yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian.	
		Program sanitasi berbasis masyarakat melalui penyediaanMCK dan pemipaan IPAL	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		
		Pembangunan Infrastruktur air limbah sistem terpusat	Meningkatnya jumlah Infrastruktur air limbah sistem terpusat skla kota, kawasan, dan komunal.		
		Pemeliharaan Infrastruktur air limbah sistem terpusat			
		Peningkatan saluran rumah (SR) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Meningkatnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat		
		6.3.Meningkatkan kualitas air dan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang.	Pembangunan instalasi		Tersedianya instalasi
			pengelolaan lumpur tinja (IPLT)		Pengelolaan lumpur tinja (IPLT)
			Pemeliharaan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)		
			Penetapan tata ruang lahan sempadansungai dan waduk		Meningkatnya kualitas air sungai dan waduk
		Penentuan baku Mutu kelas air sungai dan waduk			
	Penentuan daya tamping beban pencemaran air				
	Pengembangan program				

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
		pembinaan dan percontohan perikanan ramah lingkungan		
		Peningkatan sanitasi penduduk		
		Pengelolaan limbah peternakan, pertanian, pertambangan, dan industri		
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan waduk		
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dan warisan alam.	Penetapan warisan budaya dan warisan alam sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	Meningkatnya Jumlah warisan Budaya dan warisan alam yang dilestarikan	
	11.6. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Pembangunan System pemilahan Sampah secara terpadu		Meningkatnya persentase sampah yang tertangani
Penerapan sistem pemilahan sampah secara terpadu				
Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah				
Peningkatan nilai tambah ekonomi hasil pengolahan sampah				
Penambahan luasan RTH			Meningkatnya Indeks kualitas udara	
Penambahan dan peningkatan kualitas transportasi umum massal				
Pengujian secara				

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
		Berkala emisi kendaraan		
		Pengujian emisi/polusi aktivitas industri		
		Evaluasi Kualitas Udara perkotaan		
	11.7 Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau	Penetapan kawasan Yang tidak boleh dibangun	Meningkatnya Persentase RTH Terhadap luas wilayah	
		Pembangunan lahan hijau baru melalui pembebasan lahan		
		Pembangunan koridor ruang hijau kota		
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.2. Mencapai Pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber Daya alam secara efisien.	Pembuatan dan Updating neraca Sumberdaya alam dan lingkungan	Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan, Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan	
	12.3. Mengurangi limbah pangan per kapita dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	Penurunan susut Hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan		
		Penanganan pasca Panen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri		

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
		Peningkatan kapasitas sumberdaya masia dan kelembagaan pascapanen		
	12.4.Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah.	Pembuatan e-manifest dokumen limbah B3, data Base pengawasan dan penataan industri, dan database perizinan dan registrasi B3 online	Meningkatnya a Jumlah izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh usaha dan/ atau kegiatan	
		Pengawasan kinerja Perusahaan yang ramah lingkungan	Meningkatnya Peserta proper yang mencapai minimal ranking biru	
	12.5.Mengurangi produksi limbah Melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Sosialisasi Pendirian bank sampah	Meningkatnya Jumlah bank sampah tiap RW	
		Pembinaan dan Pelatihan SDM Pengelola bank sampah		
		Pemberian insentif Dan penghargaan pada bank sampah yang aktif		
		Pembangunan TPS 3R	Meningkatnya Jumlah sampah yang dikelola secara 3R	
	12.6. Mendorong perusahaan, terutama	Pembuatan Database dan melakukan updating	Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
	perusahaan besar untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan	memiliki izin lingkungan	
		Peningkatan pelayanan Pembuatan izin lingkungan secara online maupun offline		
		Penerapan sanksi Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan telah beroperasi tanpa memiliki izin lingkungan		
		Pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh usah dan/atau kegiatan sesuai dengan pelaporan dokumen pengelolaan lingkungan yang mereka miliki	Meningkatnya usaha dan /atau kegiatan yang melaporkan upaya pengelolaan lingkungan	
	12.8. Menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Pengembangan Kurikulum dan Metode belajar berbasis lingkungan hidup	Terciptanya sekolah adiwiyata yang berwawasan lingkungan	
		Pengelolaan dan Pengembangan sarana pendidikan Untuk pendidikan Lingkungan		
		Penghargaan sekolah adiwiyata terbaik		

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
		Peningkatan system Pelayanan publik Sesuai dengan standar pelayanan	Meningkatnya Fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat	
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan		
	12.a. Memperkuat Kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi menuju arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam Pola produksi pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri		
	Mengembangkan dan menerapkan Perangkat untuk memantau dampak Pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah	Meningkatnya strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan	
		Pengembangan destinasi wisata		
		Peningkatan promosi pariwisata		
		Peningkatan Kemitraan dengan Pelaku usaha pariwisata		
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan	15.3. Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai bebas dari lahan terdegradasi.	Pembuatan database lahan kritis	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
Penggururan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati		Pengadaan bibit pohon		
		Penanaman pohon pada lahan kritis yang berpartisipasi dengan masyarakat		
	15.6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut.	Pembentukan dan penetapan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembangian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumberdaya genetika	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembangian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumberdaya genetika	
	15.8. Memperkenalkan langkah-langkah Untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasive pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau Memberantas jenis asing invasif prioritas.	Pembuatan dan pengembangan basis data atau system informasi Dalam rangka menyebarkan informasi tentang jenis asing invasif Yang meliputi penyebaran, pengendalian maupun pencegahannya terutama pada kawasan konservasi	Terkendalnya jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air	
		Penetapan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan serta keanekaragaman hayati hewani dan nabati		

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta 2018

d. Dimensi Kelembagaan

Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dimensi kelembagaan merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target

tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi Bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi kelembagaan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Kelembagaan

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
Tujuan 16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
			Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
			Kematian disebabkan konflik berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.
			Kematian disebabkan konflik per100.000 penduduk
			Penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual
			Penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan
			Penduduk yang merasa aman berjalansendirian di area tempat tinggalnya.
	16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
	penyiksaan terhadap anak.		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
		Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Korban perdagangan manusia Perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
	16.3. Menggalakkan Negara berdasarkan hukum ditingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang samaterhadap keadilan bagi semua.	Program Jaminan Sosial	Korban kekerasan yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang dalam mekanisme resolusi konflik.
		Program Kemitraan Bina Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan	Proporsi korban kekerasan yang melaporkan kepada polisi Kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
			Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
			Proporsi tahanan yang melebihi masapenahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
	16.9. Memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan pencatatan kelahiran	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, E28 menurut umur.
			Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
	Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Program Kerjasama Informasi Kriminal	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
		Program Peningkatan Sarana dan Komunkasi Serta Media Masa	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
			Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
			Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
			diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
			Persentase penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
			Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	16.a. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	Program pembentukan lembaga hak asasi manusia dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris E6Principles</i> .

Sumber: KLHS RPJMD Kab Purwakarta Tahun 2018-2023

Beberapa rekomendasi bagi program yang dapat diterapkan dalam RPD Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Rekomendasinya adalah:

- 1) Optimalisasi sistem pendidikan 12 tahun dengan kebijakan yang tepat akurat melalui proses kajian yang komprehensif.
- 2) Melaksanakan implementasi sistem hidrologi kawasan berdasarkan hasil kajian.
- 3) Implementasi teknologi pengolahan air sesuai karakteristik air baku dan daya dukung (debit air) sungai.

b. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Rekomendasinya:

- 1) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 2) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 3) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- 4) Menetapkan kebijakan tentang mekanisme Pembebasan lahan dan Penetapan harga pasar lahan untuk menghindari spekulasi penguasaan tanah.

c. Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Rekomendasinya:

- 1) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 2) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 3) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- 4) Menetapkan kebijakan tentang pengawasan orang dan barang dari luar daerah.
- 5) Menetapkan kebijakan tentang mekanisme Pembebasan lahan dan Penetapan harga pasar lahan untuk menghindari spekulasi penguasaan tanah.

d. Program peningkatan perekonomian rakyat

Rekomendasinya:

- 1) Menetapkan kebijakan program Kehati.
- 2) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 3) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 4) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.

4. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Pembangunan berkelanjutan mengandung makna pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, namun tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, telah berkembang melalui berbagai interpretasi skema tujuan yang ingin dicapai. Setelah *Millenium Development Goals* menjadi tujuan pembangunan yang dikembangkan sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2015, sekarang ini diterapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan tujuan yang lebih komprehensif dan beragam.

Berdasarkan Analisis Kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat seperti yang tersaji dalam buku *Menyongsong SDGs Kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat* yang diterbitkan bersama antara SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, dapat digambarkan pencapaian indikator TPB Kabupaten Purwakarta. Hal ini tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta

TARGET	INDIKATOR	SKOR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.1	Penduduk Miskin dengan Garis \$ 1,90 per hari	4	A	Mencapai hampir mencapai target SDGs
1.2	Penduduk Miskin dengan Garis Kemiskinan Nasional)	4	A	
2.2	Balita Dengan Berat Badan Kurus dan Sangat Kurus	4	A	
3.1	Angka Kematian di bawah 5 Tahun	4	A	
3.2	Angka Kematian Neonatal	4	A	
4.1	Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Dasar	4	A	
4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	4	A	
4.6	Angka Melek Huruf Usia 15-24	4	A	
6.2	Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	4	A	
7.1	Rumah Tangga dengan Akses Listrik	4	A	
8.1	PDRB per Kapita (Harga Konstan 2000)	4	A	
8.5	Tingkat Pengangguran dengan Kriteria Jam Kerja < 35	4	A	
16.3	Anak Dibawah 5 Tahun Yang Sudah Memiliki Akte Kelahiran	4	A	
3.4	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	3	B	
4.5	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 dengan Pendidikan Tersier	3	B	
4.5	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	3	B	
4.6	Gap T10B40 Partisipasi Murni SMA	3	B	
8.6	Penduduk Usia Muda Yang Tidak Bekerja, Tidak Sekolah dan Tidak Pelatihan	3	B	
8.7	Penduduk Usia 5-14 tahun Yang Termasuk Kedalam Kateggori Pekerja Anak	3	B	

TARGET	INDIKATOR	SKOR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9.1	Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang	3	B	
9.2	Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir	3	B	
15.1	Proporsi Luas Area Hutan Terhadap Luas Daratan	3	B	
2.1	Balita Dengan Tinggi Badan Pendek dan Sangat Pendek	2	C	Masih Seperempat jalan lagi menuju target SDGs
2.3	Produktivitas Tanaman Pangan	2	C	
4.1	Rata-rata Lama Sekolah	2	C	
11.1	Rumah Tangga Yang Memenuhi Spesifikasi Rumah Sederhana Sehat	2	C	
3.5	Penduduk dengan Kebiasaan merokok diatas usia 15 tahun	1	D	Baru Setengah Jalan Menuju Target SDGs
4.1	Penduduk Usia 25-64 tahun dengan Pendidikan Menengah Atas	1	D	
4.5	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tersier	1	D	
4.7	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	1	D	
5.2	Tingkat partisipasi angkatan Kerja Wanita	1	D	
6.1	Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	1	D	
10.1	Rasio Gini	1	D	
10.2	Rasio Palma	1	D	
10.3	Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% Terbawah	1	D	
15.2	Area Konservasi yang Dilindungi	1	D	
3.6	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas	0	E	Masih Cukup Jauh Mencapai target SDGs
5.1	Tingkat Kesuburan wanita	0	E	
5.3	Proporsi perempuan dalam parlemen	0	E	
11.2	Rumah Tangga Kota Dengan Jaringan Air Ledeng	0	E	
12.1	Rumah Tangga Dengan Perilaku Memilah Sampah	0	E	
13.1	Emisi CO2 BBM + Listrik Rumah Tangga	0	E	
15.3	Persentase Lahan Kritis (Kriteria+Sangat Kritis) terhadap Luas Wilayah	0	E	
16.1	Kejadian Pembunuhan	0	E	
16.2	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana / Crime Rate	0	E	
Rata-Rata		2,16		

Sumber: Menyongsong SDGs Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018

Kabupaten Purwakarta secara umum mendapatkan skor 2.16 dan dengan demikian mendapatkan nilai C dalam pencapaian SDGs tahun 2030. Meskipun artinya masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Purwakarta, angka ini sama dengan angka skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang bernilai 2.16 (C).

Tantangan paling besar diantaranya adalah indikator jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas (tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera) dan rumah tangga kota dengan jaringan air ledeng (tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak). Jumlah kematian akibat kecelakaan diproyeksikan akan

mencapai 117 atau 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan targetnya sebanyak 41 untuk setiap 100.000 penduduk dan dengan demikian mendapatkan nilai E. Sedangkan untuk rumah tangga dengan jaringan air ledeng Kabupaten Purwakarta diproyeksikan hanya akan mampu mencapai setengah dari target dan karena mendapatkan nilai E.

Meskipun demikian, banyak indikator akan mengalami kemajuan, diantaranya indikator balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus (tujuan 2 tanpa kelaparan) dan rumah tangga dengan sanitasi layak (tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak). Keduanya diproyeksikan akan mencapai target SDGs pada tahun 2030 dimana keduanya bernilai tinggi dan memperoleh nilai A. Indikator lainnya yang juga akan mengalami kemajuan pesat adalah tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja kurang dari 35 persen dan, PDRB perkapita (tujuan ke 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi). Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja kurang dari 35 persen diproyeksikan menurun ke angka 2,2 persen melampaui target SDGs yang berada pada angka 3,9 persen yang artinya untuk indikator tersebut kabupaten Purwakarta memperoleh nilai A. PDRB perkapita (harga konstan 2016) juga mendapatkan nilai A yang diproyeksikan akan mencapai angka \$9891 per tahun jauh melampaui target SDGs sebesar \$3956 per tahun.

Indikator pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Purwakarta secara umum memiliki progress yang baik bernilai rata-rata A. Artinya, secara keseluruhan indikator pendidikan dan kesehatan Kabupaten Purwakarta memiliki arah yang baik untuk mencapai target SDGs. Indikator pendidikan yang bernilai baik atau A adalah angka partisipasi murni tingkat SD, angka partisipasi kasar perguruan tinggi, dan angka melek huruf usia muda 15- 24 tahun. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah masih perlu untuk mendapat perhatian khusus karena diproyeksikan hanya akan mampu mencapai setengah dari target SDGs. Indikator kesehatan yang bernilai A adalah angka kematian balita dan angka kematian neonatal, keduanya diproyeksikan akan mencapai target SDGs tahun 2030.

4.2.5 Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal maka isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Purwakarta dalam 3 (tiga) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah;

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta apabila dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat peningkatan dari tahun 2019 – 2022 dimana nilai IPM Kab. Purwakarta tahun 2022 mencapai 71,56 poin. Namun demikian apabila dilihat dari aspek lain seperti nilai Indeks Profesionalitas ASN, sampai dengan tahun 2022 masih menyandang predikat Sangat Rendah, sehingga kualitas SDM yang mendukung dalam pembangunan daerah masih kurang optimal. Sedangkan dari aspek pemajuan kebudayaan terutama kebudayaan khas daerah yang menjadi kekayaan dan keanekaragaman budaya juga masih perlu ditingkatkan dari sisi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaannya agar pemajuan kebudayaan tersebut dapat lebih optimal dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah.

2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/ prasarana bidang Kesehatan dan KB;

Sejak pandemi Covid-19 melanda diberbagai daerah termasuk Kabupaten Purwakarta, telah menguji kesiapan dan kualitas mutu pelayanan kesehatan di daerah, akses pelayanan dan sarana prasarana kesehatan yang belum optimal dan memadai telah menjadi kendala yang harus diatasi, mulai dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penyediaan SDM tenaga kesehatan yang merata, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan memadai termasuk ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan serta penyuluhan dan pemberdayaan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat harus terus ditingkatkan secara optimal.

3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup;

Dalam merespon setiap kejadian bencana yang tidak dapat di prediksi sebelumnya tentu perlu dilakukan langkah antisipatif guna memperoleh informasi/ peringatan awal (early warning) terhadap potensi bencana yang akan terjadi, baik bencana alam maupun bencana karena kelalaian manusia, termasuk bencana akibat kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Dalam penanganan bencana daerah tidak hanya terpusat pada penanganan pasca bencana saja namun harus dilakukan secara sistemis dan sistematis mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat kejadian dan penanganan pasca kejadian bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi terhadap sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan guna mengukur kesiapan daerah dalam penanganan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi;

Semenjak pandemi Covid-19 melanda berbagai daerah bahkan melanda diberbagai belahan daerah di dunia, sosial ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan mengakibatkan perekonomian daerah menurun secara signifikan, dan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta perkembangannya naik-turun, dimana angka 7,48% ditahun 2019 menjadi 8,83% pada tahun 2021, kemudian turun di tahun 2022 ke angka 8,70%. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2020 menurun sampai pada level -2,13 persen namun pada 2021 dan 2022 beranjak naik ke angka 3,42 dan 5,24 persen. Meskipun ada peningkatan tiap tahunnya namun pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat lebih berkembang, maju dan mandiri.

Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat tersebut perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian

dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang.

Selain itu upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih harus terus digalakkan, disisi lain program pemulihan ekonomi sangat perlu untuk terus diprioritaskan guna menurunkan angka kemiskinan pada level terendah.

Kebijakan ini tentu harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan program prioritas pembangunannya dalam upaya penurunan angka kemiskinan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor urusan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

5. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern;

Dalam penerapan reformasi birokrasi di daerah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih harus di tingkatkan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat baik secara efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai dengan kategori Baik, namun tentunya efektifitas pelaksanaannya mesti terus dioptimalkan agar pelayanan dan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Purwakarta terus meningkat.

Dari aspek akuntabilitas dan maturitas pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan juga masih perlu terus ditingkatkan terutama dari aspek tata kelola pemerintahan (good governance), tata kelola keuangan, pengelolaan manajemen SDM, dll. termasuk peningkatan dan pemanfaatan inovasi daerah baik secara teknologi informasi maupun regulasi, sehingga dapat menyikapi setiap perubahan dinamika dan regulasi yang terus berkembang setiap waktu.

6. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata;

Ketersediaan infrastruktur dasar sebagai sarana konektivitas antar wilayah (jalan dan jembatan) sudah sepatutnya menjadi prioritas pembangunan daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap

wilayah, capaian ketersediaan infrastruktur (Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap) di Kab. Purwakarta tahun 2021 terdapat penurunan dibanding tahun 2020, yakni hanya 83,25 persen atau turun - 4,63 persen. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran dan refokusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga berdampak pada pembangunan fisik terutama pembangunan akses jalan, akibatnya penyediaan sarana infrastruktur konektivitas masih belum merata di setiap wilayah.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu :

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
- Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
- Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

5.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD 2005-2025, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan.

Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, serta keterkaitan antara isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
							2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"												
I.	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah											
I.1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing											
					Indek Pembangunan Manusia	Poin	70,98	71,56	72,99	73,55	74,11	74,11
					Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	10,70	8,75	7,00	6,30	5,68	5,68
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,13	65,21	82,22	89,58	96,43	96,43
I.1.1	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan											
					Indek Pembangunan Manusia	Poin	70,98	71,56	72,99	73,55	74,11	74,11
					Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,10	8,11	9,23	9,75	10,24	10,24
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,12	12,13	13,85	14,63	15,38	15,38
					Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	60,00	80,00	100,00	100,00
I.1.2	Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat											
					Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	10,70	8,75	7,00	6,30	5,68	5,68
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,13	65,21	82,22	89,58	96,43	96,43
					Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
II.	Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup											
II.1	Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat											
					Angka Harapan Hidup	Tahun	71,18	71,47	72,01	72,32	72,64	72,64
II.1.1	Sasaran 3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana											
					Angka Harapan Hidup	Tahun	71,18	71,47	72,01	72,32	72,64	72,64

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
							2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,82	1,69	1,50	1,49	1,48	1,48
II.2			Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana									
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	61,07	64,28	67,49	69,09	70,69	70,69
					Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,66	0,44	0,48	0,55	0,66	0,66
II.2.1			Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	61,07	64,28	67,49	69,09	70,69	70,69
II.2.2			Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana									
					Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,66	0,44	0,48	0,55	0,66	0,66
					Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
III.		Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal										
III.1			Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat									
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	5,24	5,80	6,10	6,39	6,39
					Inflasi	Persen	1,81	4,86	1,34	1,25	1,16	1,16
					Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	69,98	74,35	82,77	86,73	90,54	90,54
III.1.1			Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah									
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	5,24	5,80	6,10	6,39	6,39
					Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,05	90,05
					Pertumbuhan UMKM	Persen	1,00	0,00	11,86	13,16	14,69	14,69
III.1.2			Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian									
					Inflasi	Persen	1,81	4,86	1,34	1,25	1,16	1,16
					Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	69,98	74,35	82,77	86,73	90,54	90,54
					Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	48,83	51,24	56,08	58,49	60,91	60,91
					Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	74,50	82,83	93,32	99,89	106,66	106,66

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
							2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.1.3				Sasaran 8 : Meningkatkan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat								
					Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,00	0,00	9,23	9,82	10,41	10,41
III.1.4				Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan								
					Nilai Tukar Petani	Poin	97,84	99,13	101,71	103,00	104,29	104,29
					Skor Pola Pangan Harapan	Poin	78,30	91,40	95,70	97,80	100,00	100,00
					Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,57	6,57	6,39	6,34	6,29	6,29
III.2				Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat								
					Angka Kemiskinan	Persen	8,83	8,70	7,25	6,83	6,44	6,44
					Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,388	0,367	0,306	0,280	0,255	0,255
					Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	11,67	12,19	12,64	12,91	13,18	13,18
III.2.1				Sasaran 10 : Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan								
					Angka Kemiskinan	Persen	8,83	8,70	7,25	6,83	6,44	6,44
					Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,388	0,367	0,306	0,280	0,255	0,255
					Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	11,67	12,19	12,64	12,91	13,18	13,18
III.2.2				Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,70	86,93	87,38	87,60	87,83	87,83
					Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	74,39	77,89	79,92	80,93	81,94	81,94
IV.		Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah										
IV.1				Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah								
					Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,25	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
							2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.1.1				Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah								
					Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,25	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00
					Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	79,76	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00
IV.1.2				Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien								
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
					Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	88,35	89,00	89,00	90,00	91,00	91,00
					Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,56	0,00	37,60	37,60	37,60	37,60
V.	Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat											
V.1			Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel									
					Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,41	64,41	67,41	70,41	73,41	73,41
					Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	65,64	67,64	69,64	71,64	73,64	73,64
					Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,58	50,50	50,62	50,68	50,74	50,74
					Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
V.1.1				Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE								
					Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	65,64	67,64	69,64	71,64	73,64	73,64
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
					Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,41	64,41	67,41	70,41	73,41	73,41
					Indeks SPBE	Poin	2,37	-	2,60	2,80	3,00	3,00
V.1.2				Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
					Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah
					Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
							2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5
					Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,195	0,212	0,228	0,237	0,245	0,245
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	77,52	79,16	82,45	84,09	85,74	85,74
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,38	50,50	50,62	50,68	50,74	50,74
V.2			Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai									
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	72,70	74,45	77,95	79,70	81,45	81,45
					Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju
V.2.1			Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan									
					Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju
V.2.2			Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat									
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	72,70	74,45	77,95	79,70	81,45	81,45
JUMLAH	1	5	8	17	70	70	70	70	70	70	70	70

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 5.2

Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	ISU STRATEGIS
1	2	3	4	5	7
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"					
I.		Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah			
I.1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing		1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah
I.1.1			Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan		
I.1.2			Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat		
II.		Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup			
II.1			Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/ prasarana bidang Kesehatan dan KB
II.1.1			Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana		
II.2			Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup
II.2.1			Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
II.2.2			Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana		
III.		Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal			
III.1			Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat		4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi
III.1.1			Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah		
III.1.2			Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian		
III.1.3			Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat		
III.1.4			Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan		
III.2			Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
III.2.1			Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan		

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	ISU STRATEGIS
1	2	3	4	5	7
III.2.2				Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
IV.		Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah			
IV.1			Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah		6. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata
IV.1.1			Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah		
IV.1.2			Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien		
V.		Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat			
V.1			Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		5. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern
V.1.1			Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE		
V.1.2			Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
V.2			Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tenram dan Damai		
V.2.1			Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		
V.2.2			Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat		

Sumber : Analisa Tim, 2023

5.3 KESELARASAN RPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

Sebagai salah satu amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 harus memperhatikan penyelarasan dengan dokumen RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Adapun penyelarasan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3

Keselarasan Indikator Makro RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RPJMN Tahun 2020-2024					Target RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026			Target RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026		
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	n/a	n/a	n/a	73,31-73,49	75,54	73,56	73,78	74,00	72,99	73,55	74,11
2	Angka Kemiskinan	Persen	n/a	n/a	n/a	N/A	6,0 - 7,0	7,39	7,24	7,10	7,25	6,83	6,44
3	Angka Pengangguran	Persen	n/a	n/a	n/a	6,00-5,30	3,6 - 4,3	8,21	8,16	8,11	7,00	6,30	5,68
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30	5,4 - 5,7	5,7 - 6,0	5,3-6,0	6,2 - 6,5	5,42	5,68	5,54	5,80	6,10	6,39
5	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Poin	n/a	n/a	n/a	0,378-0,375	0,360 - 0,374	0,408	0,406	0,404	0,306	0,280	0,255
6	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	Juta Rp.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82,77	86,73	90,54

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 5.4

Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

SASARAN POKOK RPJPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2005 - 2025	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana
4. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
	8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
5. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
	11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Meningkatnya Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
	15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SASARAN POKOK RPJPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2005 - 2025	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
8. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 5.5

Keselarasn Sasaran RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;	6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
	8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;	2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat
	6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
	8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
3. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera;	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
6. Terpenuhinya Layanan Dasar, Bidang Kesehatan dan Pendidikan;	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
7. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;	11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Terwujudnya pengentasan kemiskinan;	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
9. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;	2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat
10. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
11. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
12. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;	16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
13. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
14. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkuat Karakter Bangsa;	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
15. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
16. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
17. Meningkatnya Konektivitas Wilayah;	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
18. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
19. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
20. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE

SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
21. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
22. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;	5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana
23. Pembangunan Rendah Karbon;	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
24. Konsolidasi Demokrasi;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
25. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;	-
26. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
27. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
	15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
28. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 5.6

Keselarasn Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dengan dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 - 2026	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
	6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga	11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat
6. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
7. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
9. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
10. Terkendalinya tingkat kemiskinan	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
11. Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
12. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
13. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana

SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 - 2026	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
16. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE 16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
17. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
19. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
20. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber : Analisa Tim, 2023

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 STRATEGI

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategi menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah,

sekaligus menerjemahkan visi dan misi kedalam rencana kerja yang akan diaplikasikan.

2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Urutan strategi dari tahun ke tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien.

Adapun uraian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dapai dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Purwakarta

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
	Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"					
I.		Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah				
I.1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing			
I.1.1				Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan		1. Peningkatan Kualitas SDM
I.1.1.1					Strategi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan, dan Pengembangan Kurikulum serta SDM yang berkualitas	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
I.1.1.2					Strategi 2 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan	Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan
I.1.1.3					Strategi 3 : Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat
I.1.2				Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat		1. Peningkatan Kualitas SDM
I.1.2.1					Strategi 4 : Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	6	7	
						Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran	
						Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai	
II.		Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup					
II.1			Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
II.1.1				Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana		2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	
II.1.1.1					Strategi 5 : Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan	
						Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC	
						Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya	
						Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	
						Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat	
II.1.1.2					Strategi 6 : Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera	Menerapkan rencana pengendalian penduduk	
						Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB	
						Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah	
						Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera	
II.2			Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana				
II.2.1				Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	
II.2.1.1					Strategi 7 : Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup	
						Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan	
						Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau	

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
						Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3
						Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan
II.2.1.2					Strategi 8 : Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sadar dan Peduli Lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan
II.2.2				Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana		3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
II.2.2.1					Strategi 9 : Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Bencana	Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan
						Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan
						Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta, Komunitas dan masyarakat)
III.		Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal				
III.1			Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat			
III.1.1				Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah		4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
III.1.1.1					Strategi 10 : Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan
						Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian
III.1.1.2					Strategi 11 : Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital	Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional
						Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha
						Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM
						Menyediakan Sistem Data Base UMKM

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
III.1.2				Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian		4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
III.1.2.1					Strategi 12 : Membangun Iklim Investasi yang Kondusif	Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha
III.1.2.2					Strategi 13 : Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri	Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen
III.1.3				Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat		4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
III.1.3.1					Strategi 14 : Mengembangkan Potensi Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata	Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan
III.1.3.2					Strategi 15 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang berbasis Inovasi	Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
III.1.4				Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan		4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
III.1.4.1					Strategi 16 : Meningkatkan Produksi Unggulan Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah
						Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian
						Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan
						Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian
						Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak
III.1.4.2					Strategi 17 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata
						Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas
III.2			Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
III.2.1				Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan		5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
III.2.1.1					Strategi 18 : Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
						Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
						Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas
						Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat
III.2.2				Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
III.2.2.1					Strategi 19 : Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
						Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
IV.		Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah				
IV.1			Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah			
IV.1.1				Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah		6. Peningkatan Infrastruktur Daerah
IV.1.1.1					Strategi 20 : Meningkatkan Kualitas Akses Jaringan Jalan dan Jembatan yang Mantap	Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat
IV.1.1.2					Strategi 21 : Meningkatkan Ketersediaan Akses Jaringan Air Bersih yang Merata	Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata
IV.1.1.3					Strategi 22 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman
IV.1.2				Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien		6. Peningkatan Infrastruktur Daerah
IV.1.2.1					Strategi 23 : Meningkatkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi, Permukiman dan Pemerintahan yang Merata	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya Meningkatkan penyediaan rumah layak huni Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
V.		Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat				
V.1			Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel			
V.1.1				Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE		7. Reformasi Birokrasi
V.1.1.1					Strategi 24 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
						Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi
						Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
						Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
V.1.1.2					Strategi 25 : Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik	Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital
						Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel
						Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan
V.1.2				Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		7. Reformasi Birokrasi
V.1.2.1					Strategi 26 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance)	Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
						Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait
						Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri
						Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran</p> <p>Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif</p> <p>Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah</p> <p>Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna</p> <p>Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional</p> <p>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan</p>
V.1.2.2					Strategi 27 : Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas	<p>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa</p> <p>Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP</p> <p>Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas</p>
V.2			Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai			
V.2.1				Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
V.2.1.1					Strategi 28 : Meningkatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Desa	<p>Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa</p> <p>Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa</p> <p>Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan</p>

KODE	VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
V.2.2				Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat		8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
V.2.2.1				Strategi 29 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
						Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
						Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila
	1	5	8	17	29	8 / 100

Sumber : Analisa Tim, 2023

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 3 (tiga) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan tema pembangunan. Rumusan arah kebijakan pada RPD telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2

Tema Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026	
	TAHUN 2026
	MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING
	TAHUN 2025
	PENGUATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL
TAHUN 2024	
MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH	

Sumber : Analisa Tim, 2023

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) arah kebijakan pokok yang masing – masing dijabarkan menjadi 100 arah kebijakan sesuai dengan strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tabel 6.1 diatas. Kemudian arah kebijakan pokok tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan setiap tahunnya.

Adapun arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM

1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/ kesetaraan dan PAUD
2. Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
4. Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional
5. Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya
6. Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan
7. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno
8. Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat
9. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja
10. Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan
11. Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga
12. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran
13. Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai

2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB

1. Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan
2. Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC

3. Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
5. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat
6. Menerapkan rencana pengendalian penduduk
7. Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB
8. Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah
9. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

1. Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup
2. Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan
3. Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3
5. Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan
6. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan
7. Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan
8. Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan
9. Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta, Komunitas dan masyarakat)

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

1. Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian
3. Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional
4. Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha
5. Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM
6. Menyediakan Sistem Data Base UMKM
7. Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses
8. Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha
9. Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis
10. Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu
11. Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
12. Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah
13. Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen
14. Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan
15. Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar
16. Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata
17. Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan
18. Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata
19. Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI
20. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah

21. Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian
22. Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan
23. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian
24. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak
25. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata
26. Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas
4. Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat
5. Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak

6. Peningkatan Infrastruktur Daerah

1. Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata
2. Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat
3. Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan
5. Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman

6. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat
7. Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya
8. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
9. Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan
10. Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh

7. Reformasi Birokrasi

1. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
2. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi
3. Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
5. Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital
6. Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel
7. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan
8. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait
10. Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri
11. Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital
12. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan

13. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran
14. Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif
15. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah
16. Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna
17. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional
18. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan
19. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
20. Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP
21. Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas

8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
2. Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa
3. Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan
4. Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
5. Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila

Tabel 6.3

Arah Kebijakan Pembangunan RPD Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024 – 2026

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1. Peningkatan Kualitas SDM		
1	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD	Dinas Pendidikan
2	Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal	Dinas Pendidikan
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan
4	Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10	Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
12	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
13	Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB		
1	Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih
2	Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC	Dinas Kesehatan
3	Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya	Dinas Kesehatan
4	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih
5	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Menerapkan rencana pengendalian penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
9	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		
1	Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
3	Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau	Dinas Lingkungan Hidup
4	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
7	Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8	Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9	Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta, Komunitas dan masyarakat)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah		
1	Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3	Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
4	Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
5	Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
6	Menyediakan Sistem Data Base UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
7	Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
10	Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
11	Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
12	Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
13	Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
14	Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
15	Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
16	Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
17	Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
18	Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
19	Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
20	Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian;
21	Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian;
22	Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan	Dinas Perikanan dan Peternakan;
23	Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian;
24	Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak	Dinas Perikanan dan Peternakan;
25	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata	Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan;
26	Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas	Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan;
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
1	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
6	Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Peningkatan Infrastruktur Daerah		
1	Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan	Dinas Perhubungan
5	Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman	Dinas Perhubungan
6	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Reformasi Birokrasi		
1	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah	Semua Perangkat Daerah;
2	Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi	Sekretariat Daerah
3	Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah;
4	Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD;
5	Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi dan Informatika; Kecamatan;
6	Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel	Dinas Komunikasi dan Informatika;
7	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8	Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sekretariat Daerah;

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
9	Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait	Sekretariat Daerah;
10	Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri	Sekretariat Daerah;
11	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
12	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
13	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah;
14	Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif	Badan Keuangan dan Aset Daerah;
15	Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah	Badan Pendapatan Daerah;
16	Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
17	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
18	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kecamatan;
19	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa	Inspektorat; Kecamatan;
20	Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP	Inspektorat;
21	Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas	Inspektorat; Kecamatan;
8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
1	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan;
2	Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan;
3	Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan;
4	Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan ;
5	Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan;
6	Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8 / 100		47

Sumber : Analisa Tim, 2023

6.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Dalam rangka menjabarkan sasaran pembangunan, maka ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan pembangunan, selanjutnya guna melaksanakan arah kebijakan tersebut maka perlu dirumuskan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai sasaran sesuai strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Selanjutnya Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan Pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.4

Keselarasan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
	1. Peningkatan Kualitas SDM	1. Peningkatan Kualitas SDM	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
1	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD	Dinas Pendidikan	
2	Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal	Dinas Pendidikan	
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan	
4	Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
5	Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
6	Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
7	Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
8	Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
9	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
10	Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
11	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
12	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
13	Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
1	Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih	
2	Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC	Dinas Kesehatan	
3	Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya	Dinas Kesehatan	
4	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih	
5	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat	Dinas Kesehatan	
6	Menerapkan rencana pengendalian penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
7	Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
8	Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
1	Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau	Dinas Lingkungan Hidup	
4	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	
5	Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	
6	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
7	Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	
8	Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;	

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
9	Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	
	4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
1	Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
3	Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
4	Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
5	Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
6	Menyediakan Sistem Data Base UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
7	Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
8	Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
9	Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
10	Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
11	Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
12	Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
13	Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
14	Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
15	Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
16	Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masarakat sadar wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
17	Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
18	Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
19	Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
20	Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian;	7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
21	Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian;	

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
22	Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan	Dinas Perikanan dan Peternakan;	
23	Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian;	
24	Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak	Dinas Perikanan dan Peternakan;	
25	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata	Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan;	
26	Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas	Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan;	
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
5	Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
6	Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	6. Peningkatan Infrastruktur Daerah	6. Peningkatan Infrastruktur Daerah	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
1	Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2	Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
3	Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan	Dinas Perhubungan	
5	Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman	Dinas Perhubungan	
6	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
7	Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
8	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
9	Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
10	Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	7. Reformasi Birokrasi	7. Reformasi Birokrasi	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
1	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah	Semua Perangkat Daerah;	
2	Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi	Sekretariat Daerah	
3	Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah;	
4	Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD;	
5	Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi dan Informatika; Kecamatan;	
6	Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel	Dinas Komunikasi dan Informatika;	
7	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	
8	Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sekretariat Daerah;	
9	Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait	Sekretariat Daerah;	

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
10	Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri	Sekretariat Daerah;	
11	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	
12	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
13	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
14	Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
15	Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah	Badan Pendapatan Daerah;	
16	Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
17	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
18	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kecamatan;	
19	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa	Inspektorat; Kecamatan;	
20	Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP	Inspektorat;	
21	Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas	Inspektorat; Kecamatan;	

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
	8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan;	
2	Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan;	
3	Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan;	
4	Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan ;	12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
5	Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan;	
6	Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	
	8 / 100	47	12

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 6.5

Keterkaitan / Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024
dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN PURWAKARTA
1	2
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
	5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
	6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
	11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 6.6

Keterkaitan / Keselarasan Prioritas Pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA
1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan yang Mengoptimalkan Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Serta Dan Kelautan Dan Perikanan.	4. Pengembangan Koperasi dan UMKM 5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan 6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat 7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
3. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu.	8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan.	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
5. Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sumber : Analisa Tim, 2023

6.4 PROGRAM PEMBANGUNAN

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjabarkan dan memastikan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan, untuk mencapai tujuan dan sasaran selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja pelaksanaan program pembangunan sebagian besar telah menggunakan indikator yang terdapat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Adapun program pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.7

Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TOTAL PAGU ANGGARAN													2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243		7.587.169.601.302	
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"																		
I.	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah												215.183.101.295	218.215.674.912	226.748.111.316		660.146.887.523	
I.1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing												215.183.101.295	218.215.674.912	226.748.111.316		660.146.887.523	
						Indek Pembangunan Manusia	Poin	70,98	71,56	72,99	73,55	74,11				74,11		
						Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	10,70	8,75	7,00	6,30	5,68				5,68		
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,13	65,21	82,22	89,58	96,43				96,43		
I.1.1	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan												205.798.645.983	209.786.219.600	217.543.828.833		633.128.694.416	
						Indek Pembangunan Manusia	Poin	70,98	71,56	72,99	73,55	74,11				74,11		
						Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,10	8,11	9,23	9,75	10,24				10,24		
						Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,12	12,13	13,85	14,63	15,38				15,38		
						Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	60,00	80,00	100,00				100,00		
1.01.02	Program : Pengelolaan Pendidikan												199.986.134.737	203.876.219.600	211.613.828.833		615.476.183.170	Dinas Pendidikan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	72,83	0,00	74,29	75,74	77,20				77,20		Dinas Pendidikan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,30	0,00	99,50	99,70	99,90				99,90		Dinas Pendidikan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	94,13	0,00	94,33	94,53	94,73				94,73		Dinas Pendidikan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,52	0,00	0,54	0,55	0,56				0,56		Dinas Pendidikan
						Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,18	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,52	0,00	0,50	0,49	0,48				0,48		Dinas Pendidikan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Persen	1,72	0,00	1,75	1,78	1,82				1,82		Dinas Pendidikan
						Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	72,15	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	72,15	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Angka partisipasi kasar	Persen	23,40	23,40	24,30	24,80	25,30				25,30		Dinas Pendidikan
						Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Angka Partisipasi Murni	Persen	21,90	21,90	22,80	23,20	23,70				23,70		Dinas Pendidikan
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,60	99,60	99,61	99,62	99,63				99,63		Dinas Pendidikan
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	83,80	83,80	84,00	84,10	84,20				84,20		Dinas Pendidikan
						Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,30	99,30	99,50	99,60	99,70				99,70		Dinas Pendidikan
						Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,13	94,10	94,30	94,40	94,50				94,50		Dinas Pendidikan
						Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,70	0,70	0,50	0,40	0,30				0,30		Dinas Pendidikan
						Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	5,90	5,90	5,70	5,60	5,50				5,50		Dinas Pendidikan
						Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	21,13	22,61	24,19	24,67	25,15				25,15		Dinas Pendidikan
						Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	39,20	41,95	44,88	47,63	50,38				50,38		Dinas Pendidikan
						Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	41,53	0,00	41,55	41,56	41,57				41,57		Dinas Pendidikan
						Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	58,41	59,51	59,10	59,17	59,24				59,24		Dinas Pendidikan
						Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	97,66	99,58	98,86	98,98	99,10				99,10		Dinas Pendidikan
						Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	5,18	9,58	7,93	8,21	8,48				8,48		Dinas Pendidikan
						Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	48,95	54,69	52,54	52,90	53,26				53,26		Dinas Pendidikan
						Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	37,08	42,99	40,77	41,14	41,51				41,51		Dinas Pendidikan
						Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	59,00	61,92	60,83	61,01	61,19				61,19		Dinas Pendidikan
						Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	52,94	53,57	53,33	53,37	53,41				53,41		Dinas Pendidikan
						Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	44,83	42,90	43,50	43,62	43,87				43,87		Dinas Pendidikan
						Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	63,52	2,59	21,63	25,44	33,05				33,05		Dinas Pendidikan
						Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	75,34	85,48	81,68	82,31	82,95				82,95		Dinas Pendidikan
						Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	62,83	89,14	79,27	80,92	82,56				82,56		Dinas Pendidikan
						Indeks Inklusivitas SD	nilai	70,98	78,46	75,66	76,12	76,59				76,59		Dinas Pendidikan
						Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	77,48	78,96	78,41	78,50	78,59				78,59		Dinas Pendidikan
						Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	62,41	74,48	69,95	70,71	71,46				71,46		Dinas Pendidikan
						Indeks Inklusivitas SMP	nilai	65,28	73,32	70,31	70,81	71,31				71,31		Dinas Pendidikan
1.01.03						Program : Pengembangan Kurikulum							380.300.000	400.000.000	400.000.000		1.180.300.000	Dinas Pendidikan
						Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
						Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.01.04					Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan									200.000.000	200.000.000	200.000.000		600.000.000	Dinas Pendidikan
					Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen		38,67	38,67	38,77	38,87	38,97				38,97		Dinas Pendidikan	
					Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen		41,60	41,70	41,80	41,90	42,00				42,00		Dinas Pendidikan	
					Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen		95,88	96,00	96,06	96,12	96,18				96,18		Dinas Pendidikan	
1.01.05					Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan									199.999.900	200.000.000	200.000.000		599.999.900	Dinas Pendidikan
					Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan	
					Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan	
1.01.06					Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra									200.000.000	225.000.000	225.000.000		650.000.000	Dinas Pendidikan
					Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan	Persen		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan	
2.22.02					Program : Pengembangan Kebudayaan									2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		7.500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
					Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya		0,00	0,00	70,00	80,00	90,00				90,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina	Persen		36,00	55,00	55,00	55,00	55,00				55,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan	Persen		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.03					Program : Pengembangan Kesenian Tradisional									275.000.000	275.000.000	275.000.000		825.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
					Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event		0,00	0,00	12,00	12,00	12,00				12,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Persentase Kelompok/Komunitas Seni/Kesenian yang dibina	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				3,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan	Persen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.04						Program : Pembinaan Sejarah						450.000.000	450.000.000	450.000.000		1.350.000.000		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05						Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya						600.000.000	600.000.000	600.000.000		1.800.000.000		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00				60,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	0,00	0,00	12,00	16,00	20,00				20,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.06						Program : Pengelolaan Permuseuman						550.000.000	550.000.000	550.000.000		1.650.000.000		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.23.02						Program : Pembinaan Perpustakaan						407.211.346	460.000.000	480.000.000		1.347.211.346		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Nilai tingkat kegembiraan membaca masyarakat	Persen	63,90	63,90	70,00	80,00	85,00				85,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00				70,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah	Persen	84,60	2,17	10,00	10,00	10,00				10,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	1,07	0,10	1,07	1,07	1,07				1,07		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Laju pengunjung perpustakaan	Persen	39,25	409,13	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	12.381,00	63.035,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				75.000,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina	Persen	0,76	0,78	0,80	0,80	0,80				0,80		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	0,76	0,78	0,16	0,16	0,16				0,16		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Laju Anggota Perpustakaan	Persen	0,15	51,52	51,52	51,52	51,52				51,52		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	0,32	0,11	0,09	0,08	0,08				0,08		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03						Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno						50.000.000	50.000.000	50.000.000		150.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Persen	40,00	42,86	50,00	53,00	61,00				61,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
I.1.2						Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat						9.384.455.312	8.429.455.312	9.204.282.483		27.018.193.107		
						Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	10,70	8,75	7,00	6,30	5,68				5,68		
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,13	65,21	82,22	89,58	96,43				96,43		
						Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07				0,07		
2.07.03						Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						1.070.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000		3.210.000.000		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	0,00	69,06	69,06	69,06	69,06				69,06		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40				0,40		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan	Persen	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40				3,40		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57				0,57		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11				0,11		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07				0,07		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04					Program : Penempatan Tenaga Kerja			745.000.000	745.000.000	745.000.000						2.235.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
						Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	0,00	5,81	5,81	5,81	5,81				5,81		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05					Program : Hubungan Industrial			300.000.000	300.000.000	300.000.000						900.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64				0,64		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	0,00	38,88	38,88	38,88	38,88				38,88		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Keselamatan dan perlindungan	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.19.02					Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			775.000.000	775.000.000	775.000.000						2.325.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,0043	0,0049	0,0001	0,0001	0,0002				0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	0,95	0,96	0,01	0,01	0,01				0,01		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	0,26	0,39	0,41	0,41	0,41				0,41		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,33	0,71	0,74	0,83	0,84				0,84		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,26	0,39	0,41	0,41	0,41				0,41		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.19.03						Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						4.024.455.312	3.024.455.312	3.075.000.000		10.123.910.624		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Tingkat prestasi olahraga	Persen	50,00	66,00	70,00	80,00	85,00				85,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	25,00	49,00	50,00	60,00	75,00				75,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	15,00	25,00	40,00	50,00	65,00				65,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00				60,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Tingkat atlet berprestasi	Persen	30,00	40,00	50,00	52,00	55,00				55,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	10,00	15,00	16,00	18,00	20,00				20,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.19.04						Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						620.000.000	620.000.000	1.039.282.483		2.279.282.483		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.32.02					Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi					75.000.000	75.000.000	75.000.000			225.000.000			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
					Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.03					Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi					225.000.000	225.000.000	275.000.000			725.000.000			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
					Persentase transmigran swakarsa	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
					Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
					Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.04					Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi					125.000.000	125.000.000	125.000.000			375.000.000			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
					Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5.04.02					Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia					1.425.000.000	1.470.000.000	1.725.000.000			4.620.000.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20,00	20,00	25,00	30,00	30,00					30,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,86	0,93	1,00	1,07	1,15					1,15		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	37,25	47,34	51,01	56,51	63,85					63,85		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	Persen	2,61	5,49	2,86	2,86	2,86					2,86		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH			
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
II. Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup													137.127.808.186	140.625.922.321	143.980.807.508		421.734.538.015				
II.1			Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat													131.027.833.200	133.337.922.321	136.045.807.508		400.411.563.029	
						Angka Harapan Hidup	Tahun	71,18	71,47	72,01	72,32	72,64				72,64					
II.1.1			Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana													131.027.833.200	133.337.922.321	136.045.807.508		400.411.563.029	
						Angka Harapan Hidup	Tahun	71,18	71,47	72,01	72,32	72,64				72,64					
						Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,82	1,69	1,50	1,49	1,48				1,48					
1.02.02			Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat													86.109.252.055	87.281.228.126	88.825.631.813		262.216.111.994	Dinas Kesehatan
						Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	36,37	36,36	50,00	60,00	65,00				65,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,82	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	71,47	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	39,94	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	81,46	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	65,73	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	59,94	75,00	80,00	90,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	93,58	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	79,31	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	98,43	92,20	95,00	98,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	Persen	79,40	41,60	80,00	90,00	100,00				100,00	Dinas Kesehatan				

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar												
						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	97,57	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	98,82	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	71,47	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	39,94	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	81,00	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	60,00	75,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	94,00	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	79,00	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	98,43	92,20	95,00	98,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	79,40	41,60	80,00	90,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Rasio posyandu per satuan balita	Poin	16,68	16,82	17,34	17,60	17,86				17,86		Dinas Kesehatan
						Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	97,84	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,11	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	0,00	77,60	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	85,31	81,05	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	0,00	20,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	50,00	37,49	70,00	80,00	90,00				90,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	92,48	82,20	90,00	95,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	246,95	282,78	245,65	208,52	171,39				171,39		Dinas Kesehatan
						Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	6,07	2,90	2,58	2,26	1,94				1,94		Dinas Kesehatan
						Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	92,48	82,20	90,00	95,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	93,73	86,53	90,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Penderita diare yang ditangani	Persen	76,26	56,58	85,00	90,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Rasio	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	79,40	41,60	80,00	90,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan kunjungan bayi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan puskesmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan pelayanan nifas	Persen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	75,55	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan pelayanan anak balita	Persen	61,91	65,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
1.02.02						Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		13.500.000.000	14.150.000.000	14.750.000.000						42.400.000.000		RSUD Bayu Asih
						Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih
						Tingkat Pengendalian Infeksi di RS	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih
						Capaian Indikator Medik	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih
						Prosedur Penanganan Sampel Uji	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih
						Pengendalian Mutu	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih
						Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih
						Ketepatan Waktu Pelayanan	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih
						Temuan Yang di Tindaklanjuti	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih
						Tingkat Keandalan Sumber Daya	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih
1.02.03						Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		13.201.009.160	13.201.009.160	13.201.009.160						39.603.027.480		Dinas Kesehatan
						Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	50,00	85,00	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
						Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Persen	68,00	75,46	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
						Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	68,20	73,50	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
						Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	68,20	73,50	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
						Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	0,06	0,07	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
						Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	0,08	0,10	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
1.02.03						Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		625.000.000	725.000.000	800.000.000						2.150.000.000		RSUD Bayu Asih
						Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	0,00	0,00	75,00	78,00	80,00				80,00		RSUD Bayu Asih
						Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	0,00	0,00	75,00	78,00	80,00				80,00		RSUD Bayu Asih
1.02.04						Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		620.000.000	685.000.000	740.000.000						2.045.000.000		Dinas Kesehatan
						Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
						Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	70,75	79,67	80,00	82,00	85,00				85,00		Dinas Kesehatan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.02.05					Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									680.000.000	685.000.000	695.000.000		2.060.000.000	Dinas Kesehatan
						Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00				10,00		Dinas Kesehatan	
						Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Persen	83,40	77,20	89,00	96,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan	
1.02.05					Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									500.000.000	500.000.000	500.000.000		1.500.000.000	RSUD Bayu Asih
						Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	NU1	NU1	75,00	75,00	75,00				75,00		RSUD Bayu Asih	
2.14.02					Program : Pengendalian Penduduk									349.385.450	429.969.750	474.969.750		1.254.324.950	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,70	2,70	2,50	2,50	2,50				2,50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	37.890,00	37.890,00	36,00	36,00	36,00				36,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	29,89	29,89	30,00	30,00	31,11				31,11		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03					Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)									9.017.281.650	9.254.810.400	9.633.291.900		27.905.383.950	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	12.263,00	81,27	99,00	99,00	99,00				99,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	33,52	34,05	35,22	36,30	38,40				38,40		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00				94,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Ratio Akseptor KB	Persen	26.717,00	25.521,00	25.521,00	25.521,00	25.521,00				25.521,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi	Persen	81,27	82,27	83,28	83,28	83,28				83,28		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						perempuan menikah usia 15 - 49												
						Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	Poin	25,71	25,71	25,71	25,71	25,71				25,71		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	533,83	533,83	534,83	534,83	534,83				534,83		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	35,54	46,24	46,24	46,24	46,24				46,24		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	17,72	17,73	17,78	17,78	17,78				17,78		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	681.167,00	681.167,00	691.167,00	691.167,00	691.167,00				691.167,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	151.153,00	151.153,00	161.153,00	161.153,00	161.153,00				161.153,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	623.471,00	623.471,00	624.471,00	624.471,00	624.471,00				624.471,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	23,53	23,53	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	51,71	51,71	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	98,00	115,00	126,00	126,00	126,00				126,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	22,80	22,80	23,90	23,90	23,90				23,90		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	21,57	21,57	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	149.900,00	274.920,00	272.476,00	325.980,00	391.178,00				391.178,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan	Persen	105,00	135,00	135,00	135,00	135,00				135,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan												
2.14.04						Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							6.425.904.885	6.425.904.885	6.425.904.885		19.277.714.655	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persen	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65				15,65		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00				3.314,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00				674,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65				15,65		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	53,71	53,71	53,71	53,71	53,71				53,71		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00				19,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
II.2						Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							6.099.974.986	7.288.000.000	7.935.000.000		21.322.974.986	
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	61,07	64,28	67,49	69,09	70,69				70,69		
						Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,66	0,44	0,48	0,55	0,66				0,66		
II.2.1						Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							3.455.000.000	4.573.000.000	5.123.000.000		13.151.000.000	
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	61,07	64,28	67,49	69,09	70,69				70,69		
2.11.02						Program : Perencanaan Lingkungan Hidup							200.000.000	200.000.000	200.000.000		600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				0,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.03						Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup							1.275.000.000	1.333.000.000	1.533.000.000		4.141.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	80,00	80,00	70,00	80,00	90,00				90,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Skor/ Kategori	63,33 / Sedang	50 / Sedang	60 / Sedang	65 / Sedang	70 / Baik				70 / Baik		Dinas Lingkungan Hidup
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Skor/ Kategori	73,47 / Baik	68,74 / Sedang	70 / Baik	75 / Baik	80 / Baik				80 / Baik		Dinas Lingkungan Hidup
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor/ Kategori	35,46	36,45	37,18	37,55	37,93				37,93		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04						Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)							100.000.000	100.000.000	100.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05						Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)							50.000.000	50.000.000	50.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah limbah B3 yang dikelola	Kg	18.922.101.000,00	16.591.264.000,00	15.000.000.000,00	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00				11.000.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06						Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)							250.000.000	325.000.000	375.000.000		950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00				25,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				10,00		Dinas Lingkungan Hidup

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.07					Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH								100.000.000	100.000.000	150.000.000		350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Penetapan hak MHA	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10					Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup								100.000.000	125.000.000	125.000.000		350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11					Program : Pengelolaan Persampahan								955.000.000	1.890.000.000	2.090.000.000		4.935.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Timbulan sampah yang ditangani	Persen	60,00	74,00	75,00	75,00	75,00				75,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	30,00	31,00	31,00	32,00	32,00				32,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase cakupan area pelayanan	Persen	73,00	75,00	75,00	75,00	75,00				75,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Skor	71,00	71,00	72,00	72,00	72,00				72,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00				75,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08					Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								300.000.000	300.000.000	350.000.000		950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
						Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09					Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								125.000.000	150.000.000	150.000.000		425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
II.2.2						Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana							2.644.974.986	2.715.000.000	2.812.000.000		8.171.974.986	
						Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,66	0,44	0,48	0,55	0,66				0,66		
						Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang				Sedang		
1.05.03						Program : Penanggulangan Bencana							1.076.000.000	1.090.000.000	1.117.000.000		3.283.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04						Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran							1.355.000.000	1.405.000.000	1.455.000.000		4.215.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	95,76	90,16	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14				18,14		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	-	89,56	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	95,76	90,16	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Layanan	543,00	808,00	800,00	750,00	700,00				700,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06.06					Program : Penanganan Bencana								213.974.986	220.000.000	240.000.000		673.974.986	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal												21.643.250.806	21.969.884.508	22.748.841.597	66.361.976.911		
III.1	Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat												19.189.950.806	19.392.884.508	20.068.841.597	58.651.676.911		
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	5,24	5,80	6,10	6,39					6,39		
					Inflasi	Persen	1,81	4,86	1,34	1,25	1,16					1,16		
					Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	69,98	74,35	82,77	86,73	90,54					90,54		
III.1.1	Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah												1.150.000.000	1.215.000.000	1.365.000.000	3.730.000.000		
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	5,24	5,80	6,10	6,39					6,39		
					Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,05					90,05		
					Pertumbuhan UMKM	Persen	1,00	0,00	11,86	13,16	14,69					14,69		
2.17.02					Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam								50.000.000	52.500.000	60.000.000		162.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
					Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	Persen	0,00	0,00	87,50	90,00	91,67					91,67		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.17.03					Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi								185.000.000	195.000.000	222.500.000		602.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,05				90,05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.04					Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi								290.000.000	307.500.000	345.000.000		942.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,25				90,25		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	Persen	10,00	10,00	12,00	15,00	18,00				18,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.05					Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian								100.000.000	102.500.000	105.000.000		307.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	Persen	69,90	71,66	72,82	73,71	74,60				74,60		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.07					Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)								375.000.000	382.500.000	432.500.000		1.190.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	47,85	0,00	85,23	92,24	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	Persen	55,06	0,00	56,46	56,93	57,39				57,39		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	Persen	53,00	0,00	75,23	86,45	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	Persen	1,00	0,00	2,53	2,78	3,85				3,85		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	Persen	52,20	0,00	57,90	60,42	63,22				63,22		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.08						Program : Pengembangan UMKM						150.000.000	175.000.000	200.000.000		525.000.000		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	10,00	0,00	20,56	24,30	28,04				28,04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	Persen	6,82	0,00	9,63	10,56	11,50				11,50		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
III.1.2						Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian						3.018.320.100	3.193.320.100	3.420.062.508		9.631.702.708		
						Inflasi	Persen	1,81	4,86	1,34	1,25	1,16				1,16		
						Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	69,98	74,35	82,77	86,73	90,54				90,54		
						Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	48,83	51,24	56,08	58,49	60,91				60,91		
						Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	74,50	82,83	93,32	99,89	106,66				106,66		
2.18.02						Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal						99.989.800	99.989.800	99.989.800		299.969.400		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	6,78	11,19	5,60	5,80	6,00				6,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	4,73	5,88	6,73	7,20	7,70				7,70		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	550,00	604,00	730,00	803,00	884,00				884,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	27,74	28,00	28,50	29,00	29,5				29,5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03						Program : Promosi Penanaman Modal						199.950.000	199.950.000	199.950.000		599.850.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kegiatan	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00				2,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	Rp.	6,00	6,50	7,40	7,90	8,40				8,40		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04						Program : Pelayanan Penanaman Modal						299.986.500	299.986.500	299.986.500		899.959.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	16,95	17,30	18,50	19,00	19,50				19,50		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	Persen	93,79	90,58	94,58	95,58	96,58				96,58		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,78	91,26	92,50	93,00	93,50				93,50		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05						Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						393.394.000	393.394.000	393.394.000		1.180.182.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	6,67	6,67	7,14	8,70	8,70				8,70		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06						Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal						399.999.800	399.999.800	451.742.208		1.251.741.808	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Penanaman Modal dan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.30.02						Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan							110.000.000	120.000.000	120.000.000		350.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPF/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	93,00	0,00	95,32	96,53	97,86				97,86		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03						Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan							20.000.000	25.000.000	25.000.000		70.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04						Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting							295.000.000	330.000.000	345.000.000		970.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	34,84	0,00	37,00	38,00	39,00				39,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05						Program : Pengembangan Ekspor							200.000.000	200.000.000	200.000.000		600.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Tingkat Nilai Export bersih	Persen	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persen	0,00	0,00	2,00	2,94	3,22					3,22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06						Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen							275.000.000	350.000.000	375.000.000		1.000.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	62,61	0,00	64,62	80,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07						Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							75.000.000	75.000.000	135.000.000		285.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persen	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00				70,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Persen	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00				70,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02						Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri							450.000.000	475.000.000	600.000.000		1.525.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0,00	0,00	60,00	80,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	47,52	0,00	83,33	90,48	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH					
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
3.31.03					Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota													50.000.000	75.000.000	100.000.000		225.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	18,68	0,00	20,71	21,19	21,45				21,45		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian					
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian					
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian					
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian					
3.31.04					Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional													150.000.000	150.000.000	75.000.000		375.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
						Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian					
						Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegiatan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				10,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian					
III.1.3					Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat													4.450.000.000	4.450.000.000	4.450.000.000		13.350.000.000	
						Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03				0,03							
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,00	0,00	9,23	9,82	10,41				10,41							

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.26.02					Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000		9.450.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-35,81	-44,84	6,53	3,33	4,84				4,84		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	-18,24	32,35	0,42	2,38	2,78				2,78		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Tingkat hunian akomodasi	Persen	17,54	16,89	19,87	24,84	31,05				31,05		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Kunjungan wisata	Persen	53,01	69,89	80,00	85,00	90,00				90,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Lama kunjungan Wisata	Hari	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00				2,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Persen	4,44	4,44	0,31	0,31	0,31				0,31		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat	Persen	4,44	4,44	0,43	0,43	0,43				0,43		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	13,33	15,56	0,31	0,31	0,31				0,31		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03					Program : Pemasaran Pariwisata								400.000.000	400.000.000	400.000.000		1.200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan	Event	40,00	40,00	2,00	2,00	2,00				2,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
						Persentase destinasi wisata yang diminati	Persen	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32				0,32		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.26.04					Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual								500.000.000	500.000.000	500.000.000		1.500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan	Persen		40,00	40,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.05					Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif								400.000.000	400.000.000	400.000.000		1.200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
					Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen		40,00	40,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
III.1.4					Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan									10.571.630.706	10.534.564.408	10.833.779.089		31.939.974.203	
					Nilai Tukar Petani	Poin		97,84	99,13	101,71	103,00	104,29					104,29		
					Skor Pola Pangan Harapan	Poin		78,30	91,40	95,70	97,80	100,00					100,00		
					Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen		6,57	6,57	6,39	6,34	6,29					6,29		
2.09.02					Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan								330.000.000	330.000.000	330.000.000		990.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian	
					Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Persen		75,00	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.03					Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat								1.065.000.000	1.065.000.000	1.125.000.000		3.255.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian	
					Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen		90,00	90,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.04					Program : Penanganan Kerawanan Pangan								60.000.000	60.000.000	70.000.000		190.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian	
					Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Dokumen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.05					Program : Pengawasan Keamanan Pangan								200.000.000	200.000.000	240.000.000		640.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian	
					Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	
3.25.03					Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap								596.986.000	605.487.000	616.877.000		1.819.350.000	Dinas Perikanan dan Peternakan	
					Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton		1.371,25	1.474,09	1.635,30	1.692,54	1.751,77				1.751,77		Dinas Perikanan dan Peternakan	
					Produksi perikanan	Persen		10,50	10,50	5,25	5,25	5,25				5,25		Dinas Perikanan dan Peternakan	
					Konsumsi ikan	Persen		20,00	32,00	30,00	35,00	35,00				35,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	11,76	16,98	18,97	19,67	20,31				20,31		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	0,17	9,16	3,32	3,40	3,48				3,48		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	68,56	74,25	76,85	79,54	82,33				82,33		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produksi Perikanan Tangkap	Persen	7,50	7,50	3,50	3,50	3,50				3,50		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04						Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya						2.925.452.000	2.891.669.000	2.923.591.000		8.740.712.000		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	108.037,89	14.735,00	16.351,74	17.496,36	18.721,11				18.721,11		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	15.646,00	16.205,00	17.987,00	19.189,00	20.473,00				20.473,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	554.013.000,00	1.067.364.864,00	1.078.038.512,00	1.088.818.897,00	1.100.000.000,00				1.100.000.000,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	6.630.833,00	6.740.000,00	8.100.000,00	9.150.000,00	10.200.000,00				10.200.000,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produksi Ikan Hias	Ton	239.090,00	194.918,00	608.990,00	627.259,00	646.076,00				646.076,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produksi Perikanan budidaya	Ton	39,58	0,00	36,00	37,00	38,00				38,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.05						Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan						41.632.000	42.226.000	43.020.000		126.878.000		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.06						Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						399.851.000	405.543.000	413.173.000		1.218.567.000		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	0,00	300,00	400,00	500,00	550,00				550,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00				16,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	112,00	121,00	130,00	140,00	150,00				150,00		Dinas Perikanan dan Peternakan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.27.04						Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							552.488.000	564.289.000	576.396.000		1.693.173.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
						Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00				70,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Lokasi	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00				17,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	57.983,00	39.574,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Persen	-	-	79,00	84,00	87,50				87,50		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	633,00	696,00	828,00	908,00	992,00				992,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	13,00	14,30	16,20	18,00	19,80				19,80		Dinas Perikanan dan Peternakan
						Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Liter	32,00	35,20	38,80	41,00	42,70				42,70		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.05						Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian							250.000.000	250.000.000	250.000.000		750.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
						Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	3,00	3,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Pangan dan Pertanian
						Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	3,00	3,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.06						Program : Perizinan Usaha Pertanian							40.000.000	40.000.000	40.000.000		120.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
						Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin	Persen	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00				75,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.07						Program : Penyuluhan Pertanian							600.000.000	600.000.000	700.000.000		1.900.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
						Cakupan bina kelompok petani	Persen	70,00	70,00	73,00	74,00	80,00				80,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.07						Program : Penyuluhan Pertanian							137.102.000	144.058.000	159.838.000		440.998.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
						Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	Persen	15,00	13,00	16,00	12,00	12,00				12,00		Dinas Perikanan dan Peternakan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.27.02					Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					910.000.000	910.000.000	910.000.000			2.730.000.000			Dinas Pangan dan Pertanian
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	6,00	6,20	6,25	6,26	6,26					6,26		Dinas Pangan dan Pertanian
					Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00					2,00		Dinas Pangan dan Pertanian
					Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	25,00	26,00	73,00	73,00	73,00					73,00		Dinas Pangan dan Pertanian
					Produksi Padi	Ton	270,54	0,00	270.808,00	271.079,00	271.350,00					271.350,00		Dinas Pangan dan Pertanian
					Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Persen	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00					3,00		Dinas Pangan dan Pertanian
					Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	60,00	65,00	77,00	77,00	77,00					77,00		Dinas Pangan dan Pertanian
					Pengembangan Tanaman Manggis	Persen	3,00	4,00	5,00	15,00	20,00					20,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.03					Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					1.880.970.706	1.835.854.408	1.834.342.089			5.551.167.203			Dinas Pangan dan Pertanian
					Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	45,00	45,00	48,00	48,00	48,00					48,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.02					Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					519.701.000	527.101.000	537.014.000			1.583.816.000			Dinas Perikanan dan Peternakan
					Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50					1,50		Dinas Perikanan dan Peternakan
					Cakupan Akseptor IB	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00					85,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
					Persentase bibit ternak bersertifikat	Persen	3,00	5,00	10,00	13,00	15,00					15,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
					Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Persen	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00					3,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.03					Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					62.448.000	63.337.000	64.528.000			190.313.000			Dinas Perikanan dan Peternakan
					Persentase RPH sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
III.2			Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat					2.453.300.000	2.577.000.000	2.680.000.000					7.710.300.000			
					Angka Kemiskinan	Persen	8,83	8,70	7,25	6,83	6,44				6,44			
					Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,388	0,367	0,306	0,280	0,255				0,255			
					Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	11,67	12,19	12,64	12,91	13,18				13,18			
III.2.1			Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan					1.663.300.000	1.759.000.000	1.820.000.000					5.242.300.000			
					Angka Kemiskinan	Persen	8,83	8,70	7,25	6,83	6,44				6,44			
					Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,388	0,367	0,306	0,280	0,255				0,255			

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	11,67	12,19	12,64	12,91	13,18				13,18		
1.06.02						Program : Pemberdayaan Sosial							255.000.000	271.000.000	275.000.000		801.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.03						Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan							30.000.000	35.000.000	35.000.000		100.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04						Program : Rehabilitasi Sosial							778.300.000	833.000.000	860.000.000		2.471.300.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	471,00	402,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	260,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	30,00	40,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	400,00	120,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase PMKS yang tertangani	Persen	76,00	104,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05					Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial								600.000.000	620.000.000	650.000.000		1.870.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase anak terlantar yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.2.2					Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								790.000.000	818.000.000	860.000.000		2.468.000.000	
						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,70	86,93	87,38	87,60	87,83					87,83	
						Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	74,39	77,89	79,92	80,93	81,94					81,94	
2.08.02					Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan								260.000.000	273.000.000	288.000.000		821.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03					Program : Perlindungan Perempuan							205.000.000	220.000.000	227.000.000		652.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00					30,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	17,00	25,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	2,00	4,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	2,00	4,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.04					Program : Peningkatan Kualitas Keluarga							120.000.000	120.000.000	130.000.000		370.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga	Persen	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05					Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak							40.000.000	40.000.000	45.000.000		125.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Data Gender Anak	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					1,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06					Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)							140.000.000	140.000.000	145.000.000		425.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan	

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07						Program : Perlindungan Khusus Anak							25.000.000	25.000.000	25.000.000		75.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	8,00	16,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah												218.565.377.589	222.246.791.143	227.341.245.009	668.153.413.741		
IV.1	Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah												218.565.377.589	222.246.791.143	227.341.245.009	668.153.413.741		
						Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,25	84,00	85,00	85,00	85,00				85,00		
						Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00				100,00		
IV.1.1	Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah												125.107.053.199	126.394.975.699	129.150.595.017	380.652.623.915		
						Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,25	84,00	85,00	85,00	85,00				85,00		
						Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	79,76	80,00	81,00	82,00	83,00				83,00		
1.03.10						Program : Penyelenggaraan Jalan							88.490.000.000	89.500.000.000	91.550.000.000		269.540.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,25	-	84,00	85,00	85,00				85,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	68,76	-	68,00	68,00	68,00				68,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	72,79	-	72,00	71,00	70,00				70,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan	Persen	6,87	7,20	7,00	7,00	7,00				7,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi	Persen	2,74	4,11	5,00	5,00	5,00				5,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02						Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							19.730.000.000	19.800.000.000	19.870.000.000		59.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	-	-	37,60	37,60	37,60				37,60		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	37,56	-	84,71	84,71	84,71				84,71		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.03						Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							13.312.053.199	13.501.615.994	13.755.595.017		40.569.264.210	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	60,65	61,00	61,00	62,00	63,00					63,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Persentase penduduk berakses air minum	Persen	94,55	95,00	95,00	96,00	97,00					97,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	79,76	80,00	80,00	81,00	82,00					82,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	0,39	0,5	1,00	1,00	1,00					1,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Tingkat jaringan SPAM yang dibangun	Persen	96,24	97,00	97,00	98,00	99,00					99,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.15.02						Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)							3.325.000.000	3.343.359.705	3.725.000.000		10.393.359.705	Dinas Perhubungan
						Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	98,00	100,00	98,00	100,00	100,00					100,00	Dinas Perhubungan
						Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Poin	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00					85,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan)	Unit	311.378,00	311.378,00	311.378,00	311.378,00	311.378,00					311.378,00	Dinas Perhubungan
						Rasio ijin trayek	Persen	56,00	56,00	50,00	50,00	50,00					50,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)	Unit	300,00	300,00	307,00	310,00	310,00					310,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					1,00	Dinas Perhubungan
						Persentase layanan angkutan darat	Persen	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00					1.397,00	Dinas Perhubungan
						Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	884,00	884,00	881,00	881,00	881,00					881,00	Dinas Perhubungan
						Pemasangan Rambu- rambu	Persen	60,00	61,00	70,00	72,00	75,00					75,00	Dinas Perhubungan
						Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002					0,002	Dinas Perhubungan
						Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	576.262,00	576.262,00	576.262,00	576.262,00	576.262,00					576.262,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	490.776,00	490.776,00	539.548,00	539.548,00	539.548,00					539.548,00	Dinas Perhubungan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.15.03					Program : Pengelolaan Pelayaran								250.000.000	250.000.000	250.000.000		750.000.000	Dinas Perhubungan	
					Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin	Persen		0,00	0,00	30,00	50,00	70,00						70,00	Dinas Perhubungan
IV.1.2					Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien								93.458.324.390	95.851.815.444	98.190.649.992		287.500.789.826		
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen		-	-	100,00	100,00	100,00						100,00	
					Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen		88,35	89,00	89,00	90,00	91,00						91,00	
					Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen		37,56	0,00	37,60	37,60	37,60						37,60	
1.03.06					Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase								5.570.000.000	5.570.000.000	5.570.000.000		16.710.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00						25,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08					Program : Penataan Bangunan Gedung								30.100.000.000	31.800.000.000	33.020.000.000		94.920.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen		-	-	100,00	100,00	100,00						100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat	Persen		54,55	8,33	10,00	10,00	10,00						10,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara	Persen		-	-	90,00	90,00	90,00						90,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09					Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya								270.000.000	270.000.000	270.000.000		810.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persen		-	-	1,00	1,00	1,00						1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11					Program : Pengembangan Jasa Konstruksi								750.000.000	750.000.000	750.000.000		2.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
					Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen		0,00	0,00	25,00	25,00	25,00						25,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10						0,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persen	-	-	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12						Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang							3.278.815.235	3.303.036.264	3.520.172.959		10.102.024.458	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	5,00	11,00	20,00	20,00	20,00				20,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Persen	54,25	54,25	55,00	55,00	55,00				55,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Ketaatan terhadap RTRW	Persen	44,00	44,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.04						Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan							400.000.000	400.000.000	400.000.000		1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	Persen	-	-	10,00	10,00	10,00				10,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.05						Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan							5.050.000.000	5.050.000.000	5.050.000.000		15.150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.08						Program : Pengelolaan Tanah Kosong							850.000.000	850.000.000	850.000.000		2.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	Persen	-	-	25,00	25,00	25,00				25,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05						Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah							15.985.175.450	16.212.803.333	16.517.782.529		48.715.761.312	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	67,69	68,00	69,00	70,00	71,00				71,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	81,02	81,5	82,00	83,00	84,00				84,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0,5	0,75	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	Persen	98,45	80,5	81,00	82,00	83,00				83,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06						Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase							985.483.039	999.516.254	1.018.318.164		3.003.317.457	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	0,05	0,06	2,00	2,00	2,00				2,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.07						Program : Pengembangan Permukiman							25.920.667.622	26.289.776.283	26.784.313.511		78.994.757.416	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Persentase areal kawasan kumuh	Persen	31,55	8,00	8,00	8,00	8,00				8,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Poin	25,82	27,00	30,00	40,00	50,00				50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02						Program : Pengembangan Perumahan							309.146.029	313.548.249	319.446.408		942.140.686	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	15,00	37,00	38,00	39,00	40,00				40,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,60	2,61	9,00	10,00	11,00				11,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	46,90	47,00	48,00	49,00	50,00				50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03						Program : Kawasan Permukiman							1.975.893.394	2.004.029.990	2.041.727.817		6.021.651.201	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Rasio rumah layak huni	Persen	31,55	8,00	8,00	8,00	8,00				8,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Rasio permukiman layak huni	Persen	22,87	23,00	30,00	40,00	50,00				50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	94,68	95,00	96,00	97,00	98,00				98,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	90,91	91,00	92,00	93,00	94,00				94,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Persentase permukiman yang tertata	Persen	16,11	17,00	18,00	19,00	20,00				20,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.04.05					Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)								1.823.143.621	1.849.105.071	1.883.888.604		5.556.137.296	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					3,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					3,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.06.07					Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								190.000.000	190.000.000	195.000.000		575.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat												1.897.069.744.509	1.921.982.602.790	1.951.720.437.813		5.770.772.785.112	
V.1	Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel												1.872.400.149.190	1.897.072.332.529	1.926.861.287.026		5.696.333.768.745	
					Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,41	64,41	67,41	70,41	73,41					73,41		
					Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	65,64	67,64	69,64	71,64	73,64					73,64		
					Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50					3,50		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik					Baik		
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,58	50,50	50,62	50,68	50,74					50,74		
					Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					WTP		
V.1.1	Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE												1.464.311.156.189	1.479.066.590.562	1.498.140.133.978		4.441.517.880.729	
					Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	65,64	67,64	69,64	71,64	73,64					73,64		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik					Baik		
					Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,41	64,41	67,41	70,41	73,41					73,41		
					Indeks SPBE	Poin	2,37	-	2,60	2,80	3,00					3,00		
1.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												478.193.521.597	483.929.931.283	489.149.931.283		1.451.273.384.163	Dinas Pendidikan
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A					A		Dinas Pendidikan
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												106.523.567.079	108.231.163.570	110.573.640.704		325.328.371.353	Dinas Kesehatan
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A					A		Dinas Kesehatan
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												194.749.458.648	196.980.937.644	200.300.567.176		592.030.963.468	RSUD Bayu Asih
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A					A		RSUD Bayu Asih
					Rasio Keuangan BLUD	Skor	0,00	0,00	80,00	85,00	80,00					80,00		RSUD Bayu Asih

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional BLUD	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		RSUD Bayu Asih
						Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Skor	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00				80,00		RSUD Bayu Asih
1.03.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						42.437.697.001	42.437.697.001	42.637.697.001		127.513.091.003	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	BB	BB				BB		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						19.853.212.538	20.135.921.022	20.514.698.022		60.503.831.582	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						19.233.250.000	19.425.407.905	19.905.146.303		58.563.804.208	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						5.147.973.206	5.222.602.189	5.314.348.608		15.684.924.003	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B				B		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						13.831.494.622	13.997.749.341	14.237.490.603		42.066.734.566	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B				B		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						7.599.000.000	7.618.171.677	7.689.665.661		22.906.837.338	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B				B		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						10.156.905.340	10.337.708.465	10.529.951.160		31.024.564.965	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								16.074.497.122	16.424.497.122	16.624.497.122		49.123.491.366	Dinas Pangan dan Pertanian
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB					BB		Dinas Pangan dan Pertanian
2.11.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								37.125.305.302	36.585.166.273	36.809.392.924		110.519.864.499	Dinas Lingkungan Hidup
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB					BB		Dinas Lingkungan Hidup
2.12.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								17.242.960.689	17.400.302.479	17.441.791.879		52.085.055.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A					A		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								12.459.426.756	12.867.855.618	13.581.093.156		38.908.375.530	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB					BB		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								6.862.690.484	6.867.186.933	6.875.942.398		20.605.819.815	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A					A		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								18.333.385.684	18.627.000.000	18.663.347.100		55.623.732.784	Dinas Perhubungan
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB					BB		Dinas Perhubungan
2.16.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								9.330.482.106	9.405.449.632	9.462.933.875		28.198.865.613	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB					BB		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								14.154.207.120	14.155.277.954	14.153.268.214		42.462.753.288	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A					A		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.18.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								11.801.503.096	11.989.396.541	12.189.396.541		35.980.296.178	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A					A		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								18.565.000.000	20.043.596.509	20.215.000.000		58.823.596.509	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB					BB		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.23.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								10.218.858.281	10.282.692.115	10.535.935.383		31.037.485.779	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	A	BB	BB	BB					BB		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.25.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								11.195.629.263	11.421.559.779	11.644.323.325		34.261.512.367	Dinas Perikanan dan Peternakan
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB					BB		Dinas Perikanan dan Peternakan
4.01.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum								63.243.130.002	63.389.097.528	63.427.981.770		190.060.209.300	Sekretariat Daerah
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	A	A	A	A					A		Sekretariat Daerah
					Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Sekretariat Daerah
					Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Sekretariat Daerah
4.02.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota								46.876.175.032	47.335.987.309	47.769.737.665		141.981.900.006	Sekretariat DPRD
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	D	B	B	B	B					B		Sekretariat DPRD
					Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Sekretariat DPRD
5.01.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								10.617.741.053	10.687.724.816	10.723.966.937		32.029.432.806	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA					AA		Badan Perencanaan Pembangunan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							58.106.644.072	55.723.000.000	55.723.000.000		169.552.644.072	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							28.912.578.527	29.330.539.558	29.407.520.650		87.650.638.735	Badan Pendapatan Daerah
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Badan Pendapatan Daerah
5.03.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							32.358.428.518	32.855.654.010	33.360.631.091		98.574.713.619	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							25.699.030.316	26.039.994.595	26.525.727.263		78.264.752.174	Inspektorat
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		Inspektorat
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.386.324.995	3.429.057.225	3.486.055.220		10.301.437.440	Kecamatan Jatiluhur
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	CC	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Jatiluhur
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.130.982.955	3.159.416.055	3.186.417.055		9.476.816.065	Kecamatan Sukasari
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	B	B				B		Kecamatan Sukasari
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.861.568.444	2.887.549.050	2.931.200.000		8.680.317.494	Kecamatan Maniis
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	B	B				B		Kecamatan Maniis
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.283.584.092	3.322.567.225	3.371.352.422		9.977.503.739	Kecamatan Tegalwaru
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Tegalwaru
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.391.924.995	3.452.415.207	3.480.055.220		10.324.395.422	Kecamatan Plered
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	CC	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Plered
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.881.427.939	3.934.804.743	4.010.030.920		11.826.263.602	Kecamatan Sukatani
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	A	A	A				A		Kecamatan Sukatani

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.523.383.923	3.581.561.313	3.629.809.164		10.734.754.400	Kecamatan Darangdan	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB						BB	Kecamatan Darangdan
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.562.383.923	3.611.561.313	3.677.809.164		10.851.754.400	Kecamatan Bojong	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB						BB	Kecamatan Bojong
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.617.383.923	3.655.061.313	3.701.309.164		10.973.754.400	Kecamatan Wanayasa	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	BB	BB						BB	Kecamatan Wanayasa
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.445.424.995	3.494.057.225	3.556.555.220		10.496.037.440	Kecamatan Kiarapedes	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	CC	B	B	B						B	Kecamatan Kiarapedes
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.182.916.067	3.195.789.446	3.236.664.076		9.615.369.589	Kecamatan Pasawahan	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB						BB	Kecamatan Pasawahan
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.327.552.609	3.371.291.225	3.432.279.792		10.131.123.626	Kecamatan Pondoksalam	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	A	A						A	Kecamatan Pondoksalam
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							14.829.743.173	14.946.793.173	15.046.263.434		44.822.799.780	Kecamatan Purwakarta	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB						BB	Kecamatan Purwakarta
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.151.551.305	3.190.553.138	3.229.270.074		9.571.374.517	Kecamatan Babakan Cikao	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB						BB	Kecamatan Babakan Cikao
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.358.024.995	3.403.157.225	3.464.930.245		10.226.112.465	Kecamatan Campaka	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	BB	BB						BB	Kecamatan Campaka
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.783.342.851	3.845.065.429	3.971.063.109		11.599.471.389	Kecamatan Cibatu	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	A	A						A	Kecamatan Cibatu
7.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.143.466.067	3.185.953.138	3.245.651.276		9.575.070.481	Kecamatan Bungursari	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB						BB	Kecamatan Bungursari
8.01.01						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.088.634.734	4.192.328.341	4.317.681.309		12.598.644.384	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A						A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.02.02						Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD							24.823.996.300	25.385.189.910	26.319.398.300		76.528.584.510	Sekretariat DPRD
						Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Sekretariat DPRD
						Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Sekretariat DPRD
						Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Sekretariat DPRD
						Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat DPRD
						Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat DPRD
2.12.02						Program : Pendaftaran Penduduk							210.000.000	210.000.000	215.000.000		635.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Perekaman KTP elektronik	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Kategori	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah				Sudah		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	26,98	48,22	50,00	55,00	60,00				60,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.12.03					Program : Pencatatan Sipil								160.000.000	60.000.000	65.000.000		285.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Rasio pasangan berakte menikah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	81,61	85,02	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04					Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								785.000.000	980.000.000	1.280.000.000		3.045.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	53,33	54,00	55,00	56,00	57,00				57,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05					Program : Pengelolaan Profil Kependudukan								25.000.000	35.000.000	35.000.000		95.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Profil data kependudukan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.16.02					Program : Informasi Dan Komunikasi Publik								5.970.000.000	5.995.000.000	6.300.000.000		18.265.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	11,76	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	67,00	66,00	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	90,00	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	53,30	75,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	Persen	-	-	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03					Program : Aplikasi Informatika								10.370.000.000	10.570.000.000	10.570.000.000		31.510.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	Persen	100,00	100,00	90,00	95,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02					Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral								675.000.000	735.000.000	800.000.000		2.210.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	69,50	36,00	85,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	69,50	25,50	85,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	Persen	-	-	85,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02					Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								1.040.000.000	1.070.000.000	1.165.000.000		3.275.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	-	-	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	Persen	-	3,00	10,00	20,00	50,00				50,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								7.000.000	9.000.000	11.000.000		27.000.000	Kecamatan Jatiluhur
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Jatiluhur
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								12.784.450	14.500.000	16.500.000		43.784.450	Kecamatan Sukasari
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Sukasari

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								40.500.000	42.500.000	44.500.000		127.500.000	Kecamatan Maniis
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Maniis
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								35.500.000	36.000.000	36.500.000		108.000.000	Kecamatan Tegalwaru
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Tegalwaru
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								7.500.000	7.800.000	6.500.000		21.800.000	Kecamatan Plered
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Plered
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								7.000.000	8.000.000	8.600.000		23.600.000	Kecamatan Sukatani
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Sukatani
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								20.000.000	24.000.000	25.000.000		69.000.000	Kecamatan Darangdan
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Darangdan
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								23.000.000	25.000.000	25.000.000		73.000.000	Kecamatan Bojong
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Bojong
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								7.000.000	9.000.000	10.000.000		26.000.000	Kecamatan Wanayasa
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Wanayasa
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								5.000.000	6.000.000	6.000.000		17.000.000	Kecamatan Kiarapedes
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Kiarapedes
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								0	0	16.000.000		16.000.000	Kecamatan Pasawahan
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Pasawahan
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								42.500.000	44.050.000	44.250.000		130.800.000	Kecamatan Pondoksalam
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Pondoksalam
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								110.000.000	110.000.000	110.000.000		330.000.000	Kecamatan Purwakarta
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Purwakarta
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								10.000.000	10.000.000	10.000.000		30.000.000	Kecamatan Babakan Cikao
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Babakan Cikao

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									6.000.000	6.300.000	6.615.000		18.915.000	Kecamatan Campaka
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						Baik		Kecamatan Campaka
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									45.000.000	45.000.000	30.000.000		120.000.000	Kecamatan Cibatu
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						Baik		Kecamatan Cibatu
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									20.000.000	21.000.000	21.250.000		62.250.000	Kecamatan Bungursari
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						Baik		Kecamatan Bungursari
V.1.2					Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									408.088.993.001	418.005.741.967	428.721.153.048		1.254.815.888.016	
					Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah						Rendah		
					Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						Baik		
					Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5						3,5		
					Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						WTP		
					Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,20	0,21	0,23	0,24	0,25						0,25		
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	77,52	79,16	82,45	84,09	85,74						85,74		
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,64	3,00	3,00	3,00	3,00						3,00		
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,38	50,50	50,62	50,68	50,74						50,74		
4.01.02					Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat									13.870.000.000	14.240.000.000	14.610.000.000		42.720.000.000	Sekretariat Daerah
					Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten	Persen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00		Sekretariat Daerah
					Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00		Sekretariat Daerah
					Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online	Persen	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00						100,00		Sekretariat Daerah
					Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif	Persen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00						15,00		Sekretariat Daerah
4.01.03					Program : Perekonomian Dan Pembangunan									5.439.152.029	6.047.267.719	7.134.835.634		18.621.255.382	Sekretariat Daerah
					Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00		Sekretariat Daerah
					Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00		Sekretariat Daerah
					Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00						8,00		Sekretariat Daerah
					Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00		Sekretariat Daerah

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						ditandatangani pada kuartal pertama													
						Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Sekretariat Daerah
						Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	44,00	50,00	55,00	55,00	55,00					55,00		Sekretariat Daerah
2.24.02						Program : Pengelolaan Arsip						850.000.000	900.000.000	850.000.000		2.600.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	28,57	0,00	39,10	39,10	39,10					39,10		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00					27,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Persentase Penyusutan Arsip	Persen	9,50	0,00	20,00	20,00	20,00					20,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Arsip Aktif	Persen	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00					20,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Arsip Inaktif	Persen	5,28	0,00	20,00	20,00	20,00					20,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Arsip Vital	Persen	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00					20,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	73,00	0,00	75,00	75,00	75,00					75,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan	Persen	2,67	0,00	4,70	4,70	4,70					4,70		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03						Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip						175.000.000	175.000.000	175.000.000		525.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	33,04	6,30	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	19,99	0,00	19,99	19,99	19,99					19,99		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	1,75	13,00	1,75	1,75	1,75					1,75		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5.01.02						Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah						1.175.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000		3.675.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
						Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					Ada		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Capaian Kinerja RKPD	Persen	88,64	88,75	89,00	89,25	89,50				89,50		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03						Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						750.000.000	850.000.000	850.000.000		2.450.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.02						Program : Pengelolaan Keuangan Daerah						366.210.000.000	374.666.502.002	382.803.006.627		1.123.679.508.629		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	15,65	0,00	15,00	15,00	15,00				15,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	81,83	0,00	85,00	87,00	89,00				89,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				WTP		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	75,24	0,00	75,54	75,84	76,14				76,14		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,18	0,00	2,13	2,08	2,03				2,03		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	2,16	2,68	1,74	1,69	1,58				1,58		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	30,85	0,00	32,00	34,00	35,00				35,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	19,05	0,00	21,00	23,00	25,00				25,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	1,25	14,84	1,80	1,78	1,74				1,74		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Skor	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				6,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Skor	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	7,76	7,76	8,00	8,00	8,00				8,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penyerapan Anggaran	Skor	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Kondisi Keuangan Daerah	Skor	3,06	3,06	4,00	4,00	4,00				4,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03						Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah							2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000		6.450.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya				Ya		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	21,79	23,66	25,00	27,00	30,00				30,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	50,00	55,00	70,00	85,00	100,00				100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Persentase pengolah BMD yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)				3 (Baik)		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)				3 (Baik)		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)				3 (Baik)		Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Administrasi BMD yang Andal	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)				3 (Baik)		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04						Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.950.000.000	4.000.000.000	4.550.000.000		12.500.000.000		Badan Pendapatan Daerah
						Rasio PAD	Persen	0,73	0,78	0,83	0,88	0,93				0,93		Badan Pendapatan Daerah
						Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	11,95	12,30	12,65	13,00	13,35				13,35		Badan Pendapatan Daerah
						Rasio Pajak daerah	Persen	48,84	49,34	49,84	50,34	50,84				50,84		Badan Pendapatan Daerah
						Rasio retribusi daerah	Persen	3,92	4,23	4,53	4,84	5,14				5,14		Badan Pendapatan Daerah
						Persentase capaian PAD	Persen	88,05	88,50	88,95	89,40	89,85				89,85		Badan Pendapatan Daerah
						Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah	Persen	8,80	9,00	9,50	10,00	10,50				10,50		Badan Pendapatan Daerah
5.05.02						Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah						1.150.000.000	1.150.000.000	1.275.000.000		3.575.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	3,00	2,00	10,00	15,00	15,00				15,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
						Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	10,87	25,53	42,55	53,19	53,19				53,19		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.06.02						Program : Pengelolaan Perbatasan		600.000.000	660.000.000	750.000.000						2.010.000.000	Sekretariat Daerah	
						Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
5.03.02						Program : Kepegawaian Daerah		6.050.000.000	6.075.000.000	6.075.000.000						18.200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	78,59	80,16	80,88	81,74	82,67				82,67		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	8,40	16,66	16,99	17,33	17,67				17,67		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	29,76	39,68	49,80	54,86	59,92				59,92		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00				34,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00				172,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	249,00	494,00	504,00	514,00	524,00				524,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persen	0,41	0,26	0,29	0,26	0,21				0,21		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Persentase Pemberhentian ASN	Persen	6,04	7,02	5,73	5,94	6,16				6,16		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	Persen	1,76	2,59	2,15	2,03	1,93				1,93		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.05						Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							25.000.000	26.000.000	27.000.000		78.000.000	Sumber Daya Manusia Kecamatan Jatiluhur
						Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Jatiluhur
7.01.05						Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							26.914.762	34.177.083	51.334.221		112.426.066	Kecamatan Sukasari
						Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukasari
7.01.05						Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							26.000.000	27.000.000	28.000.000		81.000.000	Kecamatan Maniis
						Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Maniis
7.01.05						Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							64.050.000	70.250.000	82.582.798		216.882.798	Kecamatan Tegalwaru
						Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Tegalwaru
7.01.05						Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							35.500.000	32.000.000	66.000.000		133.500.000	Kecamatan Plered
						Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Plered
7.01.05						Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							54.600.000	55.230.000	55.330.000		165.160.000	Kecamatan Sukatani
						Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukatani
7.01.05						Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							120.000.000	122.000.000	122.000.000		364.000.000	Kecamatan Darangdan
						Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Darangdan
7.01.05						Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							100.000.000	100.000.000	100.000.000		300.000.000	Kecamatan Bojong
						Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bojong

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									35.000.000	42.500.000	50.000.000		127.500.000	Kecamatan Wanayasa
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Wanayasa
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									10.000.000	10.000.000	14.000.000		34.000.000	Kecamatan Kiarapedes
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Kiarapedes
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									0	30.000.000	21.000.000		51.000.000	Kecamatan Pasawahan
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Pasawahan
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									57.372.386	58.200.000	60.965.428		176.537.814	Kecamatan Pondoksalam
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Pondoksalam
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									53.875.000	63.717.795	106.484.499		224.077.294	Kecamatan Purwakarta
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Purwakarta
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									34.914.762	40.000.000	63.031.202		137.945.964	Kecamatan Babakan Cikao
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Babakan Cikao
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									69.300.000	72.765.000	76.403.250		218.468.250	Kecamatan Campaka
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Campaka
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									50.000.000	50.000.000	45.000.000		145.000.000	Kecamatan Cibatu
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Cibatu

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									40.000.000	40.400.000	40.600.000		121.000.000	Kecamatan Bungursari
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		51,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00	Kecamatan Bungursari
6.01.02					Program : Penyelenggaraan Pengawasan									3.280.000.000	3.378.000.000	3.477.000.000		10.135.000.000	Inspektorat
					Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level		2,00	2,00	3,00	3,00	3,00						3,00	Inspektorat
					Persentase tindak lanjut temuan	Persen		70,09	84,79	80,00	80,00	80,00						80,00	Inspektorat
					Jumlah temuan BPK	Laporan		16,00	15,00	10,00	9,00	8,00						8,00	Inspektorat
					Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00	Inspektorat
6.01.03					Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi									1.145.000.000	1.135.000.000	1.125.000.000		3.405.000.000	Inspektorat
					Capaian MCP KPK	Persen		74,00	100,00	81,00	82,00	83,00						83,00	Inspektorat
					Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	Perangkat Daerah		1,00	0,00	2,00	2,00	2,00						2,00	Inspektorat
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									30.000.000	31.000.000	34.000.000		95.000.000	Kecamatan Jatiluhur
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		51,00	51,00	100,00	100,00	100,00						100,00	Kecamatan Jatiluhur
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									41.079.150	47.060.000	60.050.000		148.189.150	Kecamatan Sukasari
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		80,00	80,00	100,00	100,00	100,00						100,00	Kecamatan Sukasari
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									25.000.000	30.000.000	35.000.000		90.000.000	Kecamatan Maniis
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00	Kecamatan Maniis
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									50.870.000	53.220.000	55.830.000		159.920.000	Kecamatan Tegalwaru
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00	Kecamatan Tegalwaru
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									25.500.000	17.842.018	25.000.000		68.342.018	Kecamatan Plered
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00	Kecamatan Plered

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					21.314.912	22.030.658	22.102.189			65.447.759			Kecamatan Sukatani
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukatani
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					41.000.000	33.000.000	50.000.000			124.000.000			Kecamatan Darangdan
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Darangdan
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					31.000.000	33.000.000	38.000.000			102.000.000			Kecamatan Bojong
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bojong
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					51.000.000	57.000.000	73.500.000			181.500.000			Kecamatan Wanayasa
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Wanayasa
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					15.000.000	15.000.000	15.000.000			45.000.000			Kecamatan Kiarapedes
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Kiarapedes
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					23.550.000	24.763.692	35.637.200			83.950.892			Kecamatan Pasawahan
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pasawahan
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					45.000.000	46.516.000	47.960.000			139.476.000			Kecamatan Pondoksalam
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pondoksalam
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					10.000.000	10.000.000	20.000.000			40.000.000			Kecamatan Purwakarta
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Purwakarta

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					8.000.000	10.000.000	10.000.000			28.000.000			Kecamatan Babakan Cikao
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Babakan Cikao
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					23.000.000	23.000.000	23.000.000			69.000.000			Kecamatan Campaka
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Campaka
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					45.000.000	45.000.000	35.000.000			125.000.000			Kecamatan Cibatu
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Cibatu
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					6.000.000	6.300.000	6.500.000			18.800.000			Kecamatan Bungursari
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen		51,00	51,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bungursari
V.2			Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai												24.669.595.319	24.910.270.261	24.859.150.787	74.439.016.367
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen		72,70	74,45	77,95	79,70	81,45				81,45		
					Indeks Desa Membangun	Predikat		Maju	Maju	Maju	Maju	Maju				Maju		
V.2.1			Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan												17.023.674.397	17.130.865.050	17.112.354.131	51.266.893.578
					Indeks Desa Membangun	Predikat		Maju	Maju	Maju	Maju	Maju				Maju		
2.13.02					Program : Penataan Desa					1.100.000.000	900.000.000	700.000.000			2.700.000.000			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen		0,00	0,00	30,00	20,00	20,00				20,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03					Program : Peningkatan Kerja Sama Desa					1.550.000.000	1.750.000.000	1.850.000.000			5.150.000.000			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	Persen		0,00	0,00	5,00	8,74	11,48				11,48		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase pembangunan kawasan perdesaan	Persen		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00				2,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.13.04					Program : Administrasi Pemerintahan Desa								4.350.000.000	4.250.000.000	4.050.000.000		12.650.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	2,86	0,00	5,00	5,00	5,00					5,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase desa tertib administrasi	Persen	0,00	0,00	40,00	30,00	30,00					30,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase pembinaan BUM Desa	Persen	100,00	100,00	40,00	40,00	20,00					20,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase penertiban aset desa	Persen	0,00	0,00	50,00	30,00	20,00					20,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase kepala desa yang dibina	Persen	100,00	100,00	40,00	30,00	30,00					30,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase aparatur desa yang dibina	Persen	0,00	0,00	45,00	35,00	30,00					30,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05					Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat								2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000		6.600.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase LSM aktif	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase PKK aktif	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase Posyandu aktif	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Dinas Pemberdayaan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Masyarakat dan Desa
						Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00				5,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								29.600.000	31.000.000	33.500.000		94.100.000	Kecamatan Jatiluhur
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Jatiluhur
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								21.704.750	23.900.000	26.000.000		71.604.750	Kecamatan Sukasari
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Sukasari
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								29.438.694	37.000.000	41.847.331		108.286.025	Kecamatan Maniis
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Maniis
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								37.970.903	39.020.000	40.590.000		117.580.903	Kecamatan Tegalwaru
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Tegalwaru
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								23.000.000	23.000.000	23.000.000		69.000.000	Kecamatan Plered
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Plered
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								10.500.000	11.000.000	11.000.000		32.500.000	Kecamatan Sukatani
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Sukatani
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								20.000.000	22.000.000	22.000.000		64.000.000	Kecamatan Darangdan
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Darangdan
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								10.000.000	10.000.000	10.000.000		30.000.000	Kecamatan Bojong
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Bojong
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								18.000.000	18.000.000	18.000.000		54.000.000	Kecamatan Wanayasa
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		Kecamatan Wanayasa

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					5.000.000	5.000.000	5.000.000			15.000.000			Kecamatan Kiarapedes
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Kiarapedes
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					30.000.000	32.000.000	35.000.000			97.000.000			Kecamatan Pasawahan
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pasawahan
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					5.000.000	5.500.000	6.000.000			16.500.000			Kecamatan Pondoksalam
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pondoksalam
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					7.499.760.050	7.692.710.050	7.962.710.050			23.155.180.150			Kecamatan Purwakarta
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Purwakarta
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					22.000.000	22.000.000	22.000.000			66.000.000			Kecamatan Babakan Cikao
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Babakan Cikao
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					14.700.000	15.435.000	16.206.750			46.341.750			Kecamatan Campaka
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Campaka
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					30.000.000	25.000.000	20.000.000			75.000.000			Kecamatan Cibatu
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Cibatu
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					17.000.000	18.300.000	19.500.000			54.800.000			Kecamatan Bungursari
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bungursari
V.2.2					Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat					7.645.920.922	7.779.405.211	7.746.796.656			23.172.122.789			
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen		72,70	74,45	77,95	79,70	81,45				81,45		
1.05.02					Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum					932.423.187	1.027.423.187	932.423.187			2.892.269.561			Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
						Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
						Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
						Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase Penegakan PERDA	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
8.01.02						Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan						1.150.000.000	1.151.000.000	1.154.000.000		3.455.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03						Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						3.170.763.489	3.189.831.074	3.235.222.519		9.595.817.082		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04						Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						250.000.000	252.000.000	254.000.000		756.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05						Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya						500.000.000	505.500.000	510.000.000		1.515.500.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06						Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						1.350.000.000	1.357.000.000	1.362.000.000		4.069.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.01.04						Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						7.500.000	9.000.000	10.000.000		26.500.000		Kecamatan Jatiluhur
						Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Jatiluhur

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								3.000.000	3.500.000	4.000.000		10.500.000	Kecamatan Sukasari
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukasari
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								5.000.000	6.000.000	6.500.000		17.500.000	Kecamatan Maniis
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Maniis
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								13.450.000	14.000.000	14.700.000		42.150.000	Kecamatan Tegalwaru
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Tegalwaru
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								2.000.000	2.000.000	1.000.000		5.000.000	Kecamatan Plered
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Plered
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								8.500.000	9.000.000	9.000.000		26.500.000	Kecamatan Sukatani
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukatani
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								10.000.000	5.000.000	10.000.000		25.000.000	Kecamatan Darangdan
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Darangdan
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								8.000.000	8.000.000	8.000.000		24.000.000	Kecamatan Bojong
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bojong
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								6.000.000	6.000.000	6.000.000		18.000.000	Kecamatan Wanayasa
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Wanayasa
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								5.000.000	5.000.000	5.000.000		15.000.000	Kecamatan Kiarapedes
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Kiarapedes
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								0	0	0		0	Kecamatan Pasawahan
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pasawahan
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								8.000.000	9.500.000	10.100.000		27.600.000	Kecamatan Pondoksalam
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pondoksalam
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								151.884.246	154.650.950	164.650.950		471.186.146	Kecamatan Purwakarta
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Purwakarta

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp.)			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					10.000.000	10.000.000	10.000.000			30.000.000			Kecamatan Babakan Cikao
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Babakan Cikao
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					14.400.000	14.400.000	14.400.000			43.200.000			Kecamatan Campaka
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Campaka
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					30.000.000	30.000.000	15.000.000			75.000.000			Kecamatan Cibatu
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Cibatu
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					10.000.000	10.600.000	10.800.000			31.400.000			Kecamatan Bungursari
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bungursari
JUMLAH	1	5	8	17	281	785	785	785	785	785	785	785	311	311	311	785	311	996
UNIQUE	1	5	8	17	150	631	38	327	287	265	270	270	237	248	253	270	280	47

Sumber : Perangkat Daerah terkait, 2023

Tabel 6.8

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, Program dan Pagu Indikatif
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL									2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243	
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"												
I.		Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah							215.183.101.295	218.215.674.912	226.748.111.316	
I.1		Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing							215.183.101.295	218.215.674.912	226.748.111.316	
I.1.1		Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan							205.798.645.983	209.786.219.600	217.543.828.833	
I.1.1.1		Strategi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan, dan Pengembangan Kurikulum serta SDM yang berkualitas							200.966.434.637	204.901.219.600	212.638.828.833	
		Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM							200.966.434.637	204.901.219.600	212.638.828.833	
		Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD										
		Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal										
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan										
		Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan							200.966.434.637	204.901.219.600	212.638.828.833	
1.01.02		Program : Pengelolaan Pendidikan							199.986.134.737	203.876.219.600	211.613.828.833	Dinas Pendidikan
1.01.03		Program : Pengembangan Kurikulum							380.300.000	400.000.000	400.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.04		Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan							200.000.000	200.000.000	200.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.05		Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan							199.999.900	200.000.000	200.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.06		Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra							200.000.000	225.000.000	225.000.000	Dinas Pendidikan
I.1.1.2		Strategi 2 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan							4.375.000.000	4.375.000.000	4.375.000.000	
		Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM							4.375.000.000	4.375.000.000	4.375.000.000	
		Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional										
		Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya										
		Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan										
		Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan							4.375.000.000	4.375.000.000	4.375.000.000	

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.02								Program : Pengembangan Kebudayaan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03								Program : Pengembangan Kesenian Tradisional	275.000.000	275.000.000	275.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.04								Program : Pembinaan Sejarah	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05								Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.06								Program : Pengelolaan Permuseuman	550.000.000	550.000.000	550.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
I.1.1.3					Strategi 3 : Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat				457.211.346	510.000.000	530.000.000	
						Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM			457.211.346	510.000.000	530.000.000	
						Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno						
						Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat						
						Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan			457.211.346	510.000.000	530.000.000	
2.23.02								Program : Pembinaan Perpustakaan	407.211.346	460.000.000	480.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03								Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
I.1.2				Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat					9.384.455.312	8.429.455.312	9.204.282.483	
I.1.2.1					Strategi 4 : Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Masyarakat				9.384.455.312	8.429.455.312	9.204.282.483	
						Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM			9.384.455.312	8.429.455.312	9.204.282.483	
						Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja						
						Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan						
						Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga						
						Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran						
						Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai						
						Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan			9.384.455.312	8.429.455.312	9.204.282.483	
2.07.03								Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.070.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.04								Program : Penempatan Tenaga Kerja	745.000.000	745.000.000	745.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05								Program : Hubungan Industrial	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.19.02								Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	775.000.000	775.000.000	775.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.19.03								Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.024.455.312	3.024.455.312	3.075.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.19.04								Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	620.000.000	620.000.000	1.039.282.483	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.32.02								Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.03								Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi	225.000.000	225.000.000	275.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.04								Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5.04.02								Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.425.000.000	1.470.000.000	1.725.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
II.		Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup							137.127.808.186	140.625.922.321	143.980.807.508	
II.1			Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat						131.027.833.200	133.337.922.321	136.045.807.508	
II.1.1				Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana					131.027.833.200	133.337.922.321	136.045.807.508	
II.1.1.1					Strategi 5 : Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan				115.235.261.215	117.227.237.286	119.511.640.973	
						Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB			115.235.261.215	117.227.237.286	119.511.640.973	
						Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan						
						Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC						
						Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya						
						Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan						
						Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat						
							Prioritas Pembangunan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB		115.235.261.215	117.227.237.286	119.511.640.973	
1.02.02								Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86.109.252.055	87.281.228.126	88.825.631.813	Dinas Kesehatan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02								Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.500.000.000	14.150.000.000	14.750.000.000	RSUD Bayu Asih
1.02.03								Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.201.009.160	13.201.009.160	13.201.009.160	Dinas Kesehatan
1.02.03								Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	625.000.000	725.000.000	800.000.000	RSUD Bayu Asih
1.02.04								Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	620.000.000	685.000.000	740.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.05								Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	680.000.000	685.000.000	695.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.05								Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	RSUD Bayu Asih
II.1.1.2					Strategi 6 : Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera				15.792.571.985	16.110.685.035	16.534.166.535	
					Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB				15.792.571.985	16.110.685.035	16.534.166.535	
					Menerapkan rencana pengendalian penduduk							
					Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB							
					Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah							
					Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera							
					Prioritas Pembangunan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB				15.792.571.985	16.110.685.035	16.534.166.535	
2.14.02								Program : Pengendalian Penduduk	349.385.450	429.969.750	474.969.750	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03								Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.017.281.650	9.254.810.400	9.633.291.900	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04								Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.425.904.885	6.425.904.885	6.425.904.885	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
II.2			Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						6.099.974.986	7.288.000.000	7.935.000.000	
II.2.1			Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						3.455.000.000	4.573.000.000	5.123.000.000	
II.2.1.1			Strategi 7 : Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup						3.030.000.000	4.123.000.000	4.623.000.000	
			Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						3.030.000.000	4.123.000.000	4.623.000.000	
			Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup									
			Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan									
			Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau									

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3				
								Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan				
								Prioritas Pembangunan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	3.030.000.000	4.123.000.000	4.623.000.000	
2.11.02								Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03								Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.275.000.000	1.333.000.000	1.533.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04								Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05								Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	250.000.000	325.000.000	375.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07								Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100.000.000	100.000.000	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10								Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100.000.000	125.000.000	125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11								Program : Pengelolaan Persampahan	955.000.000	1.890.000.000	2.090.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
II.2.1.2								Strategi 8 : Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sadar dan Peduli Lingkungan	425.000.000	450.000.000	500.000.000	
								Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	425.000.000	450.000.000	500.000.000	
								Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan				
								Prioritas Pembangunan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	425.000.000	450.000.000	500.000.000	
2.11.08								Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	300.000.000	300.000.000	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09								Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	125.000.000	150.000.000	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
II.2.2								Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana	2.644.974.986	2.715.000.000	2.812.000.000	
II.2.2.1								Strategi 9 : Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Bencana	2.644.974.986	2.715.000.000	2.812.000.000	
								Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	2.644.974.986	2.715.000.000	2.812.000.000	
								Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan				
								Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan				
								Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat)				

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Prioritas Pembangunan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	2.644.974.986	2.715.000.000	2.812.000.000	
1.05.03								Program : Penanggulangan Bencana	1.076.000.000	1.090.000.000	1.117.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04								Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.355.000.000	1.405.000.000	1.455.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06.06								Program : Penanganan Bencana	213.974.986	220.000.000	240.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.		Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal							21.643.250.806	21.969.884.508	22.748.841.597	
III.1			Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat						19.189.950.806	19.392.884.508	20.068.841.597	
III.1.1				Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah					1.150.000.000	1.215.000.000	1.365.000.000	
III.1.1.1					Strategi 10 : Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi				625.000.000	657.500.000	732.500.000	
						Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			625.000.000	657.500.000	732.500.000	
						Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan						
						Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian						
							Prioritas Pembangunan 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM		625.000.000	657.500.000	732.500.000	
2.17.02								Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.000.000	52.500.000	60.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.03								Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	185.000.000	195.000.000	222.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.04								Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	290.000.000	307.500.000	345.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.05								Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100.000.000	102.500.000	105.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.1.1.2					Strategi 11 : Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital				525.000.000	557.500.000	632.500.000	
						Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			525.000.000	557.500.000	632.500.000	
						Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional						
						Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha						
						Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM						
						Menyediakan Sistem Data Base UMKM						
						Prioritas Pembangunan 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM			525.000.000	557.500.000	632.500.000	
2.17.07								Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	375.000.000	382.500.000	432.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.08								Program : Pengembangan UMKM	150.000.000	175.000.000	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
III.1.2				Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian					3.018.320.100	3.193.320.100	3.420.062.508	
III.1.2.1					Strategi 12 : Membangun Iklim Investasi yang Kondusif				1.393.320.100	1.393.320.100	1.445.062.508	
						Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			1.393.320.100	1.393.320.100	1.445.062.508	
						Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses						
						Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha						
						Prioritas Pembangunan 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan			1.393.320.100	1.393.320.100	1.445.062.508	
2.18.02								Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99.989.800	99.989.800	99.989.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03								Program : Promosi Penanaman Modal	199.950.000	199.950.000	199.950.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04								Program : Pelayanan Penanaman Modal	299.986.500	299.986.500	299.986.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05								Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.394.000	393.394.000	393.394.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06								Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	399.999.800	399.999.800	451.742.208	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.1.2.2					Strategi 13 : Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri				1.625.000.000	1.800.000.000	1.975.000.000	
					Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah				1.625.000.000	1.800.000.000	1.975.000.000	
					Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis							
					Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu							
					Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri							
					Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah							
					Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen							
					Prioritas Pembangunan 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan				1.625.000.000	1.800.000.000	1.975.000.000	
3.30.02								Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	110.000.000	120.000.000	120.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03								Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	25.000.000	25.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04								Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	295.000.000	330.000.000	345.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05								Program : Pengembangan Ekspor	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06								Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	275.000.000	350.000.000	375.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07								Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	75.000.000	75.000.000	135.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02								Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri	450.000.000	475.000.000	600.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03								Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	50.000.000	75.000.000	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.31.04								Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	150.000.000	150.000.000	75.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
III.1.3				Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat					4.450.000.000	4.450.000.000	4.450.000.000	
III.1.3.1					Strategi 14 : Mengembangkan Potensi Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata				3.550.000.000	3.550.000.000	3.550.000.000	
						Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			3.550.000.000	3.550.000.000	3.550.000.000	
						Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan						
						Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar						
						Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masarakat sadar wisata						
						Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan						
						Prioritas Pembangunan 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat			3.550.000.000	3.550.000.000	3.550.000.000	
3.26.02								Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03								Program : Pemasaran Pariwisata	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
III.1.3.2					Strategi 15 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang berbasis Inovasi				900.000.000	900.000.000	900.000.000	
						Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			900.000.000	900.000.000	900.000.000	
						Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata						
						Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI						
						Prioritas Pembangunan 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat			900.000.000	900.000.000	900.000.000	
3.26.04								Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05								Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
III.1.4				Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan					10.571.630.706	10.534.564.408	10.833.779.089	
III.1.4.1					Strategi 16 : Meningkatkan Produksi Unggulan Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan				7.198.511.000	7.198.272.000	7.487.895.000	
						Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			7.198.511.000	7.198.272.000	7.487.895.000	
						Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah						
						Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian						

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan				
								Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian				
								Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak				
								Prioritas Pembangunan 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	7.198.511.000	7.198.272.000	7.487.895.000	
2.09.02								Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	330.000.000	330.000.000	330.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.03								Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.065.000.000	1.065.000.000	1.125.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.04								Program : Penanganan Kerawanan Pangan	60.000.000	60.000.000	70.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.05								Program : Pengawasan Keamanan Pangan	200.000.000	200.000.000	240.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.25.03								Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	596.986.000	605.487.000	616.877.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04								Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.925.452.000	2.891.669.000	2.923.591.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.05								Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	41.632.000	42.226.000	43.020.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.06								Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	399.851.000	405.543.000	413.173.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.04								Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	552.488.000	564.289.000	576.396.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.05								Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.06								Program : Perizinan Usaha Pertanian	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.07								Program : Penyuluhan Pertanian	600.000.000	600.000.000	700.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.07								Program : Penyuluhan Pertanian	137.102.000	144.058.000	159.838.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
III.1.4.2								Strategi 17 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian	3.373.119.706	3.336.292.408	3.345.884.089	
								Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	3.373.119.706	3.336.292.408	3.345.884.089	
								Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata				
								Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas				
								Prioritas Pembangunan 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.373.119.706	3.336.292.408	3.345.884.089	

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH	
									2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.27.02								Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	910.000.000	910.000.000	910.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian	
3.27.03								Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.880.970.706	1.835.854.408	1.834.342.089	Dinas Pangan dan Pertanian	
3.27.02								Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	519.701.000	527.101.000	537.014.000	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3.27.03								Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	62.448.000	63.337.000	64.528.000	Dinas Perikanan dan Peternakan	
III.2			Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat						2.453.300.000	2.577.000.000	2.680.000.000		
III.2.1				Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan						1.663.300.000	1.759.000.000	1.820.000.000	
III.2.1.1				Strategi 18 : Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin						1.663.300.000	1.759.000.000	1.820.000.000	
				Arah Kebijakan 5 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat						1.663.300.000	1.759.000.000	1.820.000.000	
				Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial									
				Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat									
				Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas									
				Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat									
				Prioritas Pembangunan 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						1.663.300.000	1.759.000.000	1.820.000.000	
1.06.02								Program : Pemberdayaan Sosial	255.000.000	271.000.000	275.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.03								Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	30.000.000	35.000.000	35.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.04								Program : Rehabilitasi Sosial	778.300.000	833.000.000	860.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.05								Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial	600.000.000	620.000.000	650.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
III.2.2				Sasaran 11 : Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						790.000.000	818.000.000	860.000.000	
III.2.2.1				Strategi 19 : Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak						790.000.000	818.000.000	860.000.000	
				Arah Kebijakan 5 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat						790.000.000	818.000.000	860.000.000	
				Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan									
				Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak									
				Prioritas Pembangunan 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						790.000.000	818.000.000	860.000.000	

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.02								Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	260.000.000	273.000.000	288.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03								Program : Perlindungan Perempuan	205.000.000	220.000.000	227.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04								Program : Peningkatan Kualitas Keluarga	120.000.000	120.000.000	130.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05								Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	40.000.000	40.000.000	45.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06								Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)	140.000.000	140.000.000	145.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07								Program : Perlindungan Khusus Anak	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.		Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah							218.565.377.589	222.246.791.143	227.341.245.009	
IV.1			Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah						218.565.377.589	222.246.791.143	227.341.245.009	
IV.1.1				Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah					125.107.053.199	126.394.975.699	129.150.595.017	
IV.1.1.1					Strategi 20 : Meningkatkan Kualitas Akses Jaringan Jalan dan Jembatan yang Mantap				88.490.000.000	89.500.000.000	91.550.000.000	
						Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah			88.490.000.000	89.500.000.000	91.550.000.000	
						Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata						
						Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat						
							Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah		88.490.000.000	89.500.000.000	91.550.000.000	
1.03.10								Program : Penyelenggaraan Jalan	88.490.000.000	89.500.000.000	91.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
IV.1.1.2						Strategi 21 : Meningkatkan Ketersediaan Akses Jaringan Air Bersih yang Merata			33.042.053.199	33.301.615.994	33.625.595.017	
						Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah			33.042.053.199	33.301.615.994	33.625.595.017	
						Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata						
							Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah		33.042.053.199	33.301.615.994	33.625.595.017	
1.03.02								Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19.730.000.000	19.800.000.000	19.870.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.03								Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.312.053.199	13.501.615.994	13.755.595.017	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
IV.1.1.3					Strategi 22 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal				3.575.000.000	3.593.359.705	3.975.000.000	
					Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah				3.575.000.000	3.593.359.705	3.975.000.000	
					Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan							
					Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman							
					Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah				3.575.000.000	3.593.359.705	3.975.000.000	
2.15.02								Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.325.000.000	3.343.359.705	3.725.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.03								Program : Pengelolaan Pelayaran	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Dinas Perhubungan
IV.1.2				Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien					93.458.324.390	95.851.815.444	98.190.649.992	
IV.1.2.1					Strategi 23 : Meningkatkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi, Permukiman dan Pemerintahan yang Merata				93.458.324.390	95.851.815.444	98.190.649.992	
					Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah				93.458.324.390	95.851.815.444	98.190.649.992	
					Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat							
					Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya							
					Meningkatkan penyediaan rumah layak huni							
					Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan							
					Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh							
					Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah				93.458.324.390	95.851.815.444	98.190.649.992	
1.03.06								Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	5.570.000.000	5.570.000.000	5.570.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08								Program : Penataan Bangunan Gedung	30.100.000.000	31.800.000.000	33.020.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09								Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	270.000.000	270.000.000	270.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11								Program : Pengembangan Jasa Konstruksi	750.000.000	750.000.000	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12								Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.278.815.235	3.303.036.264	3.520.172.959	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.04								Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.05								Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5.050.000.000	5.050.000.000	5.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.08								Program : Pengelolaan Tanah Kosong	850.000.000	850.000.000	850.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05								Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.985.175.450	16.212.803.333	16.517.782.529	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06								Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	985.483.039	999.516.254	1.018.318.164	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.07								Program : Pengembangan Permukiman	25.920.667.622	26.289.776.283	26.784.313.511	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02								Program : Pengembangan Perumahan	309.146.029	313.548.249	319.446.408	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03								Program : Kawasan Permukiman	1.975.893.394	2.004.029.990	2.041.727.817	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05								Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.823.143.621	1.849.105.071	1.883.888.604	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.06.07								Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	190.000.000	190.000.000	195.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.		Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat							1.897.069.744.509	1.921.982.602.790	1.951.720.437.813	
V.1			Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel						1.872.400.149.190	1.897.072.332.529	1.926.861.287.026	
V.1.1				Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE					1.464.311.156.189	1.479.066.590.562	1.498.140.133.978	
V.1.1.1					Strategi 24 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				1.444.677.371.739	1.458.993.440.562	1.477.282.418.978	
						Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi			1.444.677.371.739	1.458.993.440.562	1.477.282.418.978	
						Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah						
						Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi						
						Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
						Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD						
							Prioritas Pembangunan 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		1.444.677.371.739	1.458.993.440.562	1.477.282.418.978	
1.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	478.193.521.597	483.929.931.283	489.149.931.283	Dinas Pendidikan
1.02.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	106.523.567.079	108.231.163.570	110.573.640.704	Dinas Kesehatan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	194.749.458.648	196.980.937.644	200.300.567.176	RSUD Bayu Asih
1.03.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.437.697.001	42.437.697.001	42.637.697.001	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.853.212.538	20.135.921.022	20.514.698.022	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.233.250.000	19.425.407.905	19.905.146.303	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.147.973.206	5.222.602.189	5.314.348.608	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.831.494.622	13.997.749.341	14.237.490.603	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.599.000.000	7.618.171.677	7.689.665.661	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.156.905.340	10.337.708.465	10.529.951.160	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.09.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.074.497.122	16.424.497.122	16.624.497.122	Dinas Pangan dan Pertanian
2.11.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.125.305.302	36.585.166.273	36.809.392.924	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.242.960.689	17.400.302.479	17.441.791.879	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.459.426.756	12.867.855.618	13.581.093.156	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.862.690.484	6.867.186.933	6.875.942.398	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.333.385.684	18.627.000.000	18.663.347.100	Dinas Perhubungan
2.16.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.330.482.106	9.405.449.632	9.462.933.875	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.154.207.120	14.155.277.954	14.153.268.214	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.18.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.801.503.096	11.989.396.541	12.189.396.541	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.565.000.000	20.043.596.509	20.215.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.218.858.281	10.282.692.115	10.535.935.383	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.25.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.195.629.263	11.421.559.779	11.644.323.325	Dinas Perikanan dan Peternakan
4.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum	63.243.130.002	63.389.097.528	63.427.981.770	Sekretariat Daerah
4.02.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	46.876.175.032	47.335.987.309	47.769.737.665	Sekretariat DPRD
5.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.617.741.053	10.687.724.816	10.723.966.937	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58.106.644.072	55.723.000.000	55.723.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.912.578.527	29.330.539.558	29.407.520.650	Badan Pendapatan Daerah
5.03.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.358.428.518	32.855.654.010	33.360.631.091	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.699.030.316	26.039.994.595	26.525.727.263	Inspektorat
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.386.324.995	3.429.057.225	3.486.055.220	Kecamatan Jatiluhur
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.130.982.955	3.159.416.055	3.186.417.055	Kecamatan Sukasari
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.861.568.444	2.887.549.050	2.931.200.000	Kecamatan Maniis
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.283.584.092	3.322.567.225	3.371.352.422	Kecamatan Tegalwaru
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.391.924.995	3.452.415.207	3.480.055.220	Kecamatan Plered
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.881.427.939	3.934.804.743	4.010.030.920	Kecamatan Sukatani
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.523.383.923	3.581.561.313	3.629.809.164	Kecamatan Darangdan
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.562.383.923	3.611.561.313	3.677.809.164	Kecamatan Bojong
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.617.383.923	3.655.061.313	3.701.309.164	Kecamatan Wanayasa
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.445.424.995	3.494.057.225	3.556.555.220	Kecamatan Kiarapedes

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.182.916.067	3.195.789.446	3.236.664.076	Kecamatan Pasawahan
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.327.552.609	3.371.291.225	3.432.279.792	Kecamatan Pondoksalam
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.829.743.173	14.946.793.173	15.046.263.434	Kecamatan Purwakarta
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.151.551.305	3.190.553.138	3.229.270.074	Kecamatan Babakan Cikao
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.358.024.995	3.403.157.225	3.464.930.245	Kecamatan Campaka
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.783.342.851	3.845.065.429	3.971.063.109	Kecamatan Cibatu
7.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.143.466.067	3.185.953.138	3.245.651.276	Kecamatan Bungursari
8.01.01								Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.088.634.734	4.192.328.341	4.317.681.309	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.02.02								Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	24.823.996.300	25.385.189.910	26.319.398.300	Sekretariat DPRD
V.1.1.2								Strategi 25 : Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik	19.633.784.450	20.073.150.000	20.857.715.000	
								Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi	19.633.784.450	20.073.150.000	20.857.715.000	
								Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital				
								Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel				
								Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan				
								Prioritas Pembangunan 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	19.633.784.450	20.073.150.000	20.857.715.000	
2.12.02								Program : Pendaftaran Penduduk	210.000.000	210.000.000	215.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03								Program : Pencatatan Sipil	160.000.000	60.000.000	65.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04								Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	785.000.000	980.000.000	1.280.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05								Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	25.000.000	35.000.000	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.16.02								Program : Informasi Dan Komunikasi Publik	5.970.000.000	5.995.000.000	6.300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03								Program : Aplikasi Informatika	10.370.000.000	10.570.000.000	10.570.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02								Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	675.000.000	735.000.000	800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.21.02								Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.040.000.000	1.070.000.000	1.165.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.000.000	9.000.000	11.000.000	Kecamatan Jatiluhur
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	12.784.450	14.500.000	16.500.000	Kecamatan Sukasari
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40.500.000	42.500.000	44.500.000	Kecamatan Maniis
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	35.500.000	36.000.000	36.500.000	Kecamatan Tegalwaru
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.500.000	7.800.000	6.500.000	Kecamatan Plered
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.000.000	8.000.000	8.600.000	Kecamatan Sukatani
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000	24.000.000	25.000.000	Kecamatan Darangdan
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.000.000	25.000.000	25.000.000	Kecamatan Bojong
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.000.000	9.000.000	10.000.000	Kecamatan Wanayasa
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.000.000	6.000.000	6.000.000	Kecamatan Kiarapedes
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	0	16.000.000	Kecamatan Pasawahan
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	42.500.000	44.050.000	44.250.000	Kecamatan Pondoksalam
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	110.000.000	110.000.000	110.000.000	Kecamatan Purwakarta
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kecamatan Babakan Cikao
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6.000.000	6.300.000	6.615.000	Kecamatan Campaka
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	45.000.000	45.000.000	30.000.000	Kecamatan Cibatuh
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000	21.000.000	21.250.000	Kecamatan Bungursari

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.1.2				Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					408.088.993.001	418.005.741.967	428.721.153.048	
V.1.2.1					Strategi 26 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance)				403.171.678.939	412.988.009.599	423.532.573.659	
						Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi			403.171.678.939	412.988.009.599	423.532.573.659	
						Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah						
						Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait						
						Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri						
						Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital						
						Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan						
						Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran						
						Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif						
						Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah						
						Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna						
						Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional						
						Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan						
						Prioritas Pembangunan 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			403.171.678.939	412.988.009.599	423.532.573.659	
4.01.02								Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13.870.000.000	14.240.000.000	14.610.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03								Program : Perekonomian Dan Pembangunan	5.439.152.029	6.047.267.719	7.134.835.634	Sekretariat Daerah
2.24.02								Program : Pengelolaan Arsip	850.000.000	900.000.000	850.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03								Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	175.000.000	175.000.000	175.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5.01.02								Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.175.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03								Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	750.000.000	850.000.000	850.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.02								Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	366.210.000.000	374.666.502.002	382.803.006.627	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03								Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04								Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.950.000.000	4.000.000.000	4.550.000.000	Badan Pendapatan Daerah

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.05.02								Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.150.000.000	1.150.000.000	1.275.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.06.02								Program : Pengelolaan Perbatasan	600.000.000	660.000.000	750.000.000	Sekretariat Daerah
5.03.02								Program : Kepegawaian Daerah	6.050.000.000	6.075.000.000	6.075.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000	26.000.000	27.000.000	Kecamatan Jatiluhur
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.914.762	34.177.083	51.334.221	Kecamatan Sukasari
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.000.000	27.000.000	28.000.000	Kecamatan Maniis
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	64.050.000	70.250.000	82.582.798	Kecamatan Tegalwaru
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.500.000	32.000.000	66.000.000	Kecamatan Plered
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.600.000	55.230.000	55.330.000	Kecamatan Sukatani
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.000.000	122.000.000	122.000.000	Kecamatan Darangdan
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kecamatan Bojong
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.000.000	42.500.000	50.000.000	Kecamatan Wanayasa
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	10.000.000	14.000.000	Kecamatan Kiarapedes
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	30.000.000	21.000.000	Kecamatan Pasawahan
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	57.372.386	58.200.000	60.965.428	Kecamatan Pondoksalam
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.875.000	63.717.795	106.484.499	Kecamatan Purwakarta
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34.914.762	40.000.000	63.031.202	Kecamatan Babakan Cikao
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	69.300.000	72.765.000	76.403.250	Kecamatan Campaka
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	50.000.000	45.000.000	Kecamatan Cibatu
7.01.05								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	40.400.000	40.600.000	Kecamatan Bungursari

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.1.2.2					Strategi 27 : Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas				4.917.314.062	5.017.732.368	5.188.579.389	
						Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi			4.917.314.062	5.017.732.368	5.188.579.389	
						Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa						
						Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP						
						Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas						
							Prioritas Pembangunan 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		4.917.314.062	5.017.732.368	5.188.579.389	
6.01.02								Program : Penyelenggaraan Pengawasan	3.280.000.000	3.378.000.000	3.477.000.000	Inspektorat
6.01.03								Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.145.000.000	1.135.000.000	1.125.000.000	Inspektorat
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000	31.000.000	34.000.000	Kecamatan Jatiluhur
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.079.150	47.060.000	60.050.000	Kecamatan Sukasari
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.000.000	30.000.000	35.000.000	Kecamatan Maniis
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.870.000	53.220.000	55.830.000	Kecamatan Tegalwaru
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.500.000	17.842.018	25.000.000	Kecamatan Plered
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.314.912	22.030.658	22.102.189	Kecamatan Sukatani
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.000.000	33.000.000	50.000.000	Kecamatan Darangdan
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.000.000	33.000.000	38.000.000	Kecamatan Bojong
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.000.000	57.000.000	73.500.000	Kecamatan Wanayasa
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Kiarapedes
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.550.000	24.763.692	35.637.200	Kecamatan Pasawahan
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	46.516.000	47.960.000	Kecamatan Pondoksalam
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000	10.000.000	20.000.000	Kecamatan Purwakarta
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.000.000	10.000.000	10.000.000	Kecamatan Babakan Cikao

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH				
									2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Kecamatan Campaka				
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	45.000.000	35.000.000	Kecamatan Cibatu				
7.01.06								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	6.300.000	6.500.000	Kecamatan Bungursari				
V.2			Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai						24.669.595.319	24.910.270.261	24.859.150.787					
V.2.1				Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan						17.023.674.397	17.130.865.050	17.112.354.131				
V.2.1.1					Strategi 28 : Meningkatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Desa						17.023.674.397	17.130.865.050	17.112.354.131			
						Arah Kebijakan 8 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat						17.023.674.397	17.130.865.050	17.112.354.131		
						Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa										
						Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa										
						Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan										
							Prioritas Pembangunan 11 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa						17.023.674.397	17.130.865.050	17.112.354.131	
2.13.02								Program : Penataan Desa	1.100.000.000	900.000.000	700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.13.03								Program : Peningkatan Kerja Sama Desa	1.550.000.000	1.750.000.000	1.850.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.13.04								Program : Administrasi Pemerintahan Desa	4.350.000.000	4.250.000.000	4.050.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.13.05								Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.600.000	31.000.000	33.500.000	Kecamatan Jatiluhur				
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.704.750	23.900.000	26.000.000	Kecamatan Sukasari				
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.438.694	37.000.000	41.847.331	Kecamatan Maniis				
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	37.970.903	39.020.000	40.590.000	Kecamatan Tegalwaru				
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Kecamatan Plered				
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.500.000	11.000.000	11.000.000	Kecamatan Sukatani				
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.000.000	22.000.000	22.000.000	Kecamatan Darangdan				

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kecamatan Bojong
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kecamatan Wanayasa
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kecamatan Kiarapedes
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.000.000	32.000.000	35.000.000	Kecamatan Pasawahan
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.000.000	5.500.000	6.000.000	Kecamatan Pondoksalam
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.499.760.050	7.692.710.050	7.962.710.050	Kecamatan Purwakarta
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Kecamatan Babakan Cikao
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.700.000	15.435.000	16.206.750	Kecamatan Campaka
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.000.000	25.000.000	20.000.000	Kecamatan Cibatu
7.01.03								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	17.000.000	18.300.000	19.500.000	Kecamatan Bungursari
V.2.2				Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat					7.645.920.922	7.779.405.211	7.746.796.656	
V.2.2.1					Strategi 29 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				7.645.920.922	7.779.405.211	7.746.796.656	
						Arah Kebijakan 8 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			7.645.920.922	7.779.405.211	7.746.796.656	
						Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat						
						Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						
						Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila						
						Prioritas Pembangunan 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			7.645.920.922	7.779.405.211	7.746.796.656	
1.05.02								Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	932.423.187	1.027.423.187	932.423.187	Satuan Polisi Pamong Praja
8.01.02								Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.150.000.000	1.151.000.000	1.154.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03								Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.170.763.489	3.189.831.074	3.235.222.519	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.04								Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	250.000.000	252.000.000	254.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05								Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	500.000.000	505.500.000	510.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06								Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.350.000.000	1.357.000.000	1.362.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.500.000	9.000.000	10.000.000	Kecamatan Jatiluhur
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.000.000	3.500.000	4.000.000	Kecamatan Sukasari
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000	6.000.000	6.500.000	Kecamatan Maniis
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.450.000	14.000.000	14.700.000	Kecamatan Tegalwaru
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.000.000	2.000.000	1.000.000	Kecamatan Plered
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.500.000	9.000.000	9.000.000	Kecamatan Sukatani
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000	5.000.000	10.000.000	Kecamatan Darangdan
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kecamatan Bojong
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kecamatan Wanayasa
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kecamatan Kiarapedes
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	0	0	Kecamatan Pasawahan
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.000.000	9.500.000	10.100.000	Kecamatan Pondoksalam
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	151.884.246	154.650.950	164.650.950	Kecamatan Purwakarta
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kecamatan Babakan Cikao
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.400.000	14.400.000	14.400.000	Kecamatan Campaka

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000	30.000.000	15.000.000	Kecamatan Cibatu
7.01.04								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000	10.600.000	10.800.000	Kecamatan Bungursari
JUMLAH	1	5	8	17	29	129	29	281	2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243	281
UNIQUE	1	5	8	17	29	8/100	12	150	258	267	273	47

Sumber : Perangkat Daerah terkait, 2023

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2024 - 2026. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Selanjutnya kapasitas kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikasi rencana program pembangunan Kabupaten Purwakarta berisi program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan.

Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Pelaksanaan program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah pada tiap bidang urusan pemerintahannya, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai pelaksanaan program pembangunan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan pagu indikatif dan target indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 Kabupaten Purwakarta

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243
5.1	BELANJA OPERASI	1.955.085.354.777	1.970.743.893.225	2.003.231.802.963
5.1.01	Belanja Pegawai	995.261.945.631	994.691.735.221	995.691.735.221
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.632.645.891	921.651.823.691	949.860.491.560
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	45.698.163.255	46.888.972.328	46.888.972.328
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.492.600.000	7.511.361.985	10.790.603.854
5.2	BELANJA MODAL	162.486.404.445	182.005.946.954	196.389.605.672
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.237.828.888	1.361.982.438	1.591.637.826
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.964.513.876	75.951.602.386	78.332.961.485
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.631.694.266	47.331.694.266	52.218.933.269
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.953.645.869	43.661.946.318	49.145.809.867
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.698.721.546	13.698.721.546	15.100.263.225
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
1	2	3	4	5
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.348.210.605	23.511.954.478	23.708.989.850
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.348.210.605	23.511.954.478	23.708.989.850
5.4	BELANJA TRANSFER	348.669.312.558	348.779.081.017	349.209.044.758
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	44.927.822.558	44.962.193.106	44.692.156.847
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	303.741.490.000	303.816.887.911	304.516.887.911
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243

Sumber: Analisis Tim, 2023

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH									2.489.589.282.385	2.525.040.875.674	2.572.539.443.243		7.587.169.601.302	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.417.701.946.305	1.437.962.893.143	1.465.104.323.363		4.320.769.162.811	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								258.262.780.723	261.893.949.793	266.614.061.278		786.770.791.794	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								26.612.259.969	26.976.124.187	27.613.102.414		81.201.486.570	
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								154.252.453.363	156.397.542.466	159.261.953.369		469.911.949.198	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								513.455.392.170	520.818.420.386	530.693.125.305		1.564.966.937.861	
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								30.124.030.316	30.552.994.595	31.127.727.263		91.804.752.174	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								78.671.021.316	79.791.291.689	81.292.246.423		239.754.559.428	
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								10.509.398.223	10.647.659.415	10.832.903.828		31.989.961.466	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN								679.159.956.234	688.831.150.883	701.788.760.116		2.069.779.867.233	Dinas Pendidikan
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								679.159.956.234	688.831.150.883	701.788.760.116		2.069.779.867.233	Dinas Pendidikan
1.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								478.193.521.597	483.929.931.283	489.149.931.283		1.451.273.384.163	Dinas Pendidikan
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		Dinas Pendidikan
1.01.02	Program : Pengelolaan Pendidikan								199.986.134.737	203.876.219.600	211.613.828.833		615.476.183.170	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	72,83	0,00	74,29	75,74	77,20				77,20		Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,30	0,00	99,50	99,70	99,90				99,90		Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	94,13	0,00	94,33	94,53	94,73				94,73		Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,52	0,00	0,54	0,55	0,56				0,56		Dinas Pendidikan
		Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang	Persen	98,18	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		berpartisipasi dalam pendidikan dasar												
		Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,52	0,00	0,50	0,49	0,48				0,48		Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Persen	1,72	0,00	1,75	1,78	1,82				1,82		Dinas Pendidikan
		Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	72,15	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	72,15	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi kasar	Persen	23,40	23,40	24,30	24,80	25,30				25,30		Dinas Pendidikan
		Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni	Persen	21,90	21,90	22,80	23,20	23,70				23,70		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,60	99,60	99,61	99,62	99,63				99,63		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	83,80	83,80	84,00	84,10	84,20				84,20		Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,30	99,30	99,50	99,60	99,70				99,70		Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,13	94,10	94,30	94,40	94,50				94,50		Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,70	0,70	0,50	0,40	0,30				0,30		Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	5,90	5,90	5,70	5,60	5,50				5,50		Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	21,13	22,61	24,19	24,67	25,15				25,15		Dinas Pendidikan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	39,20	41,95	44,88	47,63	50,38				50,38		Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	41,53	0,00	41,55	41,56	41,57				41,57		Dinas Pendidikan
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	58,41	59,51	59,10	59,17	59,24				59,24		Dinas Pendidikan
		Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	97,66	99,58	98,86	98,98	99,10				99,10		Dinas Pendidikan
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	5,18	9,58	7,93	8,21	8,48				8,48		Dinas Pendidikan
		Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	48,95	54,69	52,54	52,90	53,26				53,26		Dinas Pendidikan
		Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	37,08	42,99	40,77	41,14	41,51				41,51		Dinas Pendidikan
		Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	59,00	61,92	60,83	61,01	61,19				61,19		Dinas Pendidikan
		Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	52,94	53,57	53,33	53,37	53,41				53,41		Dinas Pendidikan
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	44,83	42,90	43,50	43,62	43,87				43,87		Dinas Pendidikan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	63,52	2,59	21,63	25,44	33,05				33,05		Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	75,34	85,48	81,68	82,31	82,95				82,95		Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	62,83	89,14	79,27	80,92	82,56				82,56		Dinas Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SD	nilai	70,98	78,46	75,66	76,12	76,59				76,59		Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	77,48	78,96	78,41	78,50	78,59				78,59		Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	62,41	74,48	69,95	70,71	71,46				71,46		Dinas Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SMP	nilai	65,28	73,32	70,31	70,81	71,31				71,31		Dinas Pendidikan
1.01.03	Program : Pengembangan Kurikulum								380.300.000	400.000.000	400.000.000		1.180.300.000	Dinas Pendidikan
		Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
1.01.04	Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan								200.000.000	200.000.000	200.000.000		600.000.000	Dinas Pendidikan
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	38,67	38,67	38,77	38,87	38,97				38,97		Dinas Pendidikan
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	41,60	41,70	41,80	41,90	42,00				42,00		Dinas Pendidikan
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	95,88	96,00	96,06	96,12	96,18				96,18		Dinas Pendidikan
1.01.05	Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan								199.999.900	200.000.000	200.000.000		599.999.900	Dinas Pendidikan
		Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
		Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan
1.01.06	Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra								200.000.000	225.000.000	225.000.000		650.000.000	Dinas Pendidikan
		Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pendidikan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN								207.133.828.294	210.083.400.856	214.035.281.677		631.252.510.827	Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								207.133.828.294	210.083.400.856	214.035.281.677		631.252.510.827	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								106.523.567.079	108.231.163.570	110.573.640.704		325.328.371.353	Dinas Kesehatan
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		Dinas Kesehatan
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat								86.109.252.055	87.281.228.126	88.825.631.813		262.216.111.994	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	36,37	36,36	50,00	60,00	65,00				65,00		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,82	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	71,47	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	39,94	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	81,46	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	65,73	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	59,94	75,00	80,00	90,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	93,58	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	79,31	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	98,43	92,20	95,00	98,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	79,40	41,60	80,00	90,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	97,57	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	98,82	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	71,47	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	39,94	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	81,00	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	60,00	75,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	94,00	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	79,00	95,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	98,43	92,20	95,00	98,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	79,40	41,60	80,00	90,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Rasio posyandu per satuan balita	Poin	16,68	16,82	17,34	17,60	17,86				17,86		Dinas Kesehatan
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	97,84	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,11	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	0,00	77,60	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	85,31	81,05	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	0,00	20,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	50,00	37,49	70,00	80,00	90,00				90,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	92,48	82,20	90,00	95,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	246,95	282,78	245,65	208,52	171,39				171,39		Dinas Kesehatan
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	6,07	2,90	2,58	2,26	1,94				1,94		Dinas Kesehatan
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	92,48	82,20	90,00	95,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	93,73	86,53	90,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penderita diare yang ditangani	Persen	76,26	56,58	85,00	90,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Rasio	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	79,40	41,60	80,00	90,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan bayi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan puskesmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan nifas	Persen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	75,55	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan anak balita	Persen	61,91	65,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								13.201.009.160	13.201.009.160	13.201.009.160		39.603.027.480	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	50,00	85,00	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
		Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Persen	68,00	75,46	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	68,20	73,50	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	68,20	73,50	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
		Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	0,06	0,07	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	0,08	0,10	30,00	30,00	40,00				40,00		Dinas Kesehatan
1.02.04	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman								620.000.000	685.000.000	740.000.000		2.045.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	70,75	79,67	80,00	82,00	85,00				85,00		Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan											680.000.000	685.000.000	695.000.000	2.060.000.000	Dinas Kesehatan
		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00				10,00		Dinas Kesehatan		
		Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Persen	83,40	77,20	89,00	96,00	100,00				100,00		Dinas Kesehatan		

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD BAYU ASIH								209.374.458.648	212.355.937.644	216.350.567.176		638.080.963.468	RSUD Bayu Asih	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								209.374.458.648	212.355.937.644	216.350.567.176		638.080.963.468	RSUD Bayu Asih	
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									194.749.458.648	196.980.937.644	200.300.567.176		592.030.963.468	RSUD Bayu Asih
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		RSUD Bayu Asih	
		Rasio Keuangan BLUD	Skor	0,00	0,00	80,00	85,00	80,00				80,00		RSUD Bayu Asih	
		Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional BLUD	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		RSUD Bayu Asih	
		Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Skor	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00				80,00		RSUD Bayu Asih	
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									13.500.000.000	14.150.000.000	14.750.000.000		42.400.000.000	RSUD Bayu Asih
		Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih	
		Tingkat Pengendalian Infeksi di RS	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih	
		Capaian Indikator Medik	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih	
		Prosedur Penanganan Sampel Uji	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih	
		Pengendalian Mutu	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih	
		Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih	
		Ketepatan Waktu Pelayanan	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih	
		Temuan Yang di Tindaklanjuti	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih	
		Tingkat Kehandalan Sumber Daya	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00				85,00		RSUD Bayu Asih	
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									625.000.000	725.000.000	800.000.000		2.150.000.000	RSUD Bayu Asih
		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	0,00	0,00	75,00	78,00	80,00				80,00		RSUD Bayu Asih	
		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	0,00	0,00	75,00	78,00	80,00				80,00		RSUD Bayu Asih	
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									500.000.000	500.000.000	500.000.000		1.500.000.000	RSUD Bayu Asih
		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	NUI	NUI	75,00	75,00	75,00				75,00		RSUD Bayu Asih	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG								196.926.512.236	199.730.733.265	203.487.869.960		600.145.115.461	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								190.626.512.236	193.430.733.265	197.187.869.960		581.245.115.461	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								42.437.697.001	42.437.697.001	42.637.697.001		127.513.091.003	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	BB	BB				BB		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)								19.730.000.000	19.800.000.000	19.870.000.000		59.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	-	-	37,60	37,60	37,60				37,60		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	37,56	-	84,71	84,71	84,71				84,71		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase								5.570.000.000	5.570.000.000	5.570.000.000		16.710.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00				25,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	Program : Penataan Bangunan Gedung								30.100.000.000	31.800.000.000	33.020.000.000		94.920.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat	Persen	54,55	8,33	10,00	10,00	10,00				10,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara	Persen	-	-	90,00	90,00	90,00				90,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09	Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya								270.000.000	270.000.000	270.000.000		810.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persen	-	-	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.10	Program : Penyelenggaraan Jalan													Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,25	-	84,00	85,00	85,00				85,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	68,76	-	68,00	68,00	68,00				68,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	72,79	-	72,00	71,00	70,00				70,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan	Persen	6,87	7,20	7,00	7,00	7,00				7,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi	Persen	2,74	4,11	5,00	5,00	5,00				5,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11	Program : Pengembangan Jasa Konstruksi													Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00				25,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10				0,10		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persen	-	-	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12	Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang													Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	5,00	11,00	20,00	20,00	20,00				20,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Persen	54,25	54,25	55,00	55,00	55,00				55,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Ketaatan terhadap RTRW	Persen	44,00	44,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.04	Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan													Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	Persen	-	-	10,00	10,00	10,00				10,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.10.05	Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan								5.050.000.000	5.050.000.000	5.050.000.000		15.150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.08	Program : Pengelolaan Tanah Kosong								850.000.000	850.000.000	850.000.000		2.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	Persen	-	-	25,00	25,00	25,00				25,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								80.164.774.892	81.306.316.196	82.835.770.072		244.306.861.160	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								56.203.379.310	57.003.711.864	58.076.009.221		171.283.100.395	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								13.312.053.199	13.501.615.994	13.755.595.017		40.569.264.210	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	60,65	61,00	61,00	62,00	63,00				63,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	94,55	95,00	95,00	96,00	97,00				97,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	79,76	80,00	80,00	81,00	82,00				82,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Persen	0,39	0,5	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tingkat jaringan SPAM yang dibangun	Persen	96,24	97,00	97,00	98,00	99,00				99,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah								15.985.175.450	16.212.803.333	16.517.782.529		48.715.761.312	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	67,69	68,00	69,00	70,00	71,00				71,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	81,02	81,5	82,00	83,00	84,00				84,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0,5	0,75	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	Persen	98,45	80,5	81,00	82,00	83,00				83,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase								985.483.039	999.516.254	1.018.318.164		3.003.317.457	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan	Persen	0,05	0,06	2,00	2,00	2,00				2,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Yang Dibangun / Diperbaiki												
1.03.07	Program : Pengembangan Permukiman								25.920.667.622	26.289.776.283	26.784.313.511		78.994.757.416	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase areal kawasan kumuh	Persen	31,55	8,00	8,00	8,00	8,00				8,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Poin	25,82	27,00	30,00	40,00	50,00				50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								23.961.395.582	24.302.604.332	24.759.760.851		73.023.760.765	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								19.853.212.538	20.135.921.022	20.514.698.022		60.503.831.582	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	Program : Pengembangan Perumahan								309.146.029	313.548.249	319.446.408		942.140.686	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	15,00	37,00	38,00	39,00	40,00				40,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,60	2,61	9,00	10,00	11,00				11,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	46,90	47,00	48,00	49,00	50,00				50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program : Kawasan Permukiman								1.975.893.394	2.004.029.990	2.041.727.817		6.021.651.201	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio rumah layak huni	Persen	31,55	8,00	8,00	8,00	8,00				8,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio permukiman layak huni	Persen	22,87	23,00	30,00	40,00	50,00				50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	94,68	95,00	96,00	97,00	98,00				98,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	90,91	91,00	92,00	93,00	94,00				94,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase permukiman yang tertata	Persen	16,11	17,00	18,00	19,00	20,00				20,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)								1.823.143.621	1.849.105.071	1.883.888.604		5.556.137.296	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				3,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				3,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								20.165.673.187	20.452.831.092	20.837.569.490		61.456.073.769	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								20.165.673.187	20.452.831.092	20.837.569.490		61.456.073.769	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								19.233.250.000	19.425.407.905	19.905.146.303		58.563.804.208	Satuan Polisi Pamong Praja
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum								932.423.187	1.027.423.187	932.423.187		2.892.269.561	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan PERDA	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								6.223.973.206	6.312.602.189	6.431.348.608		18.967.924.003	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								6.223.973.206	6.312.602.189	6.431.348.608		18.967.924.003	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								5.147.973.206	5.222.602.189	5.314.348.608		15.684.924.003	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B				B		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Program : Penanggulangan Bencana								1.076.000.000	1.090.000.000	1.117.000.000		3.283.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN								15.186.494.622	15.402.749.341	15.692.490.603		46.281.734.566	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								15.186.494.622	15.402.749.341	15.692.490.603		46.281.734.566	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								13.831.494.622	13.997.749.341	14.237.490.603		42.066.734.566	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B				B		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran								1.355.000.000	1.405.000.000	1.455.000.000		4.215.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	95,76	90,16	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14				18,14		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	-	89,56	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	95,76	90,16	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Layanan	543,00	808,00	800,00	750,00	700,00				700,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								10.456.274.986	10.605.171.677	10.804.665.661		31.866.112.324	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								9.666.274.986	9.787.171.677	9.944.665.661		29.398.112.324	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								7.599.000.000	7.618.171.677	7.689.665.661		22.906.837.338	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B				B		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02	Program : Pemberdayaan Sosial								255.000.000	271.000.000	275.000.000		801.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.03	Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan								30.000.000	35.000.000	35.000.000		100.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	Program : Rehabilitasi Sosial								778.300.000	833.000.000	860.000.000		2.471.300.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	471,00	402,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti												Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	260,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	30,00	40,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	400,00	120,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase PMKS yang tertangani	Persen	76,00	104,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05	Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial								600.000.000	620.000.000	650.000.000		1.870.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase anak terlantar yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06	Program : Penanganan Bencana								213.974.986	220.000.000	240.000.000		673.974.986	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota												
1.06.07	Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								190.000.000	190.000.000	195.000.000		575.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								790.000.000	818.000.000	860.000.000		2.468.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan								260.000.000	273.000.000	288.000.000		821.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.03	Program : Perlindungan Perempuan													Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	17,00	25,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	2,00	4,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	2,00	4,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program : Peningkatan Kualitas Keluarga													Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga	Persen	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak													Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Data Gender Anak	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.08.06	Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)													Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00				100,00			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program : Perlindungan Khusus Anak													Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	8,00	16,00	100,00	100,00	100,00				100,00			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI								12.696.905.340	12.877.708.465	13.119.951.160		38.694.564.965	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								12.271.905.340	12.452.708.465	12.644.951.160		37.369.564.965	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								10.156.905.340	10.337.708.465	10.529.951.160		31.024.564.965	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.03	Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja								1.070.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000		3.210.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	0,00	69,06	69,06	69,06	69,06				69,06		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40				0,40		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan	Persen	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40				3,40		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57				0,57		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11				0,11		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07				0,07		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04	Program : Penempatan Tenaga Kerja								745.000.000	745.000.000	745.000.000		2.235.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	0,00	5,81	5,81	5,81	5,81				5,81		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05	Program : Hubungan Industrial								300.000.000	300.000.000	300.000.000		900.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64				0,64		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	0,00	38,88	38,88	38,88	38,88				38,88		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Keselamatan dan perlindungan	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								425.000.000	425.000.000	475.000.000		1.325.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.02	Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi								75.000.000	75.000.000	75.000.000		225.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.03	Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi								225.000.000	225.000.000	275.000.000		725.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase transmigran swakarsa	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32.04	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi								125.000.000	125.000.000	125.000.000		375.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN								21.410.467.828	21.715.351.530	22.123.839.211		65.249.658.569	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								17.729.497.122	18.079.497.122	18.389.497.122		54.198.491.366	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								16.074.497.122	16.424.497.122	16.624.497.122		49.123.491.366	Dinas Pangan dan Pertanian
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB				BB		Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.02	Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan								330.000.000	330.000.000	330.000.000		990.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Persen	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.03	Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat								1.065.000.000	1.065.000.000	1.125.000.000		3.255.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.04	Program : Penanganan Kerawanan Pangan								60.000.000	60.000.000	70.000.000		190.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.05	Program : Pengawasan Keamanan Pangan								200.000.000	200.000.000	240.000.000		640.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								3.680.970.706	3.635.854.408	3.734.342.089		11.051.167.203	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.02	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian								910.000.000	910.000.000	910.000.000		2.730.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	6,00	6,20	6,25	6,26	6,26				6,26		Dinas Pangan dan Pertanian
		Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00				2,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	25,00	26,00	73,00	73,00	73,00				73,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		Produksi Padi	Ton	270,54	0,00	270.808,00	271.079,00	271.350,00				271.350,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Persen	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00				3,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	60,00	65,00	77,00	77,00	77,00				77,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		Pengembangan Tanaman Manggis	Persen	3,00	4,00	5,00	15,00	20,00				20,00		Dinas Pangan dan Pertanian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.03	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian								1.880.970.706	1.835.854.408	1.834.342.089		5.551.167.203	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	45,00	45,00	48,00	48,00	48,00				48,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.05	Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian								250.000.000	250.000.000	250.000.000		750.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	3,00	3,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	3,00	3,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.06	Program : Perizinan Usaha Pertanian								40.000.000	40.000.000	40.000.000		120.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin	Persen	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00				75,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.07	Program : Penyuluhan Pertanian								600.000.000	600.000.000	700.000.000		1.900.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		Cakupan bina kelompok petani	Persen	70,00	70,00	73,00	74,00	80,00				80,00		Dinas Pangan dan Pertanian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP											40.580.305.302	41.158.166.273	41.932.392.924	123.670.864.499	Dinas Lingkungan Hidup
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											40.580.305.302	41.158.166.273	41.932.392.924	123.670.864.499	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											37.125.305.302	36.585.166.273	36.809.392.924	110.519.864.499	Dinas Lingkungan Hidup
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.02	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup											200.000.000	200.000.000	200.000.000	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				0,00		Dinas Lingkungan Hidup		
		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup		
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.03	Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup											1.275.000.000	1.333.000.000	1.533.000.000	4.141.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	80,00	80,00	70,00	80,00	90,00				90,00		Dinas Lingkungan Hidup		
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Skor/ Kategori	63,33 / Sedang	50 / Sedang	60 / Sedang	65 / Sedang	70 / Baik				70 / Baik		Dinas Lingkungan Hidup		
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Skor/ Kategori	73,47 / Baik	68,74 / Sedang	70 / Baik	75 / Baik	80 / Baik				80 / Baik		Dinas Lingkungan Hidup		
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor/ Kategori	35,46	36,45	37,18	37,55	37,93				37,93		Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.04	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)											100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.05	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)											50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah limbah B3 yang dikelola	Kg	18.922.101.000,00	16.591.264.000,00	15.000.000.000,00	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00				11.000.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)											250.000.000	325.000.000	375.000.000	950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup		

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pemerintah Daerah Kab/Kota												
		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00				25,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				10,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH								100.000.000	100.000.000	150.000.000	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Penetapan hak MHA	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								300.000.000	300.000.000	350.000.000	950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								125.000.000	150.000.000	150.000.000		425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup								100.000.000	125.000.000	125.000.000		350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program : Pengelolaan Persampahan								955.000.000	1.890.000.000	2.090.000.000		4.935.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Timbulan sampah yang ditangani	Persen	60,00	74,00	75,00	75,00	75,00				75,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	30,00	31,00	31,00	32,00	32,00				32,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase cakupan area pelayanan	Persen	73,00	75,00	75,00	75,00	75,00				75,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Skor	71,00	71,00	72,00	72,00	72,00				72,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00				75,00		Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								18.422.960.689	18.685.302.479	19.036.791.879		56.145.055.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								18.422.960.689	18.685.302.479	19.036.791.879		56.145.055.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								17.242.960.689	17.400.302.479	17.441.791.879		52.085.055.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program : Pendaftaran Penduduk								210.000.000	210.000.000	215.000.000		635.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Perekaman KTP elektronik	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Kategori	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah				Sudah		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	26,98	48,22	50,00	55,00	60,00				60,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program : Pencatatan Sipil								160.000.000	60.000.000	65.000.000		285.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio pasangan berakte nikah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	81,61	85,02	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								785.000.000	980.000.000	1.280.000.000		3.045.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	53,33	54,00	55,00	56,00	57,00				57,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan								25.000.000	35.000.000	35.000.000		95.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Profil data kependudukan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							21.659.426.756	21.967.855.618	22.381.093.156		66.008.375.530	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							21.659.426.756	21.967.855.618	22.381.093.156		66.008.375.530	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							12.459.426.756	12.867.855.618	13.581.093.156		38.908.375.530	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Program : Penataan Desa							1.100.000.000	900.000.000	700.000.000		2.700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00				20,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Program : Peningkatan Kerja Sama Desa							1.550.000.000	1.750.000.000	1.850.000.000		5.150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	0,00	0,00	5,00	8,74	11,48				11,48		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pembangunan kawasan perdesaan	Persen	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00				2,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program : Administrasi Pemerintahan Desa							4.350.000.000	4.250.000.000	4.050.000.000		12.650.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	2,86	0,00	5,00	5,00	5,00				5,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa tertib administrasi	Persen	0,00	0,00	40,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pembinaan BUM Desa	Persen	100,00	100,00	40,00	40,00	20,00				20,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase penertiban aset desa	Persen	0,00	0,00	50,00	30,00	20,00				20,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase kepala desa yang dibina	Persen	100,00	100,00	40,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase aparaturnya desa yang dibina	Persen	0,00	0,00	45,00	35,00	30,00				30,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat							2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000		6.600.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase LSM aktif	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase PKK aktif	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase Posyandu aktif	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00				5,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								22.655.262.469	22.977.871.968	23.410.108.933		69.043.243.370	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								22.655.262.469	22.977.871.968	23.410.108.933		69.043.243.370	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								6.862.690.484	6.867.186.933	6.875.942.398		20.605.819.815	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	Program : Pengendalian Penduduk								349.385.450	429.969.750	474.969.750		1.254.324.950	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,70	2,70	2,50	2,50	2,50				2,50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	37.890,00	37.890,00	36,00	36,00	36,00				36,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	29,89	29,89	30,00	30,00	31,11				31,11		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								9.017.281.650	9.254.810.400	9.633.291.900		27.905.383.950	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	12.263,00	81,27	99,00	99,00	99,00				99,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	33,52	34,05	35,22	36,30	38,40				38,40		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00				94,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ratio Akseptor KB	Persen	26.717,00	25.521,00	25.521,00	25.521,00	25.521,00				25.521,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	81,27	82,27	83,28	83,28	83,28				83,28		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	Poin	25,71	25,71	25,71	25,71	25,71				25,71		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	533,83	533,83	534,83	534,83	534,83				534,83		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	35,54	46,24	46,24	46,24	46,24				46,24		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	17,72	17,73	17,78	17,78	17,78				17,78		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	681.167,00	681.167,00	691.167,00	691.167,00	691.167,00				691.167,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	151.153,00	151.153,00	161.153,00	161.153,00	161.153,00				161.153,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	623.471,00	623.471,00	624.471,00	624.471,00	624.471,00				624.471,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	23,53	23,53	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persen	51,71	51,71	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	98,00	115,00	126,00	126,00	126,00				126,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	22,80	22,80	23,90	23,90	23,90				23,90		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	Persen	21,57	21,57	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	149.900,00	274.920,00	272.476,00	325.980,00	391.178,00				391.178,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	105,00	135,00	135,00	135,00	135,00				135,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)								6.425.904.885	6.425.904.885	6.425.904.885		19.277.714.655	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persen	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65				15,65		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00				3.314,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00				674,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65				15,65		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	53,71	53,71	53,71	53,71	53,71				53,71		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00				19,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN								21.908.385.684	22.220.359.705	22.638.347.100		66.767.092.489	Dinas Perhubungan
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								21.908.385.684	22.220.359.705	22.638.347.100		66.767.092.489	Dinas Perhubungan
2.15.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								18.333.385.684	18.627.000.000	18.663.347.100		55.623.732.784	Dinas Perhubungan
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB				BB		Dinas Perhubungan
2.15.02	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)								3.325.000.000	3.343.359.705	3.725.000.000		10.393.359.705	Dinas Perhubungan
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	98,00	100,00	98,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Perhubungan
		Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	Poin	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00				85,00		Dinas Perhubungan
		Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan)	Unit	311.378,00	311.378,00	311.378,00	311.378,00	311.378,00				311.378,00		Dinas Perhubungan
		Rasio ijin trayek	Persen	56,00	56,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Perhubungan
		Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)	Unit	300,00	300,00	307,00	310,00	310,00				310,00		Dinas Perhubungan
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Perhubungan
		Persentase layanan angkutan darat	Persen	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00				1.397,00		Dinas Perhubungan
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	884,00	884,00	881,00	881,00	881,00				881,00		Dinas Perhubungan
		Pemasangan Rambu-rambu	Persen	60,00	61,00	70,00	72,00	75,00				75,00		Dinas Perhubungan
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002				0,002		Dinas Perhubungan
		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	576.262,00	576.262,00	576.262,00	576.262,00	576.262,00				576.262,00		Dinas Perhubungan
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Orang	490.776,00	490.776,00	539.548,00	539.548,00	539.548,00				539.548,00		Dinas Perhubungan
2.15.03	Program : Pengelolaan Pelayaran								250.000.000	250.000.000	250.000.000		750.000.000	Dinas Perhubungan
		Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin	Persen	0,00	0,00	30,00	50,00	70,00				70,00		Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								27.385.482.106	27.775.449.632	28.297.933.875		83.458.865.613	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								25.670.482.106	25.970.449.632	26.332.933.875		77.973.865.613	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								9.330.482.106	9.405.449.632	9.462.933.875		28.198.865.613	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB				BB		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	Program : Informasi Dan Komunikasi Publik								5.970.000.000	5.995.000.000	6.300.000.000		18.265.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	11,76	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	67,00	66,00	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	90,00	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	53,30	75,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	Persen	-	-	95,00	97,00	99,00				99,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	Program : Aplikasi Informatika								10.370.000.000	10.570.000.000	10.570.000.000		31.510.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	Persen	100,00	100,00	90,00	95,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								675.000.000	735.000.000	800.000.000		2.210.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral								675.000.000	735.000.000	800.000.000		2.210.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	69,50	36,00	85,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	69,50	25,50	85,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada)	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	Persen	-	-	85,00	90,00	95,00				95,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								1.040.000.000	1.070.000.000	1.165.000.000		3.275.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								1.040.000.000	1.070.000.000	1.165.000.000		3.275.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	-	-	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	Persen	-	3,00	10,00	20,00	50,00				50,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN								16.929.207.120	17.170.277.954	17.493.268.214		51.592.753.288	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								15.304.207.120	15.370.277.954	15.518.268.214		46.192.753.288	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								14.154.207.120	14.155.277.954	14.153.268.214		42.462.753.288	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.02	Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam								50.000.000	52.500.000	60.000.000		162.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	Persen	0,00	0,00	87,50	90,00	91,67				91,67		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.03	Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi								185.000.000	195.000.000	222.500.000		602.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,05				90,05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.04	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi								290.000.000	307.500.000	345.000.000		942.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,25				90,25		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	Persen	10,00	10,00	12,00	15,00	18,00				18,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.05	Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian								100.000.000	102.500.000	105.000.000		307.500.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	Persen	69,90	71,66	72,82	73,71	74,60				74,60		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.17.07	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)					375.000.000	382.500.000	432.500.000				100,00	1.190.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	47,85	0,00	85,23	92,24	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	Persen	55,06	0,00	56,46	56,93	57,39				57,39		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	Persen	53,00	0,00	75,23	86,45	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	Persen	1,00	0,00	2,53	2,78	3,85				3,85		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan / sosialisasi kewirausahaan	Persen	52,20	0,00	57,90	60,42	63,22				63,22		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.17.08	Program : Pengembangan UMKM					150.000.000	175.000.000	200.000.000				28,04	525.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	10,00	0,00	20,56	24,30	28,04				28,04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	Persen	6,82	0,00	9,63	10,56	11,50				11,50		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					975.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000					3.275.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.02	Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan					110.000.000	120.000.000	120.000.000				97,86	350.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	93,00	0,00	95,32	96,53	97,86				97,86		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan								20.000.000	25.000.000	25.000.000		70.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04	Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting								295.000.000	330.000.000	345.000.000		970.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	34,84	0,00	37,00	38,00	39,00				39,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05	Program : Pengembangan Ekspor								200.000.000	200.000.000	200.000.000		600.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat Nilai Export bersih	Persen	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persen	0,00	0,00	2,00	2,94	3,22				3,22		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06	Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen								275.000.000	350.000.000	375.000.000		1.000.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	62,61	0,00	64,62	80,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.07	Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri													Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persen	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00				70,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Persen	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00				70,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02	Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri													Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0,00	0,00	60,00	80,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	47,52	0,00	83,33	90,48	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota													Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	18,68	0,00	20,71	21,19	21,45				21,45		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait												Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional								150.000.000	150.000.000	75.000.000		375.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegiatan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				10,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								13.194.823.196	13.382.716.641	13.634.459.049		40.211.998.886	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								13.194.823.196	13.382.716.641	13.634.459.049		40.211.998.886	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								11.801.503.096	11.989.396.541	12.189.396.541		35.980.296.178	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal								99.989.800	99.989.800	99.989.800		299.969.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	6,78	11,19	5,60	5,80	6,00				6,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	4,73	5,88	6,73	7,20	7,70				7,70		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	550,00	604,00	730,00	803,00	884,00				884,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	27,74	28,00	28,50	29,00	29,5				29,5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program : Promosi Penanaman Modal								199.950.000	199.950.000	199.950.000		599.850.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kegiatan	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00				2,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	Rp.	6,00	6,50	7,40	7,90	8,40				8,40		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program : Pelayanan Penanaman Modal								299.986.500	299.986.500	299.986.500		899.959.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	16,95	17,30	18,50	19,00	19,50				19,50		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	Persen	93,79	90,58	94,58	95,58	96,58				96,58		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,78	91,26	92,50	93,00	93,50				93,50		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.05	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								393.394.000	393.394.000	393.394.000		1.180.182.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	6,67	6,67	7,14	8,70	8,70				8,70		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal								399.999.800	399.999.800	451.742.208		1.251.741.808	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.19.2.22.3.26.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN										32.809.455.312	33.288.051.821	33.929.282.483		100.026.789.616	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										23.984.455.312	24.463.051.821	25.104.282.483		73.551.789.616	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan
2.19.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										18.565.000.000	20.043.596.509	20.215.000.000		58.823.596.509	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB				BB			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
2.19.02	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										775.000.000	775.000.000	775.000.000		2.325.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,0043	0,0049	0,0001	0,0001	0,0002				0,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	0,95	0,96	0,01	0,01	0,01				0,01			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	0,26	0,39	0,41	0,41	0,41				0,41			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,33	0,71	0,74	0,83	0,84				0,84			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,26	0,39	0,41	0,41	0,41				0,41			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
2.19.03	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										4.024.455.312	3.024.455.312	3.075.000.000		10.123.910.624	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Tingkat prestasi olahraga	Persen	50,00	66,00	70,00	80,00	85,00				85,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	25,00	49,00	50,00	60,00	75,00				75,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	15,00	25,00	40,00	50,00	65,00				65,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00				60,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Tingkat atlet berprestasi	Persen	30,00	40,00	50,00	52,00	55,00				55,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	10,00	15,00	16,00	18,00	20,00				20,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.19.04	Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan								620.000.000	620.000.000	1.039.282.483		2.279.282.483	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								4.375.000.000	4.375.000.000	4.375.000.000		13.125.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.02	Program : Pengembangan Kebudayaan								2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		7.500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	0,00	0,00	70,00	80,00	90,00				90,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina	Persen	36,00	55,00	55,00	55,00	55,00				55,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan	Persen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03	Program : Pengembangan Kesenian Tradisional								275.000.000	275.000.000	275.000.000		825.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00				12,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase Kelompok/Komunitas Seni/Kesenian yang dibina	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				3,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan	Persen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00				30,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.04	Program : Pembinaan Sejarah								450.000.000	450.000.000	450.000.000		1.350.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.22.05	Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya										600.000.000	600.000.000	600.000.000		1.800.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00				60,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	0,00	0,00	12,00	16,00	20,00				20,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.06	Program : Pengelolaan Permuseuman										550.000.000	550.000.000	550.000.000		1.650.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										4.450.000.000	4.450.000.000	4.450.000.000		13.350.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000		9.450.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-35,81	-44,84	6,53	3,33	4,84				4,84			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	-18,24	32,35	0,42	2,38	2,78				2,78			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Tingkat hunian akomodasi	Persen	17,54	16,89	19,87	24,84	31,05				31,05			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Kunjungan wisata	Persen	53,01	69,89	80,00	85,00	90,00				90,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Lama kunjungan Wisata	Hari	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00				2,00			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Persen	4,44	4,44	0,31	0,31	0,31				0,31			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat	Persen	4,44	4,44	0,43	0,43	0,43				0,43			Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	13,33	15,56	0,31	0,31	0,31				0,31		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03	Program : Pemasaran Pariwisata								400.000.000	400.000.000	400.000.000		1.200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan	Event	40,00	40,00	2,00	2,00	2,00				2,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase destinasi wisata yang diminati	Persen	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32				0,32		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.04	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual								500.000.000	500.000.000	500.000.000		1.500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan	Persen	40,00	40,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif								400.000.000	400.000.000	400.000.000		1.200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	40,00	40,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								11.701.069.627	11.867.692.115	12.090.935.383		35.659.697.125	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								10.676.069.627	10.792.692.115	11.065.935.383		32.534.697.125	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								10.218.858.281	10.282.692.115	10.535.935.383		31.037.485.779	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	A	BB	BB	BB				BB		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02	Program : Pembinaan Perpustakaan								407.211.346	460.000.000	480.000.000		1.347.211.346	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	63,90	63,90	70,00	80,00	85,00				85,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00				70,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah	Persen	84,60	2,17	10,00	10,00	10,00				10,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	1,07	0,10	1,07	1,07	1,07				1,07		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Laju pengunjung perpustakaan	Persen	39,25	409,13	50,00	50,00	50,00				50,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	12.381,00	63.035,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				75.000,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina	Persen	0,76	0,78	0,80	0,80	0,80				0,80		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	0,76	0,78	0,16	0,16	0,16				0,16		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Laju Anggota Perpustakaan	Persen	0,15	51,52	51,52	51,52	51,52				51,52		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	0,32	0,11	0,09	0,08	0,08				0,08		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03	Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno								50.000.000	50.000.000	50.000.000		150.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Persen	40,00	42,86	50,00	53,00	61,00				61,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								1.025.000.000	1.075.000.000	1.025.000.000		3.125.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02	Program : Pengelolaan Arsip								850.000.000	900.000.000	850.000.000		2.600.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	28,57	0,00	39,10	39,10	39,10				39,10		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00				27,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Penyusutan Arsip	Persen	9,50	0,00	20,00	20,00	20,00				20,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Arsip Aktif	Persen	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00				20,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Arsip Inaktif	Persen	5,28	0,00	20,00	20,00	20,00				20,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Arsip Vital	Persen	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00				20,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	73,00	0,00	75,00	75,00	75,00				75,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan	Persen	2,67	0,00	4,70	4,70	4,70				4,70		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip								175.000.000	175.000.000	175.000.000		525.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	33,04	6,30	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	19,99	0,00	19,99	19,99	19,99				19,99		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	1,75	13,00	1,75	1,75	1,75				1,75		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN								16.431.289.263	16.665.269.779	16.978.760.325		50.075.319.367	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								15.159.550.263	15.366.484.779	15.640.984.325		46.167.019.367	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								11.195.629.263	11.421.559.779	11.644.323.325		34.261.512.367	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB				BB		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.03	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap								596.986.000	605.487.000	616.877.000		1.819.350.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.371,25	1.474,09	1.635,30	1.692,54	1.751,77				1.751,77		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produksi perikanan	Persen	10,50	10,50	5,25	5,25	5,25				5,25		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Konsumsi ikan	Persen	20,00	32,00	30,00	35,00	35,00				35,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	11,76	16,98	18,97	19,67	20,31				20,31		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	0,17	9,16	3,32	3,40	3,48				3,48		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	68,56	74,25	76,85	79,54	82,33				82,33		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produksi Perikanan Tangkap	Persen	7,50	7,50	3,50	3,50	3,50				3,50		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya								2.925.452.000	2.891.669.000	2.923.591.000		8.740.712.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	108.037,89	14.735,00	16.351,74	17.496,36	18.721,11				18.721,11		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	15.646,00	16.205,00	17.987,00	19.189,00	20.473,00				20.473,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	554.013.000,00	1.067.364.864,00	1.078.038.512,00	1.088.818.897,00	1.100.000.000,00				1.100.000.000,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	6.630.833,00	6.740.000,00	8.100.000,00	9.150.000,00	10.200.000,00				10.200.000,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produksi Ikan Hias	Ton	239.090,00	194.918,00	608.990,00	627.259,00	646.076,00				646.076,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produksi Perikanan budidaya	Ton	39,58	0,00	36,00	37,00	38,00				38,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.05	Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan								41.632.000	42.226.000	43.020.000		126.878.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		Dinas Perikanan dan Peternakan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Perikanan Budidaya yang diawasi												
		Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.06	Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan								399.851.000	405.543.000	413.173.000		1.218.567.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	0,00	300,00	400,00	500,00	550,00				550,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00				16,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	112,00	121,00	130,00	140,00	150,00				150,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								1.271.739.000	1.298.785.000	1.337.776.000		3.908.300.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.02	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian								519.701.000	527.101.000	537.014.000		1.583.816.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50				1,50		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Cakupan Akseptor IB	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00				85,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Persentase bibit ternak bersertifikat	Persen	3,00	5,00	10,00	13,00	15,00				15,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Persen	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00				3,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.03	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian								62.448.000	63.337.000	64.528.000		190.313.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Persentase RPH sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.04	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								552.488.000	564.289.000	576.396.000		1.693.173.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00				70,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Lokasi	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00				17,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	57.983,00	39.574,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Persen	-	-	79,00	84,00	87,50				87,50		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	633,00	696,00	828,00	908,00	992,00				992,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	13,00	14,30	16,20	18,00	19,80				19,80		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Liter	32,00	35,20	38,80	41,00	42,70				42,70		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27.07	Program : Penyuluhan Pertanian								137.102.000	144.058.000	159.838.000		440.998.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	Persen	15,00	13,00	16,00	12,00	12,00				12,00		Dinas Perikanan dan Peternakan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.5.06.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH								83.152.282.031	84.336.365.247	85.922.817.404		253.411.464.682	Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								82.552.282.031	83.676.365.247	85.172.817.404		251.401.464.682	Sekretariat Daerah
4.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum								63.243.130.002	63.389.097.528	63.427.981.770		190.060.209.300	Sekretariat Daerah
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	A	A	A	A				A		Sekretariat Daerah
		Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
		Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
4.01.02	Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat								13.870.000.000	14.240.000.000	14.610.000.000		42.720.000.000	Sekretariat Daerah
		Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten	Persen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
		Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online	Persen	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
		Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif	Persen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00				15,00		Sekretariat Daerah
4.01.03	Program : Perekonomian Dan Pembangunan								5.439.152.029	6.047.267.719	7.134.835.634		18.621.255.382	Sekretariat Daerah
		Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
		Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
		Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00				8,00		Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	44,00	50,00	55,00	55,00	55,00				55,00		Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN								600.000.000	660.000.000	750.000.000		2.010.000.000	Sekretariat Daerah
5.06.02	Program : Pengelolaan Perbatasan								600.000.000	660.000.000	750.000.000		2.010.000.000	Sekretariat Daerah
		Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD								71.700.171.332	72.721.177.219	74.089.135.965		218.510.484.516	Sekretariat DPRD
4.02	SEKRETARIAT DPRD								71.700.171.332	72.721.177.219	74.089.135.965		218.510.484.516	Sekretariat DPRD
4.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota								46.876.175.032	47.335.987.309	47.769.737.665		141.981.900.006	Sekretariat DPRD
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	D	B	B	B	B				B		Sekretariat DPRD
		Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat DPRD
4.02.02	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD								24.823.996.300	25.385.189.910	26.319.398.300		76.528.584.510	Sekretariat DPRD
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Sekretariat DPRD
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Sekretariat DPRD
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Sekretariat DPRD
		Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat DPRD
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Sekretariat DPRD

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							13.692.741.053	13.887.724.816	14.148.966.937		41.729.432.806	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01	PERENCANAAN							12.542.741.053	12.737.724.816	12.873.966.937		38.154.432.806	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							10.617.741.053	10.687.724.816	10.723.966.937		32.029.432.806	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA				AA		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah							1.175.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000		3.675.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Capaian Kinerja RKPd	Persen	88,64	88,75	89,00	89,25	89,50				89,50		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5.01.03	Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										750.000.000	850.000.000	850.000.000		2.450.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										1.150.000.000	1.150.000.000	1.275.000.000		3.575.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah										1.150.000.000	1.150.000.000	1.275.000.000		3.575.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	3,00	2,00	10,00	15,00	15,00				15,00			Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	10,87	25,53	42,55	53,19	53,19				53,19			Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								426.466.644.072	432.539.502.002	440.676.006.627		1.299.682.152.701	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02	KEUANGAN								426.466.644.072	432.539.502.002	440.676.006.627		1.299.682.152.701	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								58.106.644.072	55.723.000.000	55.723.000.000		169.552.644.072	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah								366.210.000.000	374.666.502.002	382.803.006.627		1.123.679.508.629	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	15,65	0,00	15,00	15,00	15,00				15,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	81,83	0,00	85,00	87,00	89,00				89,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				WTP		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	75,24	0,00	75,54	75,84	76,14				76,14		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,18	0,00	2,13	2,08	2,03				2,03		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	2,16	2,68	1,74	1,69	1,58				1,58		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	30,85	0,00	32,00	34,00	35,00				35,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	19,05	0,00	21,00	23,00	25,00				25,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	1,25	14,84	1,80	1,78	1,74				1,74		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Skor	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				6		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Skor	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	7,76	7,76	8,00	8,00	8,00				8		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyerapan Anggaran	Skor	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Kondisi Keuangan Daerah	Skor	3,06	3,06	4,00	4,00	4,00				4		Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.03	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah								2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000		6.450.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar aset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan 4. Tersedianya nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya				Ya		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	21,79	23,66	25,00	27,00	30,00				30,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	50,00	55,00	70,00	85,00	100,00				100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase pengolah BMD yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)				3 (Baik)		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)				3 (Baik)		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)				3 (Baik)		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Administrasi BMD yang Andal	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)				3 (Baik)		Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH								32.862.578.527	33.330.539.558	33.957.520.650		100.150.638.735	Badan Pendapatan Daerah
5.02	KEUANGAN								32.862.578.527	33.330.539.558	33.957.520.650		100.150.638.735	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								28.912.578.527	29.330.539.558	29.407.520.650		87.650.638.735	Badan Pendapatan Daerah
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah								3.950.000.000	4.000.000.000	4.550.000.000		12.500.000.000	Badan Pendapatan Daerah
		Rasio PAD	Persen	0,73	0,78	0,83	0,88	0,93				0,93		Badan Pendapatan Daerah
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	11,95	12,30	12,65	13,00	13,35				13,35		Badan Pendapatan Daerah
		Rasio Pajak daerah	Persen	48,84	49,34	49,84	50,34	50,84				50,84		Badan Pendapatan Daerah
		Rasio retribusi daerah	Persen	3,92	4,23	4,53	4,84	5,14				5,14		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase capaian PAD	Persen	88,05	88,50	88,95	89,40	89,85				89,85		Badan Pendapatan Daerah
		Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah	Persen	8,80	9,00	9,50	10,00	10,50				10,50		Badan Pendapatan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								39.833.428.518	40.400.654.010	41.160.631.091		121.394.713.619	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03	KEPEGAWAIAN								38.408.428.518	38.930.654.010	39.435.631.091		116.774.713.619	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								32.358.428.518	32.855.654.010	33.360.631.091		98.574.713.619	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	Program : Kepegawaian Daerah								6.050.000.000	6.075.000.000	6.075.000.000		18.200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	78,59	80,16	80,88	81,74	82,67				82,67		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	8,40	16,66	16,99	17,33	17,67				17,67		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	29,76	39,68	49,80	54,86	59,92				59,92		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00				34,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00				172,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	249,00	494,00	504,00	514,00	524,00				524,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persen	0,41	0,26	0,29	0,26	0,21				0,21		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pemberhentian ASN	Persen	6,04	7,02	5,73	5,94	6,16				6,16		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	Persen	1,76	2,59	2,15	2,03	1,93				1,93		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1.425.000.000	1.470.000.000	1.725.000.000		4.620.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia								1.425.000.000	1.470.000.000	1.725.000.000		4.620.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20,00	20,00	25,00	30,00	30,00				30,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,86	0,93	1,00	1,07	1,15				1,15		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	37,25	47,34	51,01	56,51	63,85				63,85		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	Persen	2,61	5,49	2,86	2,86	2,86				2,86		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT								30.124.030.316	30.552.994.595	31.127.727.263		91.804.752.174	Inspektorat
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								30.124.030.316	30.552.994.595	31.127.727.263		91.804.752.174	Inspektorat
6.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								25.699.030.316	26.039.994.595	26.525.727.263		78.264.752.174	Inspektorat
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		Inspektorat
6.01.02	Program : Penyelenggaraan Pengawasan								3.280.000.000	3.378.000.000	3.477.000.000		10.135.000.000	Inspektorat
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00				3,00		Inspektorat
		Persentase tindak lanjut temuan	Persen	70,09	84,79	80,00	80,00	80,00				80,00		Inspektorat
		Jumlah temuan BPK	Laporan	16,00	15,00	10,00	9,00	8,00				8,00		Inspektorat
		Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Inspektorat
6.01.03	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi								1.145.000.000	1.135.000.000	1.125.000.000		3.405.000.000	Inspektorat
		Capaian MCP KPK	Persen	74,00	100,00	81,00	82,00	83,00				83,00		Inspektorat
		Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	Perangkat Daerah	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00				2,00		Inspektorat

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN JATILUHUR													Kecamatan Jatiluhur
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Jatiluhur
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Jatiluhur
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	CC	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Jatiluhur
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Jatiluhur
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Jatiluhur
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Jatiluhur
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Jatiluhur
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Jatiluhur
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Jatiluhur
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Jatiluhur
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Jatiluhur
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Jatiluhur
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	51,00	51,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Jatiluhur

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SUKASARI													Kecamatan Sukasari
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Sukasari
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Sukasari
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	B	B				B		Kecamatan Sukasari
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Sukasari
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Sukasari
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Sukasari
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukasari
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Sukasari
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukasari
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Sukasari
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukasari
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Sukasari
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukasari

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN MANIIS													Kecamatan Maniis
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Maniis
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Maniis
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	B	B				B		Kecamatan Maniis
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Maniis
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Maniis
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Maniis
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Maniis
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Maniis
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Maniis
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Maniis
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Maniis
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Maniis
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Maniis

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN TEGALWARU													Kecamatan Tegalwaru
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Tegalwaru
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Tegalwaru
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Tegalwaru
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Tegalwaru
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Tegalwaru
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Tegalwaru
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Tegalwaru
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Tegalwaru
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Tegalwaru
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Tegalwaru
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Tegalwaru
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Tegalwaru
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Tegalwaru

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PLERED													Kecamatan Plered
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Plered
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Plered
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	CC	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Plered
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Plered
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Plered
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Plered
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Plered
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Plered
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Plered
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Plered
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Plered
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Plered
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Plered

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN SUKATANI													Kecamatan Sukatani
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Sukatani
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Sukatani
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	A	A	A				A		Kecamatan Sukatani
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Sukatani
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Sukatani
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Sukatani
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukatani
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Sukatani
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukatani
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Sukatani
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukatani
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Sukatani
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Sukatani

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN DARANGDAN											3.734.383.923	3.787.561.313	3.858.809.164	11.380.754.400	Kecamatan Darangdan
7.01	KECAMATAN											3.734.383.923	3.787.561.313	3.858.809.164	11.380.754.400	Kecamatan Darangdan
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											3.523.383.923	3.581.561.313	3.629.809.164	10.734.754.400	Kecamatan Darangdan
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Darangdan		
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik											20.000.000	24.000.000	25.000.000	69.000.000	Kecamatan Darangdan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Darangdan		
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan											20.000.000	22.000.000	22.000.000	64.000.000	Kecamatan Darangdan
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Darangdan		
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum											10.000.000	5.000.000	10.000.000	25.000.000	Kecamatan Darangdan
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Darangdan		
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											120.000.000	122.000.000	122.000.000	364.000.000	Kecamatan Darangdan
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Darangdan		
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa											41.000.000	33.000.000	50.000.000	124.000.000	Kecamatan Darangdan
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Darangdan		

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN BOJONG													Kecamatan Bojong
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Bojong
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Bojong
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Bojong
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Bojong
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Bojong
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Bojong
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bojong
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Bojong
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bojong
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Bojong
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bojong
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Bojong
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bojong

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN WANAYASA													Kecamatan Wanayasa
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Wanayasa
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Wanayasa
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Wanayasa
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Wanayasa
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Wanayasa
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Wanayasa
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Wanayasa
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Wanayasa
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Wanayasa
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Wanayasa
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Wanayasa
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Wanayasa
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Wanayasa

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KIARAPEDES													Kecamatan Kiarapedes
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Kiarapedes
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Kiarapedes
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	CC	B	B	B				B		Kecamatan Kiarapedes
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Kiarapedes
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Kiarapedes
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Kiarapedes
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Kiarapedes
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Kiarapedes
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Kiarapedes
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Kiarapedes
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Kiarapedes
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Kiarapedes
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Kiarapedes

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN PASAWAHAN													Kecamatan Pasawahan
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Pasawahan
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Pasawahan
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Pasawahan
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Pasawahan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Pasawahan
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Pasawahan
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pasawahan
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Pasawahan
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pasawahan
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Pasawahan
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pasawahan
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Pasawahan
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pasawahan

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN PONDOKSALAM													Kecamatan Pondoksalam
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Pondoksalam
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Pondoksalam
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	A	A				A		Kecamatan Pondoksalam
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Pondoksalam
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Pondoksalam
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Pondoksalam
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pondoksalam
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Pondoksalam
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pondoksalam
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Pondoksalam
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pondoksalam
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Pondoksalam
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Pondoksalam

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN PURWAKARTA													Kecamatan Purwakarta
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Purwakarta
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Purwakarta
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Purwakarta
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Purwakarta
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Purwakarta
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Purwakarta
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Purwakarta
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Purwakarta
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Purwakarta
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Purwakarta
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Purwakarta
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Purwakarta
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Purwakarta

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BABAKAN CIKAO													Kecamatan Babakan Cikao
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Babakan Cikao
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Babakan Cikao
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Babakan Cikao
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Babakan Cikao
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Babakan Cikao
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Babakan Cikao
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Babakan Cikao
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Babakan Cikao
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Babakan Cikao
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Babakan Cikao
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Babakan Cikao
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Babakan Cikao
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Babakan Cikao

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN CAMPAKA													Kecamatan Campaka
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Campaka
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Campaka
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	BB	BB				BB		Kecamatan Campaka
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Campaka
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Campaka
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Campaka
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Campaka
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Campaka
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Campaka
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Campaka
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Campaka
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Campaka
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Campaka

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN CIBATU								3.983.342.851	4.040.065.429	4.116.063.109		12.139.471.389	Kecamatan Cibatu
7.01	KECAMATAN								3.983.342.851	4.040.065.429	4.116.063.109		12.139.471.389	Kecamatan Cibatu
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								3.783.342.851	3.845.065.429	3.971.063.109		11.599.471.389	Kecamatan Cibatu
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	A	A				A		Kecamatan Cibatu
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								45.000.000	45.000.000	30.000.000		120.000.000	Kecamatan Cibatu
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Cibatu
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								30.000.000	25.000.000	20.000.000		75.000.000	Kecamatan Cibatu
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Cibatu
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								30.000.000	30.000.000	15.000.000		75.000.000	Kecamatan Cibatu
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Cibatu
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								50.000.000	50.000.000	45.000.000		145.000.000	Kecamatan Cibatu
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Cibatu
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								45.000.000	45.000.000	35.000.000		125.000.000	Kecamatan Cibatu
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Cibatu

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN BUNGURSARI													Kecamatan Bungursari
7.01	KECAMATAN													Kecamatan Bungursari
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Kecamatan Bungursari
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB				BB		Kecamatan Bungursari
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													Kecamatan Bungursari
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		Kecamatan Bungursari
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													Kecamatan Bungursari
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bungursari
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													Kecamatan Bungursari
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bungursari
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													Kecamatan Bungursari
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bungursari
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													Kecamatan Bungursari
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	51,00	51,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Kecamatan Bungursari

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.0.00.0.00.02.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								10.509.398.223	10.647.659.415	10.832.903.828		31.989.961.466	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								10.509.398.223	10.647.659.415	10.832.903.828		31.989.961.466	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								4.088.634.734	4.192.328.341	4.317.681.309		12.598.644.384	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A				A		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan								1.150.000.000	1.151.000.000	1.154.000.000		3.455.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								3.170.763.489	3.189.831.074	3.235.222.519		9.595.817.082	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								250.000.000	252.000.000	254.000.000		756.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya								500.000.000	505.500.000	510.000.000		1.515.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial								1.350.000.000	1.357.000.000	1.362.000.000		4.069.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH	47	63	281	715	715	715	715	715	391	391	391	715	391	1.106
UNIQUE	47	41	150	584	38	290	251	232	235	235	270	281	284	235

Sumber : Perangkat Daerah terkait, 2023

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C).

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah,

yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perumusan indikator kinerja utama Kepala Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Kepala Daerah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Kepala Daerah dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan mempertimbangkan pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya daerah.

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 yang terdiri dari berbagai indikator disajikan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Pelayanan Umum; dan (3) Aspek Daya Saing Daerah.

Indikator kinerja kunci pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator pada tingkat dampak atau *impact*. Indikator tingkat *impact* ini merupakan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan

indikator kinerja pada Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja daerah tingkat hasil (*outcome*).

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

A. IKU PEMKAB PURWAKARTA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indek Pembangunan Manusia	Poin	70,98	71,56	72,99	73,55	74,11	74,11	IKU PEMKAB PURWAKARTA
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,10	8,11	9,23	9,75	10,24	10,24	IKU PEMKAB PURWAKARTA
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,12	12,13	13,85	14,63	15,38	15,38	IKU PEMKAB PURWAKARTA
4	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	60,00	80,00	100,00	100,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
5	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	10,70	8,75	7,00	6,30	5,68	5,68	IKU PEMKAB PURWAKARTA
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,13	65,21	82,22	89,58	96,43	96,43	IKU PEMKAB PURWAKARTA
7	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	IKU PEMKAB PURWAKARTA
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,18	71,47	72,01	72,32	72,64	72,64	IKU PEMKAB PURWAKARTA
9	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,82	1,69	1,50	1,49	1,48	1,48	IKU PEMKAB PURWAKARTA
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	61,07	64,28	67,49	69,09	70,69	70,69	IKU PEMKAB PURWAKARTA
11	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,66	0,44	0,48	0,55	0,66	0,66	IKU PEMKAB PURWAKARTA
12	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	IKU PEMKAB PURWAKARTA
13	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	5,24	5,80	6,10	6,39	6,39	IKU PEMKAB PURWAKARTA
14	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,05	90,05	IKU PEMKAB PURWAKARTA
15	Pertumbuhan UMKM	Persen	1,00	0,00	11,86	13,16	14,69	14,69	IKU PEMKAB PURWAKARTA
16	Inflasi	Persen	1,81	4,86	1,34	1,25	1,16	1,16	IKU PEMKAB PURWAKARTA
17	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	69,98	74,35	82,77	86,73	90,54	90,54	IKU PEMKAB PURWAKARTA
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	48,83	51,24	56,08	58,49	60,91	60,91	IKU PEMKAB PURWAKARTA
19	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	74,50	82,83	93,32	99,89	106,66	106,66	IKU PEMKAB PURWAKARTA
20	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	IKU PEMKAB PURWAKARTA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,00	0,00	9,23	9,82	10,41	10,41	IKU PEMKAB PURWAKARTA
22	Nilai Tukar Petani	Poin	97,84	99,13	101,71	103,00	104,29	104,29	IKU PEMKAB PURWAKARTA
23	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	78,30	91,40	95,70	97,80	100,00	100,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
24	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,57	6,57	6,39	6,34	6,29	6,29	IKU PEMKAB PURWAKARTA
25	Angka Kemiskinan	Persen	8,83	8,70	7,25	6,83	6,44	6,44	IKU PEMKAB PURWAKARTA
26	Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,388	0,367	0,306	0,280	0,255	0,255	IKU PEMKAB PURWAKARTA
27	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	11,67	12,19	12,64	12,91	13,18	13,18	IKU PEMKAB PURWAKARTA
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,70	86,93	87,38	87,60	87,83	87,83	IKU PEMKAB PURWAKARTA
29	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	74,39	77,89	79,92	80,93	81,94	81,94	IKU PEMKAB PURWAKARTA
30	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,25	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
31	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	79,76	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
32	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
33	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	88,35	89,00	89,00	90,00	91,00	91,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
34	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,56	0,00	37,60	37,60	37,60	37,60	IKU PEMKAB PURWAKARTA
35	Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	65,64	67,64	69,64	71,64	73,64	73,64	IKU PEMKAB PURWAKARTA
36	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU PEMKAB PURWAKARTA
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,41	64,41	67,41	70,41	73,41	73,41	IKU PEMKAB PURWAKARTA
38	Indeks SPBE	Poin	2,37	-	2,60	2,80	3,00	3,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
39	Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	IKU PEMKAB PURWAKARTA
40	Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU PEMKAB PURWAKARTA
41	Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	IKU PEMKAB PURWAKARTA
42	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PEMKAB PURWAKARTA
43	Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,1950	0,2120	0,2280	0,2370	0,2450	0,25	IKU PEMKAB PURWAKARTA
44	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	77,52	79,16	82,45	84,09	85,74	85,74	IKU PEMKAB PURWAKARTA
45	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,636	3,000	3,000	3,000	3,000	3,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
46	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,38	50,50	50,62	50,68	50,74	50,74	IKU PEMKAB PURWAKARTA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU PEMKAB PURWAKARTA
48	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	72,70	74,45	77,95	79,70	81,45	81,45	IKU PEMKAB PURWAKARTA
	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Makro Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indek Pembangunan Manusia	Poin	70,98	71,56	72,99	73,55	74,11	74,11	IKU PEMKAB PURWAKARTA
2	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	10,70	8,75	7,00	6,30	5,68	5,68	IKU PEMKAB PURWAKARTA
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	5,24	5,80	6,10	6,39	6,39	IKU PEMKAB PURWAKARTA
4	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	69,98	74,35	82,77	86,73	90,54	90,54	IKU PEMKAB PURWAKARTA
5	Angka Kemiskinan	Persen	8,83	8,70	7,25	6,83	6,44	6,44	IKU PEMKAB PURWAKARTA
6	Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,388	0,367	0,306	0,280	0,255	0,255	IKU PEMKAB PURWAKARTA
	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Sumber : Analisa Tim, 2023

B. IKU PERANGKAT DAERAH KAB. PURWAKARTA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Pendidikan									
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,10	8,11	8,12	8,13	8,14	8,14	IKU Dinas Pendidikan
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,12	12,13	12,14	12,15	12,16	12,16	IKU Dinas Pendidikan
3	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKU Dinas Pendidikan
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan									
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,18	71,29	71,51	71,62	71,73	71,73	IKU Dinas Kesehatan
6	Cakupan Pelayanan SPM Kesehatan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IKU Dinas Kesehatan
7	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKU Dinas Kesehatan
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Bayu Asih									
9	Persentase ketercapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
10	Pencapaian Standar Akreditasi	Opini	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
11	Presentase pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan	Persen	75,00	80,00	87,00	88,00	88,00	88,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
12	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persen	90,00	90,00	92,00	92,00	93,00	93,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
13	Dokumen Kinerja Rumah Sakit	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
14	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	80,00	82,00	83,00	83,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Persentase Pemenuhan Kebutuhan operasional Penunjang Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	75,00	78,00	80,00	80,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
16	Persentasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persen	80,00	85,00	87,00	87,00	88,00	88,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
17	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
19	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Km	83,25	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,56	0,00	37,60	37,60	37,60	37,60	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	BB	BB	BB	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
24	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	79,76	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	88,35	89,00	89,00	90,00	91,00	91,00	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Satuan Polisi Pamong Praja									
28	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
30	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
31	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,66	0,44	0,48	0,55	0,66	0,66	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan									
34	Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
35	Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
36	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
37	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
38	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Angka Kemiskinan	Persen	8,83	8,38	8,18	8,08	7,99	7,99	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
40	Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
41	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rp.	11,67	11,78	12,11	12,28	12,44	12,44	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,70	86,93	87,38	87,60	87,83	87,83	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
43	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	74,39	77,89	79,92	80,93	81,94	81,94	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
44	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
45	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi									
46	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	0,00	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
47	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,00	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
48	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
49	Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
50	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
51	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Pangan dan Pertanian									
52	Persentase kecukupan bahan pangan	Persen	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
53	Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
54	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
55	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Lingkungan Hidup									
56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	61,07	64,28	67,49	69,09	70,69	70,69	IKU Dinas Lingkungan Hidup
57	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	60 %	74 %	75 %	75 %	75 %	75 %	IKU Dinas Lingkungan Hidup
58	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Lingkungan Hidup
59	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Dinas Lingkungan Hidup
60	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
61	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
63	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
64	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	Persen	24,14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
66	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
67	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
68	Indeks Desa Membangun	Poin/ Status	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
69	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,82	1,38	1,38	1,37	1,36	1,36	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
70	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
71	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan									
72	Tersedianya sarana prasarana layanan publik Perhubungan	Persen	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	IKU Dinas Perhubungan
73	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	Pon	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	IKU Dinas Perhubungan
74	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Dinas Perhubungan
75	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informatika									
76	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
78	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,37	-	2,60	2,80	3,00	3,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
79	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	-	84,00	97,00	98,00	99,00	99,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
80	Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
81	Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian									
82	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	5,24	4,88	5,31	5,72	5,72	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
83	Persentase Koperasi Aktif	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,05	90,05	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
84	Pertumbuhan UMKM	Persen	1,00	0,00	11,86	13,16	14,69	14,69	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
85	Inflasi	Persen	1,81	4,86	1,34	1,25	1,16	1,16	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
86	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Rp.	0,00	0,00	46.782.449.072,00	47.737.192.933,00	48.711.421.360,00	48.711.421.360,00	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
88	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
89	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. (Triliun)	4,73	5,88	6,73	7,20	7,70	7,70	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
90	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
91	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan									
92	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	60,00	80,00	100,00	100,00	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
93	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,057	0,058	0,061	0,063	0,066	0,066	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
94	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
95	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,00	0,00	9,23	9,82	10,41	10,41	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
96	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
97	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									
98	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	63,90	63,90	70,00	80,00	85,00	85,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
99	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
100	Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah	Persen	84,60	2,17	10,00	10,00	10,00	10,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
101	Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	1,07	0,10	1,07	1,07	1,07	1,07	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
102	Laju pengunjung perpustakaan	Persen	39,25	409,13	50,00	50,00	50,00	50,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
103	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	12.381,00	63.035,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
104	Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina	Persen	0,76	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
105	Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	0,76	0,78	0,16	0,16	0,16	0,16	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
106	Laju Anggota Perpustakaan	Persen	0,15	51,52	51,52	51,52	51,52	51,52	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
107	Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	0,32	0,11	0,09	0,08	0,08	0,08	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
108	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	A	BB	BB	BB	BB	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
109	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
110	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	Poin	30,80	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan								
111	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Poin	20,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
112	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	47,00	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
113	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	47,00	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
114	Persentase arsip dinamis	Persen	30,80	58,00	20,20	85,20	100,00	100,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
115	Persentase arsip statis	Persen	47,00	16,00	10,00	10,00	11,00	11,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Dinas Perikanan dan Peternakan									
116	Persentase peningkatan usaha perikanan	Persen	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
117	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	Persen	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
118	Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
119	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
120	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
121	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Daerah									
122	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A	A	A	A	IKU Sekretariat Daerah
123	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
124	Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	IKU Sekretariat Daerah
125	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	2,64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKU Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD									
126	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	D	B	B	B	B	B	IKU Sekretariat DPRD
127	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
128	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA	AA	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
129	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
130	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Persen	90,45	91,51	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
131	Indeks Inovasi Daerah	Skor/ Kategori	50,38	50,50	50,62	50,68	50,74	50,74	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah									
132	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
133	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
135	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan Daerah									
136	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKU Badan Pendapatan Daerah
137	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Badan Pendapatan Daerah
138	Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,195	0,212	0,228	0,237	0,245	0,245	IKU Badan Pendapatan Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
139	Tingkat Profesionalitas ASN	Katagori	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
140	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	0,00	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
141	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	0,00	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
142	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	0,00	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Inspektorat									
143	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKU Inspektorat
144	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Inspektorat
145	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat Daerah	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	IKU Inspektorat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKU Inspektorat
147	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Inspektorat
148	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	70,09	84,79	80,00	80,00	80,00	80,00	IKU Inspektorat
149	Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	Persen	89,13	0,00	85,00	87,00	90,00	90,00	IKU Inspektorat
Kecamatan Jatiluhur									
150	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	CC	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Jatiluhur
151	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Jatiluhur
152	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	IKU Kecamatan Jatiluhur
Kecamatan Sukasari									
153	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	B	B	B	IKU Kecamatan Sukasari
154	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Sukasari
155	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	IKU Kecamatan Sukasari
Kecamatan Maniis									
156	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	B	B	B	IKU Kecamatan Maniis
157	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Maniis
157	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Maniis
Kecamatan Tegalwaru									
159	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Tegalwaru
160	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Tegalwaru
160	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Tegalwaru

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kecamatan Plered									
162	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	IKU Kecamatan Plered
163	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Plered
164	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Plered
Kecamatan Sukatani									
165	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Sukatani
166	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Sukatani
167	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Sukatani
Kecamatan Darangdan									
168	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Darangdan
169	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Darangdan
170	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Darangdan
Kecamatan Bojong									
171	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Bojong
172	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Bojong
173	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	IKU Kecamatan Bojong
Kecamatan Wanayasa									
174	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Wanayasa
175	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Wanayasa
175	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status Mandiri	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Wanayasa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kecamatan Kiarapedes									
177	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	CC	B	B	B	B	IKU Kecamatan Kiarapedes
178	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Kiarapedes
179	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Kiarapedes
Kecamatan Pasawahan									
180	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Pasawahan
181	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Pasawahan
182	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	IKU Kecamatan Pasawahan
Kecamatan Pondoksalam									
183	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	A	A	A	A	IKU Kecamatan Pondoksalam
184	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Pondoksalam
184	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	IKU Kecamatan Pondoksalam
Kecamatan Purwakarta									
186	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Purwakarta
187	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Purwakarta
188	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	IKU Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Babakan Cikao									
189	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Babakan Cikao
190	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Babakan Cikao
191	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Babakan Cikao

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kecamatan Campaka									
192	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	IKU Kecamatan Campaka
193	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Campaka
193	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Predikat	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Campaka
Kecamatan Cibatu									
195	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	C	B	A	A	A	IKU Kecamatan Cibatu
196	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Cibatu
196	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	IKU Kecamatan Cibatu
Kecamatan Bungursari									
198	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKU Kecamatan Bungursari
199	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Bungursari
200	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	IKU Kecamatan Bungursari
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
201	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
202	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
203	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	72,70	74,45	77,95	79,70	81,45	81,45	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH	47	203	203	203	203	203	203	202	202
UNIQUE	47	96	21	69	63	69	68	67	48

Sumber : Analisa Tim dan Perangkat Daerah terkait, 2023

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indek Pembangunan Manusia	Poin	70,98	71,56	72,99	73,55	74,11	74,11	IKU PEMKAB PURWAKARTA
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,10	8,11	9,23	9,75	10,24	10,24	IKU PEMKAB PURWAKARTA
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,12	12,13	13,85	14,63	15,38	15,38	IKU PEMKAB PURWAKARTA
4	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	10,70	8,75	7,00	6,30	5,68	5,68	IKU PEMKAB PURWAKARTA
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,13	65,21	82,22	89,58	96,43	96,43	IKU PEMKAB PURWAKARTA
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,18	71,47	72,01	72,32	72,64	72,64	IKU PEMKAB PURWAKARTA
7	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,82	1,69	1,50	1,49	1,48	1,48	IKU PEMKAB PURWAKARTA
8	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	5,24	5,80	6,10	6,39	6,39	IKU PEMKAB PURWAKARTA
9	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	69,98	74,35	82,77	86,73	90,54	90,54	IKU PEMKAB PURWAKARTA
10	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	48,83	51,24	56,08	58,49	60,91	60,91	IKU PEMKAB PURWAKARTA
11	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	74,50	82,83	93,32	99,89	106,66	106,66	IKU PEMKAB PURWAKARTA
12	Nilai Tukar Petani	Poin	97,84	99,13	101,71	103,00	104,29	104,29	IKU PEMKAB PURWAKARTA
13	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	78,30	91,40	95,70	97,80	100,00	100,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
14	Angka Kemiskinan	Persen	8,83	8,70	7,25	6,83	6,44	6,44	IKU PEMKAB PURWAKARTA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,388	0,367	0,306	0,280	0,255	0,255	IKU PEMKAB PURWAKARTA
16	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	11,67	12,19	12,64	12,91	13,18	13,18	IKU PEMKAB PURWAKARTA
	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Sumber : Analisa Tim, 2023

B. ASPEK PELAYANAN UMUM

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	72,83	0,00	74,29	75,74	77,20	77,20	IKK Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,30	0,00	99,50	99,70	99,90	99,90	IKK Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	94,13	0,00	94,33	94,53	94,73	94,73	IKK Dinas Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,52	0,00	0,54	0,55	0,56	0,56	IKK Dinas Pendidikan
5	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
6	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,52	0,00	0,50	0,49	0,48	0,48	IKK Dinas Pendidikan
7	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Persen	1,72	0,00	1,75	1,78	1,82	1,82	IKK Dinas Pendidikan
8	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	72,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	72,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
10	Angka partisipasi kasar	Persen	23,40	23,40	24,30	24,80	25,30	25,30	IKK Dinas Pendidikan
11	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
12	Angka Partisipasi Murni	Persen	21,90	21,90	22,80	23,20	23,70	23,70	IKK Dinas Pendidikan
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,60	99,60	99,61	99,62	99,63	99,63	IKK Dinas Pendidikan
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	83,80	83,80	84,00	84,10	84,20	84,20	IKK Dinas Pendidikan
15	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,30	99,30	99,50	99,60	99,70	99,70	IKK Dinas Pendidikan
16	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,13	94,10	94,30	94,40	94,50	94,50	IKK Dinas Pendidikan
17	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,70	0,70	0,50	0,40	0,30	0,30	IKK Dinas Pendidikan
18	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	5,90	5,90	5,70	5,60	5,50	5,50	IKK Dinas Pendidikan
19	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
23	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	21,13	22,61	24,19	24,67	25,15	25,15	IKK Dinas Pendidikan
24	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	39,20	41,95	44,88	47,63	50,38	50,38	IKK Dinas Pendidikan
25	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	41,53	0,00	41,55	41,56	41,57	41,57	IKK Dinas Pendidikan
26	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	menamatkan sekolah dasar								
27	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
28	Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
29	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	58,41	59,51	59,10	59,17	59,24	59,24	IKK Dinas Pendidikan
30	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	97,66	99,58	98,86	98,98	99,10	99,10	IKK Dinas Pendidikan
31	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	5,18	9,58	7,93	8,21	8,48	8,48	IKK Dinas Pendidikan
32	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	48,95	54,69	52,54	52,90	53,26	53,26	IKK Dinas Pendidikan
33	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	37,08	42,99	40,77	41,14	41,51	41,51	IKK Dinas Pendidikan
34	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	59,00	61,92	60,83	61,01	61,19	61,19	IKK Dinas Pendidikan
35	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	52,94	53,57	53,33	53,37	53,41	53,41	IKK Dinas Pendidikan
36	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	44,83	42,90	43,50	43,62	43,87	43,87	IKK Dinas Pendidikan
37	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	63,52	2,59	21,63	25,44	33,05	33,05	IKK Dinas Pendidikan
38	Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	75,34	85,48	81,68	82,31	82,95	82,95	IKK Dinas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	62,83	89,14	79,27	80,92	82,56	82,56	IKK Dinas Pendidikan
40	Indeks Inklusivitas SD	nilai	70,98	78,46	75,66	76,12	76,59	76,59	IKK Dinas Pendidikan
41	Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	77,48	78,96	78,41	78,50	78,59	78,59	IKK Dinas Pendidikan
42	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	62,41	74,48	69,95	70,71	71,46	71,46	IKK Dinas Pendidikan
43	Indeks Inklusivitas SMP	nilai	65,28	73,32	70,31	70,81	71,31	71,31	IKK Dinas Pendidikan
44	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
45	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
46	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	38,67	38,67	38,77	38,87	38,97	38,97	IKK Dinas Pendidikan
47	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	41,60	41,70	41,80	41,90	42,00	42,00	IKK Dinas Pendidikan
48	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	95,88	96,00	96,06	96,12	96,18	96,18	IKK Dinas Pendidikan
49	Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
50	Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
51	Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pendidikan
52	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	0,00	0,00	70,00	80,00	90,00	90,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
53	Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina	Persen	36,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan	Persen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
55	Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
56	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
57	Persentase Kelompok/ Komunitas Seni/Kesenian yang dibina	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
58	Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan	Persen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
59	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
60	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
61	Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
62	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
63	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	0,00	0,00	12,00	16,00	20,00	20,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
64	Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
65	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	63,90	63,90	70,00	80,00	85,00	85,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
66	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
67	Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah	Persen	84,60	2,17	10,00	10,00	10,00	10,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	1,07	0,10	1,07	1,07	1,07	1,07	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
69	Laju pengunjung perpustakaan	Persen	39,25	409,13	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
70	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	12.381,00	63.035,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
71	Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina	Persen	0,76	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
72	Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	0,76	0,78	0,16	0,16	0,16	0,16	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
73	Laju Anggota Perpustakaan	Persen	0,15	51,52	51,52	51,52	51,52	51,52	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
74	Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	0,32	0,11	0,09	0,08	0,08	0,08	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
75	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Persen	40,00	42,86	50,00	53,00	61,00	61,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
76	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	0,00	69,06	69,06	69,06	69,06	69,06	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
77	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
78	Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan	Persen	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
79	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
80	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
82	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	0,00	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
83	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
84	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
85	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	0,00	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
86	Keselamatan dan perlindungan	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
87	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
88	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,0043	0,0049	0,0001	0,0001	0,0002	0,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
89	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	0,9500	0,9600	0,0100	0,0100	0,0100	0,01	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
90	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	0,26	0,39	0,41	0,41	0,41	0,41	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
91	Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,33	0,71	0,74	0,83	0,84	0,84	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
92	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,26	0,39	0,41	0,41	0,41	0,41	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Tingkat prestasi olahraga	Persen	50,00	66,00	70,00	80,00	85,00	85,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
94	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	25,00	49,00	50,00	60,00	75,00	75,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
95	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	15,00	25,00	40,00	50,00	65,00	65,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
96	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
97	Tingkat atlet berprestasi	Persen	30,00	40,00	50,00	52,00	55,00	55,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
98	Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	10,00	15,00	16,00	18,00	20,00	20,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
99	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
100	Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
101	Persentase transmigran swakarsa	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
102	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
103	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
104	Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
105	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20,00	20,00	25,00	30,00	30,00	30,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
106	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,86	0,93	1,00	1,07	1,15	1,15	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Manusia
107	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	37,25	47,34	51,01	56,51	63,85	63,85	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
108	Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	Persen	2,61	5,49	2,86	2,86	2,86	2,86	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
109	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	36,37	36,36	50,00	60,00	65,00	65,00	IKK Dinas Kesehatan
110	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
111	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
112	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
113	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	71,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
114	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	39,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
115	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	81,46	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
116	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	65,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
117	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	59,94	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	93,58	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
119	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	79,31	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
120	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	98,43	92,20	95,00	98,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
121	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	79,40	41,60	80,00	90,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
122	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
123	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	97,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
124	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	98,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
125	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	71,47	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
126	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	39,94	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
127	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	81,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
128	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
129	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang	Persen	60,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mendapatkan pelayanan kesehatan								
130	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	94,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
131	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	79,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
132	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	98,43	92,20	95,00	98,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
133	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	79,40	41,60	80,00	90,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
134	Rasio posyandu per satuan balita	Poin	16,68	16,82	17,34	17,60	17,86	17,86	IKK Dinas Kesehatan
135	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	97,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
136	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
137	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	0,00	77,60	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
138	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
139	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	85,31	81,05	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
140	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	0,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	50,00	37,49	70,00	80,00	90,00	90,00	IKK Dinas Kesehatan
142	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	92,48	82,20	90,00	95,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
143	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	246,95	282,78	245,65	208,52	171,39	171,39	IKK Dinas Kesehatan
144	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	6,07	2,90	2,58	2,26	1,94	1,94	IKK Dinas Kesehatan
145	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	92,48	82,20	90,00	95,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
146	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	93,73	86,53	90,00	90,00	95,00	95,00	IKK Dinas Kesehatan
147	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
148	Penderita diare yang ditangani	Persen	7626,00%	56,58	85,00	90,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
149	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Rasio	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
150	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	79,40	41,60	80,00	90,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
151	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
152	Cakupan puskesmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
153	Cakupan pelayanan nifas	Persen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
154	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	75,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
155	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	61,91	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
156	Cakupan pelayanan gawat darurat level	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)								
157	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
158	Tingkat Pengendalian Infeksi di RS	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
159	Capaian Indikator Medik	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
160	Prosedur Penanganan Sampel Uji	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
161	Pengendalian Mutu	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
162	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
163	Ketepatan Waktu Pelayanan	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
164	Temuan Yang di Tindaklanjuti (Temuan ketidakterersediaan Media dan Reagensia dan Temuan Hasil Telusur)	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
165	Tingkat Kehandalan Sumber Daya	Persen	-	-	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
166	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	50,00	85,00	30,00	30,00	40,00	40,00	IKK Dinas Kesehatan
167	Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Persen	68,00	75,46	30,00	30,00	40,00	40,00	IKK Dinas Kesehatan
168	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	68,20	73,50	30,00	30,00	40,00	40,00	IKK Dinas Kesehatan
169	Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	68,20	73,50	30,00	30,00	40,00	40,00	IKK Dinas Kesehatan
170	Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	0,06	0,07	30,00	30,00	40,00	40,00	IKK Dinas Kesehatan
171	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	0,08	0,10	30,00	30,00	40,00	40,00	IKK Dinas Kesehatan
172	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	0,00	0,00	75,00	78,00	80,00	80,00	IKK RSUD Bayu Asih

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	0,00	0,00	75,00	78,00	80,00	80,00	IKK RSUD Bayu Asih
174	Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
175	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	70,75	79,67	80,00	82,00	85,00	85,00	IKK Dinas Kesehatan
176	Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	10,00	IKK Dinas Kesehatan
177	Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Persen	83,40	77,20	89,00	96,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kesehatan
178	Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	NU1	NU1	75,00	75,00	75,00	75,00	IKK RSUD Bayu Asih
179	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,70	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
180	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
181	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	37.890,00	37.890,00	36,00	36,00	36,00	36,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
182	Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	29,89	29,89	30,00	30,00	31,11	31,11	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
183	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	12.263,00	81,27	99,00	99,00	99,00	99,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
184	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	33,52	34,05	35,22	36,30	38,40	38,40	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
186	Ratio Akseptor KB	Persen	26.717,00	25.521,00	25.521,00	25.521,00	25.521,00	25.521,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
187	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	81,27	82,27	83,28	83,28	83,28	83,28	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
188	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	Poin	25,71	25,71	25,71	25,71	25,71	25,71	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
189	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	533,83	533,83	534,83	534,83	534,83	534,83	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
190	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	35,54	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
191	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	17,72	17,73	17,78	17,78	17,78	17,78	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
192	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	681.167,00	681.167,00	691.167,00	691.167,00	691.167,00	691.167,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
193	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	151.153,00	151.153,00	161.153,00	161.153,00	161.153,00	161.153,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
194	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	623.471,00	623.471,00	624.471,00	624.471,00	624.471,00	624.471,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
195	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	23,53	23,53	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
196	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	51,71	51,71	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
197	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB	Persen	98,00	115,00	126,00	126,00	126,00	126,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk								
198	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	22,80	22,80	23,90	23,90	23,90	23,90	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
199	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	21,57	21,57	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
200	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	149.900,00	274.920,00	272.476,00	325.980,00	391.178,00	391.178,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
201	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	105,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
202	Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persen	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
203	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
204	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
205	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
206	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan	Persen	53,71	53,71	53,71	53,71	53,71	53,71	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak								
207	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
208	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
209	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
210	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
211	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	80,00	80,00	70,00	80,00	90,00	90,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
212	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Skor/ Kategori	63,33 / Sedang	50 / Sedang	60 / Sedang	65 / Sedang	70 / Baik	70 / Baik	IKK Dinas Lingkungan Hidup
213	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Skor/ Kategori	73,47 / Baik	68,74 / Sedang	70 / Baik	75 / Baik	80 / Baik	80 / Baik	IKK Dinas Lingkungan Hidup
214	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor/ Kategori	35,46	36,45	37,18	37,55	37,93	37,93	IKK Dinas Lingkungan Hidup
215	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
216	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Kg	18.922.101.00 0,00	16.591.264.00 0,00	15.000.000.00 0,00	13.000.000.00 0,00	11.000.000.00 0,00	11.000.000.00 00,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
217	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
218	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan,	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota								
219	Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
220	Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
221	Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
222	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
223	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
224	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
225	Penetapan hak MHA	MHA	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
226	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
227	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
228	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	60,00	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
229	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	30,00	31,00	31,00	32,00	32,00	32,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	73,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
231	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Skor	71,00	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
232	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
233	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
234	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
235	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
236	Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
237	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
238	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
239	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
240	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	95,76	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
241	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
242	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	-	89,56	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
244	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	95,76	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
245	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
246	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Layanan	543,00	808,00	800,00	750,00	700,00	700,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
247	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
248	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
249	Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	Persen	0,00	0,00	87,50	90,00	91,67	91,67	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,05	90,05	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
251	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,25	90,25	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
252	Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	Persen	10,00	10,00	12,00	15,00	18,00	18,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
253	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	Persen	69,90	71,66	72,82	73,71	74,60	74,60	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
254	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	47,85	0,00	85,23	92,24	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
255	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	Persen	55,06	0,00	56,46	56,93	57,39	57,39	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
256	Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	Persen	53,00	0,00	75,23	86,45	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
257	Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	Persen	1,00	0,00	2,53	2,78	3,85	3,85	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
258	Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	Persen	52,20	0,00	57,90	60,42	63,22	63,22	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
259	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	10,00	0,00	20,56	24,30	28,04	28,04	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
260	Persentase UMKM yang terfasilitasi	Persen	6,82	0,00	9,63	10,56	11,50	11,50	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dalam pengembangan usahanya								Menengah Perdagangan dan Perindustrian
261	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	6,78	11,19	5,60	5,80	6,00	6,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
262	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rp.	4,73	5,88	6,73	7,20	7,70	7,70	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
263	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	550,00	604,00	730,00	803,00	884,00	884,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
264	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	27,74	28,00	28,50	29,00	29,5	29,5	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
265	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kegiatan	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
266	Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	Rp.	6,00	6,50	7,40	7,90	8,40	8,40	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
267	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	16,95	17,30	18,50	19,00	19,50	19,50	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
268	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	Persen	93,79	90,58	94,58	95,58	96,58	96,58	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
269	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,78	91,26	92,50	93,00	93,50	93,50	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
270	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	6,67	6,67	7,14	8,70	8,70	8,70	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
271	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
272	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	93,00	0,00	95,32	96,53	97,86	97,86	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
274	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
275	Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
276	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	34,84	0,00	37,00	38,00	39,00	39,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
277	Tingkat Nilai Export bersih	Persen	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
278	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persen	0,00	0,00	2,00	2,94	3,22	3,22	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
279	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	62,61	0,00	64,62	80,00	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
280	Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persen	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	70,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
281	Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Persen	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	70,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
282	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk	Persen	0,00	0,00	60,00	80,00	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP								Perindustrian
283	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	47,52	0,00	83,33	90,48	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
284	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	18,68	0,00	20,71	21,19	21,45	21,45	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
285	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
286	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
287	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
288	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
289	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegiatan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
290	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per	Persen	-35,81	-44,84	6,53	3,33	4,84	4,84	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kebangsaan								
291	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	-18,24	32,35	0,42	2,38	2,78	2,78	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
292	Tingkat hunian akomodasi	Persen	17,54	16,89	19,87	24,84	31,05	31,05	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
293	Kunjungan wisata	Persen	53,01	69,89	80,00	85,00	90,00	90,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
294	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
295	Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Persen	4,44	4,44	0,31	0,31	0,31	0,31	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
296	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat	Persen	4,44	4,44	0,43	0,43	0,43	0,43	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
297	Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	13,33	15,56	0,31	0,31	0,31	0,31	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
298	Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan	Event	40,00	40,00	2,00	2,00	2,00	2,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
299	Persentase destinasi wisata yang diminati	Persen	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
300	Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan	Persen	40,00	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
301	Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	40,00	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
302	Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Persen	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
303	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
305	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
306	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.371,25	1.474,09	1.635,30	1.692,54	1.751,77	1.751,77	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
307	Produksi perikanan	Persen	10,50	10,50	5,25	5,25	5,25	5,25	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
308	Konsumsi ikan	Persen	20,00	32,00	30,00	35,00	35,00	35,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
309	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	11,76	16,98	18,97	19,67	20,31	20,31	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
310	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	0,17	9,16	3,32	3,40	3,48	3,48	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
311	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	68,56	74,25	76,85	79,54	82,33	82,33	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
312	Produksi Perikanan Tangkap	Persen	7,50	7,50	3,50	3,50	3,50	3,50	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
313	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	108.037,89	14.735,00	16.351,74	17.496,36	18.721,11	18.721,11	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
314	Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	15.646,00	16.205,00	17.987,00	19.189,00	20.473,00	20.473,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
315	Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	554.013.000,00	1.067.364.864,00	1.078.038.512,00	1.088.818.897,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
316	Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	6.630.833,00	6.740.000,00	8.100.000,00	9.150.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
317	Produksi Ikan Hias	Ton	239.090,00	194.918,00	608.990,00	627.259,00	646.076,00	646.076,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
318	Produksi Perikanan budidaya	Ton	39,58	0,00	36,00	37,00	38,00	38,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
319	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
320	Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
321	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
322	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	0,00	300,00	400,00	500,00	550,00	550,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
323	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
324	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	112,00	121,00	130,00	140,00	150,00	150,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
325	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
326	Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
327	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
328	Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Lokasi	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
329	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	57.983,00	39.574,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
330	Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Persen	-	-	79,00	84,00	87,50	87,50	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
331	Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	633,00	696,00	828,00	908,00	992,00	992,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
332	Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	13,00	14,30	16,20	18,00	19,80	19,80	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
333	Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Liter	32,00	35,20	38,80	41,00	42,70	42,70	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
334	Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	3,00	3,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
335	Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	3,00	3,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
336	Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin	Persen	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
337	Cakupan bina kelompok petani	Persen	70,00	70,00	73,00	74,00	80,00	80,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
338	Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	Persen	15,00	13,00	16,00	12,00	12,00	12,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
339	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	6,00	6,20	6,25	6,26	6,26	6,26	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
340	Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
341	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	25,00	26,00	73,00	73,00	73,00	73,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
342	Produksi Padi	Ton	270,54	0,00	270.808,00	271.079,00	271.350,00	271.350,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
343	Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Persen	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
344	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	60,00	65,00	77,00	77,00	77,00	77,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
345	Pengembangan Tanaman Manggis	Persen	3,00	4,00	5,00	15,00	20,00	20,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
346	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	45,00	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
347	Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
348	Cakupan Akseptor IB	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
349	Persentase bibit ternak bersertifikat	Persen	3,00	5,00	10,00	13,00	15,00	15,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
350	Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Persen	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
351	Persentase RPH sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
353	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
354	Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
355	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	471,00	402,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
356	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
357	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	260,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
358	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
359	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	30,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
360	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	400,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
361	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	76,00	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
362	Persentase anak terlantar yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
364	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
365	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
366	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
367	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
368	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
369	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
370	Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
371	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
372	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	17,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
373	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	2,00	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
374	Cakupan perempuan dan anak korban	Persen	2,00	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum								Perempuan dan Perlindungan Anak
375	Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga	Persen	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
376	Data Gender Anak	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
377	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
378	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	8,00	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
379	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,25	-	84,00	85,00	85,00	85,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
380	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	68,76	-	68,00	68,00	68,00	68,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
381	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	72,79	-	72,00	71,00	70,00	70,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
382	Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan	Persen	6,87	7,20	7,00	7,00	7,00	7,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
383	Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi	Persen	2,74	4,11	5,00	5,00	5,00	5,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
384	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	-	-	37,60	37,60	37,60	37,60	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
385	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	37,56	-	84,71	84,71	84,71	84,71	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
386	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	Persen	60,65	61,00	61,00	62,00	63,00	63,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota								
387	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	94,55	95,00	95,00	96,00	97,00	97,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
388	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	79,76	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
389	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Persen	0,39	0,5	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
390	Tingkat jaringan SPAM yang dibangun	Persen	96,24	97,00	97,00	98,00	99,00	99,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
391	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	98,00	100,00	98,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Perhubungan
392	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	Poin	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	IKK Dinas Perhubungan
393	Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan)	Unit	311.378,00	311.378,00	311.378,00	311.378,00	311.378,00	311.378,00	IKK Dinas Perhubungan
394	Rasio ijin trayek	Persen	56,00	56,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Perhubungan
395	Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)	Unit	300,00	300,00	307,00	310,00	310,00	310,00	IKK Dinas Perhubungan
396	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Perhubungan
397	Persentase layanan angkutan darat	Persen	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	IKK Dinas Perhubungan
398	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	884,00	884,00	881,00	881,00	881,00	881,00	IKK Dinas Perhubungan
399	Pemasangan Rambu- rambu	Persen	60,00	61,00	70,00	72,00	75,00	75,00	IKK Dinas Perhubungan
400	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	IKK Dinas Perhubungan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	576.262,00	576.262,00	576.262,00	576.262,00	576.262,00	576.262,00	IKK Dinas Perhubungan
402	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	490.776,00	490.776,00	539.548,00	539.548,00	539.548,00	539.548,00	IKK Dinas Perhubungan
403	Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin	Persen	0,00	0,00	30,00	50,00	70,00	70,00	IKK Dinas Perhubungan
404	Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
405	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
406	Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat	Persen	54,55	8,33	10,00	10,00	10,00	10,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
407	Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara	Persen	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
408	Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persen	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
409	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
410	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
411	Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persen	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
412	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	5,00	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
413	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Persen	54,25	54,25	55,00	55,00	55,00	55,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
414	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	44,00	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
415	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	Persen	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
416	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
417	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	Persen	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
418	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	67,69	68,00	69,00	70,00	71,00	71,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
419	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	81,02	81,5	82,00	83,00	84,00	84,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
420	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0,5	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
421	Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	Persen	98,45	80,5	81,00	82,00	83,00	83,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
422	Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	0,05	0,06	2,00	2,00	2,00	2,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
423	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	31,55	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
424	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Poin	25,82	27,00	30,00	40,00	50,00	50,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
425	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	15,00	37,00	38,00	39,00	40,00	40,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
426	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,60	2,61	9,00	10,00	11,00	11,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
427	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	46,90	47,00	48,00	49,00	50,00	50,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
428	Rasio rumah layak huni	Persen	31,55	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
429	Rasio permukiman layak huni	Persen	22,87	23,00	30,00	40,00	50,00	50,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
430	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	94,68	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
431	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	90,91	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
432	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	16,11	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
433	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
434	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
435	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
436	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKK Dinas Pendidikan
437	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKK Dinas Kesehatan
438	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKK RSUD Bayu Asih
439	Rasio Keuangan BLUD	Skor	0,00	0,00	80,00	85,00	80,00	80,00	IKK RSUD Bayu Asih

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
440	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional BLUD	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK RSUD Bayu Asih
441	Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Skor	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	IKK RSUD Bayu Asih
442	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
443	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
444	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
445	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
446	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
447	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	B	B	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
448	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
449	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
450	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Lingkungan Hidup
451	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
452	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
453	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
454	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Perhubungan
455	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
456	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
457	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
458	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
459	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	A	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
460	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
461	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	A	A	A	A	A	IKK Sekretariat Daerah
462	Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah
463	Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah
464	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	D	B	B	B	B	B	IKK Sekretariat DPRD
465	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat DPRD
466	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA	AA	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
467	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
468	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKK Badan Pendapatan Daerah
469	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
470	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	IKK Inspektorat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
471	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	CC	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Jatiluhur
472	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	B	B	B	IKK Kecamatan Sukasari
473	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	B	B	B	IKK Kecamatan Maniis
474	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Tegalwaru
475	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	CC	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Plered
476	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	A	A	A	A	IKK Kecamatan Sukatani
477	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Darangdan
478	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Bojong
479	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Wanayasa
480	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	CC	B	B	B	B	IKK Kecamatan Kiarapedes
481	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Pasawahan
482	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	A	A	A	IKK Kecamatan Pondoksalam
483	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Purwakarta
484	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Babakan Cikao
485	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Campaka
486	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	B	B	A	A	A	IKK Kecamatan Cibatu
487	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	IKK Kecamatan Bungursari
488	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
489	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Sekretariat DPRD
490	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Sekretariat DPRD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada)								
491	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Sekretariat DPRD
492	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat DPRD
493	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat DPRD
494	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
495	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
496	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Kategori	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
497	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
498	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	26,98	48,22	50,00	55,00	60,00	60,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
499	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
500	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	Rasio pasangan berakate nikah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
502	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	81,61	85,02	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
503	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	53,33	54,00	55,00	56,00	57,00	57,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
504	Profil data kependudukan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
505	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	11,76	95,00	97,00	99,00	99,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
506	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	67,00	66,00	95,00	97,00	99,00	99,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
507	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	90,00	95,00	97,00	99,00	99,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
508	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	53,30	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
509	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
510	Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	Persen	-	-	95,00	97,00	99,00	99,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
511	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
512	Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	Persen	100,00	100,00	90,00	95,00	100,00	100,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
513	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	69,50	36,00	85,00	90,00	95,00	95,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
514	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	69,50	25,50	85,00	90,00	95,00	95,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
515	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
516	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
517	Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	Persen	-	-	85,00	90,00	95,00	95,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
518	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
519	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
520	Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	Persen	-	3,00	10,00	20,00	50,00	50,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
521	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Jatiluhur
522	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Sukasari
523	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Maniis
524	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Tegalwaru
525	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Plered
526	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Sukatani

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
527	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Darangdan
528	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Bojong
529	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Wanayasa
530	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Kiarapedes
531	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Pasawahan
532	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Pondoksalam
533	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Purwakarta
534	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Babakan Cikao
535	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Campaka
536	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Cibatuh
537	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Bungursari
538	Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten	Persen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah
539	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah
540	Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online	Persen	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah
541	Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif	Persen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	IKK Sekretariat Daerah
542	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah
543	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah
544	Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	IKK Sekretariat Daerah
545	Persentase jumlah total proyek	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama								
546	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah
547	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	44,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	IKK Sekretariat Daerah
548	Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
549	Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	28,57	0,00	39,10	39,10	39,10	39,10	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
550	Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
551	Persentase Penyusutan Arsip	Persen	9,50	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
552	Arsip Aktif	Persen	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
553	Arsip Inaktif	Persen	5,28	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
554	Arsip Vital	Persen	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
555	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	73,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
556	Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan	Persen	2,67	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
557	Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	33,04	6,30	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
558	Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	19,99	0,00	19,99	19,99	19,99	19,99	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
559	Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	1,75	13,00	1,75	1,75	1,75	1,75	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
560	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
561	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
562	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
563	Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
564	Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
565	Capaian Kinerja RKPD	Persen	88,64	88,75	89,00	89,25	89,50	89,50	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
566	Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
567	Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
568	Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
569	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan	Persen	15,65	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	IKK Badan Keuangan dan Aset

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tenaga kesehatan								Daerah
570	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	81,83	0,00	85,00	87,00	89,00	89,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
571	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
572	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	75,24	0,00	75,54	75,84	76,14	76,14	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
573	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,18	0,00	2,13	2,08	2,03	2,03	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
574	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	2,16	2,68	1,74	1,69	1,58	1,58	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
575	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	30,85	0,00	32,00	34,00	35,00	35,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
576	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	19,05	0,00	21,00	23,00	25,00	25,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
577	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	1,25	14,84	1,80	1,78	1,74	1,74	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
578	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
579	Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Skor	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
580	Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Skor	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
581	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	7,76	7,76	8,00	8,00	8,00	8,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
582	Penyerapan Anggaran	Skor	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
583	Kondisi Keuangan Daerah	Skor	3,06	3,06	4,00	4,00	4,00	4,00	IKK Badan Keuangan dan Aset

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Daerah
584	Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar aset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan 4. Tersedianya nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
585	Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
586	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	21,79	23,66	25,00	27,00	30,00	30,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
587	Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	50,00	55,00	70,00	85,00	100,00	100,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
588	Persentase pengolah BMD yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
589	Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
590	Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
591	Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
592	Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
593	Administrasi BMD yang Andal	Indeks	2 (cukup)	2 (cukup)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
594	Rasio PAD	Persen	0,73	0,78	0,83	0,88	0,93	0,93	IKK Badan Pendapatan Daerah
595	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	11,95	12,30	12,65	13,00	13,35	13,35	IKK Badan Pendapatan Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
596	Rasio Pajak daerah	Persen	48,84	49,34	49,84	50,34	50,84	50,84	IKK Badan Pendapatan Daerah
597	Rasio retribusi daerah	Persen	3,92	4,23	4,53	4,84	5,14	5,14	IKK Badan Pendapatan Daerah
598	Persentase capaian PAD	Persen	88,05	88,50	88,95	89,40	89,85	89,85	IKK Badan Pendapatan Daerah
599	Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah	Persen	8,80	9,00	9,50	10,00	10,50	10,50	IKK Badan Pendapatan Daerah
600	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	3,00	2,00	10,00	15,00	15,00	15,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
601	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
602	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	10,87	25,53	42,55	53,19	53,19	53,19	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
603	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
604	Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Sekretariat Daerah
605	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	78,59	80,16	80,88	81,74	82,67	82,67	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
606	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	8,40	16,66	16,99	17,33	17,67	17,67	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
607	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	29,76	39,68	49,80	54,86	59,92	59,92	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
608	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Manusia
609	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
610	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	249,00	494,00	504,00	514,00	524,00	524,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
611	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persen	0,41	0,26	0,29	0,26	0,21	0,21	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
612	Persentase Pemberhentian ASN	Persen	6,04	7,02	5,73	5,94	6,16	6,16	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
613	Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	Persen	1,76	2,59	2,15	2,03	1,93	1,93	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
614	Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
615	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Jatiluhur
616	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Sukasari
617	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Maniis

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
618	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Tegalwaru
619	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Plered
620	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Sukatani
621	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Darangdan
622	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Bojong
623	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Wanayasa
624	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes
625	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Pasawahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
626	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Pondoksalam
627	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Purwakarta
628	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Babakan Cikao
629	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Campaka
630	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Cibatu
631	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Bungursari
632	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	IKK Inspektorat
633	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	70,09	84,79	80,00	80,00	80,00	80,00	IKK Inspektorat
634	Jumlah temuan BPK	Laporan	16,00	15,00	10,00	9,00	8,00	8,00	IKK Inspektorat
635	Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Inspektorat
636	Capaian MCP KPK	Persen	74,00	100,00	81,00	82,00	83,00	83,00	IKK Inspektorat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
637	Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	Perangkat Daerah	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	IKK Inspektorat
638	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	51,00	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Jatiluhur
639	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Sukasari
640	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Maniis
641	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Tegalwaru
642	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Plered
643	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Sukatani
644	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Darangdan
645	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Bojong
646	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Wanayasa
647	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	administrasi desa yang dilaksanakan								
648	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Pasawahan
649	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Pondoksalam
650	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Purwakarta
651	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Babakan Cikao
652	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Campaka
653	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Cibatu
654	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	51,00	51,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Bungursari
655	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
656	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	0,00	0,00	5,00	8,74	11,48	11,48	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
657	Persentase pembangunan kawasan perdesaan	Persen	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
658	Persentase peningkatan status desa	Persen	2,86	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mandiri								dan Desa
659	Persentase desa tertib administrasi	Persen	0,00	0,00	40,00	30,00	30,00	30,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
660	Persentase pembinaan BUM Desa	Persen	100,00	100,00	40,00	40,00	20,00	20,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
661	Persentase penertiban aset desa	Persen	0,00	0,00	50,00	30,00	20,00	20,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
662	Persentase kepala desa yang dibina	Persen	100,00	100,00	40,00	30,00	30,00	30,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
663	Persentase aparatur desa yang dibina	Persen	0,00	0,00	45,00	35,00	30,00	30,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
664	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
665	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
666	Persentase LSM aktif	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
667	Persentase PKK aktif	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
668	Persentase Posyandu aktif	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
669	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
670	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Jatiluhur
671	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Sukasari
672	Persentase kegiatan pemberdayaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Maniis

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	masyarakat yang dilaksanakan								
673	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Tegalwaru
674	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Plered
675	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Sukatani
676	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Darangdan
677	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Bojong
678	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Wanayasa
679	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes
680	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Pasawahan
681	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Pondoksalam
682	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Purwakarta
683	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Babakan Cikao
684	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Campaka
685	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Cibatu
686	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Bungursari

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
687	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
688	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
689	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
690	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
691	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
692	Persentase Penegakan PERDA	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
693	Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
694	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
695	Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
696	Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
697	Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
698	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
699	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Jatiluhur
700	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Sukasari
701	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Maniis
702	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Tegalwaru
703	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Plered
704	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Sukatani
705	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Darangdan
706	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Bojong
707	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Wanayasa
708	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes
709	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Pasawahan
710	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Pondoksalam
711	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Purwakarta
712	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Babakan Cikao
713	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Campaka
714	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Cibatuh
715	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Bungursari
	715	715	715	715	715	715	715	715	715

Sumber : Analisa Tim dan Perangkat Daerah terkait, 2023

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	60,00	80,00	100,00	100,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
2	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	IKU PEMKAB PURWAKARTA
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	61,07	64,28	67,49	69,09	70,69	70,69	IKU PEMKAB PURWAKARTA
4	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,66	0,44	0,48	0,55	0,66	0,66	IKU PEMKAB PURWAKARTA
5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	IKU PEMKAB PURWAKARTA
6	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,65	0,00	89,70	89,80	90,05	90,05	IKU PEMKAB PURWAKARTA
7	Pertumbuhan UMKM	Persen	1,00	0,00	11,86	13,16	14,69	14,69	IKU PEMKAB PURWAKARTA
8	Inflasi	Persen	1,81	4,86	1,34	1,25	1,16	1,16	IKU PEMKAB PURWAKARTA
9	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	IKU PEMKAB PURWAKARTA
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,00	0,00	9,23	9,82	10,41	10,41	IKU PEMKAB PURWAKARTA
11	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,57	6,57	6,39	6,34	6,29	6,29	IKU PEMKAB PURWAKARTA
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,70	86,93	87,38	87,60	87,83	87,83	IKU PEMKAB PURWAKARTA
13	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	74,39	77,89	79,92	80,93	81,94	81,94	IKU PEMKAB PURWAKARTA
14	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,25	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
15	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	79,76	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
16	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
17	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	88,35	89,00	89,00	90,00	91,00	91,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
18	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,56	0,00	37,60	37,60	37,60	37,60	IKU PEMKAB PURWAKARTA
19	Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	65,64	67,64	69,64	71,64	73,64	73,64	IKU PEMKAB PURWAKARTA
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU PEMKAB PURWAKARTA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,41	64,41	67,41	70,41	73,41	73,41	IKU PEMKAB PURWAKARTA
22	Indeks SPBE	Poin	2,37	-	2,60	2,80	3,00	3,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
23	Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	IKU PEMKAB PURWAKARTA
24	Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU PEMKAB PURWAKARTA
25	Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	IKU PEMKAB PURWAKARTA
26	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PEMKAB PURWAKARTA
27	Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,1950	0,2120	0,2280	0,2370	0,2450	0,25	IKU PEMKAB PURWAKARTA
28	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	77,52	79,16	82,45	84,09	85,74	85,74	IKU PEMKAB PURWAKARTA
29	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,636	3,000	3,000	3,000	3,000	3,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
30	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,38	50,50	50,62	50,68	50,74	50,74	IKU PEMKAB PURWAKARTA
31	Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU PEMKAB PURWAKARTA
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	72,70	74,45	77,95	79,70	81,45	81,45	IKU PEMKAB PURWAKARTA
	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Sumber : Analisa Tim, 2023

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, mengikuti berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2023.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program-program teknis pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 ini disusun dengan berpedoman pada tahapan terakhir dari RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, serta memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 dan RPJMN Tahun 2020 - 2024.

Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, 2025 dan 2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026. Guna mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPD sebagai berikut :

1. RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 dan RKPD Tahun 2024, 2025 dan 2026;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPD Tahun 2024

- 2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
- 3. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, seyogyanya harus memperhatikan dan mempedomani RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, serta mengerahkan semua potensi dan kemampuan daerah guna tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- 4. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;
- 6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024 - 2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

9.2 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman transisi dalam menyusun dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah tahun 2024 - 2026, sebelum dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak dilaksanakan di tahun 2024.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2023 merupakan tahun terakhir berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, sehingga penyusunan dokumen perencanaan daerah tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, 2025 dan 2026, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 dan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026. Selanjutnya RKPD tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan

penyusunan KUA PPAS serta Rancangan APBD Kabupaten Purwakarta pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2025 atau setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mulai menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2030. Namun demikian penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026, masih berpedoman pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, sampai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2030 ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, maka kebijakan perencanaan pembangunan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 tetap tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2030. Hal ini untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan dokumen perencanaan sebelumnya.

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kabupaten Purwakarta demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

